SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204), yang dilakukan oleh:----------

Terlapor I : PC Muriah Ltd, yang beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd – 10th Floor, Jalan TB Simatupang Kav. 22- 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia ;------

Terlapor II : PC Ketapang II Ltd, beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd – 10th Floor, Jalan TB Simatupang Kav. 22- 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 Indonesia;-------

Terlapor III : PT Aquamarine Divindo Inspection, beralamat di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi;----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada *Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide Bukti* B1, I.2): ----------

1.1 Latar Belakang; ----------

Gambaran Umum dan Permasalahan; ----------

PC Muriah Ltd. dan PC Ketapang II Ltd. merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerjasama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). PC Muriah Ltd. mengoperasikan Kepodang Field yang berlokasi sekitar 180 km di timur laut lepas pantai Semarang, Jawa Tengah.Fasilitas yang terdapat di Kepodang meliputi WHT-C (*Well Head Tower*-C), CPP (*Central Processing Plant*) dan WHM-A (*Well Head Module*-A). PC Ketapang II Ltd. mengoperasikan Bukit Tua Field yang berlokasi sekitar 40 km di utara Madura, Jawa Timur. Pemisahan *full well stream* antara gas dan cairan dilakukan di WHP (*Well Head Platform*), selanjutnya dipindahkan ke FPSO (*Floating Production, Storage and Offloading*) untuk selanjutnya dialirkan melalui pipa ke WHP dan ORF (*Onshore Receiving Facilities*) di Gresik. Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No.11204)* merupakan tender bersama yang dilakukan oleh PC Muriah Ltd. dan PC Ketapang II Ltd. untuk melakukan pemeliharaan berupa *Underwater services* terhadap fasilitas yang berada baik di *Kepodang Field* maupun *Ketapang Field*. ----------

Berdasarkan *Scope of Work*, pekerjaan *underwater service* tersebut meliputi: ----------

1. *Platform Inpection,* yang terdiri dari*:*----------
   a. *General Visual Inspection;* ----------
   b. *Thickness Measurement (di WHP Platform, CPP Platform dan WHTC Platform);* ----------
   c. *Marine Growth Measurement (di WHP Platform, CPP Platform dan WHTC Paltform);*----------
   d. *Cathodic Protection Survey;*----------
   e. *Riser Survey;*----------
   f. *Conductor Survey;*----------
   g. *Caisson Survey;* ----------
   h. *Debris Survey;* ----------
   i. *Scour Survey;*----------
   j. *Anode Mapping;* ----------
   k. *MPI of Selected Joint.* ----------
2. *Pipeline Survey,* yang terdiri dari*:*----------
   a. *10" WHTC Platform to CPP;* ----------
   b. *8" WHP Platform to FPSO;*----------
   c. *12" WHP Platform to FPSO;* ----------
   d. *16" WHP Platform to FPSO;* ----------
   e. *12" WHP Platform to ORF Gresik.*----------

1.2 Objek Perkara: ----------

Paket Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) dengan nilai penawaran pemenang sebesar Rp. 47.360.900.000,00 (*empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah*).----------

1.3 Dugaan Pelanggaran: ----------

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

1.4 Tentang Susunan Panitia Tender; ----------

Berikut susunan Panitia Tender (*Tender Committee*) yang ditugaskan oleh Presiden PC Muriah Ltd. (Hazli Sham Kassim) tanggal 20 Juni 2016:----------

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan
1.	Hardi Istijanto	Acting Senior Manager Supply Chain Management	Chairman
2.	Andiono Setiawan	Senior Manager Corporate Affair & Administration	Alternate Chairman
3.	Damayanti Rini Respati	Manager Legal	Legal Member
4.	Wahyu Winoto	Manager Tax	Finance Member
5.	Ivan Darwin Ricky Siregar	Manager Oil and Gas Accounting	Finance Member
6.	Hayun Budiman	Head Offshore Facilities	Technical Member
7.	Indra Guswarman	Manager Construction	Technical Member
8.	Bagus Dananto	Company Site Representative	Technical Member
9.	Wahyudin Bahri Nasifi	Chief Geophysicist	Technical Member
10.	Nedia Permata Hasan	Senior Manager HSE	Support Member
11.	Yudhistira Tjukam	Manager Operation Support	Support Member
12.	Juli Indira Wardhana	Manager Material & Supply Base	Support Member
13.	Nur Achrony	Senior Procurement Officer	Secretary
14.	Adry Indra Permadi	Senior Procurement Officer	Secretary
15.	Budhi Prayogo	Senior Procurement Officer	Secretary
16.	Jamin Jamil B.M. Idris	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
17.	Hendrayana	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
18.	Anwar Fahmi B. Ahmad Zaki	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
19.	Sulton Amrullah	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
20.	Silia AK Hamdan	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
21.	Pantja Savitri Widdarini	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
22.	Oni Mayendra	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
23.	Christian Demoris Pandiangan	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member
24.	Rianita Izhari	Technical and Other Expertise	Ad Hoc Member

Berikut susunan Panitia Tender (*Tender Committee*) yang ditugaskan oleh Presiden PC Muriah Ltd. (Mohamad Zaini Noor) tanggal 9 September 2016: ----------

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan
1.	Hardi Istijanto	Acting Senior Manager Supply Chain Management	Chairman
2.	Andiono Setiawan	Senior Manager Corporate Affair & Administration	Alternate Chairman
3.	Damayanti Rini Respati	Manager Legal	Legal Member
4.	Wahyu Winoto	Manager Tax	Finance Member
5.	Ivan Darwin Ricky Siregar	Manager Oil and Gas Accounting	Finance Member
6.	Hayun Budiman	Head Offshore Facilities	Technical Member
7.	Indra Guswarman	Manager Construction	Technical Member

8.	Bagus Dananto	Company Site Representative	Technical Member
9.	Wahyudin Bahri Nasifi	Chief Geophysicist	Technical Member
10.	Nedia Permata Hasan	Senior Manager HSE	Support Member
11.	Yudhistira Tjukam	Manager Operation Support	Support Member
12.	Juli Indira Wardhana	Manager Material & Supply Base	Support Member
13.	Nur Achrony	Senior Procurement Officer	Secretary
14.	Adry Indra Permadi	Senior Procurement Officer	Secretary
15.	Budhi Prayogo	Senior Procurement Officer	Secretary

Berikut susunan Panitia Tender (*Tender Committee*) yang ditugaskan oleh Presiden PC Muriah Ltd. (Mohamad Zaini Md Noor) tanggal 10 Oktober 2016: ----------

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tender Committee
1.	Hardi Istijanto	Head (Procurement Indonesia)	Chairman
2.	Nur Achrony	Executive (Sourcing-Drilling & Exploration)	Secretary
3.	Budhi Prayogo	Executive (Sourcing-Project & Operations)	Secretary
4.	Wahyu Winoto	Head Tax	Alternate Chairman & Finance Function
5.	Damayanti Rini Respati	Legal Councel	Legal Function
6.	Andiono Setiawan	Head Corporate Affair & Administration	User Function
7.	Hendrayana	Head Operation	User Function
8.	Indra Guswarman	Head Construction	User Function
9.	Wahyudin Bahri Nasifi	Head Geoscience	User Function
10.	Nedia Permata Hasan	Head HSE	User Function

Berikut susunan Tim Evaluasi Teknis berdasarkan Perencanaan Tender (*Tender Plan*) tanggal 29 April 2016:------

No	Nama	Jabatan	Keanggotaan
1.	Nizar Saputra	Senior Integrity Engineer	Full Time – Team Leader
2.	Sulton Amrullah	Manager Operation Engineering	Full Time
3.	Herry Gunawan	Senior Marine Operation	Full Time
4.	Adry Indra Permadi/ Budhi P	Senior Procurement Management	Full Time
5.	Febby A. Viariawan	HSE Representative	Full Time
6.	Octoria Suwandy	Finance Executive	Full Time
7.	Christian Demoris	Legal Officer	Part Time

Berikut susunan Tim Evaluasi Komersial berdasarkan Perencanaan Tender (*Tender Plan*) tanggal 29 April 2016:------

Nama	Jabatan	Keanggotaan
Adry Indra Permadi/Budhi P	Senior Procurement Management	Team Leader
Nizar Saputra	Senior Integrity Engineer	Full Time
Sulton Amrullah	Manager Operation Engineering	Full Time
Herry Gunawan	Senior Marine Operation	Full Time

SALINAN

1.5 Tentang Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* ----------

Perihal	Keterangan
Nomor Tender	11204
Judul Tender	*Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field*
Bidang dan sub bidang	1. Bidang Jasa lainnya, sub bidang Pengelasan Bawah Air 2. Bidang Pelayanan Penyelaman (*Diving Services*), sub bidang Peralatan Pekerjaan Bawah Air 3. Bidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan, sub bidang Pengujian Tak Merusak (*Non Destructive Testing*)
Golongan usaha	Usaha Besar
Minimum Local Content (Tingkat Komponen Dalam Negeri-TKDN)	35%
Metode Pelaksanaan Tender	Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi
Sistem tender/pemasukan penawaran	Metode Dua Sampul (sampul pertama: dokumen administrasi dan teknis, sampul kedua: dokumen komersial/harga)
Metode evaluasi	Sistem Gugur
Pedoman Pelaksanaan Tender	1. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Dokumen Tender 3. Berita Acara Pre Bid Clarification Meeting
Tipe pekerjaan	*Call out basis*
Lokasi Pekerjaan	*Kepodang Field* di lepas pantai Jawa Tengah dan *Ketapang Field* di lepas pantai Jawa Timur
Company's Facilities	*Onshore: Production/Operation Facilities at* ORF Surabaya Offshore: Kepodang (Muriah) *Field* and Ketapang (Bukit Tua) *Field*
Contractor's Point of Origin for Company Operation	Petronas *Shore Base* (Area Surabaya, Jawa Timur)
Company's Equipment Point of Delivery for Contractor's Equipment/Special Tools and Consumable	Petronas *Shore Base* (Area Surabaya, Jawa Timur)
Metode Pergantian Crew	Menggunakan helikopter dari *Point of Hire* di Bandara Juanda Surabaya
Pemberitahuan mobilisasi	Semula: 3 hari kalender (Dokumen

SALINAN

	Perencanaan) Menjadi:14 hari kalender (*Pre Bid Clarification Meeting*)
Sumber Pendanaan	Anggaran PC Muriah Ltd. dan PC Ketapang II Ltd. (50%-50%)
Nilai Pagu	Rp 40-50 Milyar (tidak diumumkan ke peserta)
Nilai HPS/OE	Rp 49.465.485.000,- (diumumkan ke peserta pada saat pembukaan amplop kedua/evaluasi komersial)
Jangka waktu kontrak	3 (*tiga*) tahun + 1 (*satu*) tahun perpanjangan (*optional*)
Tipe Kontrak	Unit Rate

1.6 Tentang Kronologis Tender: ----------

No.	Tahap Tender	Keterangan
1.	Tender Plan Proposal (resitting)	29 April 2016
2.	Persetujuan Tender Plan	20 Mei 2016
3.	Pengumuman Prakualifikasi	25 Mei 2016 di Harian Republika
4.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Persyaratan Kualifikasi	26-31 Mei 2016
5.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Paling lambat 3 Juni 2016 pukul 15.00 WIB
6.	Jumlah pendaftar kualifikasi	10 peserta: 1. PT Seascape Survey Indonesia 2. PT Advanced Offshore Services 3. PT Patra Dinamika 4. PT DOF Subsea Indonesia 5. PT Bintang Subsea Indonesia – PT Sigorus Indonesia (Consortium) 6. PT Cakrawala Amartha Jaya 7. PT Jasalindo – PT Warna Triendo (Consortium) 8. PT Aquamarine Divindo Inspection 9. PT Fabila Teknik Sejahtera 10. PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (Consortium)
7.	Evaluasi Pra Kualifikasi	3 Juni 2016 – 25 Juli 2016 (*Prolong HSE Evaluation*)
8.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Pra Kualifikasi	12 Agustus 2016: 6 peserta lulus, 4 peserta tidak lulus
9.	Peserta lulus pra kualifikasi	1. PT Seascape Survey Indonesia 2. PT Advanced Offshore Services 3. PT Patra Dinamika 4. PT Bintang Subsea Indonesia –

		PT Siguros Indonesia (Consortium) 5. PT Cakrawala Amartha Jaya 6. PT Aquamarine Divindo Inspection
10.	Peserta tidak lulus pra kualifikasi	1. PT DOF Subsea Indonesia (*have no related experience in Indonesia area, below minimum HSE scoring grade*) 2. PT Jasalindo – PT Warna Triendo (*Consortium*) (*below minimum HSE scoring grade*) 3. PT Fabila Teknik Sejahtera (*below minimum HSE scoring grade*) 4. PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (*Consortium*) (*not certified for IMCA Members, not have related for SKT Migas and below minimum HSE scoring grade*)
11.	Jangka waktu keberatan terhadap hasil pra kualifikasi	2 (dua) hari kerja: 15-16 Agustus 2016
12.	Peserta yang keberatan	Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara-PT Cahaya Karya Bhakti Samudera mengajukan surat keberatan pada tanggal 16 Agustus 2016 agar dilakukan evaluasi ulang dengan melampirkan dokumen IMCA, SKT Migas dan isian HSE
13.	Tanggapan Panitia terhadap keberatan	Panitia melakukan evaluasi ulang, dan mengirimkan surat tanggal 2 September 2016 yang menginformasikan bahwa konsorsium tersebut tetap tidak lulus karena tidak memenuhi nilai minimum HSE.
14.	Undangan untuk memasukkan dokumen penawaran	21 September 2016
15.	Pengambilan dokumen pengadaan	21-22 September 2016
16.	Pre Bid Clarification Meeting #1	26 September 2016
17.	Pemasukan Dokumen Penawaran (Closing Date)	7 Oktober 2016 (14.00 WIB) diperpanjang sampai dengan 14 Oktober 2016
18.	Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran	5 peserta: 1. PT Aquamarine Divindo Inspection 2. PT Cakrawala Amartha Jaya 3. PT Seascape Survey Indonesia 4. PT Patra Dinamika 5. PT Advanced Offshore Services
19.	Peserta tidak memasukkan penawaran	1 peserta: PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (*Consortium*)

		(*decline without notification*)
20.	Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification: administrative and technical clarification)	7 Oktober 2016
21.	Pembukaan amplop pertama: evaluasi administrasi dan teknis	19 Oktober 2016
22.	Persetujuan hasil evaluasi administrasi dan teknis	9 Desember 2016
23.	Pemberitahuan hasil Pembukaan amplop pertama	13 Desember 2016: 4 peserta lulus, 1 peserta tidak lulus
24.	Peserta lulus evaluasi administrasi dan teknis	PT Patra Dinamika PT Seascape Survey Indonesia PT Aquamarine Divindo Inspection PT Advanced Offshore Services
25.	Peserta tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis	PT Cakrawala Amartha Jaya (tidak memenuhi Contractor Equipment and Personneel Specification)
26.	Jangak waktu keberatan (protest period) terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis	2 (dua) hari kerja :14-15 Desember 2016
27.	Clarification meeting terkait keberatan terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis	4 Januari 2017
28.	Evaluasi komersial/harga	9 Januari 2017
29.	Peserta evaluasi komersial/harga	1. PT Patra Dinamika (Rp 65.139.825.000,00) 2. PT Seascape Survey Indonesia (Rp 114.968.040.000,00) 3. PT Aquamarine Divindo Inspection (Rp 47.360.900.000,00) 4. PT Advanced Offshore Services (Rp 66.306.725.000,00)
30.	Local content/TKDN peserta	1. PT Patra Dinamika (72.41%) 2. PT Seascape Survey Indonesia (48.92%) 3. PT Aquamarine Divindo Inspection (83.80%) 4. PT Advanced Offshore Services (80%)
31.	Rapat negosiasi harga dengan penawar terendah	18 Januari 2017
32.	QWQ	20 Januari 2017
33.	Pengumuman Hasil Evaluasi Komersial/harga	26 Januari 2017
34.	Peserta yang lulus evaluasi komersial	PT Aquamarine Divindo Inspection
35.	Peserta yang tidak lulus evaluasi komersial	1. PT Patra Dinamika 2. PT Seascape Survey Indonesia

SALINAN

		3. PT Advance Offshore Services
36.	Penetapan Pemenang (Letter of Award)	6 Februari 2017
37.	Letter of Acceptance dari pemenang tender	7 Februari 2017
38.	Pemenang Tender	PT Aquamarine Divindo Inspection
39.	Harga Pemenang	Penawaran hasil negosiasi: Rp 47.355.000.000,-
40.	Masa Sanggah	5 hari kerja (tidak ada yang menyanggah)
41.	Penerbitan Release Order	23 Februari 2017
42.	Penandatanganan kontrak	Belum ditanda-tangani

1.7 Tentang Ketentuan Dokumen Penawaran: ----------

Berikut ketentuan penyusunan kelengkapan dokumen dalam Sampul Pertama: ----------

Section	Rujukan
Section (T1) Technical Proposal Letter	Bid Document: Attachment B
Section (T2) No Legal Dispute Statement	Bid Document: Attachment D
Section (T3) Local Content Commitment Statement	Bid Document: Attachment E
Section (T4) Contract Form	Bid Document: Attachment G
Section (T5) Scope of Work	Exhibit I and appendixes
Section (T6) Contractor Equipment and Personnel Specification	Exhibit III and appendixes
Section (T7) HSE Requirements	Exhibit IV and appendixes
Section (T8) Proforma of Bank Guarantee	Exhibit V
Section (T9) Importation and Exportation Procedure	Exhibit VII
Section (T10) Administrative Procedure	Exhibit VIII
Section (T11) Administrative Procedure	Minutes of Prebid Meeting and Clarification
Additional Technical Requirements	Bidder's Pass Experiences Bidder Organization Bidder Working Procedures Bidder Equipments List of Proposed Personel (Resume) HSE Plan and Emergency Response Procedure

Berikut ketentuan penyusunan kelengkapan dokumen dalam Sampul Kedua:----------

Section	Rujukan
Section (C1) Bid Bond Price Letter	Bid Document: Attachment F
Section (C2) Bid Bond and Statement Letter of Authenticity	Bid Document: Attachment C
Section (C3) Contract Price Schedule	Exhibit II and appendixes
Section (C4) Local Content Form	Appendix 2 of Exhibit II

1.8 Tentang Perencanaan Tender: ----------

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tender, diatur bahwa Kriteria Evaluasi teknis meliputi : ----------

(1) Pengalaman perusahaan: harus memiliki pengalaman di bidang *underwater service* (*Diving* and ROV Inspection) minimum 7 (*tujuh*) tahun untuk pekerjaan sejenis di Indonesia;----------

(2) Sertifikasi IMCA Membership of Contractor, IMCA *Supervisor Certification*, *IMCA Divers Certification*; --------

(3) Workshop Criteria: memiliki workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services*;----------

1.9 Terkait dengan ketiga kriteria Evaluasi Teknis dalam Dokumen Perencanaan Tender yang meliputi pengalaman perusahaan, sertifikasi dan workshop criteria yang dimiliki oleh Terlapor III dan para peserta tender yaitu PT Seascape Surveys Indonesia, PT Patra Dinamika dan PT Advanced Offshore Service adalah sebagai berikut: ----------

(1) Pengalaman perusahaan: harus memiliki pengalaman di bidang *Underwater service* (*Diving* and *ROV inspection*) minimum 7 (*tujuh*) tahun untuk pekerjaan sejenis di Indonesia;----------

Berdasarkan keterangan dan dokumen penawaran Terlapor III diketahui bahwa Terlapor III berdiri pada tahun 2007. Berdasarkan *Project Experience List* 2010-2016 diketahui bahwa proyek pertama dilakukan sejak 24 Desember 2010 dengan pemberi kerja Cnooc Ses Ltd. untuk pekerjaan *Un-mooring* FSO (*Floating Storage and Offloading*) Maxus Widuri Services di Cnooc Widuri Field di Laut Jawa. Selain itu, Terlapor III juga melampirkan *Relevant Project Experience List* dimana pekerjaan pertama dimulai sejak 9 Mei 2013 dengan pemberi kerja

yaitu PT Rajawali Swiber Cakrawala untuk pekerjaan *Pipeline Inspection Using* ROV di Madura Offshore;-------

Berdasarkan keterangan dan dokumen penawaran PT Seascape Surveys Indonesia, diketahui bahwa perusahaan tersebut berdiri tahun 2005 dan telah memiliki pengalaman pekerjaan di bidang *underwater services* sejak tahun 2006; ----------

Berdasarkan keterangan dan dokumen penawaran PT Patra Dinamika, diketahui bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1994 dan telah memiliki pengalaman pekerjaan di bidang *underwater services* sejak tahun 2000;----------

Berdasarkan keterangan dan dokumen penawaran PT Advanced Offshore Service, diketahui bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2004 dan telah memiliki pengalaman pekerjaan di bidang *underwater services* sejak tahun 2009; ----------

(2) Sertifikasi: *IMCA Membership of Contractor*, *IMCA Supervisor Certification*, *IMCA Divers Certification*:--------

Berdasarkan dokumen Prakualifikasi, persyaratan kualifikasi terdiri dari Persyaratan Legal dan Administrasi, Persyaratan Finansial, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan HSE. Dalam persyaratan teknis, salah satunya mempersyaratkan bahwa pemohon wajib melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership;----------

Berdasarkan ketentuan Exhibit I-*Special Provision and Scope of Work*, Item 2.4.4. *Contractors Qualification Experience* (point 1) disebutkan bahwa: *The Contractor is to be and IMCA member company;* ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III menyatakan sudah memenuhi ketentuan tersebut dimana Terlapor III adalah anggota IMCA untuk kategori

ROV, dan 'akan menjadi' anggota IMCA untuk kategori *Diving*;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat IMCA untuk kategori *Diving* sejak awal tahun 2016. Pada saat tender diumumkan pada 25 Mei 2016, proses tersebut belum selesai;----------

(3) Workshop Criteria: Memiliki workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services*:----------

Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III menyatakan memiliki workshop yang berlokasi di sekitar Surabaya;----------

Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Investigator, alamat kantor Terlapor III di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo, Jawa Timur yang juga merupakan *workshop* dan gudang penyimpanan peralatan selam termasuk ROV. Lokasi tersebut dekat dengan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan waktu tempuh kurang lebih 1 (satu) jam. Lokasi tersebut juga dekat dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan waktu tempuh kurang lebih 10 (sepuluh) menit;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III memuat peralatan ROV dengan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menuju Petronas *Shore Base* di Lamongan, Jawa Timur; ----------

Berdasarkan dokumen *Contract Form* disebutkan definisi-definisi terkait lokasi mobilisasi berikut: ---------

a. Tanggal mobilisasi (*mobilization date*) adalah tanggal saat peralatan Kontraktor akan dikirimkan ke Lokasi Mobilisasi dan siap untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan serta pengangkutan selanjutnya ke lokasi-lokasi kerja sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan (*Contract Form*, Pasal 2 butir 2.22);------

b. Lokasi Mobilisasi ((*Mobilisation Site*) adalah lokasi yang ditentukan dalam Lampiran I – "Ketentuan Khusus & Lingkup Pekerjaan" tempat Peralatan Kontraktor akan dikirimkan oleh Kontraktor untuk pemuatan dan pengangkutan ke Lokasi-lokasi Kerja oleh Perusahaan (*Contract Form*, Pasal 2 butir 2.23);

c. Titik Keberangkatan (*Point of Hire*) adalah lokasi yang ditentukan oleh Perusahaan dalam Lampiran I – "Ketentuan Khusus & Lingkup Pekerjaan" dimana Kontraktor harus mengumpulkan personelnya dan/atau peralatannya untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi kerja (*Contract Form*, Pasal 2 butir 2.24);----------

d. Tempat Asal (*Point of Origin*) adalah lokasi darimana personil atau peralatan kontraktor harus dimobilisasi dari dan didemobilisasi ke atau lokasi lain yang disetujui perusahaan (*Contract Form,* Pasal 2 butir 2.25);----------

e. Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) adalah lokasi dari mana Peralatan Kontraktor harus dimobilisasi dari dan didemobilisasi ke atau lokasi ditentukan dalam Lampiran I – "Ketentuan Khusus & Lingkup Pekerjaan" (*Contract Form,*Pasal 2 butir 2.26);--------

Berdasarkan dokumen tender diketahui ketentuan terkait mobilisasi sebagai berikut:----------

a. Pemberitahuan mobilisasi dalam Dokumen Perencanaan Tender adalah dalam waktu 3 (*tiga*) hari kalender, namun kemudian direvisi berdasarkan *Pre Bid Clarification Meeting* menjadi 14 (*empat belas*) hari kalender;----------

b. Titik Keberangkatan (*Point of Hire*) adalah di Bandara Juanda Surabaya; ----------

c. Tempat Asal (*Point of Origin*) Terlapor III adalah di area Surabaya, yaitu di Sidoarjo; ----------

d. Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) adalah di *Petronas Shore Base* di area Surabaya yaitu *Lamongan Shore Base*, Jawa Timur;----------

e. Kontraktor menanggung semua biaya yang berhubungan dengan trasportasi peralatan kontraktor dari *Point of Origin* ke *Point of Delivery* dan sebaliknya, serta biaya transportasi dan akomodasi personil dari *Point of Origin* ke *Point of Hire* dan sebaliknya. Semua biaya tersebut dibebankan ke rekening kontraktor;----------

1.10 Terkait dengan Persyaratan Keanggotaan IMCA; ----------

Pembahasan fakta-fakta terkait dengan persyaratan keanggotaan IMCA terdiri dari:----------

(1) Penjelasan umum terkait IMCA; ----------

Berdasarkan *By Law for IMCA Holding Limited*, IMCA (*International Marine Contractors Association*) adalah: ---

"The international trade association representing the interests of contractors and the associated supply chain directly or indirectly involved with the construction, installation, maintenance and/or operation of marine facilities for the extraction, production or transportation of offshore oil or gas, other extractive industries and for utilisation of wind, wave and other energy sources in a marine environment."----------

Salah satu tujuan utama pembentukan IMCA adalah berupaya memberikan standar tertinggi terkait *health,* safety*, environment and quality* dengan resiko dan biaya yang seimbang. Untuk memenuhi standarisasi tersebut, IMCA memberikan *training* dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bagi perusahaan yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota IMCA; ----------

Anggota IMCA antara lain terdiri dari para kontraktor, pemilik kapal, *supplier* barang dan jasa terkait kegiatan *marine operations, Diving, Remotely Operation Vehicle* (ROV) dan *Hydrographic survey and positioning systems*;

Keanggotaan IMCA berdasarkan kompetensi kontraktor terdiri dari *Marine Division*, *Diving Division*, *Offshore Survey Division* dan *Remote System and ROV Division*; --

Untuk memperoleh keanggotaan IMCA tersebut, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk masing-masing kategori/*division*, selanjutnya IMCA melakukan penilaian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, dan menerbitkan sertifikat IMCA bagi perusahaan yang lulus. Sertifikat IMCA tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang; ----------

Berdasarkan *Articles of Association for IMCA Holdings Limited*, kriteria Keanggotaan IMCA (*IMCA Membership*) yaitu: ----------

a. Membership *will be open to companies and other organisations but not to private individuals;* ----------
b. Membership *is non-transferrable*; ----------
c. Members *shall be active in the offshore, marine or underwater engineering industries, either as contractors, vessel owners, suppliers of equipment or services, or as oil & gas and other offshore operators, government departments or other non-governmental organizations;* ----------
d. *There shall be two types of members: voting members (being all members other than corresponding members) and corresponding members;* ----------
e. The category of membership to which a *member shall belong shall be determined in accordance with the bye-laws;*----------

(2) Persyaratan Keanggotaan IMCA dalam tender *a quo* diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:----------

Dokumen perencanaan tender terkait Sertifikasi mensyaratkan IMCA *Membership of Contractor*, IMCA *Supervisor Certification*, IMCA *Divers Certification*;--------

Dokumen persyaratan kualifikasi tender, huruf D. Persyaratan kualifikasi poin 3. Persyaratan Teknis, diatur bahwa pemohon wajib melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA *Membership*; ----------

Dokumen tender, Exhibit I-*Special Provision and Scope of Work*, Item 2.4.4. *Contractors Qualification Experience* (point 1) menyebutkan "*The Contractor is to be and IMCA member company";* ----------

Tender *Clarification#2 Administrative and Technical* Clarification berdasarkan dokumen faksimili Nomor 1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa peserta tender harus merupakan anggota IMCA untuk kategori *Diving* dan kategori ROV, dan standarisasi peralatan dan personil harus mengikuti IMCA *Guidance* dan IMCA *Standard* ----------

1.11 Terkait dengan Dokumen Tender *Clarification #2Administrative and Technical Clarification* tanggal 7 Oktober 2016 adalah sebagai berikut: ----------

Dokumen ini dikirimkan kepada 6 (*enam*) peserta tender yang lulus prakualifikasi: ----------

Dokumen ini merupakan respon dari Panitia Tender terhadap permintaan klarifikasi administrasi dan teknis dari peserta tender pada *pre bid clarification meeting* tanggal 26 September 2016;----------

Panitia tender menyatakan bahwa dokumen ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender; ----------

Berdasarkan *Minutes of Prebid Meeting* tanggal 7 Oktober 2016 (halaman 5) tersebut dinyatakan bahwa "*The Minutes of Prebid Meeting shall be an integral part of bid Document and shall be submitted along with Bidder's proposal*";----------

Berdasarkan *Minutes of Prebid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016, butir 5 tentang *Technical, Commercial and Contractual Clarifications*, butir 5.5. dinyatakan bahwa

"Contractor shall follow IMCA requirement for all aspect of the execution'; ----------

Terlapor III menyatakan bahwa hasil dari pre bid clarification meeting ini sifatnya mengikat;----------

Dalam lampiran dokumen tersebut, Panitia Tender merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta tender terkait dengan Sertifikasi IMCA dan standarisasi IMCA antara lain sebagai berikut: ----------

	Reference	Bidder's Clarification Request	Company Response
	PT Advanced Offshore Services		
6.	*Exhibit I-Special Provision and Scope of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience (point 1)*	*Bidder request Company to confirm that Bidder must be IMCA member in Diving Division "Contractor Category".*	*Bidder of Member IMCA ROV and Diving.*
14.	*Exhibit III _ Contractor Equipment & Personnel Specification item. 4 Equipment page 4 of 9*	*Bidder request Company to confirm that this project will be follow strictly to IMCA guideline?*	*- Refer to IMCA Guidance* *- PETRONAS TECHNICAL STANDARD 602124 Diving operation management Guideline*
	PT Patra Dinamika		
4.	*Exhibit I (Point 2.4.4. Contractors Qualification Experience)*	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 September 2016. Kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan *IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS* karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV?	- Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA - Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan Diving
6.	*Exhibit III (Point 4.0. Equipment – A. Diving Equipment)*	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 September 2016. . Semua peralatan menyelam dan peralatan yang terkait harus mematuhi IMCA.	- IMCA Standard - IMCA D14 - IMCA D15 - IMCA D23 - IMCA R004

		. Semua peralatan menyelam dibuat dalam waktu 20 tahun terakhir diganti mejadi *fit for purpose*.	
	PT Seascape Survey Indonesia		
5.	*Exhibit III Contractor Equipment & Personnel Specification. 4.0.A. Diving Equipment*	*It is stated in the document that all Diving equipment and associated equipment shall comply to International Diving reference like IMCA or ADCI or applicable government regulation.* *During the Pre Bid Meeting, Bidder understand that Company will revise the document and stated to be"comply to IMCA". Please confirm.*	*See Exhibit III Rev Company will refer to* IMCA.

1.12 Terkait PT Samudera Biru Nusantara (PT SBN); ----------

PT SBN, beralamat di Karinda Plaza Blok B No. 22 Karang Tengah Raya–Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang berdiri pada tahun 2000, bergerak dalam bidang *underwater service*:----------

Berdasarkan dokumen Keputusan Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Samudera Biru Nusantara Berkedudukan di Jakarta tanggal 5 Juli 2015, pemegang saham terakhir PT SBN yang terdiri dari Freddy Rompas, Johny Rompas, Jimmy Rompas dan Michael Wilson Tinangon menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan menjadi sebagai berikut: Johny Rompas (Direktur Utama), Jimmy Rompas (Direktur), Michael Wilson Tinangon (Direktur), Freddy Rompas (Komisaris Utama) dan Grace Debora Rompas (Komisaris);----------

PT Rubotori Petrotech Indonesia berencana melakukan akuisisi terhadap PT SBN yang diketahui telah collapse dan tidak ada aktivitas sejak tahun 2008-2009 dengan Laporan pajak terakhir pada tahun 2008-2009; ----------

PT Rubotori Petrotech Indonesia, beralamat di Mutiara Building Lantai 3, Suite 302, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 10, Jakarta Selatan, merupakan perusahaan yang berdiri pada bulan November 2010 dan bergerak di bidang survey dan studi eksplorasi minyak dan gas bumi;----------

PT Rubotori Petrotech Indonesia tertarik untuk mengakuisisi dan menjadikan PT SBN sebagai salah satu anak perusahaan karena PT SBN memiliki pengalaman di bidang *underwater service* dan memiliki Sertifikat IMCA; ----------

Pada tanggal 30 April 2015, PT Rubotori Petrotech Indonesia (diwakili oleh Sdr. Bono Widjonarko selaku Direktur) dan PT SBN (diwakili oleh Michael Wilson Tinangon selaku Direktur) menandatangani Perjanjian Pengelolaan dalam rangka pengambil-alihan PT SBN oleh PT Rubotori Petrotech Indonesia. Sejak saat itu, semua kegiatan PT SBN di bawah kendali PT Rubotori Petrotech Indonesia dan selama satu tahun Sdr. Bono Widjonarko selaku Direktur PT Rubotori Petrotech Indonesia berhak untuk mencari pekerjaan atas nama PT SBN;----------

Selama rentang waktu Perjanjian Pengendalian, masa berlaku IMCA sudah habis, kemudian PT Rubotori Petrotech Indonesia memperpanjang sertifikat IMCA atas nama PT SBN dengan melakukan pembayaran untuk tahun 2015 dan 2016: ---------

Berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 30 April 2015, PT Rubotori Petrotech Indonesia melakukan pembayaran *annual fee* keanggotaan IMCA PT SBN untuk kategori *Diving* tahun 2015 adalah sebesar GBP 5280 (*lima ribu dua ratus delapan puluh Poundsterling*). ----------

Berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2015, PT Rubotori Petrotech Indonesia melakukan pembayaran *annual fee* keanggotaan IMCA PT SBN untuk kategori *Diving* tahun 2016 adalah sebesar GBP 5280 *(lima ribu dua ratus delapan puluh Poundsterlin*);----------

Menurut keterangan Saksi Sdr. Bono Widjonarko selaku Direktur PT Rubotori Petrotech Indonesia dan Sdr. Michael Wilson Tinangon selaku Direktur PT SBN, kondisi kantor PT SBN yang beralamat di Karinda Plaza sudah tidak beroperasi, tidak memiliki pegawai, dan peralatan yang dimiliki sudah tidak beroperasi dengan baik karena tidak ada *maintenance*. ----------

Berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan terhadap dokumen legal dan dokumen pajak, PT Rubotori Petrotech Indonesia memutuskan tidak jadi mengakuisisi PT SBN. ------

Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Michael Wilson Tinangon selaku Direktur PT SBN yang saat ini berdomisili di Balikpapan, PT SBN sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2009 karena diputus pekerjaan secara sepihak oleh Total yang mengakibatkan PT SBN di-*blacklist* sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi.----------

Menurut Saksi Sdr. Michael Wilson Tinangon, pada saat pra kualifikasi, seharusnya Panitia Tender dapat melihat Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa dan *supporting letter* PT SBN untuk PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III). Seharusnya kedua perusahaan tersebut didiskualifikasi oleh Panitia Tender;----------

1.13 Terkait Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara (PT SBN) – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (PT Cakrabhasa); ----------

Pada tanggal 30 Mei 2016 PT SBN di bawah kepengurusan Sdr. Bono Widjonarko melakukan kerjasama dalam bentuk konsorsium dengan PT Cakrabhasa untuk mengikuti tender dalam perkara *a quo;*----------

PT Cakrabhasa, berdiri pada tahun 1985, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang survey kapal, kabel, dan pipa bawah air;----------

Menurut PT Cakrabhasa, dalam Konsorsium tersebut, PT SBN hanya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*; ----------

Konsorsium PT SBN - PT Cakrabhasa mengikuti proses prakualifikasidalam tender *a quo*; ----------

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi, Konsorsium PT SBN - PT Cakrabhasa dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki Sertifikat Keanggotaan IMCA, tidak memiliki SKT Migas terkait, dan nilai HSE di bawah minimum skor; ---------

a. Berdasarkan keterangan PT Cakrabhasa, PT Cakrabhasa tidak memiliki Keanggotaan IMCA baik pada kategori *Diving* maupun ROV, sedangkan PT SBN memiliki Keanggotaan IMCA hanya untuk kategori *Diving*; ----------
b. Berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender, Huruf D. Persyaratan Kualifikasi, point 1. Persyaratan Legal dan Administrasi, butir 1.2. Izin dan Lisensi, pemohon wajib melampirkan salinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas yang masih berlaku khusus bagi golongan usaha besar. (*vide* Lap.C7.1). Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Migas Nomor 859/SKT-02/DMT/2016 yang diterbitkan oleh Dirjen Migas pada tanggal 11 Juli 2016, PT SBN terdaftar untuk usaha penunjang Bidang Usaha Jasa Nonkonstruksi, Subbidang Pekerjaan Bawah Air dengan bagian subbidang Pelayanan Penyelaman (*Diving Services*) yaitu Pengelasan Bawah Air, Penggelaran Pipa Bawah Air; ----------
c. Berdasarkan Dokumen Prakualifikasi, skor minimal untuk lulus HSE adalah 56. Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa dinilai tidak mencapai skor minimal HSE tersebut; ---------
d. Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa mengajukan keberatan terhadap hasil evaluasi prakualifikasi tersebut dengan menyerahkan dokumen-dokumen terkait Sertifikat Keanggotaan IMCA, SKT Migas terkait dan isian HSE, dan meminta Panitia Tender untuk melakukan evaluasi ulang;
e. Setelah dilakukan evaluasi ulang, Panitia Tender menyatakan bahwa konsorsium tersebut tidak lulus karena dokumen HSE hanya disampaikan dalam bentuk MS Word dan tidak dilengkapi dengan tanda-tangan persetujuan/*approval* untuk semua prosedur dan

dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti pengimplementasian dari prosedur HSE yang ada. ---------

1.14 Fakta terkait Surat Dukungan Keanggotaan IMCA dari PT Samudera Biru Nusantara (SBN) kepada Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

Pada tanggal 19 Oktober 2016, Direktur PT SBN yaitu Sdr. Michael Wilson Tinangon menerbitkan surat dukungan (*supporting letter*) untuk Terlapor III dengan menyertakan Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* tahun 2016 atas nama PT SBN; ----------

Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Michael Wilson Tinangon dan Sdr. Bono Widjonarko, pemberian surat dukungan oleh PT SBN tersebut adalah setelah Perjanjian Pengendalian berakhir pada bulan April 2016; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III mengakui memiliki sertifikasi IMCA untuk kategori ROV sejak tahun 2016, namun tidak memiliki sertifikasi IMCA untuk kategori *Diving* karena masih dalam proses *desktop audit* oleh pihak IMCA; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor III dan Saksi PT SBN, Terlapor III mendapat surat dukungan terkait Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* dari PT Samudera Biru Nusantara; ----------

Berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender, Huruf D. Persyaratan kualifikasi, poin 1. Persyaratan Legal dan Administrasi, butir 1.2. Izin dan Lisensi, jika calon peserta tender mendaftar sebagai konsorsium, maka wajib melampirkan surat kerjasama konsorsium; ----------

Berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor III, Terlapor III tidak mendaftar sebagai konsorsium. (*vide* Lap.C7.1); ----------

Terlapor III menyatakan hubungan dengan PT SBN adalah dalam bentuk dukungan keanggotaan IMCA.----------

Terlapor III dan PT SBN menyatakan bahwa hubungan kerjasama di antara mereka tidak dibuat dalam bentuk konsorsium; ----------

Terlapor III menyatakan semua dukungan finansial adalah dari Terlapor III.----------

1.15 Terkait dengan keberatan atau masa protes yang diajukan oleh PT Advanced Offshore Services setelah proses evaluasi administrasi dan teknis adalah sebagai berikut: ----------

Pada masa protes setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis PT Advanced Offshore Services mengirimkan Surat Nomor 124/AOS-BID/RSP/X/2016 tanggal 14 Desember 2016 kepada Terlapor I dan Terlapor II. Perusahaan tersebut memprotes diluluskannya salah satu perusahaan (dalam hal ini yaitu Terlapor III) yang hanya memiliki keanggotaan IMCA untuk kategori ROV saja, namun tidak memiliki keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*; ----------

Pada tanggal 4 Januari 2017 Terlapor I dan Terlapor II melakukan klarifikasi kepada PT Advanced Offshore Services. Dalam *Minutes of Meeting*, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan bahwa Terlapor III memiliki *supporting letter* dari PT Samudera Biru Nusantara yang merupakan anggota IMCA untuk kategori *Diving*. Kondisi tersebut dinyatakan dapat diterima oleh Terlapor I dan Terlapor II; ----------

Berdasarkan hasil *Pre Bid Clarification Meeting* yang disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 7 Oktober 2016, butir 3.3. tentang *amendments of bid documents*, mengatur: ----------

1. *Company may amend Bid Documents for any reason, whether at its own initiative or as a result of responses to clarifications, to issue addendum at any time. Such notification shall be inform in writing 3 (three) working days prior Bid Closing/Submission.* ----------
2. *Company will distribute in writing such Addendum to all Bidders."*----------

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah melakukan amandemen terhadap Dokumen Tender terkait ketentuan surat dukungan Keanggotaan IMCA dari perusahaan lain sebagai pengganti persyaratan Sertifikasi Keanggotaan IMCA yang seharusnya dimiliki sendiri oleh peserta tender yang bersangkutan;----------

1.16 Terkait *Owner Estimate* dan Harga Penawaran Pemenang Tender adalah sebagai berikut:----------

Berdasarkan ketentuan dalam PTK 007 Revisi 3 Tahun 2005, Bab V tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 tentang Daftar Pengadaan (*Procurement List*), diatur bahwa :--

a. Daftar pengadaan (*Procurement List*) dengan nilai paket tender lebih besar dari Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) atau US$5.000.000,00 (*lima juta dollar Amerika Serikat*) harus mendapat persetujuan SKK Migas pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari WP&B (*Work Program and Budget*);
b. Untuk paket tender dengan nilai lebih besar dari Rp 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) atau US$500.000,00 (*lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) atau US$5.000.000,00 (*lima juta dollar Amerika Serikat*) tetap harus dituangkan dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari WP&B, tapi tidak memerlukan persetujuan dari SKK Migas;----------

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tender, Terlapor I dan Terlapor II menetapkan Pagu Anggaran (*budget*) sebesar Rp 40.000.000.000,00 (*empat puluh milyar rupiah*) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*);------

Berdasarkan ketentuan dalam PTK 007 Revisi 3 Tahun 2005, Bab VII tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (*OE*), Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, nilai total HPS/OE tidak bersifat rahasia setelah pembukaan penawaran harga. Rincian HPS/OE bersifat rahasia bagi Peserta Tender.

Dalam hal pembukaan penawaran harga terdapat penawaran yang memenuhi syarat jumlah untuk dievaluasi lebih lanjut, maka nilai HPS/OE dicantumkan dalam dokumen Pembukaan Dokumen Tender. Panitia Tender mengumumkan nilai total HPS/OE kepada peserta tender;----------

Menurut keterangan para Saksi, HPS/OE tidak pernah diumumkan kepada para peserta tender. Hal ini dilakukan agar peserta tender dapat mengajukan penawaran secara kompetitif; ----------

Berikut nilai total OE dan nilai penawaran masing-masing peserta tender: ----------

Owner Estimate	Rp	49.465.485.000,00
PT Seascape Surveys	Rp	114.968.040.000,00
PT Advanced Offshore Services	Rp	66.306.125.000,00
PT Patra Dinamika	Rp	65.139.825.000,00
PT Aquamarine Divindo Inspection	Rp	47.360.900.000,00

Berdasarkan nilai penawaran para peserta tender tersebut di atas, Terlapor III adalah satu-satunya peserta tender yang mengajukan penawaran di bawah OE. Menurut Terlapor III, margin penawaran tersebut adalah sekitar 10% (*sepuluh persen*) sampai dengan 15% (*lima belas persen*);----------

Selisih harga Terlapor III selaku pemenang tender dengan penawaran harga peserta tender serta persentase terhadap HPS/OE adalah sebagai berikut:----------

Peserta Tender	Selisih terhadap HPS/OE (Rp)	% terhadap HPS/OE
PT Seascape Surveys	65.502.555.000,00	232.42%
PT Advanced Offshore Services	16.840.640.000,00	134.04%
PT Patra Dinamika	15.674.340.000,00	131.68%
PT Aquamarine Divindo Inspection	(2.104.585.000,00)	95.74%

Komponen harga penawaran untuk masing-masing biaya mobilisasi/demobilisasi, *working* dan *standby* terdiri dari: ----

a. *Diving (Air Diving Personnel, SRP Diving Spread, Air Diving Spread);* ----------
b. *ROV ROV Personnel, ROV Equipment* (IMCA R 004)); --------
c. *Support Vessel*; ----------

d. *Inspection Tool*;----------

e. *Diving Construction, Rigging and Cleaning Equipment.* ------

Berdasarkan dokumen penawaran harga PT Seascape Surveys, PT Advanced Offshore Services, dan PT Patra Dinamika, satuan biaya untuk mobilisasi/demobilisasi untuk masing-masing item rata-rata lebih mahal dibandingkan dengan biaya *working* dan *standby*. Sedangkan berdasarkan dokumen penawaran harga Terlapor III, satuan biaya untuk mobilisasi/demobilisasi untuk masing-masing item rata-rata lebih murah dibandingkan dengan biaya *working* dan *standby;*

Berdasarkan Exhibit II *Price Schedule*, Point 3.0 *Contractor's Rates of Services*, diatur bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk peralatan dan personil adalah biaya *lump sum* yang ditanggung oleh kontraktor dari *Point of Origin* ke *Point of Delivery* dan sebaliknya. ----------

1.17 Terkait dengan Sertifikat IMCA untuk kategori *Diving* yang diajukan oleh Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

Bahwa berdasarkanketerangan dari pihak IMCA yang dilakukan komunikasi melalui email pada tanggal 31 Mei 2017 diketahui proses permohonan Terlapor III untuk memperoleh Sertifikat IMCA untuk kategori *Diving* masih dalam proses. (*vide Bukti* C43, C44);----------

1.18 Terkait dengan *Release Order* (RO) dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III dalam pelaksanaan Tender *Provision of underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) adalah sebagai berikut :----------

Bahwa Terlapor III telah menerima *Release Order* (RO) dari Terlapor I dan Terlapor II pada tanggal 22 Februari 2017; -----

Berdasarkan aturan internal Terlapor I dan Terlapor II, RO muncul karena dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat kontrak sebagai dasar hukum untuk melakukan pekerjaan;----------

Menurut Terlapor III, secara *de facto* kontrak memang belum ditandatangani, tetapi secara *de jure* memang pekerjaan sudah berjalan dengan RO ini sebagai dasar hukumnya; ------

Besaran nilai RO adalah senilai Rp 8.977.500.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk *Kepodang Field* dan senilai Rp 10.307.500.000,00 (*sepuluh milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk *Ketapang Field*. Namun demikian, pekerjaan belum bisa dilaksanakan karena belum dilakukan *kick-off meeting*;----------

Menurut ketentuan PTK 007 Revisi III Tahun 2015, Bab XII, Pasal 1 tentang Penerbitan Kontrak, penerbitan kontrak yang tidak kompleks diupayakan dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari terhitung sejak tanggal penunjukan pemenang. Untuk kontrak yang bersifat kompleks diupayakan dalam waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak tanggal penunjukan pemenang. Jika memerlukan waktu lebih lama, maka harus memberitahukan kepada SKK Migas; ----------

Penunjukkan pemenang atau *Letter of Award* dari Terlapor I dan Terlapor II diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2017, sedangkan *Letter of Acceptance* dari Terlapor III disampaikan pada tanggal 7 Februari 2017. Bahwa pada saat jangka waktu Tim penyelidikan dalam kasus ini berakhir pada tanggal 18 Juli 2017, kontrak belum ditanda-tangani meskipun telah melampaui batas waktu 90 (*sembilan puluh*) hari setelah penunjukkan pemenang tersebut. ----------

1.19 Analisa Dugaan Pelanggaran;----------

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran *Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No.11204) adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

1.20 Berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu:

a. Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------
b. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------
c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.----------

1.21 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.---

1.22 Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: ----------

a. Memborongatau melaksanakan suatu pekerjaan; ----------
b. Mengadakan barang dan/atau jasa; ----------
c. Membeli suatu barang dan/atau jasa;----------
d. Menjual suatu barang dan/atau jasa. ----------

1.23 Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:----------

a. Tender terbuka,----------
b. Tender terbatas, ----------
c. Pelelangan umum, dan----------
d. Pelelangan terbatas. ----------

1.24 Bahwa *Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No.11204) merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan berupa jasa inspeksi platform dan pipa gas yang dilakukan melalui tender terbuka.----------

1.25 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

Unsur pelaku usaha ----------

Bahwa dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah: ----------

"Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah:---

1) PC Muriah Ltd., yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan bersama dengan PC Ketapang II Ltd; ----------
2) PC Ketapang II Ltd, yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan bersama dengan PC Muriah Ltd. ----------
3) PT Aquamarine Divindo Inspection, yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *underwater services* yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai pelaku usaha pemenang tender; ----------

Unsur pihak lain----------

Pihak lain adalah menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah: ----------

Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.----------

Bahwa pihak lain yang dimaksud di dalam Dugaan Pelanggaran ini adalah PT Aquamarine Divindo Inspection, yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *underwater services*;. Dalam prakteknya, PT Aquamarine Divindo Inspection telah mengikuti dan menjadi pemenang dalam Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No.11204). ----------

Unsur bersekongkol ----------

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah

"*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*". ----------

Bahwa unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;---
d. menciptakan persaingan semu;----------
e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ----------

Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam dugaan pelanggaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan memfasilitasi Terlapor I sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang dengan cara sebagai berikut:

a. Terkait dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company.* ----------
   (1) Bahwa diketahui dalam persyaratan Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company*;----------
   (2) Bahwa diketahui pengertian *the Contractor is to be and IMCA member company* sebagaimana dipahami oleh Terlapor III adalah kontraktor/perusahaan yang masih dalam proses menjadi anggota IMCA maupun yang sudah menjadi anggota IMCA dapat memenuhi ketentuan ini, dimana pada saat pengumuman tender (25 Mei 2016) Terlapor III adalah anggota IMCA untuk kategori ROV, dan 'akan menjadi' anggota IMCA untuk kategori *Diving*;----------
   (3) Bahwa diketahui ketiga peserta lainnya yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, yaitu PT Seascape Surveys Indonesia, PT Patra Dinamika, dan PT Advanced Offshore Service memiliki Sertifikat IMCA baik untuk kategori *Diving* maupun kategori ROV. -----
   (4) Bahwa dengan demikian patut diduga ketentuan *the Contractor is to be and IMCA* member *company* tersebut dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk memfasilitasi Terlapor III agar dapat mengikuti tender dalam perkara *a quo.*----------
b. Terkait dengan persyaratan *workshop* atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services* ----------
   (1) Bahwa *diketahui* persyaratan di dalam tender ini *workshop* atau kantor perwakilan harus yang berlokasi

di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services* sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain;

(2) Bahwa diketahui alamat Terlapor III berada di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo, Jawa Timur yang juga merupakan *workshop* dan gudang penyimpanan peralatan selam termasuk ROV sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain;----------

(3) Bahwa diketahui Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif dalam tender ini terkait dengan mobilisasi peralatan dan personil sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tender yaitu dalam waktu 3 (tiga) hari kalender. Ketentuan pemberitahuan mobilisasi tersebut dibuat sesuai dengan kemampuan Terlapor III yang dapat memobilisasi sesuai ketentuan tersebut. Namun berdasarkan hasil *Pre Bid Clarification Meeting*, jangka waktu tersebut diubah menjadi 14 (empat belas) hari karena peserta tender lainnya tidak ada yang berlokasi di area Surabaya sehingga dapat memenuhi tenggat waktu mobilisasi yang singkat tersebut;----------

(4) Bahwa diketahui Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif terkait dengan lokasi mobilisasi dan demobilisasi dari *Point of Origin* di Sidoarjo menuju *Point of Hire* di Bandara Internasional Juanda Surabaya maupun menuju *Point of Delivery* di Petronas Shore Base di Lamongan dengan berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;----------

(5) Bahwa dengan demikian patut diduga persyaratan workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk memfasilitasi Terlapor III agar dapat memenangkan tender dalam perkara *a quo*. ----------

c. Terkait Evaluasi Persyaratan Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II ----------

(1) Bahwa diketahui persyaratan Keanggotaan IMCA untuk ROV dan *Diving* bersifat kumulatif dan merupakan persyaratan yang menggugurkan dalam penilaian kualifikasi; ----------

(2) Bahwa diketahui berdasarkan histori penerapan persyaratan Keanggotaan IMCA dalam tender *a quo*, terjadi beberapa kali perubahan dimana pada tahap perencanaan dan dokumen prakualifikasi diharuskan melampirkan IMCA *Membership of Contractor*. Kemudian pada Dokumen Tender, Exhibit I, persyaratan tersebut berubah sehingga dapat memfasilitasi Terlapor III yang masih dalam proses permohonan Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*. Selanjutnya pada *pre bid clarification meeting*, ditegaskan kembali secara lebih spesifik bahwa peserta harus Anggota IMCA untuk ROV dan *Diving*; ----------

(3) Bahwa diketahui menurut para Terlapor dan para Saksi, hasil *pre bid clarification meeting* itu sifatnya mengikat sebagai dasar hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender; ----------

(4) Bahwa dengan demikian, ketentuan terakhir yang digunakan terkait dengan persyaratan Keanggotaan IMCA adalah sebagaimana dimaksud dalam hasil *pre bid clarification meeting* yang menyatakan peserta tender adalah Anggota IMCA baik untuk ROV maupun *Diving*; ----------

(5) Bahwa diketahui persyaratan Keanggotaan IMCA untuk ROV dan *Diving* tersebut bersifat kumulatif, sehingga peserta tender harus memiliki Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kedua kategori tersebut; ----

(6) Bahwa diketahui persyaratan Keanggotaan IMCA untuk ROV dan *Diving* ini merupakan persyaratan yang substantif karena bersifat mengugurkan. Jika hanya memiliki salah satu Sertifikat, maka peserta tender gugur/*failed*; ----------

(7) Bahwa seharusnya Terlapor III digugurkan oleh Terlapor I dan Terlapor II karena tidak memiliki sertifikat *Diving* tetapi Terlapor I dan Terlapor II tetap tidak menggugurkan Terlapor III; ----------

(8) Bahwa dengan demikian patut diduga, tindakan Terlapor I dan Terlapor II tidak mengugurkan Terlapor III adalah untuk membiarkan Terlapor III untuk tetap menjadi pemenang dalam perkara *a quo*.----------

d. Terkait Surat dukungan Keanggotaan IMCA PT SBN kepada Terlapor III bertentangan dengan ketentuan IMCA

(1) Bahwa diketahui berdasarkan aturan IMCA, keanggotaan IMCA bersifat *non transferrable* dan anggota IMCA harus aktif melakukan kegiatan di bidang *offshore, marine* atau *underwater*; ----------

(2) Bahwa diketahui berdasarkan keterangan dari PT SBN dan PT Rubotori Petrotech Indonesia, terbukti bahwa PT SBN sudah *collapse*, tidak beroperasi, tidak memiliki pegawai, tidak memiliki peralatan, sudah pindah alamat dan tidak membayar pajak sejak tahun 2010. Meskipun demikian, PT SBN masih memiliki sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* yang dibayarkan oleh PT Rubotori Petrotech Indonesia;

(3) Bahwa diketahui surat dukungan berupa Sertifikat Keanggotaan IMCA yang diberikan oleh PT SBN kepada Terlapor III bertentangan dengan aturan IMCA yang mengatur bahwa keanggotaan tersebut tidak dapat dialihkan ke perusahaan lain (*non transferrable*). Selain itu, PT SBN pun sudah tidak aktif beroperasi di bidang *underwater service*, sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai anggota IMCA yang dapat memenuhi standarisasi *health, safety and environment* untuk peralatan dan personil sesuai dengan IMCA *Guidance* dan IMCA *Standard*; ----------

(4) Bahwa seharusnya Terlapor I dan Terlapor II mengetahui terkait dengan aturan IMCA yang mengatur bahwa keanggotaan tersebut tidak dapat

dialihkan ke perusahaan lain (*non transferrable*) sehingga Terlapor III tidak bisa mendapatkan surat dukungan sertifikat *Diving* dari PT SBN;----------

(5) Bahwa seharusnya Terlapor I dan Terlapor II mengetahui terkait PT SBN sudah tidak aktif lagi beroperasi di bidang *underwater service*, sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai anggota IMCA yang dapat memenuhi standarisasi *health, safety and environment* untuk peralatan dan personil sesuai dengan IMCA *Guidance* dan IMCA *Standard*; ----------

(6) Bahwa dengan demikian patut diduga, tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang tetap memenangkan Terlapor III dengan tidak mengindahkan aturan IMCA sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin 4 serta terkait dengan tidak aktifnya lagi PT SBN di bidang *underwater service* sebagaimana di jelaskan di poin 5 merupakan bentuk fasilitasi Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III untuk menjadi pemenang dalam perkara *a quo*. ----------

e. Terkait Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA; -----

(1) Bahwa diketahui Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa tidak lulus prakualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan Keanggotaan IMCA karena hanya memiliki satu Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*; ----------

(2) Bahwa diketahui Terlapor III lulus prakualifikasi meskipun hanya memiliki satu Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori ROV dan mendapat surat dukungan dari PT SBN untuk Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*; ----------

(3) Bahwa diketahui Terlapor I dan Terlapor II seharusnya mendiskualifikasi Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa dan Terlapor III karena dalam tender yang sama, PT SBN mendaftar sebagai peserta tender dalam bentuk konsorsium dengan PT Cakrabhasa, namun

juga memberikan dukungan kepada Terlapor III yang merupakan pesaing Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa dalam tender tersebut; ----------

(4) Bahwa ketentuan mengenai diperbolehkannya surat dukungan untuk Keanggotaan IMCA tidak pernah diatur dalam Dokumen Tender maupun dalam amandemen Dokumen Tender dan tidak pernah diberitahukan kepada peserta tender lainnya;----------

(5) Bahwa diketahui Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia mengundurkan diri dan tidak memasukkan Dokumen Penawaran dengan alasan tidak memenuhi kualifikasi dimana konsorsium hanya memiliki Keanggotaan IMCA untuk kategori Survey dan ROV, namun tidak memiliki Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving;*----------

(6) Bahwa diketahui PT Seascape Survey Indonesia, PT Patra Dinamika dan PT Advanced Offshore Services merupakan peserta tender yang memenuhi kualifikasi dan memiliki Sertifikasi IMCA untuk ROV dan *Diving;*-

(7) Bahwa penerapan standar ganda terhadap penilaian Sertifikasi Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut mengakibatkan peserta tender lain tidak dapat bersaing secara *fair* dengan Terlapor III dalam tender ini;----------

(8) Bahwa dengan demikian patut diduga, penerapan standar ganda terhadap penilaian Sertifikasi Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II merupakan bentuk dari fasilitasi Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III untuk lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis dan menjadi pemenang dalam perkara *a quo.* ----------

f. Terkait Penilaian Panitia kepada Surat Dukungan Yang diberikan Oleh PT SBN kepada Terlapor III sebagai Pemenang Tender ----------

(1) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi, Konsorsium PT SBN - PT Cakrabhasa dinyatakan tidak

lulus karena tidak memiliki Sertifikat Keanggotaan IMCA, tidak memiliki SKT Migas terkait, dan nilai HSE di bawah minimum skor; ----------

(2) Bahwa terkait dengan Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa dinyatakan tidak lulus terkait dengan nilai HSE dibawah minimum tetapi Panitia tetap memperbolehkan surat dukungan berupa Sertifikat Keanggotaan IMCA dari PT SBN kepada Terlapor III; ---

(3) Bahwa dengan demikian patut diduga, terkait dengan diperbolehkan atau diluluskannya surat dukungan berupa Sertifikat Keanggotaan IMCA dari PT SBN kepada Terlapor III untuk memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang. ----------

g. Terkait *Owner Estimate* dan Harga Penawaran Pemenang Tender----------

(1) Bahwa diketahui besaran pagu dan *Owner Estimate* yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*), sehingga tender ini tidak perlu mendapat persetujuan dari SKK Migas. Dengan demikian, proses perencanaan, proses evaluasi dan penetapan pemenang tender dilakukan oleh Panitia Tender tanpa mendapat pengawasan dan persetujuan dari SKK Migas;----------

(2) Bahwa diketahui sebelum pembukaan penawaran tender, nilai total dan rincian HPS/OE bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada peserta tender; ---------

(3) Bahwa diketahui Terlapor III adalah satu-satunya peserta tender yang dapat memberikan harga penawaran di bawah HPS/OE. Sedangkan ketiga peserta tender lainnya seluruhnya menawar di atas HPS/OE; ----------

(4) Bahwa diketahui berdasarkan analisa terhadap komponen harga untuk masing-masing item biaya penawaran, satuan biaya untuk mobilisasi/ demobilisasi (untuk peralatan dan personil)

merupakan faktor penentu dalam pembentukan harga penawaran ini; ----------

(5) Bahwa Terlapor III memperoleh keuntungan penghematan biaya mobilisasi dan demobilisasi dari *Point of Origin* ke *Point of Delivery* dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan lokasi Terlapor III yang persis sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tender sehingga *Owner Estimate* dihitung dengan asumsi perhitungan biaya mobilisasi dan demobilisasi di area Surabaya. Sedangkan ketiga peserta tender lainnya menghitung biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk area di luar Surabaya bahkan di luar Jawa Timur; ----------

(6) Bahwa dengan demikian patut diduga, Terlapor I dan Terlapor II patut diduga menyusun perhitungan *Owner Estimate* berdasarkan estimasi perhitungan biaya Terlapor III sehingga Terlapor III dapat mengajukan penawaran yang menyesuaikan dengan perhitungan tersebut. ----------

Unsur Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender ----

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya". ----------

Bahwa unsur mengatur dan menentukan pemenang tender didalam dugaan pelangaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang. ----------

Bahwa tindakan *Terlapor* I dan Terlapor II dengan mengatur dan menentukan Terlapor III menjadi pemenang telah dijelaskan sebagaimana diatas di dalam unsur bersekongkol dengan cara sebagai berikut: ----------

a. Terkait dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company;* ----------
b. Terkait dengan persyaratan *workshop* atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services;* ----------
c. Terkait Evaluasi Persyaratan Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; ----------
d. Terkait Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA; -----
e. Terkait Surat dukungan Keanggotaan IMCA PT SBN kepada Terlapor III bertentangan dengan ketentuan IMCA;
f. Terkait Penilaian Panitia kepada Surat Dukungan Yang diberikan Oleh PT SBN kepada Terlapor III sebagai Pemenang Tender; dan ----------
g. Terkait *Owner* Estimate dan Harga Penawaran Pemenang Tender. ----------

Dampak ----------

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pihak lain tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.----------

Kesimpulan ----------

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada*Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang*

Field (Tender No. 11204) yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 13 Desember 2017, Terlapor I dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden PC Muriah LTD tanggal 28 November 2017 dan Terlapor II dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden PC Ketapang II LTD memberi kuasa kepada Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Ardian Deny Sidharta, S.H., Romi Emirat,S.H., Verry Iskandar, S.H., M.Hum., dan Winotia Ratna, S.H., LL.M., Advokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210 menyampaikan/membacakan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide Bukti* TI-TII.1, TI-TII.2, TI-TII.5): ----------

LDP Tim Investigator pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5/1999 sehubungan dengan Tender dengan bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor III sebagai pemenang Tender;

Atas dalih-dalih Tim Investigator, Terlapor I dan Terlapor II membantah tegas dasar dan fakta dugaan yang diajukan oleh Tim Investigator dalam LDP karena tidak berlandaskan fakta hukum yang benar dan sesungguhnya. Tidak ada dan tidak pernah ada persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender, sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator;----------

Unsur terpenting dalam Pasal 22 UU No.5/1999 adalah "bersekongkol"

a) Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999) menjelaskan bahwa: ----------

"*bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha* dengan *pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*", -----

b) Pasal 1 angka 8 UU No.5/1999 mendefinisikan persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai: ----------

"*bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha* dengan *pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*"

Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, dalih-dalih yang diajukan Tim Investigator dalam LDP berkenaan dengan "bersekongkol" tidak ada satupun yang terpenuhi ----------

Dalam dan sepanjang pelaksanaan Tender, tidak ada kerjasama yang dilakukan antara Terlapor I dan/atau Terlapor II dengan Terlapor III dan tidak ada satu pihak pun yang memiliki inisiatif untuk memenangkan pihak tertentu. Uraian disampaikan di bawah ini: -----

Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan proses Tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKK/SKKO0000/2015/SO revisi ketiga mengenai Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kontrak Kerjasama (PTK 007 Revisi 3) dan peraturan internal Terlapor I dan Terlapor II sendiri selaku Kontraktor KKS:----------

a) Mengacu pada Angka 1.1 *Attachment A – Instruction to Bidders* (ITB) halaman 1 dinyatakan sebagai berikut: ----------

   "*Tender ini mengikuti serta tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam IPT dan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ("SKK Migas") No.PTK-007/SKKO0000/2015/S0 dan seluruh perubahannya ("PTK 007-Rev-3") termasuk amandemen dari waktu ke waktu serta hukum dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan pekerjaan yang dilelangkan.*" ----------

b) Untuk memudahkan dalam mengkaji bahwa setiap tahap dalam proses Tender telah dilakukan sesuai dengan PTK 007 Revisi 3, penjelasan akan diuraikan dalam bentuk tabel pada bagian II Kronologis Tender pada angka 12 Tanggapan di bawah ini. --------

Tidak ada kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor III sebagai pemenang Tender: ----------

a) Tuduhan persekongkolan dalam LDP menitikberatkan pada persyaratan mengenai pengalaman perusahaan, keanggotaan IMCA, dan *work site* atau tempat dilaksanakan pekerjaan Tender

b) Sebagaimana akan kami uraikan dalam angka 28 dan 29 Tanggapan, Tim Investigator memiliki pengertian yang salah

mengenai syarat pengalaman perusahaan. Pengertian Tim Investigator bahwa perusahaan harus memiliki pengalaman di bidang *Underwater service* minimum 7 (tujuh) tahun untuk pekerjaan sejenis di Indonesia adalah tidak tepat. Berdasarkan PTK 007 Revisi 3, persyaratan yang sesungguhnya adalah telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada sub-bidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan. Syarat ini sesuai dengan dokumen Tender, yaitu Angka 3 halaman 7 Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field Nomor Tender: 11204 (*vide Bukti* B43, B44);----------

c) Dalam tahap Proses Bidding, syarat *"is to be or IMCA membership"* atau akan menjadi dan telah menjadi anggota IMCA berlaku untuk seluruh peserta Tender. Tidak ada diskriminasi. Dalam tahap Proses Bidding atau *Bid Process*, dimana penilaian dilakukan dari sisi teknikal, klarifikasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Panitia Tender bahwa keanggotaan IMCA yang disyaratkan adalah untuk kategori *Diving* dan ROV juga berlaku untuk seluruh Peserta Tender; ----------

d) Tim Investigator menuduh bahwa terdapat syarat untuk memiliki workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools dan Equipment of NDT and Inspection Services*. Tuduhan ini tidak benar. Tidak ada syarat spesifik untuk memiliki workshop atau kantor perwakilan khusus di Jawa Timur dalam seluruh dokumen-dokumen persyaratan Tender; ----------

Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah mengistimewakan dan memfasilitasi Terlapor III sehingga menjadi pemenang Tender:----------

a) Dalam LDP, Tim Investigator menuduh bahwa seolah-olah surat dukungan (*supporting letter*) untuk keanggotaan IMCA kategori *Diving* yang diberikan oleh Terlapor III merupakan perlakuan istimewa dari Panitia Tender. Hal tersebut tidak benar.----------

b) Terdapat Peserta Tender lain yang juga memiliki surat dukungan untuk IMCA, yaitu PT Cakrawala Amartha Jaya yang memperoleh

surat dukungandari PT Jaya Salvage Indonesia (PT Jasalindo) untuk keanggotaan IMCA kategori *Diving* dan ROV. ----------

c) Surat dukungan merupakan suatu praktek yang umum. Terbukti bahwa dalam Tender terdapat persyaratan mengenai *vessel* dimana 4 (empat) dari 5 (lima) Peserta Tender memasukan surat dukungan untuk memenuhi persyaratan ini karena keempat Peserta Tender tersebut tidak memiliki *vessel* atau kapal.----------

d) *Work site* atau wilayah pekerjaan (bukan workshop atau kantor perwakilan) yang ditulis dalam dokumen persyaratan Tender untuk berada di daerah sekitar Jawa Timur memang karena fasilitas operasional Terlapor I dan Terlapor II berada di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak masuk akal apabila *work site* yang ditetapkan dalam Tender adalah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ataupun Papua karena lokasi fasilitas operasi Terlapor I dan Terlapor II tidak berada di sana. --

e) Nilai Tender sebesar Rp 40 miliar s/d Rp 50 miliar ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan survei pasar yang memang disyaratkan oleh PTK 007 Revisi 3 untuk diadakan sebelum Tender.----------

Tidak tercipta persaingan semu karena proses Tender dilakukan secara terbuka, terbukti dengan adanya pengumuman Tender dalam Surat Kabar Republika tertanggal 25 Mei 2016, serta semua proses Tender dan klarifikasi dapat diikuti dan diterima oleh semua Peserta Tender:----------

a) Seluruh kriteria penilaian Tender, baik dari segi administratif, teknis, dan komersial berlaku bagi seluruh Peserta Tender; -------

b) Keanggotaan IMCA bukanlah satu-satunya syarat dalam Tender ini. Salah satu syarat yang memiliki bobot pertimbangan penting adalah HSE (*Health, Safety, Environment*). HSE merupakan salah satu bagian dari manajemen sebuah perusahaan untuk mencapai visi dan misi serta bagaimana perusahaan menjalankan opersionalnya. Terlapor I dan Terlapor II memiliki standar HSE tertentu dan khusus karena bidangnya dalam usaha minyak dan gas bumi. ----------

Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha tertentu, termasuk kepada Terlapor III yang mengikuti Tender, dengan cara melawan hukum, serta seluruh proses Tender dilakukan dengan transparan, adil dan terbuka.----------

Tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II telah sesuai dengan Work Program dan Budget (WP&B) yang diserahkan Terlapor I dan Terlapor II kepada SKK Migas. ----------

Sebelum kami menguraikan tanggapan kami terhadap LDP, perkenankan kami menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai Tender dan kronologis pelaksanaan Tender hingga ditunjuknya pemenang Tender. ----------

KRONOLOGIS TENDER----------

Dalam menyusun kronologis Tender ini, Terlapor I dan Terlapor II akan menjelaskan tahap demi tahap Tender dengan mengacu pada ketentuan PTK 007 Revisi 3, sebagaimana sesuai dengan dokumen Tender, yaitu pada Angka 1.1 ITB halaman 1.----------

PTK 007 Revisi 3 mengatur mengenai perencanaan pengadaan barang/jasa, mulai dari tahap persiapan daftar pengadaan oleh Kontraktor KKS sampai dengan penerbitan kontrak bagi pihak yang memenangkan tender. ----------

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan Kontraktor KKS. Untuk melaksanakan sebagian tugas pemeliharaan fasilitas operasi pada wilayah kerja Terlapor I dan Terlapor II, dikarenakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan Kontraktor KKS, maka diperlukan suatu tender----------

Terlapor I dan Terlapor II bersama-sama mengadakan Tender dengan lingkup pekerjaan pengadaan jasa penyelaman (*Diving services*), perawatan, perbaikan untuk pekerjaan bawah air dan juga inspeksi yang mendukung pemeliharaan fasilitas produksi di wilayah kerja Ketapang dan Kepodang. Selain itu, Peserta Tender diharapkan juga dapat menyediakan personel yang terampil dan kompeten serta dapat mengadakan peralatan kerja dan vessel yang bersifat *on-call* basis

selama 3 (tiga tahun) dengan opsi perpanjangan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: ----------

Nomor Tender	Judul Tender	Minimum TKDN	Golongan Usaha	Bidang	Sub Bidang
11204	*Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field*	35%	Usaha besar	Jasa Lainnya 02.f.03. Pelayanan Penyelaman (*Diving* Services) 02.1.12. Perawatan dan Perbaikan Peralatan	- 02.f.03.01– Pengelasan Bawah Air - 02.i.12.12– Peralatan Pekerjaan Bawah Air - 02.k.02– Pengujian Tak Merusak (*Non Destructive Testing*)

Tender untuk lingkup pekerjaan ini pada wilayah kerja tersebut baru pertama kali diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Tender yang diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut merupakan Tender yang bersifat terbuka atau umum, sebagaimana tercermin dalam Pengumuman Lelang Umum dalam Surat Kabar Republika tertanggal Rabu 25 Mei 2016.----------

Guna memudahkan Majelis Komisi yang Terhormat untuk dapat menilai bahwa Tender ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PTK 007 Revisi 3, ITB dan dokumen-dokumen Tender yang relevan, kami telah menyusun kronologis Tender sebagaimana kami uraikan di bawah ini: ----------

No	PTK 007 Revisi 3	ITB beserta dokumen lain	
	Proses tender dan Acuan Peraturan	Proses Tender	Dokumen
Rencana Tender: Tahap perencanaan Tender dimulai dari tanggal 29 April 2016			
1.	Angka 2.3.1. Bab II hal 14; Angka 2.5. Bab II hal 16; Angka 1.1. Bab V hal 45; Angka 2.1. Bab V hal 47.[1]	Rencana Tender ini <u>tidak memerlukan</u> persetujuan SKK Migas dikarenakan nilai Tender kurang dari Rp50 miliar.	Bagian *company estimate* halaman 2 Tender Plan (Resitting) tanggal 29 April 2016.
Penunjukan Panitia Tender			
2.	Angka 4.1.1. Bab VI halaman	Penunjukan Panitia Tender dengan	Bagian *technical evaluation team members* halaman 11

[1] Ringkasan Peraturan: Proses tender yang memerlukan persetujuan **SKK Migas** adalah untuk rencana tender dengan nilai paket tender **<u>lebih besar dari Rp50 miliar Rupiah</u>**.

	54. Angka 4.4. Bab V halaman 56 – 57.[2]	komposisi sebagai berikut: Tim evaluasi teknik a) Nizar Saputra; b) Sulton Amrullah; c) Herry Gunawan; d) Adry Indra Permadi/Budhi P; e) Febbi A. Viariawan; f) Octoria Suwandy; dan g) Christian Demoris. Tim evaluasi komersial a) Adry Indra Permadi/Budhi P; b) Nizar Saputra; c) Sulton Amrullah; dan d) Herry Gunawan.	Tender plan (Resitting) tanggal29 April 2016. Bagian *commercial evaluation team members* halaman 12 Tender plan (*Resitting*) tanggal 29 April 2016.
Pengumuman Tender – 25 Mei 2016			
3.	Angka 1.1. dan 1.2. Bab XI halaman 132. Angka 2.6. Bab V halaman 50.[3]	Pengumumanmengenai Tender terdapat pada Surat Kabar Republika. Dikarenakan rencana Tender ini tidak memerlukan persetujuan SKK Migas, maka pengumuman dapat langsung dilakukan oleh penyelenggara Tender.	Surat Kabar Republika, Rabu 25 Mei 2016.
TAHAP PRAKUALIFIKASI			
Registrasi Peserta Tender – 26 s/d 31 Mei 2016			
4.	Angka 2.3. Bab XI halaman 133.[4]	Periode registrasiTender dilaksanakan dari tanggal 26 – 31 Mei 2016. Proses registrasi Tender dilakukan di kantor PC Muriah Ltd. yang beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav.22 – 26 Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Total peserta yang mendaftarkan untuk proses Tender sampai tanggal 31 Mei 2016 sebanyak 14.	Ringkasan Proses Prakualifikasi.
Pengumpulan Dokumen Prakualifikasi – 3 Juni 2016			
5.		Dalam tahap pemasukan dokumen prakualifikasi pada tanggal 3 Juni 2016, pendaftar yang memasukan dokumen prakualifikasi hanya 10 peserta, yaitu: a) PT Seascape Survey Indonesia. b) PT Advanced Offshore Services.	*Log Bid. PQ Submission* tanggal 3 Juni 2016.

[2] Ringkasan Peraturan: Panitia Tender wajib menandatangani pakta integritas yang berlaku di lingkungan masing-masing Kontraktor KKS yang memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis.

[3] Ringkasan Peraturan: **Pengumuman pelelangan dilakukan** secara terbuka melalui **papan pengumuman resmi dan media cetak**, dan/atau laman (website) Kontraktor KKS dan/atau laman SKK Migas. Jangka waktu pengumuman pelelangan yang melalui papan pengumuman resmi dan laman Kontraktor KKS, yaitu minimal diumumkan tiga hari kerja.

[4] Ringkasan Peraturan: **Pelaksanaan pendaftaran** penyedia barang/jasa sesuai dengan **waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam pengumuman**. Pendaftaran terbuka untuk semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan golongan usaha dan memiliki bidang usaha dan sub-bidang usaha yang sesuai dengan lingkup pekerjaan paket tender yang akan dilelangkan.

		c) PT Patra Dinamika. d) PT DOF Subsea Indonesia. e) PT Cakrawala Amartha Jaya. f) PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (Consortium). g) PT Fabila Teknik Sejahtera. h) PT Aquamarine Divindo Inspection. i) PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Consortium). j) PT Jasalindo – PT Wama Trierindo (Consortium).	
Penilaian atas Prakualifikasi Pengumuman Peserta Tender atas Prakualifikasi – 12 Agustus 2016			
6.	Angka 3.1. – 3.3. dan 3.6. Bab XI halaman 134 – 136.[5]	Pada tanggal 12 Agustus 2016, Panitia Tender telah mengumumkan hasil penilaian kualifikasi melalui pemberitahuan secara tertulis untuk calon Peserta Tender yang lulus kualifikasi dan tidak lulus kualifikasi. Calon Peserta Tender yang lulus kualifikasi yaitu: a) PT Seascape Survey Indonesia; b) PT Advanced Offshore Services; c) PT Patra Dinamika; d) PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Consortium); e) PT Cakrawala Amartha Jaya; dan f) PT Aquamarine Divindo Inspection. Calon Peserta Tender yang tidak lulus kualifikasi yaitu: a) PT DOF Indonesia; b) PT Jasalindo – PT Warna Triendo (Consortium); c) PT Fabila Teknik Sejahtera; dan d) PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya (Consortium). Calon Peserta Tender yang tidak lulus kualifikasi diberi kesempatan untuk menyampaian keberatan dalam 2 hari kerja setelah	Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender. Facsimile message No.1035/PCML/TDR/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang pemberitahuan hasil kualifikasi. *PQ Evaluation Result.*

[5] Ringkasan Peraturan: Pelaksanaan kualifikasi adalah bagian dari proses pelelangan umum yang dilakukan terhadap dokumen klarifikasi yang disampaikan oleh calon peserta tender.Pelaksanaan evaluasi mengikuti ketentuan dan tata cara yang diatur dalam dokumen penilaian kualifikasi.

Panitia tender dapat melaksanakan rapat pemberian penjelasan mengenai isi tata cara penilaian dokumen kualifikasi. Calon peserta tender menyampaikan dokumen kualifikasi selambat-lambatnya pada tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam dokumen penilaian kualifikasi.

Panitia tender mengumumkan hasil penilaian kualifikasi di papan pengumuman resmi Kontraktor KKS dan/atau memberitahukan secara tertulis termasuk melalui surat elektronik kepada calon peserta tender tentang hasil penilaian kualifikasi termasuk alasan-alasannya serta masa penyampaian keberatan atas ketidaklulusan pada penilaian kualifikasi.

		pengumuman.	
Keberatan atas hasil penilaian kualifikasi – 16 Agustus 2016			
7.	Angka 3.4.2., 3.7.1., 3.7.2, 3.7.4. dan 3.7.5. Bab XI halaman 135 – 136.[6]	PT Samudera Biru Nusantara mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian kualifikasi tanggal 16 Agustus 2016. PT Samudera Biru Nusantara juga melampirkan data-data pendukung yang masih berlaku, yaitu: a) Fotokopi keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*; b) Fotokopi SKT Migas untuk bidang usaha jasa non konstruksi sub-bidang pekerjaan bawah air; dan c) HSE prosedur. PT Samudera Biru Nusantara juga mengirimkan surat No.044/SBN-MKT/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada PC Muriah Ltd untuk meminta pengunduran waktu untuk menyerahkan dokumen PQ dan HSE. Panitia Tender mengirimkan surat balasan No.1066/PCML/TDR/2016 tanggal 24 Agustus 2016 untuk memperpanjang waktu penyampaian ulang dokumen prakualifikasi sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 pukul 14.00. Panitia Tender mengirimkan surat No.1093/PCML/TDR/2016 tanggal 2 September 2016 ke PT Samudera Biru Nusantara perihal hasil evaluasi ulang dokumen kualifikasi. Hasil dari evaluasi ulang dokumen kualifikasi PT Samudera Biru Nusantara, yaitu tidak memenuhi syarat untuk di evaluasi lebih lanjut, karena HSE prosedur hanya disampaikan dalam bentuk Ms. Word dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan persetujuan untuk semua prosedur dan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti pengimplementasian dari prosedur HSE yang ada. <u>Dengan demikian, PT Samudera Biru Nusantara tidak lulus tahap prakualifikasi karena tidak</u>	Surat No.002-0816 tanggal 16 Agustus 2016 dari PT Samudera Biru Nusantara ke Panitia Tender tentang permohonan keberatan hasil kualifikasi. Surat No.044/SBN-MKT/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dari PT Samudera Biru Nusantara kepada PC Muriah Ltd tentang permohonan pengunduran waktu penyerahan dokumen PQ dan HSE. Surat No.1066/PCML/TDR/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dari Panitia Tender ke PT Samudera Biru Nusantara permintaan dokumen praqualifikasi. Surat No.1093/PCML/TDR/2016 tanggal 2 September 2016 dari Panitia Tender ke PT Samudera Biru Nusantara hasil evaluasi ulang dokumen kualifikasi.

[6] Ringkasan Peraturan: Keberatan diajukan secara tertulis kepada panitia tender. **Hanya dapat diajukan oleh calon peserta tender yang tidak lulus**.

Panitia tender dapat melakukan klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen penilaian kualifikasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. **Calon peserta tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh panitia tender** dan tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai *post bidding*. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh panitia tender.

Panitia tender mengundang calon peserta tender yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan/atau menanggapi secara tertulis keberatan tentang hasil penilaian kualifikasi paling lambat tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan dan/atau pertanyaan. Apabila keberatan yang disampaikan dinyatakan benar, maka panitia tender melakukan penilaian ulang kualifikasi dan mengumumkan hasilnya.

		memenuhi standar HSE.	
PROSES BIDDING / BID PROCESS			
Pengambilan dokumen Tender - 21 s/d 22 September 2016			
8.	Angka 3.10. Bab XI halaman 136. Angka 4.1. dan 4.2. Bab XI halaman 138.[7]	Undangan pengambilan dokumen penawaran Tender. Dokumen dapat diambil mulai tanggal 21 – 22 September 2016 (sampai dengan pukul 16.00) dengan menunjukan bukti bayar registrasi sebesar Rp500 ribu. Selain itu, terdapat jadwal untuk pre-bid meeting, penutupan penyerahan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran. Peserta yang mengambil dokumen penawaran adalah sebagai berikut: a) PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Consortium): 22 September 2016; b) PT Patra Dinamika: 22 September 2016; c) PT Seascape Survey Indonesia: 22 September 2016; d) PT Aquamarine Divindo Inspection: 22 September 2016; e) PT Advanced Offshore Services: 22 September 2016; dan f) PT Cakrawala Amartha Jaya: 22 September 2016.	Facsimile message No.1155/PCML/TDR/2016 dari Panitia Tender.[8]tentang undangan untuk mengambil dokumen penawaran.
Pemberian penjelasan oleh Panitia Tender – 26 September 2016			
9.	Angka 5.1., 5.3. – 5.8., 5.10. dan 5.12. Bab XI halaman 138 – 140.[9]	Panitia Tender mengundang Peserta Tender untuk menghadiri rapat penjelasan Tender. Peserta Tender yang tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap proses tender selanjutnya. Seluruh Peserta Tender hadir pada	Angka 2.1.1 halaman 18 ITB. Facsimile message No.1191/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2017 dari Panitia Tender ke Peserta Tender yang lulus kualifikasi tentang Berita Acara Rapat Penjelasan.

[7] Ringkasan Peraturan: Undangan pengambilan dokumen tender disampaikan secara tertulis dan/atau surat elektronik dan/atau media elektronik isi undangan harus memuat syarat, tempat, waktu pengambilan dokumen tender.

Pengambilan dokumen tender harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam undangan. Pengambilan setelah waktu yang ditetapkan tidak akan dilayani oleh panitia tender.

Peserta lelang dipungut biaya penggantian dokumen tender sebesar Rp250 ribu Rupiah untuk nilai perkiraan paket tender lebih besar dari Rp2,5 miliar Rupiah dan Rp500 ribu Rupiah untuk nilai perkiraan paket tender lebih besar dari Rp10 miliar Rupiah.

[8] Penerima: PT Seascape Survey Indonesia; PT Advanced Offshore Services; PT Patra Dinamika; PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Consortium); PT Cakrawala Amartha Jaya; dan PT Aquamarine Divindo Inspection,

[9] Ringkasan Peraturan: Wajib dilakukan untuk pengadaan jasa dengan nilai tender di atas Rp 5 miliar Rupiah. Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota panitia tender.Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen tender dan/atau perubahannya.

Hanya dapat dilakukan oleh peserta tender yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi dan yang mengambil dokumen tender. Apabila ada peserta tender yang tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan, peserta tender dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap proses tender selanjutnya.

Peserta tender dapat menanyakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan dokumen tender dan pelaksanaan tender secara tertulis paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditentukan oleh panitia tender.

Panitia tender harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta tender selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung satu hari kerja setelah penerimaan pertanyaan. **Hasil pemberian penjelasan terhadap dokumen tender dan keterangan lainnya, termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tender.**

Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen tender dan/atau penjelasan tambahan setelah rapat pemberian penjelasan, panitia tender menerbitkan addendum dokumen tender yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud, dan dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender yang harus diberitahukan kepada seluruh peserta tender.

		saat rapat penjelasan. Beberapa perubahan persyaratan dan informasi tambahan berdasarkan hasil rapat penjelasan Tender adalah: a) Klarifikasi atas dokumen penawaran paling lambat diajukan pada tanggal 27 September 2016 pukul 14.00. b) Perubahan dokumen penawaran akan diberitahukan paling lambat 3 hari kerja sebelum penutupan dokumen penawaran. c) Lokal konten yang diminta minimum 35%. d) Jaminan penawaran masih harus tetap berlaku 4 bulan sejak masa penyampaian dokumen penawaran. e) Jadwal penyampaian dokumen penawaran akan diadakan pada hari Jumat, 7 Oktober 2016 pukul 14.00 dan pembukaan dokumen penawaran akan diadakan pada hari Jumat, 7 Oktober 2016 pukul 14.30. f) Panitia Tender akan memperpanjang jangka waktu penyampaian dokumen penawaran tidak lebih cepat dari 5 hari kerja dari pengiriman klarifikasi yang diajukan oleh Peserta Tender. g) Kontraktor harus mematuhi persyaratan IMCA untuk seluruh aspek dalam pelaksanaan pekerjaan. h) Kontraktor harus mempersiapkan peralatan utama pada saat melakukan penyelaman dan pengoperasian ROV.	Exhibit III – Contractor Equipment & Personnel Specification. Halaman 12 dan halaman 13 Exhibit I – Special Provision and Scope of Work.

Periode protes			
10.	Angka 5.10., 6, 6.2.2., 6.3. dan 6.4.2 Bab XI halaman 139 – 140.[10]	Panitia Tender memperpanjang waktu penyampaian dokumen Tender menjadi hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 13.30 dan pembukaan dokumen Tender pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 14.00. Pada tanggal 7 Oktober 2016, Panitia Tender memberikan klarifikasi terhadap permintaan klarifikasi administrasi dan teknis dari Peserta Tender. Peserta Tender yang meminta klarifikasi kepada Panitia Tender, yaitu: a) PT Advanced Offshore Services; b) PT Patra Dinamika; c) PT Aquamarine Divindo Inspection; dan d) PT Seascape Surveys. Panitia Tender telah menjawab permintaan klarifikasi/protes Peserta Tender sehingga proses Tender dilanjutkan.	Facsimile message No.1186/PCML/TDR/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dari Panitia Tender mengenai klarifikasi tender I – perpanjangan waktu penutupan penawaran.[11] Facsimile message No.1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dari Panitia Tender mengenai klarifikasi tender II – klarifikasi administrasi dan teknis.[12]
Penyampaian dokumen penawaran – 19 Oktober 2016			
11.	Angka 7 Bab XI halaman 141.[13]	Hanya 5 Peserta Tender yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a) PT Patra Dinamika tanggal 19 Oktober 2016; b) PT Advanced Offshore Services tanggal 19 Oktober 2016; c) PT Seascape Survey Indonesia tanggal 19 Oktober 2016; d) PT Cakrawala Amartha Jaya tanggal 19 Oktober 2016; dan e) PT Aquamarine Divindo Inspection tanggal 19 Oktober 2016. Pemasukan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan pukul 13.30. Hanya 1 peserta yang tidak melakukan pengumpulan dokumen penawaran yaitu PT	Ringkasan Pemasukan Dokumen Penawaran. Facsimile Message No.1212/PCML/TDR/2016 tanggal 12 Oktober 2017 dari Panitia Tender mengenai klarifikasi tender III – klarifikasi administrasi.

[10] Ringkasan Peraturan: Setelah diterimanya dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukannya pemberian penjelasan, peserta tender diberikan waktu untuk dapat melakukan protes terhadap dokumen tender paling lambat 3 hari kerja sebelum hari terakhir masa pemasukan dokumen penawaran.

Protes dapat diajukan terhadap persyaratan dan kriteria yang mengarah kepada satu penyedia barang/jasa atau jenis barang/jasa tertentu. Panitia tender memberikan tanggapan atas protes secara tertulis atau mengadakan pertemuan klarifikasi selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung satu hari kerja setelah diterimanya surat protes.

Proses tender dilanjutkan apabila protes benar dan setelah panitia tender melakukan perbaikan atas dokumen tender serta menyampaikan kepada seluruh peserta tender.Hasil pemberian penjelasan terhadap dokumen tender dan keterangan lainnya, termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender.

[11] Penerima: PT bintang Subsea – PT Siguros Indonesia (Consortium); PT Patra Dinamika; PT Seascape Surveys; PT Aquamarine Divindo; PT Advance Offshore Services; dan PT Cakrawala Amartha Jaya.

[12] Penerima: PT bintang Subsea – PT Siguros Indonesia (Consortium); PT Patra Dinamika; PT Seascape Surveys; PT Aquamarine Divindo; PT Advance Offshore Services; dan PT Cakrawala Amartha Jaya.

[13] Ringkasan Peraturan: Dokumen penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan di dalam dokumen tender. Dokumen penawaran harus ditujukan kepada alamat yang ditentukan dan dengan cara yang diatur dalam dokumen tender.

		Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Consortium) sehingga dinyatakan gugur pada Tender ini.	
Pembukaan dokumen Penawaran Data Teknis (Sampul-I) – 19 Oktober 2016 Pukul 14.00			
12.	Angka 8.2. Bab XI halaman 141. Angka 4.2.2. dan 4.2.3. Bab VIII halaman 86 – 87.[14]	Dokumen penawaran dari 5 Peserta Tender dibuka di depan seluruh peserta dan Panitia Tender. Masing-masing Peserta Tender dapat memeriksa dokumen penawaran Peserta Tender lainnya. Panitia Tender memberikan kesempatan kepada wakil Peserta Tender yang hadir untuk dapat melihat penawaran dari Peserta Tender lainnya dan apabila terdapat hal-hal yang patut dicatat, maka akan dicatat dalam berita acara rapat pembukaan penawaran. Namun demikian, tidak ada hal-hal yang disampaikan oleh Peserta Tender yang patut dicatat dalam berita acara rapat pembukaan penawaran.	*Minutes of Bid Opening (first envelope).* *Attendance List – Bid Opening Meeting – 1st Envelope (technical).*
Evaluasi teknis – 9 Oktober s/d 5 Desember 2016			
13.	Angka 9.1., 9.2., 9.5.1. dan 9.5.13. Bab XI halaman 143, 144 dan 148.[15]	Peserta yang lulus evaluasi teknis adalah: a) PT Seascape Survey Indonesia; b) PT Advanced Offshore Services; c) PT Patra Dinamika; dan d) PT Aquamarine Divindo Inspection. PT Cakrawala Amartha Jaya tidak lulus evaluasi teknis. Mengacu pada dokumen *Technical Evaluation Report*, PT Cakrawala Amartha Jaya tidak lulus penawaran teknis dikarenakan kriteria peralatan yang tidak memadai dan dinilai berwarna merah.	Ringkasan evaluasi teknis tanggal 9 Oktober 2016 – 5 Desember 2016. Statement of Act tanggal 13 November 2016. *Technical Evaluation Report.* *Detailed Technical Evaluation Criteria.* *Facsimile Message* No.1408/PCML/TDR/2016 tanggal 13 Desember 2016 dari Panitia Tender tentang pemberitahuan Peserta Tender yang lulus dan tidak lulus.[16]

[14] Ringkasan Peraturan: Setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup, maka peserta tender tidak dapat lagi memberikan susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran. Apabila peserta tender melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran akan dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan, kecuali:

a) Pemenuhan kekurangan nilai materai, penambahan materai, penambahan tanggal materai, dan/atau surat penawaran sesuai ketentuan dalam dokumen tender. Penambahan tersebut dilakukan pada saat rapat pembukaan penawaran oleh wakil peserta tender bersangkutan yang hadir dalam pembukaan penawaran;

b) Penyampaian jaminan penawaran asli. Jaminan penawaran asli harus disampaikan pada saat sebelum waktu pembukaan dokumen penawaran harga; dan

c) Pemasukan, perubahan atau tambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis untuk tahap I (pertama) pada sistem dua tahap.

Atas usulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran sebagaimana dijelaskan di atas bukan merupakan dan tidak dikategorikan sebagai post bidding.

[15] Ringkasan Peraturan: Panitia tender melakukan evaluasi penawaran dari peserta tender berdasarkan pada ketentuan dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen tender. **Tidak ada ketentuan periode waktu bagi panitia tender untuk melakukan evaluasi penawaran**.

Pada evaluasi penawaran tahap-I (pertama) sistem dua tahap, panitia tender dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi teknis untuk memastikan penawaran peserta tender memenuhi persyaratan teknis yang tercantum pada dokumen tender.

Panitia tender juga dapat melakukan negosiasi teknis kepada penawaran yang telah memenuhi syarat teknis dan hasilnya dimungkinkan adanya perubahan materi perincian penawaran dan/atau penambahan dokumen yang mendukung penawaran teknis dan tidak dikategorikan sebagai post bidding. Panitia tender dalam melakukan evaluasi teknsi harus mengacu pada tata cara evaluasi dan kriteria/faktor-faktor yang ditetapkan pada dokumen tender.

Pada penyampaian dokumen penawaran sistem dua tahap, peserta tender yang penawarannya dinyatakan lulus evaluasi teknis (tahap-I) oleh panitia tender diundang untuk menyampaikan penawaran harga (tahap-II).

[16] Penerima: PT Patra Dinamika; PT Seascape Surveys; PT Aquamarine Divindo; PT Advanced Offshore Services; dan PT Cakrawala Amartha Jaya.

		Panitia Tender mengirimkan Facsimile Message No.1408/PCML/TDR/2016 tanggal 13 Desember 2016, untuk menginformasikan peserta yang tidak lulus dan lulus dalam tahap pembukaan dokumen penawaran pertama. Dalam hal ini, Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor II) melakukan survei lapangan kepada semua Peserta Tender yang memasukkan penawaran (yaitu, 5 perusahaan: PT Seascape Survey Indonesia, PT Advanced Offshore Services, PT Patra Dinamika, PT Aquamarine Divindo Inspection dan PT Cakrawala Amartha Jaya).	
Sanggahan dan tanggapan penilaian evaluasi teknis – 14 Desember 2016			
14.	Angka 14.2.2.1. dan 14.3.2. Bab XI halaman 173.[17]	PT Advanced Offshore Servicesdalam suratnya No.124/AOS-BID/RSP/X/2016 tanggal 14 Desember 2016 meminta Panitia Tender untuk melakukan klarifikasi terhadap Facsimile Message No.1408/PCML/TDR/2016 tanggal 13 Desember 2016 terkait pemberitahuan kepada Peserta Tender yang lulus dan tidak lulus dalam tahap evaluasi teknis. Di dalam suratnya, PT Advanced Offshore Services meminta klarifikasi atas: "*As per our knowledge, there are contractors mentioned in qualified contractors list is not member of IMCA in both Diving and ROV but only ROV.*" Mengacu pada surat permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh PT Advanced Offshore Services pada tanggal 14 Desember 2016, Panitia Tender telah melakukan klarifikasi atas pertanyaan terkait dengan PT Aquamarine Divindo Inspection. Menurut Panitia Tender, PT Aquamarine Divindo Inspection tidak menjadi anggota IMCA untuk kategori *Diving*, namun menjadi anggota IMCA untuk kategori ROV. Panitia Tender menjelaskan bahwa PT Aquamarine Divindo Inspection memiliki surat dukunganuntuk Tender ini dengan PT Samudera Biru Nusantara yang memiliki keanggotaan IMCA untuk kategori	Surat No.124/AOS-BID/RSP/X/2016 tanggal 14 Desember 2016 dari PT Advanced Offshore Services kepada Panitia Tender tentang tanggapan Peserta Tender atas pemberitahuan Peserta Tender yang lulus dan tidak lulus. Minutes of meeting tanggal 4 Januari 2017 antara panitia tender dan perwakilan PT Advanced Offshore Services.

[17] Ringkasan Peraturan: Sanggahan dengan sistem dua sampul dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi teknis, dimana harus diajukan dalam waktu 2 hari kerja terhitung setelah pengumuman hasil evaluasi teknis. Dalam menanggapi sanggahan, panitia tender dapat melakukan rapat klarifikasi dengan peserta tender yang melakukan sanggahan untuk menyampaikan tanggapan sanggahan.Hasil rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan.

		Diving. Sehingga, menurut Panitia Tender, PT Aquamarine Divindo Inspection mempunyai kedua dokumen tersebut. Setelah mendengarkan klarifikasi yang diberikan oleh Panitia Tender, PT Advanced Offshore Services menyetujui klarifikasi tersebut sesuai dengan berita acara pertemuan antara Panitia Tender dengan PT Advanced Offshore Services yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2017.	
Pembukaan dokumen Penawaran Harga (sampul-II) – 9 Januari 2017			
15.	Angka 8.6. dan 8.11.2. Bab XI halaman 142 dan 143. Angka 1.6. dan 1.7. Bab VII halaman 64[18]	Pembukaan sampul komersial tanggal 9 Januari 2017. Angka 3.4. *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* mengatur bahwa TKDN yang dipersyaratkan di dalam tender ini adalah sebesar 35%. Peserta yang diundang adalah: a) PT Seascape Survey Indonesia; b) PT Advanced Offshore Services; c) PT Patra Dinamika; dan d) PT Aquamarine Divindo Inspection. Berikut di bawah ini nilai penawaran, lokal konten dan jaminan penawaran untuk 4 bidders: PT Patra Dinamika a) Penawaran: Rp65.139.825.000. b) Lokal konten: 72,41%. c) Jaminan Penawaran: Rp350.000.000. PT Seascape Survey Indonesia a) Penawaran: Rp114.968.040.000. b) Lokal konten: 48,92%. c) Jaminan Penawaran: Rp950.000.000. PT Aquamarine Divindo Inspection a) Penawaran: Rp47.360.900.000. b) Lokal konten: 83,80%. c) Jaminan Penawaran:	Ringkasan Pembukaan Sampul Komersial dan Evaluasi Komersial. *Minutes of Bid Opening (second envelope)* tanggal 9 Januari 2017. *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016.

[18] Ringkasan Peraturan: Peserta tender yang penawarannya lulus evaluasi teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran tahap-II (kedua).

Panitia tender memeriksa keberadaan dan kelengkapan, dokumen-dokumen yang ada dalam dokumen penawaran sebagaimana diisyaratkan dalam dokumen tender. Hasilnya dicatat dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran.Keputusan bahwa dokumen penawaran memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ditetapkan pada tahap evaluasi penawaran.

Nilai total HPS/OE tidak bersifat rahasia setelah pembukaan penawaran harga.Rincian HPS/OE bersifat rahasia bagi Peserta Tender.Dalam hal pembukaan penawaran harga terdapat penawaran yang memenuhi syarat jumlah untuk dievaluasi lebih lanjut, maka nilai total HPS/OE dicantumkan dalam berita acara pembukaan Dokumen Tender.Panitia Tender memberitahukan nilai total HPS/OE kepada Peserta Tender.

		Rp338.000.000. PT Advanced Offshore Services a) Penawaran: Rp66.306.725.000. b) Lokal konten: 80%. c) Jaminan Penawaran: Rp435.000.000. Mengacu pada dokumen *Minutes of Bid Opening (Second Envelope)*, Panitia Tender mengumumkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) untuk Tender ini kepada Peserta Tender dengan nilai Rp49.465.485.000.	
Evaluasi komersial – 10 s/d 17 Januari 2017			
16.	Angka 9.6 Bab XI halaman 148 – 161.[19]	Evaluasi komersial dilakukan dari tanggal 10 – 17 Januari 2017.	Ringkasan Pembukaan Sampul Komersial dan Evaluasi Komersial.
Negosiasi harga penawaran – 18 Januari 2017			
17.	Angka 10.1.1., 10.3., 10.4.1.4. dan 10.4.2.1. Bab XI halaman 161 – 163.[20]	Mengacu pada dokumen *Price Negotiation Confirmation* yang diajukan oleh PT Aquamarine Divindo Inspection pada tanggal 18 Januari 2017 kepada Panitia Tender, PT Aquamarine Divindo Inspection sepakat untuk menurunkan harga penawaran Tender ini dari semula Rp47,360,900,000 menjadi Rp47,355,000,000. Setelah dilakukannya negosiasi dengan PT Aquamarine Divindo Inspection, PT Aquamarine Divindo Inspection diwajibkan untuk mengajukan perbaikan dokumen penawaran komersial paling lambat tanggal 19 Januari 2017. Pada tanggal 19 Januari 2017, PT Aquamarine Divindo Inspection mengirimkan surat No.009-A/AMDI-PKCL/I/2017 perihal penawaran harga kepada PC Ketapang II Ltd. Di dalam surat tersebut, PT Aquamarine Divindo Inspection sepakat untuk menawarkan harga jasa untuk Tender ini menjadi	*Price Negotiation Confirmation* tanggal 18 Januari 2017. Surat No.009-A/AMDI-PKCL/I/2017 tanggal 19 Januari 2017. Lampiran SC-12B Formulir Pernyataan TKDN Jasa.

[19] Ringkasan Peraturan: Evaluasi komersial dimulai dengan penelitian kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga dan dokumen pendukungnya atas dokumen penawaran harga dari peserta tender yang dinyatakan lulus oleh panitia tender.

[20] Ringkasan Peraturan: Upaya negosiasi dapat dilakukan apabila diketahui bahwa harga penawaran peringkat I lebih tinggi dibanding HPS/OE. Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau setinggi-tingginya sama dengan HPS/OE.

Sebelum negosiasi dilakukan, kepada seluruh **peserta tender yang akan dinegosiasi diberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi**.

Hasil dari metode negosiasi langsung harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh panitia tender dan wakil peserta tender yang dinegosiasi dan minimal memuat:

a) Metode negosiasi;

b) Harga penawaran semula dan harga penawaran final hasil negosiasi; dan

c) Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.

Penyampaian negosiasi secara tertulis dimana wakil peserta tender **menyampaikan dokumen penawaran harga secara tertulis, bertanggal, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan/pejabat** peserta tender yang memiliki kewenangan. **Dokumen penawaran tersebutdimasukkan dalam sampul tertutup dan pada waktu yang telah ditentukan**.Penyampaian penawaran hanya dapat dilakukan satu kali.

Negosiasi harga dilakukan pertama-tama kepada peserta tender peringkat I (pertama).**Bila harga penawaran hasil negosiasi telah di bawah atau sama dengan nilai HPS/OE, maka tidak dilakukan negosiasi kepada peserta tender yang lain.**

		Rp47,355,000,000. Selain itu, PT Aquamarine Divindo Inspection juga mengirimkan formulir pernyataan TKDN jasa yang telah diperbaiki sesuai hasil negosiasi dengan Panitia Tender.	
Pengumuman pemenang – 25 Januari 2017			
18.	Angka 13 Bab XI halaman 171.[21]	Pada tanggal 25 Januari 2017, Panitia Tender memberitahukan informasi calon pemenang Tender melalui *Facsimile* No.0068/PCML/TDR/2017. Calon pemenang dalam Tender ini adalah PT Aquamarine Divindo Inspection. Sebelum dilakukannya pengumuman calon pemenang, Panitia Tender melakukan meeting internal untuk proses Tender dan penentuan pemenang.	*Minutes of Meeting (TCEAR)* tanggal 20 Januari 2017. *Facsimile Message* No.0068/PCML/TDR/2017 tanggal 25 Januari 2017 dari Panitia Tender kepada: a) PT Patra Dinamika; b) PT Seascape Surveys; c) PT Aquamarine Divindo Inspection; dan d) PT Advanced Offshore Services, tentang pemberitahuan Peserta Tender yang lulus dan tidak lulus tahap penawaran komersial.
Sanggahan penilaian evaluasi komersial			
19.	Angka 14.1.2.2, 14.1.3.2 – 14.1.3.4. dan 14.2.2.2. Bab XI halaman 171 – 173.[22]	Tidak ada sanggahan yang diajukan oleh ketiga Peserta Tender lainnya.	
Penunjukan dan penerimaan penunjukan oleh pemenang Tender – 6 dan 7 Februari 2017			
20.	Angka 16.1. Bab XI halaman 177 – 178.[23]	Penunjukan PT Aquamarine Divindo Inspection sebagai pemenang Tender Petronas dengan nilai penawaran sebesar Rp47,355,000,000, lokal konten sebesar 83,80%, berlaku pada tanggal 6 Februari 2017. PT Aquamarine Divindo Inspection menerima dan menyetujui LoA pada tanggal 7 Februari 2017.	*Letter of Award* (LoA) tanggal 6 Februari 2017. *Acknowledgment Receipt and Acceptance* tanggal 7 Februari 2017.

Berdasarkan kronologis Tender di atas, jelas bahwa seluruh rangkaian proses Tender telah sesuai dengan PTK 007 Revisi 3 dan ITB beserta dokumen lain yang terdapat dalam Tender; ----------

[21] Ringkasan Peraturan: Keputusan tentang penetapan calon pemenang tender diumumkan melalui papan pengumuman Kontraktor KKS dan diberitahuan secara tertulis kepada seluruh peserta tender. Dalam pengumuman calon pemenang tender harus dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang tender masih bersifat belum final dan belum mengikat.Di dalam pengumuman calon pemenang tender harus dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi setiap peserta tender.

[22] Ringkasan Peraturan: Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap keputusan penetapan pemenang tender.

Materi sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:

a) Rekayasa proses pelelangan yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.

b) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia tender dan/atau pejabat berwenang.

c) Permintaan klarifikasi dan pertanyaan atas evaluasi oleh panitia tender.

Harus diajukan dalam waktu dua hari kerja, terhitung setelah tanggal pengumuman penetapan.

[23] Ringkasan Peraturan: Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tender diwajibkan menerima penunjukkan dalam waktu 3 hari kerja terhitung sejak tanggal surat penunjukan pemenang tender.

Majelis Komisi yang Terhormat, untuk selanjutnya kami sampaikan keberatan-keberatan Terlapor I dan Terlapor II untuk dari aspek formil berkenaan dengan penanganan penyelidikan dan perkara oleh Tim Investigator, sebagai berikut:----------

ASPEK FORMIL----------

LDP TIM INVESTIGATOR KURANG PIHAK ATAU TIDAK LENGKAP (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)----------

LDP Tim Investigator kurang pihak, dimana PT Samudera Biru Nusantara tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini karena Tim Investigator dalam LDP-nya berkali-kali menyangkutpautkan PT Samudera Biru Nusantara ke dalam dalih-dalih persekongkolannya, yaitu:----------

a) dalih terkait PT Samudera Biru Nusantara; ----------
b) dalih terkait Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera; ----------
c) dalih terkait surat dukungan Keanggotan IMCA dari PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III; ----------

Salah satu yang menjadi dalih Tim Investigator dalam LDP-nya adalah berkenaan dengan surat dukungan, dimana dinyatakan dalam LDP seolah-olah surat dukungan yang diberikan oleh PT Samudera Biru Nusantara "dikondisikan" oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor III, *quad non*, karenanya sudah sepatutnya PT Samudera Biru Nusantara sekarang juga dipanggil sebagai terlapor. --

Berdasarkan pendapat ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* Cetakan 16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 439, menyatakan bahwa: -

"*Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap.Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh".* ----------

Terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI selalu memutus secara konsisten bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Terlapor I dan Terlapor II kutip di bawah ini: ----------

Putusan Mahkamah Agung No.186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985; ----------

"Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknya berpendapat bahwa apabila pihak tergugat dianggap kurang, maka tuntutan dalam gugatan tidak dapat diselesaikan secara hukum." ----------

Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983; ----------

"Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknya berpendapat bahwa masalah kepemilikan penting untuk menentukan apakah suatu pihak harus ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat dalam gugatan perdata." ----------

Dengan demikian, tidak ditariknya PT Samudera Biru Nusantara sebagai Terlapor, jelas menunjukkan bahwa LDP Tim Investigator kurang pihak. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor I dan Terlapor II uraikan di atas serta dikuatkan oleh fakta-fakta, pendapat ahli serta putusan Mahkamah Agung di atas, maka mohon Majelis Komisi yang terhormat untuk menyatakan LDP tidak dapat diterima sehingga perkara aquo tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

ASPEK MATERIIL ----------

Terlapor I dan Terlapor II dengan ini menolak secara tegas dalih Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5/1999 pada Tender. ----------

Pasal 22 UU No.5/1999 menyatakan bahwa: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

Unsur-unsur utama dari Pasal 22 UU No.5/1999 adalah sebagai berikut: (i) bersekongkol, (ii) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; dan (iii) sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Akan dijelaskan di bawah ini bahwa tidak ada satu unsur pun yang terpenuhi.----------

Dari uraian yang diberikan dalam LDP, terlihat bahwa LDP hanya menitik beratkan pada masalah IMCA. Padahal kriteria atau syarat pemenangan Tender tidak melulu berdasarkan dari ada atau tidaknya keanggotaan IMCA, namun merupakan keseluruhan penilaian terhadap syarat administratif, syarat teknis dan syarat komersial;------

UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU No.5/1999 TIDAK TERPENUHI MAKA TERLAPOR I DAN TERLAPOR II TIDAK MELANGGAR UU PERSAINGAN USAHA----------

A.1 UNSUR "BERSEKONGKOL" TIDAK TERPENUHI----------

Terlapor I dan Terlapor II dengan tegas menolak dalih-dalih Tim Investigator pada Analisis Dugaan Pelanggaran, Bagian C halaman 29 – 36 LDP yang pada intinya mendalihkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/pengguna jasa/pemilik pekerjaan telah melakukan persekongkolan vertikal dengan memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang. Dalih-dalih Tim Investigator tersebut merupakan dalih yang mengada-ada dan tidak berdasar, sebagaimana akan Terlapor I dan Terlapor II uraikan di bawah ini. ----

Adapun yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Dalam LDP, tidak ada satu uraian pun yang didalihkan Tim Investigator mengenai siapa yang melakukan inisiatif atau bagaimana inisitiatif tersebut terbangun. Tim Investigator hanya menduga inisiatif tersebut muncul dari proses Tender.----------

Sebagaimana dapat dilihat dari tabel no.1 s/d no.20, halaman 8 – 19 dalam Tanggapan ini, seluruh kegiatan Tender telah dilaksanakan secara terbuka, transparan dan sesuai dengan amanat yang diberikan dalam PTK 007 Revisi 3. Dari tabel tersebut, secara jelas tampak bahwa dalam keseluruhan proses tersebut tidak dimungkinkan adanya kerja sama atau inisiatif satu pihak kepada pihak lainnya untuk memenangkan Tender; ----------

Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 tersebut disebutkan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a) Kerjasama antara dua pihak atau lebih----------
Dalam perkara aquo, tidak ada kerja sama antara Panitia Tender maupun dengan peserta Tender tertentu. ----------

b) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. ----------
Semua persyaratan mengenai keikutsertaan Tender, baik dari sisi administratif, teknis dan komersial telah dibuat secara tertulis oleh Panitia Tender dalam dokumen-dokumen persyaratan Tender terkait. Setiap klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Tender sehubungan dengan permintaan klarifikasi Peserta Tender telah dicantumkan dalam minuta rapat.Pembukaan Sampul I dan Sampul II dilakukan secara terbuka dimana setiap Peserta Tender yang hadir dapat melihat dokumen penawaran yang diserahkan oleh Peserta Tender lainnya. ----------

c) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.
Tidak ada peristiwa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, baik antara sesama Peserta Tender maupun antara Peserta Tender dengan Panitia Tender.----------

d) Menciptakan persaingan semu ----------
Tidak ada persaingan semu. Seluruh Peserta Tender bersaing secara adil dan transparan. Seluruh kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Panitia Tender, termasuk namun tidak terbatas pada: HSE, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), *Bid Bond* (Jaminan Penawaran), Keanggotaan IMCA, dan lain-lain berlaku untuk seluruh Peserta Tender. ----------

e) Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan----
Tidak ada persetujuan dan/atau pemberian fasilitas terjadinya persekongkolan. Sebagaimana diwajibkan dalam PTK 007 Revisi 3, Panitia Tender wajib menandatangani pakta integritas memuat sekurang-kurangnya kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan etika bisnis. Kepatuhan terhadap etika bisnis ini semakin dipertegas dalam ITB, angka 1.3.7 mengenai Etika Bisnis, sebagaimana dikutip:----------

> "*Karyawan Perusahaan akan dikenakan tindakan disiplin yang berat jika terlibat dalam suatu kasus yang melanggar etika bisnis ... dan oleh sebab itu para Peserta Tender dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi karyawan*

Perusahaan dan melanggar etika bisnis sebagaimana disebutkan di atas, agar hubungan usaha antara Peserta Tender dan Perusahaan menjadi sehat, efisien adil dan kompetitif. ...” --------

Hal ini berarti, seluruh penilaian dilakukan oleh Panitia Tender terhadap dokumen penawaran dari seluruh Peserta Tender adalah murni berdasarkan dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat-syarat keikutsertaan Tender.----------

f) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

Seluruh tindakan Panitia Tender dilakukan berdasarkan PTK 007 Revisi 3 dan ketentuan dalam ITB beserta dokumen lain yang terdapat dalam Tender. Tidak ada tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengatur pemenang Tender. ----------

g) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

Seluruh proses tender a quo dilakukan secara adil, berimbang dan tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu PTK 007 dan tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang bertentangan dengan PTK 007 maupun UU No.5/1999. Surat dukungan untuk suatu persyaratan tertentu berlaku bagi semua Peserta Tender.Syarat TKDN juga berlaku untuk seluruh peserta. ----------

Lebih lanjut, Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 menguraikan indikasi suatu persekongkolan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa tidak ada satu indikasi apapun yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dan sepanjang tahap-tahap Tender yang dapat dianggap sebagai suatu persekongkolan. ----------

No	Indikasi Persekongkolan Dalam Tender	Fakta
Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan		
1.	Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.	Tidak. Metode Tender dilakukan secara terbuka. Hal ini dapat dilihat dari Pengumuman Tender dalam Surat Kabar Republika, Rabu 25

		Mei 2016.
2.	Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.	Tidak. Terdapat 14 peserta yang mendaftar dan akhirnya 10 peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi.
3.	Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.	Tidak. 14 peserta yang melakukan registrasi dan 10 peserta (termasuk konsorsium) menyampaikan dokumen prakualifikasi. Dalam tahap Pembukaan Dokumen Penawaran (Sampul II), terdapat 4 Peserta yang lolos ke tahap ini.
4.	Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.	Tidak. Pendanaan Tender berasal dari Terlapor I dan Terlapor II dengan komposisi seimbang. Keempat Peserta Tender yang maju ke tahap Pembukaan Dokumen Penawaran (termasuk Terlapor III) tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II.
5.	Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.	Tidak. Nilai HPS/OE Tender adalah Rp49,465,485,000. Nilai jaminan lelang 1 – 3 %. Jaminan penawaran yang diserahkan lebih besar dari 3% tidak menyebabkan diskualifikasi.
6.	Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.	Tidak. Lokasi tempat Tender di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Waktu pelaksanaan lelang masih normal, tidak pernah pada proses Tender saat matahari belum terbit dan/atau matahari sudah terbenam. Seluruh pelaksanaan lelang dilakukan pada jam kerja yang wajar.
Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia		
7.	Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.	Tidak. Panitia Tender yang dipilih sudah memenuhi kualifikasi untuk dapat menjalankan Tender. Panitia Tender ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Terlapor I dan Terlapor II. Orang-orang yang ditunjuk memiliki sertifikasi PTK 007 sebagai panitia pengadaan. Penunjukan panitia tender pada Terlapor I dan Terlapor II dibuat bukan untuk tender tertentu

		saja, namun berlaku untuk semua proses tender. Panitia Tender juga menandatangani Pakta Integritas.
8.	Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.	Tidak. Seluruh Panitia Tender merupakan pegawai yang profesional dan tidak terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu. Berdasarkan peraturan internal dan *Code of Business Ethic Petronas*, apabila terdapat *conflict of interest* dalam proses tender maka panitia tender yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan digantikan dengan panitia tender lainnya.
9.	Susunan dan kinerja panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.	Tidak. Susunan, tugas dan kewenangan Panitia Tender ditentukan di dalam dokumen Rencana Tender. Untuk selanjutnya, seluruh berita acara proses Tender, baik itu pemberitahuan, tanggapan, ataupun klarifikasi, selalu mencantumkan susunan Panitia Tender.
Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang		
10.	Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.	Tidak. Tidak ada persyaratan yang membatasi pelaku usaha tertentu di dalam Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender dan ITB beserta dokumen lain yang terdapat dalam Tender.
11.	Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.	Tidak. Tidak ada kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu/Peserta Tender. Seluruh perubahan persyaratan atau kebutuhan dokumen hanya dibahas pada tahap pemberian penjelasan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender tanggal 26 September 2016.
12.	Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.	Tidak. Tidak ada kesepakatan di luar dari tahap pemberian penjelasan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender tanggal 26 September 2016.
13.	Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	Tidak. Tidak ada pelaku usaha yang diluluskan apabila tidak atau kurang memenuhi persyaratan.
14.	Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.	Tidak. Tidak ada perlakukan Panitia

		Tender yang memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pelaku usaha. Seluruh kriteria dan syarat Tender berlaku bagi seluruh Peserta Tender. Bagi calon Peserta Tender/Peserta Tender yang tidak lulus penilaian ataupun dokumen yang dipersyaratkan, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
15.	Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.	Tidak. Panitia Tender mengundang Peserta Tender untuk menghadiri rapat penjelasan Tender. Seluruh klarifikasi atas persyaratan setelah tahap prakualifikasi dibahas di dalam rapat penjelasan Tender, dibuat berita acara rapatnya dan diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender.
16.	Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).	Tidak. Tidak ada pemegang saham Petronas yang juga memiliki saham di perusahaan Peserta Tender dan tidak ada benturan kepentingan bagi Petronas dengan Peserta Tender atau pihak lain terkait Tender.
Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.		Mengacu pada halaman 14 dokumen Rencana Tender, seluruh proses pembuatan persyaratan Tender, termasuk dokumen dan kriteria pekerjaan: a) diajukan oleh Adry I. Permadi, Pegawai Senior Pengadaan; b) diperiksa oleh Manajer Pengadaan; c) didukung oleh Pudji Setyawan Subyantoro, Ketua Panitia Tender; d) disetujui untuk diajukan oleh Hendrayana, Wakil Presiden bagian Operasi; dan e) disetujui oleh Hazli Sham Kassim, Presiden Petronas.
Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender		
17.	Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.	Tidak. Mengacu pada surat kabar Republika tanggal 25 Mei 2016 mengenai pengumuman dan waktu pendaftaran Tender yaitu pada tanggal 26 – 31 Mei 2017.
18.	Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha	Tidak. Pengumuman yang dibuat oleh Panitia Tender di dalam pengumuman Tender dibuat

	tertentu.	secara lengkap dan sesuai dengan Angka 1.3 Bab XI halaman 132 PTK 007 Revisi 3. Dokumen Tender diberikan kepada seluruh Peserta Tender. Klarifikasi atas persyaratan Tender juga disampaikan kepada seluruh Peserta Tender.
19.	Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.	Tidak. Pengumuman Tender melalui Surat Kabar Republika, yang merupakan surat kabar yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1992. Surat Kabar Republika merupakan Koran nasional.
20.	Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.	Tidak. Pengumuman Tender telah mengikuti ukuran iklan yang wajar.
Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang		
21.	Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.	Seluruh dokumen Tender yang diberikan kepada Peserta Tender sama dan tidak ada perbedaan.
22.	Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.	Panitia Tender memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk mengambil dokumen Tender pada tanggal 21 – 22 September 2016.
23.	Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.	Tidak. Lokasi tempat Tender di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Jl. Letjen TB Simatupang merupakan salah satu jalan raya yang dikenal di Ibukota Jakarta. Gedung Talavera adalah gedung perkantoran yang besar dan memiliki tanda/*signage* yang besar.
24.	Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.	Tidak. Tidak pernah ada pemindahan tempat pengambilan dokumen. Pengambilan dokumen Tender selalu berlokasi di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang		
25.	Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.	Tidak. HPS/OE yang ditentukan di Tender hanya senilai Rp 49,465,485,000 sebagaimana mengacu pada dokumen Rencana Tender dan Summary of OE.

26.	Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.	Tidak. HPS/OE diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender pada saat pembukaan sampul penawaran harga. Besaran nilai HPS/OE tersebut dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga.
27.	Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.	Tidak. Mengacu pada dokumen Summary of OE, perhitungan HPS/OE dilakukan secara jelas dan wajar.
Indikasi persekongkolan pada saat tender atau open house lelang		
28.	Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.	Seluruh informasi terkait pekerjaan Tender telah diberitahukan di dalam tahap pengumuman Tender dan tahap pemberian penjelasan oleh Panitia Tender pada tanggal 26 September 2016.
29.	Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.	Tidak. Panitia Tender telah menanggapi permintaan klarifikasi oleh Peserta Tender terkait beberapa ketentuan yang ada di dokumen Tender dan sesuai Angka 6.4.2 Bab XI halaman 140 PTK 007 Revisi 3, proses Tender dilanjutkan setelah Panitia Tender melakukan klarifikasi atas dokumen Tender serta menyampaikan kepada seluruh Peserta Tender.
30.	Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.	Tidak. Panitia Tender selalu mengundang ataupun memberikan informasi terkait seluruh klarifikasi dan/atau informasi terkait dengan dokumen Tender.
31.	Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan panitia.	Tidak. Seluruh pertemuan antara Panitia Tender dan Peserta Tender selalu dibuatkan berita acara dan dikirimkan kepada Peserta Tender.
Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang		
32.	Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.	Tidak ada. Seluruh dokumen penawaran dari Peserta Tender diberikan sebelum hari penutupan penyampaian dokumen Tender dan tidak ada Peserta Tender yang mengajukan dokumen penawaran ataupun Panitia Tender yang menerima setelah masa penutupan penyampaian dokumen penawaran Tender.

33.	Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.	Tidak ada. Seluruh dokumen penawaran Tender yang diterima oleh Panitia Tender telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat di Angka 2.4 bagian 2 Proses Tender dokumen ITB.
34.	Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.	Tidak ada. Hanya Peserta Tender yang lulus tahap proses kualifikasi yang dapat memberikan penawaran/memasukan dokumen penawaran.
35.	Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.	Tidak ada. HPS/OE tidak diubah sejak pertama kali dinyatakan di dalam dokumen Rencana Tender.
36.	Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.	Tidak ada pemindahan lokasi. Lokasi penyerahan dokumen Tender hanya di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang		
37.	Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.	Tidak. Tender untuk jenis pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II.
38.	Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.	Tidak berlaku dalam hal ini karena Tender ini baru pertama kali diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II.
39.	Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.	Tidak. Keempat Peserta Tender yang telah lolos tahap evaluasi teknis memasukkan harga yang berbeda-beda. Hal ini dapat dibuktikan pada dokumen Minutes of Bid Opening (*second envelope*) tanggal 9 Januari 2017.
40.	Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.	Tidak. Lihat penjelasan di atas bahwa Tender untuk pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II.
41.	Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.	Tidak ada keistimewaan untuk Peserta Tender tertentu. Seluruh Peserta Tender diberikan hak dan informasi yang sama untuk dapat memasukan dokumen penawaran.
42.	Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.	Tidak ada dokumen penawaran yang mirip. Mengacu ke aturan PTK 007 Revisi 3, ada beberapa dokumen yang harus disampaikan oleh Peserta Tender. Dokumen-

		dokumen yang dipersyaratkan di dalam dokumen Tender selain mengacu pada ketentuan PTK 007 Revisi 3, juga yang mendukung kegiatan pekerjaan Tender. Setiap Peserta Tender secara independen memasukkan dokumen penawarannya.
43.	Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia.	Tidak ada dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia. Seluruh dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Tender tidak dibuka sampai dengan tahapannya, yaitu dokumen penawaran teknis yang dibuka pada saat pembukaan sampul pertama dan dokumen penawaran komersial dibuka pada saat pembukaan sampul kedua.
44.	Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.	Tidak. Proses evaluasi teknis dan komersial dilakukan di kantor Terlapor I dan Terlapor II yang berlokasi di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
45.	Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.	Tidak. Tender untuk jenis pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II.
Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang		
46.	Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.	Tidak. Pengumuman telah dilakukan oleh Panitia Tender melalui pemberitahuan melalui faksimili kepada seluruh Peserta Tender yang lolos *technical evaluation.* Dengan demikian, Peserta Tender yang pada akhirnya tidak ditunjuk sebagai Pemenang Tender juga akan mengetahui siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang tidak.
47.	Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.	Tidak. Panitia Tender mengumumkan calon pemenang Tender tanggal 25 Januari 2017 dan tidak ada perubahan atau penundaan terkait jadwal pengumuman tersebut.
48.	Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.	Tidak. Tender untuk jenis pekerjaan ini baru pertama kali diadakan. Peserta Tender yang memenangkan Tender adalah

		Peserta Tender yang sesuai dengan persyaratan Tender dan telah lulus seluruh tahapan proses Tender.
49.	Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.	Tidak. Tender untuk jenis pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II.
50.	Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.	Mengingat harga terendah yang ditawarkan oleh salah satu peserta tender masih di atas dibanding dengan 80% nilai HPS/OE, maka harga penawaran tersebut masih dibilang wajar. Mengacu pada Angka 9.6.10.1 Bab XI halaman 154 – 155 PTK 007 Revisi 3, panitia tender baru melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada peserta tender apabila diketahui nilai penawaran yang diajukan lebih rendah dibanding dengan 80% nilai HPS/OE.
Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan		
51.	Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang.	Panitia menanggapi setiap sanggahan (apabila ada). Dari tahap prakualifikasi – penentuan pemenang Tender, Panitia Tender selalu menanggapi sanggahan yang diajukan oleh Peserta Tender dan seluruh tanggapan/klarifikasi dari Panitia Tender dikirimkan melalui faksimili kepada seluruh Peserta Tender.
52.	Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.	Tidak. Hasil evaluasi Tender selalu diberitahukan melalui faksimili yang dikirimkan kepada seluruh Peserta Tender. Hasil evaluasi teknis maupun komersial dinyatakan secara singkat di dalam faksimili yang dikirimkan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender.
Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak		
53.	Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.	Tidak. Surat penunjukan pemenang Tender/LoA baru dikeluarkan setelah adanya calon Pemenang Tender, yaitu PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III). Pengumuman Tender diberitahukan pada tanggal 25 Januari 2017.Surat penunjukan pemenang Tender diserahkan pada tanggal 6 Februari 2017.

54.	Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Tidak. Setelah pengumuman calon pemenang Tender, Panitia menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender kepada Peserta Tender pada tanggal 6 Februari 2017.
55.	Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.	Lengkap. Tidak ada kriteria surat penunjukan pemenang Tender, baik itu di PTK 007 Revisi 3 maupun di dokumen ITB beserta dokumen lain yang terdapat dalam Tender. Penunjukan pemenang Tender telah lengkap sesuai dengan persyaratan Tender yang terdapat di PTK 007 Revisi 3, ITB dan perubahannya.
56.	Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.	Konsep kontrak dibuat secara detail dan komprehensif, sesuai dengan seluruh ketentuan, persyaratan dan kriteria yang terdapat di dalam dokumen penawaran Tender.

Terkait dengan ketiga Kriteria Evaluasi Teknis dalam Dokumen Perencanaan Tender----------

1.2 Dalam angka 10 halaman 13 dan 14 LDP pada bagian Fakta-Fakta, Tim Investigator mendalihkan mengenai Kriteria Evaluasi Teknis dalam Dokumen Perencanaan Tender yang meliputi pengalaman perusahaan, sertifikasi dan *workshop criteria.* Dalih-dalih tersebut tidak tepat, tidak benar dan tidak memiliki dasar, sebagaimana akan Terlapor I dan Terlapor II uraikan di bawah ini.----------

1.3 Interpretasi Tim Investigator terhadap syarat pengalaman Peserta Tender bahwa Peserta Tender diharuskan memiliki pengalaman di bidang *Underwater service* minimum 7 (*tujuh*) tahun untuk pekerjaan sejenis di Indonesia adalah salah. PTK 007 Revisi 3 dan dokumen-dokumen persyaratan Tender tidak pernah mensyaratkan total pengalaman minimum 7 (*tujuh*) tahun, melainkan, mempunyai pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis paling tidak 1 (*satu*) kali dalam kurun waktu 7 (*tujuh*) tahun terakhir. ----------

LDP Tim Investigator	Dokumen Tender Terlapor I dan Terlapor II
Angka 10 point 1: *"1. Pengalaman perusahaan: <u>harus memiliki pengalaman</u> di bidang Underwater service (Diving and ROV inspection) <u>minimum 7 (tujuh) tahun</u> untuk pekerjaan sejenis di Indonesia."*	Angka 7.0 halaman 10 Dokumen Tender Plan (*Resitting*) *"Bidder's selection is based on local companies which have experience in prepare Underwater services within 7 years doing similar work in Indonesia"*
	Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender Angka 3 halaman 7: *"<u>3. Persyaratan Teknis</u>* *PEMOHON wajib menyediakan dan menyerahkan dokumen-dokumen berikut:* - *Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis <u>sekurang-kurangnya satu kalidalam</u> kurun waktu <u>tujuh tahun terakhir</u> pada subbidang usaha yang sesuai dengan paket tender, di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota konsorsium ataupun sebagai subkontraktor."*
	PTK 007 Revisi 3
	Angka 2.4.6. Bab VIII halaman 73: *"2.4.6. Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis <u>sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir</u> pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun diluar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai subkontraktor dan memiliki nilai pengalaman sesuai ketentuan dan yang dipersyaratkan pada angka 2.4.7."*

Terkait dalih Tim Investigator sehubungan dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company.*----------

1.4 Tim Investigator dalam Fakta-Fakta halaman 14 dan Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf a halaman 30-31 LDP, pada intinya mendalihkan bahwa persyaratan Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4 yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company*, merupakan tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor III agar dapat mengikuti tender dalam perkara aquo;--

1.5 Persyaratan di atas bertujuan untuk "membuka" persyaratan IMCA menjadi lebih luas. Akan berbeda efeknya apabila Tender sejak awal dan secara langsung sudah mensyaratkan keanggotaan IMCA hanya untuk kategori tertentu. Hal ini akan lebih mempersempit kesempatan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengikuti Tender. ----------

1.6 *Bid Document Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang* Tender No.11204 yang memuat *Exhibit I*, item 2.4.4 tersebut telah selesai disusun oleh Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor II) sebelum Pengumuman Tender (25 Mei 2016), yaitu pada saat proses pengajuan Rencana Tender (*Tender Plan*) kepada Panitia Tender. Hal ini berarti, Terlapor I dan Terlapor II tidak serta merta mengubah ketentuan dalam dokumen tersebut untuk secara spesifik memasukan Exhibit I, item 2.4.4 guna mengistimewakan Terlapor III semata. ----------

1.7 Fakta bahwa Bid Document mensyaratkan "*The Contractor is to be and IMCA member company"* dan Terlapor III sedang mengurus pendaftaran keanggotaannya untuk menjadi anggota IMCA kategori *Diving* dan sudah menjadi anggota IMCA untuk kategori ROV sehingga Terlapor III diloloskan untuk maju ke tahap berikutnya adalah suatu hal yang telah sesuai dengan persyaratan dalam Tender. ----------

1.8 Memiliki keanggotaan IMCA tidak serta merta menjadikan suatu peserta Tender sebagai pemenang Tender karena setiap peserta masih harus melalui tahap seleksi berikutnya. ----------

1.9 Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dalih-dalih Tim Investigator tentang dugaan bahwa dimasukkannya syarat "*The Contractor is to be and IMCA member company"* adalah untuk memfasilitasi Terlapor III merupakan dalih yang tidak benar dan tidak berdasar. ----------

Terkait dalih Tim Investigator sehubungan dengan persyaratan *workshop* atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services.* ----------

1.10 Dalih-dalih Tim Investigator dalam Fakta-Fakta Angka 10 Halaman 13-15 LDP dan Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf b halaman 31-32 LDP merupakan dalih-dalih yang tidak benar dan tidak berdasar. Adapun Tim Investigator dalam dalih tersebut menyatakan bahwa terdapat syarat bagi Peserta Tender untuk "memiliki workshop" atau "kantor perwakilan" yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services.* Tidak ada syarat dalam dokumen Tender yang secara spesifik mensyaratkan agar Peserta Tender memiliki "*workshop*" atau "kantor perwakilan" di sekitar Jawa Timur. ----------

1.11 Tim Investigator menggunakan dalih di atas beserta dalih-dalih terkait perubahan Pemberitahuan Mobilisasi yang semula 3 (*tiga*) hari kalender menjadi 14 (*empat belas*) hari kalender, sebagai dalih-dalih untuk membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi Terlapor III agar dapat memenangkan Tender karena Terlapor III memiliki kantor di Sidoarjo, Jawa Timur. ----------

Pemberitahuan Mobilisasi ----------

1.12 Perubahan Pemberitahuan Mobilisasi dari 3 (*tiga*) menjadi 14 (*empat belas*) hari dilakukan oleh Panitia Tender berdasarkan permintaan dari Peserta Tender dan perubahan ini telah

diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender dan karenanya berlaku bagi seluruh Peserta Tender:----------

a) *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting for Provision of Underwater Services for Muriah and Ketapang Tender No.11024*, angka 5.1 halaman 4, untuk pertemuan tanggal 26 September 2016: ----------

"*5.1. COMPANY will revise Exibit-I [sic] with propose detail personnel and mob-demob for each personnel and equipment. Other revision also made to Exhibit-I and III as attached. This revised exhibits shall supersede the previous Exhibit I, II, and III."* ----------

b) *Revision-01* dari *Exhibit I Special Provision and Scope of Work Provision of Underwater Services for Ketapang Field and Kepodang Field*, pada halaman 5:----------

"*Mobilization Notice* ----------

COMPANY shall give CONTRACTOR the following advance notice for mobilization----------

Fourteen (14) calendar days for CONTRACTOR Personnel."-

c) *Tender Clarification#02 Administrative And Technical Clarification* tanggal 7 Oktober 2016. ----------

Peserta Tender	Pertanyaan	Klarifikasi
PT Patra Dinamika	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 Sept 2016. Pemberitahuan min 3 hari kalender untuk call out services diganti menjadi 7 hari kalender tidak termasuk kapal	Lihat Exhibit III Rev – 14 Hari Kalender.
PT Seascape	Mobilisation Notice – It is stated that COMPANY shall give CONTRACTOR in advance notice for mobilization Seven (7) daus calendar days for CONTACTOR Personnel. …	Fourteen (14) calendar days.

Tidak ada peryaratan untuk memiliki workshop atau kantor perwakilan di Jawa Timur----------

1.13 Adalah fakta bahwa tidak ada persyaratan dalam dokumen Tender, yang secara spesifik menentukan hal terkait ketentuan

lokasi "*workshop*" ataupun "kantor perwakilan". Persyaratan yang ada dalam dokumen Tender terkait adalah sebagai berikut: ----------

Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender – Bagian A	
Kutipan	Terjemahan Bahasa Indonesia (tidak resmi)
Operating Area *COMPANY's Facilities:* *Production/Operation Facilities at Offshore site are Bukit Tua and Muriah area.*	Wilayah Operasi Fasilitas-fasilitas PERUSAHAAN: Fasilitas-fasilitas Produksi/Operasi pada lokasi Lepas Pantai terletak di wilayah Bukit Tua dan Muriah.
CONTRACTOR's Point of Origin *CONTRACTOR Point of Origin for Company operations is in within Surabaya area, East Java.*	Tempat Asal Kontraktor Tempat Asal Kontraktor untuk operasi-operasi Perusahaan terletak di wilayah Surabaya, Jawa Timur.
Work Site(s) *CONTRACTOR, upon issuance of Work Order by COMPANY shall perform the work and the work may, as Company so directs be perform on the following location:* *COMPANY's Facilities:* *Production/Operation Offshore sites are Bukit Tua and Muriah area.*	Lokasi(-lokasi) Kerja KONTRAKTOR, setelah dikeluarkannya Perintah Kerja oleh PERUSAHAAN, harus melaksanakan pekerjaan, dan pekerjaan tersebut dapat, sebagaimana diperintahkan oleh Perusahaan, dilaksanakan di lokasi berikut ini: Fasilitas-fasilitas PERUSAHAAN: Lokasi-lokasi Produksi/Operasi Lepas Pantai terletak di wilayah Bukit Tua dan Muriah.
Point of Delivery *The Company Equipment Point of Delivery for the Contractor's Equipment/Special Tools and Consumable is at Supply Base.* *The Contractor must cover all costs associated with the transportation of the CONTRACTOR's Equipment from their Point of Origin to the Point of Delivery and vice versa. All transportation costs of the CONTRACTOR's Equipment will be under CONTRACTOR's account.*	Titik Penyerahan Titik Penyerahan Peralatan Perusahaan, [dalam hal ini] untuk Peralatan/Perlengkapan dan Barang Habis Pakai Khusus Kontraktor, terletak di Pusat Logistik. Kontaktor harus membayar seluruh biaya yang terkait dengan pengangkutan Peralatan KONTRAKTOR dari dan ke Tempat Asalnya. Seluruh biaya pengangkutan Peralatan KONTRAKTOR akan menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
Bid Document – Exhibit I *Special Provision and Scope of Work*	
Kutipan	Terjemahan Bahasa Indonesia (tidak resmi)
Operating Area *COMPANY's Facilities:* *Production/Operation Facilities at Offshore site are Bukit Tua and Muriah area.*	Wilayah Operasi Fasilitas-fasilitas PERUSAHAAN: Fasilitas-fasilitas Produksi/Operasi pada lokasi Lepas Pantai terletak di wilayah Bukit Tua dan Muriah.
CONTRACTOR's Point of Origin *CONTRACTOR Point of Origin for Company operations is in within Surabaya area, East Java.*	Tempat Asal Kontraktor Tempat Asal Kontraktor untuk operasi-operasi Perusahaan terletak di wilayah Surabaya, Jawa Timur.
Work Site(s) *COMPANY's Facilities:* *Production/Operation Offshore sites are Bukit Tua and Muriah area.*	Lokasi(-lokasi) Kerja Fasilitas-fasilitas PERUSAHAAN: Lokasi-lokasi Produksi/Operasi Lepas Pantai terletak di wilayah Bukit Tua dan Muriah.
Point of Delivery *The Company Equipment Point of Delivery for the Contractor's Equipment/Special Tools and*	Titik Penyerahan Titik Penyerahan Peralatan Perusahaan, [dalam hal ini] untuk Peralatan/Perlengkapan dan

Consumable is at Supply Base. The Contractor must cover all costs associated with the transportation of the CONTRACTOR's Equipment from their Point of Origin to the Point of Delivery and vice versa. All transportation costs of the CONTRACTOR's Equipment will be under CONTRACTOR's account.	Barang Habis Pakai Khusus Kontraktor, terletak di Pusat Logistik. Kontaktor harus membayar seluruh biaya yang terkait dengan pengangkutan Peralatan KONTRAKTOR dari dan ke Tempat Asalnya. Seluruh biaya pengangkutan Peralatan KONTRAKTOR akan menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
Mobilization Notice *Company shall give CONTRACTOR for the following advance notice for mobilization:* • *Fourteen (14) calendar days for CONTRACTOR Personnel.*	Pemberitahuan Mobilisasi Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada KONTRAKTOR mengenai mobilisasi, dengan jangka waktu: • Empat belas (14) hari kalender untuk pekerja KONTRAKTOR.
Personnel Point of Hire *Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. The CONTRACTOR shall provide the transportation for the CONTRACTOR personnel from CONTRACTOR Point of Origin to Personnel Point of Hire and vice versa. However, COMPANY will provide the transport for the CONTRACTOR's personnel from Personnel Point of Hire to the Work Site and vice versa.*	Titik Perekrutan Pekerja Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. KONTRAKTOR harus menyediakan transportasi untuk pekerja KONTRAKTOR dari Tempat Asal KONTRAKTOR menuju Titik Perekrutan Pekerja dan sebaliknya. Namun, PERUSAHAAN akan menyediakan transportasi bagi pekerja KONTRAKTOR dari Titik Perekrutan Pekerja menuju Lokasi Kerja dan sebaliknya.
Contract Form dalam *Bid Document*	
Kutipan Bahasa Inggris	Kutipan Bahasa Indonesia
Mobilisation Site *The site designated in EXHIBIT I – "Special provision & Scope of Work" at which CONTRACTOR shall assemble its personnel and/or its EQUIPMENT to be transferred the Work Site(s).*	Lokasi Mobilisasi Lokasi yang ditentukan dalam LAMPIRAN I – "KETENTUAN KHUSUS & LINGKUP PEKERJAAN" tempat Peralatan KONTRAKTOR akan dikirimkan oleh KONTRAKTOR untuk pemuatan dan pengangkutan ke Lokasi (-Lokasi) Kerja oleh PERUSAHAAN.
Point of Hire *The location specified by COMPANY in EXHIBIT I – "SPECIAL PROVISION & SCOPE OF WORK" at which CONTRACTOR shall assemble its personnel and/or its EQUIPMENT to be transferred the Work Site(s).*	Titik Keberangkatan Lokasi yang ditentukan oleh PERUSAHAAN dalam LAMPIRAN I – "KETENTUAN KHUSUS & LINGKUP PEKERJAAN" di mana KONTRAKTOR harus mengumpulkan personelnya dan/atau PERALATANnya untuk diberangkatkan ke Lokasi (-Lokasi) Kerja.
Point of Origin *The location from where the CONTRACTOR personnel or Equipment are to be mobilised from and demobilised to, or such other locations agreed to by COMPANY.*	Tempat Asal Lokasi dari mana personil atau Peralatan KONTRAKTOR harus dimobilisasi dari dan didemobilisasi ke atau lokasi lain yang disetujui oleh PERUSAHAAN.
Point of Delivery *The location from where the CONTRACTOR Equipment are to be mobilised from and demobilised to as stipulated in EXHIBIT I "SPECIAL PROVISION & SCOPE OF WORK".*	Titik Penyerahan Lokasi dari mana Peralatan Kontraktor harus dimobilisasi dari dan didemobilisasi kea tau lokasi ditentukan dalam LAMPIRAN I – "KETENTUAN KHUSUS & LINGKUP PEKERJAAN".

1.14 Ketentuan terkait lokasi Titik Keberangkatan (Point of Hire), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) dibuat dengan memperhitungkan lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender. Adalah fakta bahwa lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender ini adalah di dalam wilayah fasilitas Terlapor I dan Terlapor II, yaitu Petronas *Shore Base* yang merupakan Fasilitias Produksi/Operasi di ORF Surabaya dan *offshore site* Bukit Tua dan Muriah di Jawa Timur. ----------

1.15 Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, karena Tender dilaksanakan untuk keperluan perawatan fasilitas Terlapor I dan Terlapor II yang berada pada Tempat Asal (*Point of Origin*) di Surabaya, Jawa Timur, tentunya Titik Keberangkatan (*Point of Hire*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) berada di dalam wilayah atau di sekitar wilayah Tempat Asal (*Point of Origin*). Dalam hal ini, maka sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin apabila suatu daerah di Kalimantan, Sulawesi ataupun di Papua menjadi Tempat Asal (*Point of Origin*), Titik Keberangkatan (*Point of Hire*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*);----------

1.16 Apabila penetapan lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) dalam ITB dan lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender dihubungkan, terdapat kesamaan, yaitu seluruh lokasi berada di Jawa Timur. Oleh karena itu, dapat diketahui fakta bahwa penetapan-penetapan lokasi tersebut seluruhnya didasarkan oleh lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender ini. Bahkan apabila melihat riwayat tender-tender lain yang pernah diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II, hampir seluruh lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) ditentukan di sekitar wilayah Jawa Timur. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Terlapor I dan Terlapor II uraikan di atas, terbukti bahwa tidak terdapat kesengajaan ataupun tindakan memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III; --

Terkait dalih Tim Investigator mengenai evaluasi persyaratan keanggotaan IMCA dalam Tender oleh Terlapor I dan Terlapor II--------

1.17 Tim Investigator dalam Fakta-Fakta halaman 16 dan 17 LDP dan Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf c halaman 32-33 LDP pada intinya mendalihkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menggugurkan Terlapor III dan telah membiarkan Terlapor III untuk menjadi pemenang dalam Tender ini dengan mengingat persyaratan Tender mengenai kepemilikan keanggotaan IMCA kategori *Diving* dan ROV.-------

1.18 Dalih-dalih tersebut merupakan dalih yang tidak benar dan tidak berdasar karena Terlapor III telah memenuhi seluruh persyaratan Tender baik dalam Tahap Prakualifikasi maupun sampai Penunjukkan Pemenang Tender, sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor I dan Terlapor II untuk menggugurkan Terlapor III----------

Persyaratan yang bersifat menggugurkan ----------

1.19 Tim Investigator dalam LDP halaman 32 mendalihkan bahwa persyaratan keanggotaan IMCA merupakan syarat yang bersifat kumulatif dan menggugurkan. Dalih Tim Investigator ini salah. Keanggotaan IMCA bukan merupakan satu-satunya syarat yang bersifat menggugurkan. Terdapat syarat-syarat administratif dan teknis lainnya yang juga bersifat menggugurkan dan menentukan, antara lain:----------

No	Dokumen	Persyaratan
1.	Angka 3 Halaman 7 - Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender	Melampirkan salinan sertifikat ISO 9001 "*Quality Assurance*"
2.	Angka 4 Halaman 7 – Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender	Persyaratan HSE
3.	Bid Document – Exhibit III *Contractor Equipment & Personnel Specification*	Wajib menyediakan peralatan yang memadai sesuai dengan spesifikasi dan personal yang memenuhi persyaratan. 1. *Personnel.* *To be furnished by Contractor* • *Failure to provide the required demonstrable qualifications*

		and experience will be grounds for disqualification; • *All contactor personnel proposed here under shall be technically competent, fully qualified, certified and trained to international oilfield standards to perform the Services*. 2. *Equipment*. • *Diving* equipment • ROV, 2 *type of* ROV *Inspection* ROV and *Work Class* ROV • *Cleaning tools* • *Diving Support Vessel* (DSV) • *Mobilisation* • *Demobilisation* • *Crew Change* • *Victualling*

1.20 Selanjutnya, sebagaimana telah kami uraikan dalam LDP ini bahwa, Terlapor III bukannya tidak dapat memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving*. Terlapor III didukung oleh suatu perusahaan yang memberikan surat dukungan yang memiliki keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* dan Terlapor III telah memiliki keanggotaan IMCA untuk kategori ROV----------

Klarifikasi Panitia Tender atas persyaratan keanggotaan IMCA----------

1.21 Adapun seluruh persyaratan perihal IMCA dalam setiap tahapan Tender akan kami uraikan pada tabel di bawah ini: ---

Tahap Tender	Dokumen Terkait	Persyaratan keanggotaan IMCA	Informasi/Keterangan
Prakualifikasi	Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender	*3. Persyaratan Teknis* *PEMOHON wajib menyediakan dan menyerahkan dokumen-dokumen berikut:* ... - *Melampirkan salinan*	Syarat salinan keanggotaan IMCA memiliki maksud bahwa setiap Peserta Tender dapat memasukkan dokumen keanggotaan IMCA untuk kategori apapun. IMCA memiliki 4 divisi keanggotaan, yaitu *Diving*, *Marine*, *Offshore Survey* dan *Remote system* & ROV. Peserta Tender dapat saja memasukkan salah satu ataupun lebih tanda

		keanggotaan dari IMCA Membership	keanggotaan IMCA mereka. Hal ini untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi publik untuk berpartisipasi dalam Tender.
Proses *Bidding*	ITB - *Exhibit* I – *Special Provision and Scope of Work*, Angka 2.4.4 Halaman 13	*The Contractor is to be and IMCA member company*	Dokumen ini diberikan kepada Peserta Tender tanggal 21-22 September 2016).
Periode Protes	*Tender Clarification#02 Administrative and Technical Clarification*	PT Advanced Offshore Services menyampaikan satu pertanyaan klarifikasi terkait dengan Exhibit I – Special Provision and Scope of Work Item 2.4.4.	Dokumen ini diberikan kepada peserta Tender tanggal 7 Oktober 2016. Berikut ini adalah kutipan dari pertanyaan PT Advanced Offshore Services serta jawaban dari Panitia Tender: • Pertanyaan *Bidder request Company to confirm that Bidder must be IMCA member in Diving Division "Contractor Category".* • Jawaban *Bidder of Member IMCA ROV and Diving.*

1.22 Klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Tender sebagaimana dalam tabel di atas tidak melanggar PTK 007 Revisi 3 maupun Bid Document, sebagaimana dikutip :----------

a) Angka 3.3 Bab VIII halaman 86 PTK 007 Revisi 3 sebagaimana dikutip di bawah ini:----------

"Risalah rapat penjelasan pelelangan (apabila ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IPT/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB" ---------

b) ITB, angka 2.2 Klarifikasi dan Pengecualian :----------

"*Permintaan klarifikasi dan perubahan atas draft ketentuan dan persyaratan Kontrak dapat diajukan oleh selama masa klarifikasi sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan. Perusahaan akan memberikan jawaban atas klarifikasi secara tertulis kepada semua Peserta Tender, dan klarifikasi dari Perusahaan tesrbut merupakan bagian dari Dokumen Tender."*----------

1.23 Karenanya klarifikasi yang dilakukan Panitia Tender sebagaimana terdapat dalam *Tender Clarification#02 Administrative and Technical Clarification* dimana Panitia Tender mengklarifikasi bahwa syarat keanggotaan IMCA yang diminta adalah untuk kategori *Diving* dan ROV telah sesuai

dengan pedoman proses tender yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam PTK 007 Revisi 3. ----------

1.24 Dalam proses Tender ini, terdapat 2 (dua) Peserta Tender yang tidak atau belum memiliki keanggotaan IMCA dan akhirnya menyerahkan surat dukungan dari perusahaan lain yang memiliki keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving,* yaitu: -------

Nama Perusahaan	Pemberi Surat Dukungan dan Nomor Surat	Jenis Keanggotaan IMCA
PT Aquamarine Divindo Inspection	PT Samudera Nusantara Surat No:005/SBN/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016	*Diving*
PT Cakrawala Amartha Jaya	PT Jasalindo Surat No:023-JKT/ADM-SL/X/16 tertanggal 7 Oktober 2016	*Diving* dan ROV

Surat dukungan tersebut, telah membantu kedua perusahaan tersebut untuk memenuhi persyaratan Tender dan untuk mengikuti proses seleksi yang telah disusun oleh Panitia Tender. ----------

Terkait dalih Tim Investigator yang menyatakan dukungan keanggotaan IMCA PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III bertentangan dengan ketentuan IMCA ----------

1.25 Dalih-dalih Tim Investigator dalam Fakta-Fakta halaman 22 dan Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf d halaman 33-34 LDP pada intinya menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang dengan tidak memperhatikan ketentuan IMCA. ----------

1.26 Tim Investigator lebih lanjut mendalihkan dalam angka d.5 LDP halaman 33 bahwa: ----------

"*Bahwa seharusnya Terlapor I dan Terlapor II mengetahui terkait PT SBN sudah tidak aktif lagi beroperasi di bidang underwater service, sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai anggota IMCA yang dapat memenuhi standarisasi health, safety, and environment untuk peralatan dan personil sesuai dengan IMCA Guidance dan IMCA Standard.".*----------

1.27 Kewenangan untuk memberikan keanggotaan ataupun untuk memperpanjang keanggotan IMCA suatu perusahaan adalah murni kewenangan IMCA. Secara hukum, PT Samudera Biru

Nusantara masih berdiri dan keanggotaan IMCA-nya masih valid. Lebih lanjut, tidak ada bukti bahwa keanggotaan IMCA PT Samudera Biru Nusantara sudah dicabut. ----------

Mengenai penjelasan umum tentang keanggotaan IMCA ----------

1.28 Sebagaimana dapat dilihat dalam LDP, IMCA menerapkan standar tertentu agar suatu kontraktor dapat menjadi anggota IMCA, sebagaimana dikutip Fakta-Fakta Angka 11 Poin 5 angka 1 huruf e halaman 16 LDP: ----------

"Untuk memperoleh keanggotaan IMCA tersebut, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk masing-masing kategori/ division, selanjutnya IMCA melakukan penilaian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, dan menerbitkan sertifikat IMCA bagi perusahaan yang lulus.Sertifikat IMCA tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang."----

1.29 Pada faktanya, berdasarkan laman IMCA, untuk dapat menjadi anggota IMCA, khususnya dalam bidang *Diving*, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan dan penilaian tersendiri yang dilakukan oleh *Operation Committee IMCA*: ----------

a) Perusahaan yang berniat untuk bergabung dengan IMCA sebagai anggota *Diving* contractor diharuskan untuk menunjukkan kemampuan operasi mereka sesuai dengan *IMCA International Code of Practice for Offshore Diving* dan petunjuk terkait. (sumber: https://www.imca-int.com/about-imca/membership/responsibilities/)--------

b) Berikut ini akan dikutip pasal dalam Anggaran Rumah Tangga IMCA: ----------

Bye-Laws for IMCA	Anggaran Rumah Tangga IMCA (Terjemahan Bahasa Indonesia tidak resmi)
4.12 Companies or organisations wishing to join IMCA as GCo, ICO and Co Members must: i) be willing to be audited against the Association's guidelines where required by a client contract; and ii) have an overall quality management system which includes a safety management system.	4.12 Perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang bermaksud untuk bergabung dengan IMCA sebagai anggota Kontraktor Global (GCo), Kontraktor Internasional (ICO) dan Kontraktor (Co) wajib: i) bersedia untuk diaudit sesuai dengan pedoman Asosiasi apabila disyaratkan oleh suatu kontrak klien, dan ii) memiliki suatu sistem manajemen kualitas secara menyeluruh yang mencakup sistem manajemen keamanan.

4.13	*Such applications shall then be considered by the Operations Committee, which shall be empowered at its sole discretion to accept, reject or defer the application. The basis for nonacceptance shall be uniform, open, transparent, proportionate, non-discriminatory and serve a legitimate purpose based on objective standards. An applicant who is refused membership shall be advised in writing of the reasons, which may be challenged in an appeal to the Board.*	4.13	Permohonan-permohonan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh Komite Operasi, yang didasari oleh diskresinya semata-mata untuk menerima, menolak atau menangguhkan permohonan tersebut. Dasar tidak diterimanya [permohonan tersebut] harus selaras, terbuka, transparan, proporsional, tidak diskriminatif dan sesuai dengan tujuan yang sah berdasarkan standar-standar yang obyektif. Pemohon yang permohonan keanggotaannya ditolak akan mendapat pemberitahuan tertulis mengenai alasan [ditolaknya permohonan], yang dapat diperdebatkan dalam banding terhadap Dewan.
4.14	*Two officers (ideally two directors or a director and the company secretary) of all new Members shall sign an undertaking that it will abide by the Articles of Association of IMCA Holdings Ltd. and these Bye-laws and act as a responsible member of the Association. Membership will commence once the Chief Executive has received this undertaking and monies due in respect of their first subscription.*	4.14	Dua orang pejabat (idealnya dua orang direktur atau seorang direktur dan sekretaris perusahaan) dari seluruh Anggota baru harus menandatangani suatu perjanjian bahwa perusahaannya akan mematuhi Anggaran Dasar IMCA Holdings Ltd. dan Anggaran Rumah Tangga ini serta bertindak sebagai anggota Asosiasi yang bertanggung jawab. Keanggotaan akan mulai berlaku setelah Ketua Pelaksana menerima perjanjian ini dan uang yang harus dibayar sehubungan dengan iuran pertama.

1.30 Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa dalam memberikan keanggotannya, termasuk untuk kategori *Diving,* IMCA memiliki acuan-acuan tertentu yang harus dipenuhi. Perusahaan yang telah memperoleh keanggotaan IMCA (dibuktikan dengan tanda keanggotaan IMCA secara tertulis) berarti telah memenuhi standar-standar dan persyaratan yang ditentukan oleh IMCA. ----------

1.31 Selama keanggotaan tersebut tidak pernah dicabut ataupun dinyatakan sebaliknya, pihak ketiga memiliki kewajiban hukum untuk menganggap bahwa keanggotaan tersebut adalah sah. Dengan demikian, keanggotaan PT Samudera Biru Nusantara

untuk IMCA kategori *Diving* adalah sah karena perusahaan tersebut masih terdaftar sebagai anggota IMCA.----------

Perihal rencana pengambilalihan PT Samudera Biru Nusantara oleh PT Rubotori Protech Indonesia----------

1.32 Tim Investigator pada Fakta-Fakta angka 13 Halaman 19 s/d 21 LDP, juga mendalihkan bahwa seluruh kegiatan PT Samudera Biru Nusantara dilakukan di bawah kendali PT Rubotori Petrotech Indonesia dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan dalam rangka pengambilalihan PT Samudera Biru Nusantara oleh PT Rubotori Petrotech Indonesia. ----------

1.33 Sebagaimana fakta diketahui bahwa konsorsium PT Samudera Biru Nusantara dengan PT Cahaya Karya Bhakti Samudera merupakan calon Peserta Tender yang tidak lolos dalam tahap prakualifikasi. Pada tahap pengumpulan dokumen prakualifikasi, tidak terdapat dokumen konsorsium PT Samudera Biru Nusantara dengan PT Cahaya Karya Bhakti Samudera, yang berisi keterangan mengenai adanya rencana akuisisi dan pengendalian oleh PT Rubotori Protech Indonesia.

1.34 Kemudian, sebagaimana didalihkan sendiri oleh Tim Investigator dalam angka 13.11 LDP bahwa “Berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan terhadap dokumen legal dan dokumen pajak, PT Rubotori Petrotech Indonesia memutuskan tidak jadi mengakuisisi PT Samudera Biru Nusantara. Hal ini berarti: ----------

a) Dalih-dalih mengenai rencana akuisisi atau pengalihan menjadi tidak lagi relevan karena PT Samudera Biru Nusantara masih berdiri sebagai suatu perseroan terbatas
b) Keanggotaan IMCA kategori *Diving* atas PT Samudera Biru Nusantara adalah benar milik PT Samudera Biru Nusantara, bukan PT Rubotori Petrotech Indonesia; dan --
c) Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa secara hukum PT Samudera Biru Nusantara masih berdiri dan keanggotaan IMCA-nya tetap harus dianggap valid ---------

Perihal keanggotaan IMCA yang tidak dapat dialihkan ke perusahaan lain (*non-transferable)* ----------

1.35 Tim Investigator dalam dalihnya pada Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C huruf d halaman 33 LDP telah secara keliru menafsirkan bahwa pemberian surat dukungan merupakan bentuk 'pengalihan' atau 'transfer' atas keanggotaan IMCA kategori *Diving* milik PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III; ----------

1.36 Penerbitan surat dukungan bukanlah merupakan suatu pengalihan 'kepemilikan'. Apabila penafsiran Tim Investigator tersebut kemudian diterapkan dalam pemberian surat dukungan untuk persyaratan kapal atau *vessel,* dimana beberapa Peserta Tender mendapat surat dukungan dari pihak lain,berarti setiap perusahaan perkapalan yang memberikan surat dukungan kepada Peserta Tender tertentu telah mengalihkan kapal-kapalnya kepada Peserta Tender terkait. Dalam hal ini terlihat bahwa penafsiran Tim Investigator tersebut adalah penafsiran yang sama sekali tidak tepat. -------

1.37 Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, definisi pengalihan adalah sebagai berikut: ----------

Prof. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV (Jakarta: PT Intermasa, 1989), halaman 72: ----------

"*Menurut sistem B.W., suatu pemindahan hak terdiri atas dua bagian.Pertama suatu "obligatoire overeenkomst" dan kedua suatu "zakelijke overeenkomst".Yang dimaksudkan dengan yang pertama, ialah tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak itu, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran, sedangkan yang kedua, ialah pemindahan hak itu sendiri.*" ----------

1.38 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 140:----------

"*Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alsa hak (rechtstitel) tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.*" ----------

1.39 Dengan demikian, sesuai dengan prinsip hukum umum di atas, pemberian surat dukungan bukanlah merupakan suatu bentuk pengalihan kepemilikan sebagaimana yang didalihkan oleh Tim Investigator. ----------

Terkait dalih Tim Investigator yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan sertifikat IMCA----------

1.40 Tim Investigator pada Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf e halaman 34-35 LDP, pada intinya mendalihkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi Terlapor III untuk lulus dalam evaluasi administrasi dan teknis dengan menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan sertifikat IMCA.------

1.41 Dalih standar ganda yang dikemukakan Tim Investigator tidak berdasar, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini: ----------

a) Tim Investigator dalam angka e.1 halaman 34 LDP mendalihkan: ----------

"Bahwa diketahui Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa tidak lulus prakualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan Keanggotaan IMCA karena hanya memiliki satu Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori Diving."--

Fakta:----------

(1) "satu Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving"* tersebut adalah milik PT Samudera Biru Nusantara dan keanggotaan tersebut masih berlaku atau sah. ----------

(2) Dikarenakan Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* tersebut valid, maka surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor III untuk keanggotaan IMCA kategori *Diving* adalah sah. ----------

(3) Sebagaimana telah kami jelaskan dalam angka 12 Tanggapan, Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera tidak lulus prakualifikasi bukan karena hanya memiliki 1 (*satu*) Keanggotaan IMCA, melainkan karena tidak memenuhi standar penilaian HSE. Sekali lagi perlu kami jelaskan kembali bahwa yang menjadi syarat dalam tahap Prakualifikasi adalah keanggotaan IMCA. Kalaupun hanya

punya 1 (satu) keanggotaan, maka syarat tersebut terpenuhi. ----------

(4) Dalam angka e.3 halaman 34 LDP, Tim Investigator mendalihkan:

"Bahwa diketahui Terlapor I dan Terlapor II seharusnya mendiskualifikasi Konsorsium PT SBN – PT Cakrabhasa dan Terlapor III karena dalam tender yang sama, PT SBN mendaftar sebagai peserta tender dalam bentuk konsorsium dengan PT Cakrabhasa, namun juga memberikan dukungan kepada Terlapor III yang merupakan pesaing Konsorsium PT SBN - PT Cakrabhasa dalam tender tersebut."----------

Fakta: ----------

(1) Kalimat "bahwa diketahui" patut diduga berasal dari pendapat pribadi Sdr. Michael Wilson Tinangon yang seharusnya tidak dipertimbangkan Sdr. Michael Wilson Tinangon bukanlah ahli yang dimintakan pendapat ahlinya dalam perkara aquo. Sementara itu, seandainya pun sebagai saksi, *quod non*, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk keterangan saksi yang sah.

(2) Tidak ada larangan dalam PTK 007 Revisi 3 dan dalam dokumen persyaratan Tender manapun yang melarang: satu anggota suatu konsorsium untuk memberikan surat dukungan kepada peserta tender lainnya atau satu peserta tender untuk memberikan surat dukungan kepada peserta tender lainnya. ----------

(3) Dalam angka e.4 halaman 34 LDP, Tim Investigator mendalihkan: "*bahwa ketentuan mengenai diperbolehkannya surat dukungan untuk Keanggotaan IMCA tidak pernah diatur dalam Dokumen Tender maupun dalam amandemen Dokumen Tender dan tidak pernah diberitahukan kepada peserta tender lainnya.*". ----------

Fakta :----------

(1) Tidak ada ketentuan dalam PTK 007 Revisi 3 yang melarang adanya suatu surat dukungan kepada peserta lain ----------

(2) Surat dukungan merupakan sudah menjadi suatu praktek umum sebagaimana terbukti: ----------

(3) Surat dukungan sehubungan dengan keanggotaan IMCA diserahkan oleh: PT Samudera Biru Nusantara kepada

Terlapor III dan PT Jasalindo kepada PT Cakrawala Amartha Jaya----------

(4) Surat dukungan sehubungan dengan *Survey* &Positioning *Services* diserahkan oleh PT Pageo Utama kepada PT Patra Dinamika.----------

(5) Surat dukungan sehubungan dengan ketersediaan kapal untuk melaksanakan pekerjaan Tender diserahkan oleh: PT Bahtera Niaga Internasional, PT Wintermar dan PT Tridaya Patra Marine.----------

(6) Catatan: Surat dukungan untuk ketersediaan kapal tersebut juga tidak diatur secara spesifik dalam dokumen tender, namun dimengerti dan dipraktekan oleh Peserta Tender atas dasar *common knowledge.* Oleh karenanya pada saat PT Advanced Offshore Services meminta klarifikasi sehubungan dengan keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* Terlapor III, PT Advanced Offshore Services dapat menerima penjelasan Panitia Tender mengenai keberadaan surat dukungan tersebut. Karena hal yang sama juga dilakukan oleh PT Advanced Offshore Services sehubungan dengan ketersediaan vessel. PT Advanced Offshore Services menerima surat dukungan dari PT Wintermar Offshore Marine Group untuk ketersediaan kapal/*vessel*----------

Perihal Terkait Surat Dukungan Keanggotaan IMCA dari PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III----------

1.42 Tim Investigator selain pada Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf e Angka 4 halaman 34 LDP, juga pada intinya mendalihkan hal yang sama dalam Fakta-Fakta angka 16 poin 4 LDP sebagaimana dikutip di bawah ini;----------

"*Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah melakukan amandemen terhadap Dokumen Tender terkait ketentuan surat dukungan Keanggotaan IMCA dari perusahaan lain sebagai pengganti persyaratan Sertifikat Keanggotaan IMCA yang seharusnya dimiliki sendiri oleh peserta tender yang bersangkutan.*"----------

1.43 Dalih-dalih Tim Investigator tersebut adalah dalih yang salah dan tidak berdasar karena diketahui fakta bahwa: ----------

(1) Memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain tidak dilarang dalam PTK 007 Revisi 3 ----------

(2) Terdapat Peserta Tender lain yang juga menyerahkan surat dukungan untuk keanggotaan IMCA, yaitu PT Cakrawala Amartha Jaya yang memiliki surat dukungan dari PT Jasalindo ----------

(3) Surat dukungan merupakan suatu hal yang umum dalam proses tender. Selain IMCA, surat dukunganjuga terdapat untuk memenuhi persyaratan mengenai kapal atau *vessel*, yaitu sebagai berikut:----------

Surat	Pemberi Dukungan	Penerima Dukungan
Surat No.335/MKT-BNI/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016	PT Bahtera Niaga Internasional	PT Aquamarine Divindo Inspection
Surat tanggal 12 Oktober 2016	PT Wintermar Offshore Marine Group	PT Patra Dinamika
Surat No.LO113/TPM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016	PT Tridaya Patra Marine	PT Patra Dinamika
Surat No.3365/A.10/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016	PT Wintermar Offshore Marine Group	PT Advanced Offshore Services
Surat No.650/BMB-MKT/LOS/X-16 tanggal 3 Oktober 2016	PT Bayu Maritim Berkah	
Surat No.247/BD-LOG/X/16 tanggal 11 Oktober 2016	PT Logindo Samudramakmur Tbk.	

1.44 Majelis Komisi yang Terhormat, sama seperti keanggotaan IMCA, vessel juga merupakan salah satu kriteria yang dinilai oleh Panitia Tender. Demi menjunjung prinsip kesempatan yang terbuka seluas-luasnya bagi seluruh Peserta Tender, bagi yang tidak memiliki *vessel* atau kapal, maka dapat didukung oleh perusahaan lain yang memang memiliki kapal. Dukungan tersebut dibuktikan dengan suatu surat dukungan.----------

Terkait dalih Tim Investigator mengenai Penilaian Panitia kepada Surat Dukungan yang diberikan oleh PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III sebagai pemenang tender;----------

1.45 Tim Investigator pada Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C huruf f halaman 35 LDP, pada intinya mendalihkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi Terlapor III dengan

memperbolehkan atau meluluskan surat dukungan berupa keanggotaan IMCA dari PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III.----------

1.46 Dalih Tim Investigator pada Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf f Angka 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi, Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki Sertifikat Keanggotaan IMCA, tidak memiliki SKT Migas terkait dan nilai HSE di bawah minimum skor merupakan dalih yang keliru. Hal ini karena: --

a) Berdasarkan Surat dari PT Samudera Biru Nusantara No.002-0816 kepada PC Muriah LTD Perihal: Permohonan Keberatan, Konsorsium tersebut menyerahkan bukti Keanggotaan IMCA, SKT Migas dan HSE Prosedur. Dalam suratnya tersebut, Konsorsium ini meminta agar dapat dievaluasi kembali ----------

b) Panitia Tender melakukan evaluasi kembali dan menyatakan Konsorsium tersebut tidak lulus karena tidak memenuhi syarat penilaian untuk HSE. Jadi, ketidaklulusan tersebut bukan karena Konsorsium tidak memilki keanggotaan IMCA dan SKT Migas, melainkan karena nilai HSEnya tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender ----------

1.47 Perlu dibedakan kedudukan dan posisi antara PT Samudera Biru Nusantara sebagai anggota Konsorsium dan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri pada waktu memberikan Surat Dukungan untuk keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* kepada Terlapor III. Pada saat dinilai sebagai anggota Konsorsium, yang dilihat adalah konsorsiumnya – apakah memenuhi peryaratan Tender. Sementara itu, sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, PT Samudera Biru Nusantara terbukti masih memiliki Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* yang valid. Tidak ada putusan dari institusi manapun yang mengatakan bahwa Keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* PT Samudera Biru Nusantara sudah tidak valid atau

tidak berlaku. IMCA sebagai institusi internasional yang bonafid sudah pasti mengeluarkan perpanjangan Keanggotan IMCA untuk PT Samudera Biru Nusantara setelah terbukti bahwa perusahaan tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh IMCA----------

1.48 Dihubungkan dengan surat dukungan:----------

a) Pemberian surat dukungan merupakan suatu praktek yang umum dan dapat diberlakukan untuk persyaratan lain selain untuk keanggotan IMCA. Dalam Tender ini, 3 (tiga) Peserta, yaitu: PT Patra Dinamika, PT Advanced Offshore Services, dan Terlapor III memasukkan surat dukungan dari berbagai perusahaan kapal untuk memenuhi persyaratan mengenai ketersediaan kapal/*vessel* dengan spesifikasi tertentu. Malah, PT Patra Dinamika memasukkan 2 (dua) surat dukungan, masing-masing dari PT Wintermar Offshore Marine Group dan PT Tridaya Patra Marine, untuk memenuhi persyaratan tersedianya 2 (*dua*) *vessel*/kapal; ----------

b) Terdapat Peserta Tender lainnya, yaitu PT Cakrawala Amartha Jaya yang memasukkan surat dukungan untuk keanggotaan IMCA kategori *Diving* (dan ROV) dari PT Jasalindo.----------

Terkait dalih Tim Investigator mengenai Owner Estimate dan Harga Penawaran Pemenang Tender; ----------

1.49 Tim Investigator pada Fakta-Fakta Angka 17 Halaman 23-25 LDP dan Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf g halaman 35 -36 LDP, pada intinya mendalihkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II patut diduga menyusun pehitungan HPS/OE berdasarkan estimasi perhitungan biaya Terlapor III sehingga Terlapor III dapat mengajukan penawaran yang menyesuaikan dengan perhitungan tersebut----------

1.50 Tender dalam perkara aquo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PTK 007 Revisi 3. Rencana Tender ini tidak memerlukan persetujuan SKK Migas dikarenakan nilai paket

tender lebih kecil dari Rp50 miliar sebagaimana dijelaskan pada Bab II Angka 2.5. halaman 16 PTK 007 Revisi 3 dan Bab V Angka 1.1. halaman 45 PTK 007 Revisi 3. Terlapor I dan Terlapor II juga telah memuat Rencana Tender ini pada saat penyusunan WP&B kepada SKK Migas yang telah dituangkan dalam dokumen daftar pengadaan (*procurement list*). Di dalam dokumen tersebut, nilai besaran HPS/OE untuk suatu tender tidak disampaikan dan hanya disampaikan dengan sebatas nilai perkiraan kontrak;----------

1.51 Terkait dengan Tender, sesuai dengan ketentuan dalam Bab VII Angka 2.3 Halaman 66 PTK 007 Revisi 3, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan *market survey* atau survei pasar sebelum menetapkan HPS/OE sebesar Rp40 miliar s/d Rp50 miliar, sebagaimana dikutip di bawah ini:----------

> *"2.3. Tata cara membuat HPS/OE*
> *2.3.1. Analisa terhadap data yang diperoleh dari sumber referensi sebagaimana angka 2.2. yang disesuaikan dengan Lingkup Kerja*
> *2.3.2. Memperhitungkan harga pasar dalam negeri yang wajar atau rata-rata harga internasional yang wajar dengan kondisi cost insurance and freight (CIF) pelabuhan tujuan akhir di Indonesia ditambah dengan preferensi harga barang dalam negeri sebesar 15% (lima belas persen), dalam hal barang yang diperlukan sudah diproduksi di dalam negeri."*

Dengan demikian, penetapan HPS/OE tersebut dilakukan dengan memiliki basis atau dasar dan tidak serta merta hanya berdasarkan keinginan Terlapor I dan Terlapor II ----------

1.52 Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan dalam Bab VII PTK 007 Revisi 3 tentang HPS/OE, Angka 1.6 tentang Ketentuan Umum mengatur bahwa nilai HPS/OE tidak bersifat rahasia setelah pembukaan penawaran harga. Dalam hal ini tahap penawaran harga adalah tahap Pembukaan Sampul II ----------

1.53 Dalam Tender ini, jelas tidak ada yang dirahasiakan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Hal tersebut dibuktikan dengan pembukaan nilai HPS/OE oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada seluruh Peserta Tender pada tahap Pembukaan Sampul II, yaitu pada tanggal 9 Januari 2017 di hadapan Peserta

Tender yang hadir. Tindakan ini telah sesuai dengan ketentuan PTK 007 Revisi 3 sebagaimana diuraikan di atas ----

1.54 Sementara itu, perihal nilai penawaran para Peserta Tender, merupakan murni pertimbangan dan perhitungan bisnis masing-masing Peserta Tender. Terlapor I dan Terlapor II sama sekali tidak ikut campur dengan metode perhitungan maupun komponen perhitungan biaya masing-masing Peserta Tender --

1.55 Tim Investigator dalam LDP juga mendalihkan bahwa satuan biaya mobilisasi/demobilisasi (untuk peralatan dan personil) merupakan faktor penentu dalam pembentukan harga penawaran. Lebih lanjut, Tim Investigator menghubungkan penetapan Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*), sebagai faktor yang menguntungkan Terlapor III karena dapat melakukan penghematan biaya mobilisasi dan demobilisasi Terlapor III----------

1.56 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Terlapor I dan Terlapor II, apabila penetapan lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) dalam ITB dan lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender dihubungkan, terdapat kesamaan yaitu seluruh lokasi berada di Jawa Timur. Penetapan-penetapan lokasi tersebut murni seluruhnya didasarkan oleh lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender ini----------

1.57 Terlebih lagi, hampir seluruh lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) ditentukan di sekitar wilayah Jawa Timur pada tender-tender yang sebelumnya pernah diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Oleh karena itu, terbukti bahwa tidak terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam memfasilitasi Terlapor III melalui penetapan Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*). Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis pengadaan lainnya yang mensyaratkan Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) di daerah Jawa Timur, misalnya pengadaan kapal,

pengadaan *drilling services* untuk kegiatan *drilling,* pengadaan catering, dan pengadaan *land transportation*----------

1.58 Dengan demikian, terbukti bahwa penetapan Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) di daerah Jawa Timur bukanlah tindakan memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III dalam mempengaruhi pembentukan harga penawaran ataupun HPS/OE. ----------

1.59 Berdasarkan seluruh penjelasan Terlapor I dan Terlapor II di atas, jelas bahwa unsur "bersekongkol" tidak terpenuhi. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai Panitia Tender/pengguna jasa dengan cara memfasilitasi Terlapor III sebagai Peserta Tender untuk menjadi pemenang Tender. Seluruh rangkaian proses Tender telah dilakukan sesuai dengan ketentuan PTK 007 Revisi 3 dengan transparan dan terbuka. Oleh karenanya menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi yang Terhormat untuk menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan dan karenanya LDP Tim Investigator harus tidak dilanjutkan. ----------

UNSUR "UNTUK MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER" TIDAK TERPENUHI

1.60 Yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 adalah----------

"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara*" ---

1.61 Lebih lanjut, mengacu pada Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999, pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dapat dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya ---

1.62 Dalam proses Tender ini, Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah membuat suatu ketentuan tender yang sengaja

dirancang untuk memberikan hambatan maupun perlakuan istimewa terhadap salah satu Peserta Tender. Seluruh persyaratan dan metode yang digunakan dalam Tender telah sesuai dengan PTK 007 Revisi 3 ----------

1.63 Mengacu pada tabel pada angka 12 dan tabel pada angka 27 di atas dalam Tanggapan ini, sebagaimana telah kami uraikan satu demi satu tidak terdapatnya atau tidak terbuktinya indikasi persekongkolan, maka dapat dilihat secara jelas dan gamblang bahwa seluruh proses/tahapan dan rangkaian Tender telah dilakukan secara transparan, terbuka, adil, mengindahkan pedoman dalam PTK 007 Revisi 3. Tidak ada satu tahap ataupun tindakan Panitia Tender sepanjang dalam proses Tender yang dapat mengindikasikan bahwa terdapat persekongkolan ----------

1.64 Dalam Tender seluruh Peserta Tender diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, seluruh Peserta Tender diberikan persyaratan-persyaratan yang sama, kesempatan yang sama, maupun jangka waktu pemenuhan persyaratan yang sama ----------

1.65 Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada penjelasan Terlapor I dan Terlapor II mengenai unsur bersekongkol, tidak terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II sebagai Panitia Tender/pengguna jasa/pemilik pekerjaan telah melakukan persekongkolan vertikal dengan memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang ----------

1.66 Lebih lanjut, Terlapor I dan Terlapor II akan menguraikan kembali secara singkat terkait tidak terpenuhinya unsur bersekongkol yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Terlapor I dan Terlapor II ----------

Terkait dalih Tim Investigator sehubungan dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company* ----------

1.67 Sebagaimana Terlapor I dan Terlapor II uraikan dalam angka 30 s/d 34 Tanggapan, tidak terdapat peraturan perundangan

yang melarang syarat "*the Contractor is to be and IMCA member company".* Selain itu, fakta bahwa Bid Document mensyaratkan "*The Contractor is to be and IMCA member company"* dan Terlapor III sedang mengurus pendaftaran keanggotaanya untuk menjadi anggota IMCA kategori *Diving* dan sudah menjadi anggota IMCA untuk kategori ROV sehingga Terlapor III diloloskan untuk maju ke tahap berikutnya adalah suatu hal yang telah sesuai dengan persyaratan dalam Tender

Terkait dalih Tim Investigator sehubungan dengan persyaratan workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services* ----------

1.68 Dalih ini terbukti mengada-ada karena memang tidak ada persyaratan dalam Dokumen Tender yang secara spesifik mensyaratkan agar Peserta Tender memiliki "workshop" atau "kantor perwakilan" di sekitar Jawa Timur. ----------

a) Lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender ini adalah di fasilitas operasional Terlapor I dan Terlapor II yang berlokasi di sekitar Jawa Timur;----------

b) Menjadi suatu hal yang tidak masuk akal apabila kemudian lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) ditentukan untuk berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ataupun Papua; ----------

c) Perubahan Pemberitahuan Mobilisasi yang semula 3 hari kalender menjadi 14 hari kalender merupakan permintaan dari Peserta Tender dan bukan inisiatif sepihak dari Terlapor I dan Terlapor II;----------

Terkait dalih Tim Investigator mengenai evaluasi persyaratan keanggotaan IMCA dalam Tender oleh Terlapor I dan Terlapor II--------

1.69 Sebagaimana Terlapor I dan Terlapor II jelaskan dalam angka 42 s/d 49 Tanggapan, Terlapor III telah memenuhi seluruh persyaratan Tender dalam tahap Prakualifikasi hingga tahap

Penunjukkan Pemenang Tender, termasuk persyaratan mengenai keanggotaan IMCA:----------

a) Terlapor III memiliki keanggotaan IMCA kategori *Diving* dan ROV; ----------
b) Memiliki surat dukungan dari PT Samudera Biru Nusantara untuk keanggotaan IMCA kategori *Diving*; yang mana keanggotaan IMCA PT Samudera Biru Nusantara tersebut masih valid pada saat Tender; ----------
c) Surat dukungan tidak dilarang dalam PTK 007 Revisi 3; --

Terkait dalih Tim Investigator yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA----------

1.70 Sebagaimana telah Terlapor I dan Terlapor II uraikan dalam angka 64 dan 65 Tanggapan, tidak ada standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA----------

a) Tender merupakan tender yang bersifat terbuka; ----------
b) Seluruh persyaratan mengenai keanggotaan IMCA dan klarifikasinya telah dibuat sesuai dengan PTK 007 Revisi 3 dan Dokumen Tender. ----------
c) Surat dukungan untuk keanggotaan IMCA tidak hanya diajukan oleh Terlapor III, melainkan juga oleh PT Cakrawala Amartha Jaya yang memperoleh surat dukungan dari PT Jasalindo ----------

Terkait Surat Dukungan Keanggotaan IMCA dari PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III bertentangan dengan ketentuan IMCA -

1.71 Sebagaimana telah Terlapor I dan Terlapor II jelaskan dalam Tanggapan, surat dukungan PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III tidak bertentangan dengan ketentuan IMCA, karena: ----------

a) Surat dukungan tidak dilarang oleh PTK 007 Revisi 3 dan sudah menjadi praktek umum. ----------
b) Surat dukungan tidak hanya untuk IMCA melainkan juga ditemukan dalam persyaratan untuk vessel. ----------

c) Pemberian surat dukungan sehubungan dengan keanggotaan IMCA tidak berarti mengalihkan keanggotaan itu sendiri kepada pihak lain. ----------

d) Pada saat Tender, keanggotaan IMCA kategori *Diving* PT Samudera Biru Nusantara valid dan tidak pernah dicabut.

Terkait dalih Tim Investigator mengenai Penilaian Panitia kepada surat dukungan yang diberikan oleh PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III sebagai pemenang Tender----------

1.72 Sebagaimana telah Terlapor I dan Terlapor II jelaskan dalam Tanggapan, tidak ada persekongkolan dalam penilaian terhadap surat dukungan PT Samudera Biru Nusantara kepada Terlapor III, karena:----------

a) Pemberian surat dukungan merupakan hal yang tidak dilarang dalam PTK 007 Revisi 3. ----------

b) Selain dari Terlapor III, terdapat peserta Tender lain yang juga menyerahkan dan menggunakan surat dukungan baik untuk IMCA dan vessel.----------

Terkait dalih Tim Investigator mengenai *Owner Estimate* dan Harga Penawaran Pemenang Tender----------

1.73 Sebagaimana telah Terlapor I dan Terlapor II jelaskan dalam Tanggapan, tidak ada persekongkolan dalam menentukan HPS/OE dan Harga Penawaran Pemenang Tender: ----------

a) Penetapan HPS/OE dilakukan berdasarkan market survey atau survei pasar sebagaimana disyaratkan oleh PTK 007 Revisi 3.----------

b) Tidak ada tukar menukar berkas atau dokumen Tender secara diam-diam antara Panitia Tender dengan Peserta Tender Tertentu ----------

c) Sesuai dengan PTK 007 Revisi 3, nilai HPS/OE disampaikan pada saat pembukaan sampul penawaran harga dan dicatat dalam berita acara terkait. ----------

d) Nilai penawaran para Peserta Tender merupakan murni pertimbangan dan perhitungan masing-masing Peserta Tender. ----------

e) Penetapan lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) yang menjadi faktor perhitungan harga penawaran Peserta Tender ditetapkan berdasarkan lokasi fasilitas operasi Terlapor I dan Terlapor II yang membutuhkan pekerjaan Tender berada di wilayah Jawa Timur----------

1.74 Dengan tidak terbuktinya unsur bersekongkol, sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, maka tidak terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengatur dan menentukan Terlapor III sebagai pemenang Tender. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa unsur "Untuk Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender" tidak terpenuhi. Sehingga menjadi patut dan berdasar hukum bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator. ----------

UNSUR "MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT" TIDAK TERPENUHI

1.75 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999 menyatakan bahwa ; ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" ----------

1.76 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menolak dianggap telah menghambat persaingan usaha dalam Tender, oleh karena tidak terbukti adanya persekongkolan atau konspirasi usaha yang terjadi antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III maupun dengan pihak manapun, maka secara nyata Terlapor I dan Terlapor II tidak menghambat Peserta Tender lain untuk bersaing secara sehat dan kompetitif untuk dapat menjadi pemenang Tender. ----------

1.77 Oleh karena tidak terpenuhinya unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka

secara otomatis unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Dengan demikian, menjadi patut dan beralasan bagi Majelis Komisi yang Terhormat untuk menolak LDP yang diajukan Tim Investigator. ----------

DAMPAK; ----------

1.78 Berdasarkan uraian-uraian Terlapor I dan Terlapor II dalam Tanggapan ini, terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999. ----------

1.79 Dikarenakan tidak adanya persekongkolan, maka dalih Tim Investigator mengenai adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses Tender karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar. Oleh karenanya tidak ada dampak negatif terhadap persaingan usaha yang ditimbulkan oleh proses Tender. ----------

1.80 KPPU dalam Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 menjelaskan mengenai dampak dalam persekongkolan tender, sebagaimana dikutip di bawah ini:----------

"*Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:*

1. *Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.* ----------
2. *Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.*
3. *Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.*
4. *Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.*".

1.81 Lebih lanjut, diketahui fakta bahwa dampak-dampak tersebut sama sekali tidak terjadi dengan adanya Tender ini, sebagaimana akan Terlapor I dan Terlapor II uraikan di bawah:

	Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999	Fakta
1	Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.	Konsumen tidak membayar harga yang lebih mahal: • HPS/OE adalah Rp49.465.485.000. • Terlapor III memberikan harga penawaran yang semula Rp 47.360.900.000 menjadi Rp 47.355.000.000.
2	Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.	Terlapor I dan Terlapor II dalam mengadakan Tender ini, memberikan kesempatan yang sama terhadap Calon Peserta Tender maupun Peserta Tender. Tidak terbukti adanya tindakan memfasilitasi yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II antara lain dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta Tender untuk dapat melakukan klarifikasi, sanggahan pada setiap tahapan Tender sebagaimana diatur dalam *Bid Document*.
3	Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.	Tender merupakan Tender terbuka, sebagaimana diumumkan dalam Surat Kabar Republika 25 Mei 2016. Seluruh persyaratan Tender yang disusun telah sesuai dengan PTK 007 Revisi 3 dan berlaku bagi semua Peserta Tender.
4	Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.”	Lihat penjelasan untuk no.1 di atas dan tabel pada nomor 12 Tanggapan. Hampir seluruh penawaran harga yang dilakukan oleh Peserta Tender, berada di atas nilai HPS/OE, kecuali penawaran Terlapor III. Oleh karena itu, terbukti bahwa tidak terdapat *mark-up* terhadap nilai proyek Tender ini.

1.82 Sebagaimana telah Terlapor I dan Terlapor II uraikan sebelumnya, tujuan diadakannya Tender ini adalah dalam rangka perawatan, perbaikan untuk pekerjaan bawah air dan inspeksi yang mendukung pemeliharaan fasilitas produksi di wilayah kerja Ketapang dan Kepodang. Sehubungan dengan adanya Pemeriksaan ini, Terlapor I dan Terlapor II dengan itikad baik menunda terlebih dahulu pelaksanaan pekerjaan Tender, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas Tender ini. ----------

TERLAPOR I DAN TERLAPOR II MENCADANGKAN HAKNYA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI, AHLI, DAN BUKTI-BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN----------

1.83 Pasal 45 ayat (4) Perkom No.1/2010 menyatakan sebagai berikut: ----------

"Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor dapat mengajukan:
a. Tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran;
b. Nama saksi dan nama ahli; dan
c. *Surat dan/ atau dokumen lainnya."*

1.84 Berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor I dan Terlapor II memiliki hak untuk mengajukan saksi, ahli, dan surat-surat dalam setiap pemeriksaan, termasuk namun tidak terbatas dalam pemeriksaan pendahuluan. Pengajuan bukti-bukti dimaksud sangatlah mendasar dan menjadi pokok dalam pemeriksaan pelanggaran mengingat dalam hukum terdapat asas yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. ----------

1.85 Berkaitan dengan hal di atas, Terlapor I dan Terlapor II mencadangkan haknya untuk mengajukan alat bukti saksi, ahli dan bukti-bukti tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No.5/1999. ----------

1.86 Dengan ini, Terlapor I dan Terlapor II mencadangkan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti, sebagaimana tersebut di atas. ----------

1.87 Untuk itu, Terlapor I dan Terlapor II mencadangkan haknya untuk mengajukan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dan ahli sebanyak 3 (tiga) orang. Namun karena terbatasnya waktu penyampaian Tanggapan ini, Terlapor I dan Terlapor II belum dapat memberikan secara rinci nama-nama saksi serta ahli untuk Terlapor I dan Terlapor II. ----------

KESIMPULAN ----------

Berdasarkan penjelasan Terlapor I dan Terlapor II di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: ----------

1.88 Seluruh proses Tender dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan, dimana Peserta Tender dibebankan dengan persyaratan-persyaratan Tender yang sama. Tidak ada Peserta Tender yang memperoleh keistimewaan dalam bentuk

apapun. Seluruh tahap dan proses Tender dilakukan dengan berpedoman pada PTK 007 Revisi 3 dan ITB serta klarifikasi-klarifikasinya yang telah pula disampaikan kepada Peserta Tender terkait. ----------

1.89 Unsur-unsur Pasal 22 UU No.5/1999 tidak terpenuhi: ----------

a. Unsur persekongkolan tidak terpenuhi. Indikasi persekongkolan sebagaimana terdapat dalam Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 satu pun tidak terpenuhi.

b. Unsur untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi. Dikarenakan tidak ada persekongkolan, maka unsur ini otimatis tidak terpenuhi.

c. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Dikarenakan seluruh unsur-unsur utama tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada dampak persaingan usaha tidak sehat sebagaimana didalihkan oleh Tim Investigator dalam LDP-nya

PETITUM;----------

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, Terlapor I dan Terlapor II dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang Terhormat untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut: ----------

1) Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU;----------

2) Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak patut secara hukum untuk diproses ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan karena tidak memiliki alat bukti yang cukup; ----------

3) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak bersekongkol dengan Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;----------

4) Menghentikan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara No.04/KPPU-L/2016 dan tidak melanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan III tersebut, Terlapor III dan dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection tanggal 4 Desember 2017 yang memberi kuasa kepada Nurmalita Malik, S.H., M.H., Lantiko Hikma Suryatama, S.H., Nidinda,S.H., dan Ayu Susanti, S.H.., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HADS PARTNERSHIP LAW OFFICE, yang beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980 telah menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

I. TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO. 5/1999 KARENA TERLAPOR III SELALU MENGIKUTI DAN MEMATUHI SELURUH PROSEDUR TENDER DENGAN BENAR DAN MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF DIBANDINGKAN PESERTA TENDER LAINNYA

3.1 Terlapor III secara tegas menyatakan bahwa dalil dan tuduhan dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor III telah melakukan persekongkolan dalam Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) ("Tender") bersama-sama dengan Terlapor I dan Terlapor II adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan tanpa bukti karena Terlapor III tidak pernah melakukan melakukan persekongkolan maupun upaya kolusi dalam bentuk apa pun sebagaimana diatur didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No.5/1999");----------

3.2 Terlapor III membantah dan menolak seluruh tuduhan persekongkolan didalam LDP karena Terlapor III selalu mengikuti dan mematuhi seluruh proses Tender dari awal hingga tahap akhir secara baik dan benar; ----------

3.3 Sebagaimana dinyatakan didalam LDP, Terlapor III selalu mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan Tender dengan cermat sehingga selalu lulus dalam setiap tahapan Tender, dengan uraian sebagai berikut: ----------

No.	Tahap Tender	Hasil
1.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Ikut
2.	Evaluasi Pra Kualifikasi	Lulus
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Ikut
4.	Evaluasi Administrasi dan Teknis	Lulus
5.	Hasil Evaluasi Komersial/Harga	1) PT Aquamarine Divindo Inspection (Rp. 47.360.900.000,00) 2) PT Patra Dinamika (Rp. 65.139.825.000,00) 3) PT Advanced Offshore Services (Rp. 66.306.725.000,00) 4) PT Seascape Survey Indonesia (Rp. 114.968.040.000,00)
6.	Evaluasi *Local Content* (TKDN)	1) PT Aquamarine Divindo Inspection (83.80%) 2) PT Patra Dinamika (72.41%) 3) PT Advanced Offshore Services (80%) 4) PT Seascape Survey Indonesia (48.92%)

3.4 Berdasarkan uraian proses Tender dalam tabel tersebut, maka terlihat jelas Terlapor III merupakan peserta Tender dengan harga penawaran paling rendah dibandingkan dengan peserta Tender lainnya, yaitu Rp. 47.360.900.000,00, serta dengan nilai *local content* (TKDN) paling tinggi yakni sebesar 83.80%;-

3.5 Nilai evaluasi Terlapor III merupakan hasil yang terbaik karena Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan peserta Tender lainnya karena jarak lokasi kantor dan *workshop* milik Terlapor III yang berada di Sidoarjo berdekatan dengan lokasi pekerjaan yang terletak di lepas pantai Lamongan. Faktor ini memungkinkan Terlapor III untuk melakukan mobilisasi peralatan dan personil secara lebih mudah dan efisien, sehingga mampu menekan biaya operasional secara signifikan; ----------

3.6 Keunggulan kompetitif Terlapor III dalam Tender ini sebenarnya juga telah diakui secara tegas didalam LDP sebagai berikut: ----------

a) Terdapat fakta dimana Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif karena lokasi *workshop* berdekatan dengan lokasi pekerjaan, sebagaimana dijelaskan didalam LDP poin 3 huruf b pada halaman 14, sebagai berikut: --------

"*Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Investigator, alamat kantor Terlapor III di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo, Jawa Timur yang juga*

merupakan workshop dan gudang penyimpanan peralatan selam termasuk ROV. Lokasi tersebut dekat dengan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan waktu tempuh kurang lebih 1 (satu) jam.Lokasi tersebut juga dekat dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dengan waktu tempuh kurang lebih 10 (sepuluh) menit."

b) Terdapat fakta dimana Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif karena kemudahan mobilisasi ROV karena lokasi *workshop* berdekatan dengan lokasi pekerjaan, sebagaimana dijelaskan didalam LDP poin 3 huruf c pada halaman 14, sebagai berikut:----------

"*Berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor III memuat peralatan ROV dengan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk menuju Petronas Shore Base di Lamongan, Jawa Timur.*"

c) Terdapat fakta dimana harga peserta Tender lainnya lebih mahal karena tingginya biaya mobilisasi alat dan personil akibat lokasi yang berjauhan dari lokasi pekerjaan, sebagaimana dijelaskan didalam LDP poin 9 pada halaman 25, sebagai berikut;----------

"9.Berdasarkan dokumen penawaran harga PT Seascape Surveys, PT Advanced Offshore Services, dan PT Patra Dinamika, satuan biaya untuk mobilisasi/demobilisasi untuk masing-masing item rata-rata lebih mahal dibandingkan dengan biaya working dan standby. Sedangkan berdasarkan dokumen penawaran harga Terlapor III, satuan biaya untuk mobilisasi/demobilisasi untuk masing-masing item rata-rata lebih murah dibandingkan dengan biaya working dan standby." -------

d) Tim Investigator sendiri pada dasarnya telah setuju dan mengakui adanya *competitive advantage* yang dimiliki oleh Terlapor III sehingga mampu lebih efisien dan mengajukan harga penawaran paling rendah, sebagaimana dijelaskan didalam LDP poin b angka 3 dan 4 pada halaman 31, sebagai berikut:----------

"*3. Bahwa diketahui Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif dalam tender ini terkait dengan mobilisasi peralatan dan personil sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tender yaitu dalam waktu 3 (tiga) hari kalender…*

4. Bahwa diketahui Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif terkait dengan lokasi mobilisasi dan demobilisasi dari Point of Origin di Sidoarjo menuju Point of Hire di Bandara Internasional Juanda

Surabaya maupun menuju Point of Delivery di Petronas Shore Base di Lamongan dengan berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya."

e) Tim Investigator sendiri telah mengakui bahwa komponen mobilisasi merupakan komponen yang paling menentukan dibandingkan dengan komponen harga lainnya, sebagaimana dijelaskan didalam LDP poin g angka 4 pada halaman 36, sebagai berikut: ----------

"*4. Bahwa diketahui berdasarkan analisa terhadap komponen harga untuk masing-masing item biaya penawaran, satuan biaya untuk mobilisasi/demobilisasi (untuk peralatan dan personil) merupakan faktor penentu dalam pembentukan harga penawaran ini;*"

3.7 Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas bahwa Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang Tender karena Terlapor III mampu memenuhi seluruh persyaratan tender yang ditetapkan serta mampu mengajukan harga penawaran paling rendah dikarenakan Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dibandingkan peserta Tender lainnya;----------

3.8 Berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta dan argumen tersebut maka telah jelas terbukti Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan didalam perkara ini. Oleh karena itu Terlapor III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;----------

II. LDP HARUS DIGUGURKAN KARENA MENGANDUNG KESALAHAN FATAL DAN CACAT HUKUM KARENA MENYATAKAN TERLAPOR I SEBAGAI PEMENANG TENDER

3.9 Terlapor III menolak LDP yang diajukan Tim Investigator karena terbukti mengandung kesalahan fatal dan cacat hukum, karena telah menyatakan Terlapor I sebagai pemenang Tender; ----------

3.10 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Komisi, kesalahan fatal didalam LDP terdapat pada bagian Analisis Dugaan

Pelanggaran poin C angka 4 halaman 30, yang kami kutip sebagai berikut; ----------

> "*Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam dugaan pelanggaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan memfasilitasi Terlapor I sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang…*" --------

3.11 Selanjutnya, LDP kembali mempertegas penunjukkan Terlapor I sebagai pemenang Tender didalam LDP pada bagian D, huruf b halaman 36, yang kami kutip sebagai berikut:----------

> "*Bahwa unsur mengatur dan menentukan pemenang tender didalam dugaan pelanggaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang.*" ----------

3.12 Analisis LDP tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena Terlapor I bukan pemenang Tender, melainkan berkedudukan sebagai panitia Tender atau pemberi pekerjaan. Hal ini sebagaimana pernyataan Tim Investigator sendiri pada LDP poin 2 angka 2.1. halaman 2, sebagai berikut: ----------

> "*2.Terlapor dalam perkara A Quo adalah:*
> *2.1. PC Muriah, Ltd., beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430,Indonesia, Telepon +6221-7592-2500, Faksmili +6221-75925222, yang selanjutnya disebut Terlapor I;*"

3.13 Kedudukan PC Muriah atau Terlapor I selaku Panitia Tender atau Pemberi Pekerjaan juga ditegaskan kembali didalam LDP pada poin A huruf a halaman 28, sebagai berikut: ----------

> "*a. PC Muriah, Ltd., beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Labuan, Malaysia berdasarkan Memorandum and Articles of Association of PC Muriah Ltd. Tanggal 20 Januari 2005, yang merupakan operator Kontrak Kerja Sama Muriah untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya di wilayah kerja Muriah, Lepas Pantai Utara Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang dalamdugaanpelanggaran ini adalah sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan bersama dengan PC Ketapang II Ltd.;*"----------

3.14 Kesalahan LDP tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena LDP merupakan basis utama pemeriksaan di KPPU. Cacat didalam LDP tersebut telah menyebabkan

materi dan analisa LDP menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas siapa pihak yang menjadi pemenang Tender sebenarnya; ----------

3.15 Lebih lanjut, kesalahan LDP juga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan bagi Terlapor III, sehingga demi hukum kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Komisi menolak atau menggugurkan LDP tersebut;----------

3.16 Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas terbukti LDP telah mengandung kesalahan yang fatal dan cacat hukum sehingga LDP haruslah digugurkan. Oleh karena itu Terlapor III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No.5/1999;----------

III. TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5/1999 KARENA TERLAPOR III TIDAK PERNAH BEKERJASAMA DENGAN TERLAPOR I DAN TERLAPOR II UNTUK MENGATUR TENDER

3.17 Terlapor III membantah dan menolak seluruh tuduhan persekongkolan didalam LDP karena hanya berdasarkan asumsi serta tidak berdasar bukti. Faktanya Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi maupun kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak Terlapor I dan Terlapor II selaku Panitia Tender untuk menentukan pemenang Tender;----------

3.18 Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender, persekongkolan vertikal yang dimaksud didalam LDP perkara ini harus dibuktikan dengan bukti yang menunjukkan telah terjadi kerjasama antara Panitia Tender atau pemilik pekerjaan dengan pengguna barang dan jasa atau peserta Tender dalam menentukan pemenang;----------

> "*Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi*

pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.----------

3.19 Fakta Terlapor III hanya bersikap pasif dan patuh dalam mengikuti seluruh prosedur Tender. Terlapor III tidak pernah melakukan perbuatan apapun untuk mempengaruhi keputusan Panitia Tender. ----------

3.20 Terlapor III tidak pernah mengetahui, tidak terlibat, serta tidak pernah mempengaruhi keputusan Panitia Tender terkait hal-hal terkait tender, seperti:----------

a. Penyusunan *Owner Estimate* (OE); ----------
b. Evaluasi Sertifikat IMCA;----------
c. Syarat lokasi *workshop* atau kantor perwakilan berlokasi di sekitar Jawa Timur; ----------

3.21 Terlapor III membantah analisa LDP mengenai penyusunan OE, karena Terlapor III sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui penyusunan OE tersebut. ----------

3.22 Selanjutnya Terlapor III juga telah memenuhi persyaratan sertifikat IMCA yang diminta oleh Panitia Tender dengan mengajukan surat dukungan (*letter of support*) dari PT Samudera Biru Nusantara. Persyaratan ini diterima oleh Panitia Tender karena masih sesuai dengan ketentuan Tender dan diajukan sebelum pembukaan harga penawaran. Hal ini telah pula dijelaskan didalam Tender *Clarification Meeting* dan merupakan kewenangan penuh Panitia Tender; ----------

3.23 Bahkan, sama sekali tidak ada bukti Terlapor I dan Terlapor II telah menyusun persyaratan *workshop* untuk memfasilitasi Terlapor III menjadi pemenang. Justru Terlapor I dan Terlapor II merevisi jangka waktu mobilisasi peralatan dan personil dari 3 (tiga) hari menjadi 14 (empat belas) hari dengan tujuan untuk memudahkan peserta Tender lainnya untuk dapat memenuhi tenggat waktu mobilisasi yang terlalu singkat tersebut.----------

3.24 Selanjutnya, LDP telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU No.5/1999 yang mengatur mengenai alat bukti. Analisa LDP hanya didasarkan pada rekaan dan asumsi belaka tanpa berdasarkan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian

yang cukup. LDP tidak merujuk satu pun alat bukti sebagaimana diamanahkan Pasal 42 UU No.5/1999 sebagai berikut: ----------

"*Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:* ----------
a. keterangan saksi----------
b. keterangan ahli----------
c. surat dan atau dokumen ----------
d. petunjuk ----------
e. keterangan pelaku usaha." ----------

3.25 Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa tuduhan LDP sangat tidak berdasar hukum, karena faktanya Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi maupun kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak Terlapor I dan Terlapor II selaku Panitia Tender untuk menentukan pemenang Tender. Oleh karena itu Terlapor III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No.5/1999.----------

IV. TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5/1999 KARENA UNSUR "MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER" DALAM PERKARA INI TIDAK TERPENUHI

3.26 Terlapor III membantah dan menolak seluruh tuduhan persekongkolan didalam LDP karena faktanya pekerjaan Tender ini belum pernah dilaksanakan oleh Terlapor III sehingga secara hukum salah satu unsur Pasal 22 UU No.5/1999 yaitu unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang tender" tidak terpenuhi.----------

3.27 Berdasarkan dokumen Berita Acara Rapat Pembahasan Kontrak *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* Contract No. 4850000140 (Ex Tender No. 11204) tanggal 7 September 2017 ("Berita Acara Rapat 7 September 2017"), terdapat fakta bahwa kontrak Tender belum ditandatangani sehingga pekerjaan belum dilaksanakan. ----------

3.28 Didalam Berita Acara Rapat 7 September 2017 dijelaskan bahwa Tender diputuskan untuk tidak dilanjutkan lagi dan

Petronas selaku pemilik pekerjaan akan melakukan proses Tender baru.----------

3.29 Berdasarkan alasan dan bukti tersebut maka dapat disimpulkan unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang tender" tidak terpenuhi karena Terlapor III belum pernah menandatangani kontrak dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan. Hal ini ini juga didukung oleh fakta dimana Petronas selaku pemilik pekerjaan akan melakukan Tender ulang.----------

3.30 Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor III tidak bersalah melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 karena unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang tender" dalam perkara ini secara hukum tidak terpenuhi. ----------

V. TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5/1999 KARENA LDP TIDAK MENGURAIKAN UNSUR "SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT"

3.31 Terlapor III membantah dan menolak seluruh tuduhan persekongkolan didalam LDP karena faktanya LDP tidak pernah menguraikan salah satu unsur Pasal 22 UU No.5/1999 yaitu unsur "sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

3.32 Setelah Terlapor III membaca dengan cermat LDP Tim Investigator, maka terdapat fakta LDP tidak pernah menguraikan unsur "sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" secara substansial.-

3.33 Padahal Pasal 22 UU No.5/1999 merupakan pasal yang menggunakan pendekatan *rule of reason* sehingga mutlak diperlukan adanya bukti disertai analisis dampak negatif akibat dari tindakan atau perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor II maupun Terlapor lainnya. ----------

3.34 Pernyataan Tim Invetigator didalam LDP yang pada pokoknya menyatakan dampak dari tindakan persekongkolan adalah "tindakan tidak jujur dan melawan hukum" sangat tidak

beralasan karena hal-hal tersebut bukan merupakan bentuk sebuah akibat atau dampak. ----------

3.35 Tidak adanya bukti, uraian maupun penjelasan adanya dampak negatif terhadap tingkat persaingan didalam LDP, terbukti telah menyebabkan ketidakpastian hukum. LDP sama sekali tidak mampu menguraikan pihak mana yang dirugikan, berapa kerugian yang diderita, maupun hal-hal lain sebagai bukti adanya dampak negatif yang merugikan persaingan. ----------

3.36 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Terlapor III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk dapat menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No.5/1999.----------

VI. TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5/1999 KARENA TERLAPOR III TIDAK MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

3.37 Terlapor III membantah dan menolak seluruh tuduhan persekongkolan didalam LDP karena faktanya Terlapor III tidak pernah melakukan persaingan usaha tidak sehat. -------

3.38 Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999, definisi persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

> "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujuratau melawan hukumatau menghambat persaingan usaha.*"

3.39 Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: ----------

a. Tidak ada persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang; dan----------

b. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

3.40 Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999 tersebut tidak terbukti dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

a. Selama proses Tender, kenyataannya masing-masing peserta tender saling bersaing secara ketat satu sama lain. Hal ini karena proses Tender dilaksanakan secara terbuka, transparan dan *fair*. Seluruh peserta Tender memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk bersaing mengikuti Tender dengan mengikuti seluruh persyaratan Tender yang ada. ----------

b. Terlapor III tidak pernah menghambat persaingan usaha seperti menciptakan *entry barrier* maupun menghalangi peserta Tender lain. Lebih lanjut, Terlapor III sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi maupun kerjasama dalam bentuk apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk menentukan pemenang Tender.----------

c. Terlapor III dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu bertindak secara patut dan tidak melawan hukum. Terlapor III selalu konsisten mematuhi seluruh prosedur dan persyaratan Tender dengan jujur. Terlapor III dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku, apalagi dengan mengingat status Terlapor III sebagai sebuah perusahaan yang memiliki reputasi baik di bidang *underwater construction* dan *marine services*. ----------

3.41 Lebih lanjut, harga penawaran dari Terlapor III merupakan harga paling rendah dalam Tender justru telah menghasilkan efisiensi bagi Terlapor II dan Terlapor III, yang mana selaras dengan maksud dan tujuan dari UU No.5/1999. ----------

3.42 Hal tersebut dijelaskan didalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2015 terkait dugaan persekongkolan tender dalam pembangunan pabrik pupuk di Petrokimia Gresik, dimana dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan kaidah hukum sebagai berikut: ----------

> *10.6. …pembangunan Pabrik Pupuk Amonia-Urea di Petrokimia Gresik akan mendukung peningkatan efisiensi produksi pangan di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur yang berpotensi menghemat biaya transportasi Urea yang dikeluarkan PT Petrokimia Gresik dan menghemat keuangan negara untuk importasi*

Amonia. Efisiensi produksi dan efisiensi biaya ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 di atas yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

10.7. Bahwa harga penawaran Konsorsium Rekayasa – TEC (penawar terendah kedua) adalah USD 537,5 juta, sedangkan harga penawaran Konsorsium Wuhuan-Adhi (penawar terendah pertama) setelah penurunan harga sebesar USD 2,5 juta adalah USD 523,2 juta;

10.8. Bahwa selisih harga penawaran Konsorsium Wuhuan-Adhi dibandingkan Konsorsium Rekayasa – TEC (peserta terendah kedua) adalah kurang lebih USD 14,3 juta atau setara dengan Rp. 172.315.000.000 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah), sehingga pencabutan diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi menyebabkan cost saving bagi Terlapor I kurang lebih USD 14,3 juta;

10.9. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor I mencabut keputusan diskualifikasi tersebut telah mengakibatkan terjadinya efisiensi perusahaan yang sesuai dengan tujuan diadakannya tender perkara a quo dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 di atas;"

3.43 Berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum tersebut maka telah jelas terbukti Terlapor III tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan/perbuatan Terlapor III justru telah selaras dengan tujuan dari UU No.5/1999 karena telah menghasilkan efisiensi biaya dan waktu sehingga menguntungkan Terlapor I dan Terlapor II selaku pemberi pekerjaan. ----------

VII. TERLAPOR III TIDAK MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK APA PUN SEBALIKNYA TERLAPOR III JUSTRU MENDERITA KERUGIAN BESAR AKIBAT PERKARA INI

3.44 Terlapor III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk mengesampingkan LDP karena Terlapor III tidak menerima keuntungan apapun dari Tender ini. Sebaliknya, Terlapor III justru menderita kerugian baik materiil maupun immateriil. ----------

3.45 Kerugian ini diderita oleh Terlapor III akibat dari kontrak pekerjaan Tender yang hingga saat ini belum ditandatangani sehingga Terlapor III tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Hal ini telah menyebabkan kerugian nyata bagi Terlapor III. --

3.46 Selain itu Terlapor III juga menderita kerugian karena tercorengnya nama baik dan reputasi baik Terlapor III di mata rekanan bisnis, terutama di bidang *underwater construction,* akibat dari tuduhan persekongkolan Tender yang tidak berdasar dan tanpa bukti. ----------

3.47 Dengan demikian, dalil dalam LDP serta tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Terlapor III seolah-olah melakukan persekongkolan Tender dengan Terlapor I dan Terlapor II, terbukti merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar. ----------

3.48 Berdasarkan seluruh penjelasan-penjelasan di atas sudah seharusnya Terlapor III dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 karena tidak ada persekongkolan dalam perkara ini. ----------

3.49 Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam Tanggapan ini, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017agar dapat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan atau Keputusan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017 ini ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dan menyatakan bahwa Terlapor III/PT Aquamarine Divindo Inspection tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

4. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap: ----------

4.1 Sdr. Dwi Andriyanto selaku Personal Asistant mewakili Direktur PT DOF Subsea sebagai Saksi pada Sidang tanggal 17 Januari 2018 (*vide Bukti* B4); ----------

4.2 Sdri. Mia Siti Mariani selaku Administrator mewakili Direktur PT Fabila Teknik Sejahtera sebagai Saksi pada Sidang tanggal 6 Februari 2018 (*vide Bukti* B5);----------

4.3 Sdr. Lusianan Sulistianingsih dan Sdr. Dewi Lisa Nehemia selaku perwakilan dari Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia dan PT Sigur Ros Indonesia sebagai Saksi pada Sidang tanggal 6 Februari 2018 (*vide Bukti* B6); ----------

4.4 Sdr. Daniel Yudi PS,ST., selaku Direktur PT Cakrawala Amartha Jaya sebagai Saksi pada Sidang tanggal 7 Februari 2018 (*vide* Bukti B7); ----------

4.5 Sdr. Ravinda Pratap Singh selaku Presiden Direktur PT Advance Offshore Services didampingi oleh Sdri. Nissa Pramesthi selaku koordinator tender sebagai Saksi pada Sidang tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* B9); ----------

4.6 Sdr. Achmad Djaelani selaku Direktur Utama PT Patra Dinamika sebagai Saksi pada Sidang tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* B10); ----------

4.7 Sdr. Bono Widjonarko selaku Direktur PT Rubotori Petrotech sebagai Saksi pada Sidang tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* B11); ----------

4.8 Sdri. Margaretha Retno Sundari selaku Direktur PT Seascape Survey Indonesia sebagai Saksi pada Sidang tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* B12); ----------

4.9 Sdr. Michael Wilson Tinangon selaku Direktur PT Samudera Biru Nusantara sebagai Saksi pada Sidang tanggal 13 Maret 2018 (*vide Bukti* B13); ----------

4.10 Sdri. Maya Aprilia selaku General Manager Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara-PT Cahaya Karya Bhakti Samudera sebagai Saksi pada Sidang tanggal 13 Maret 2018 (*vide Bukti* B14); ----------

4.11 Sdr. Slamet Subagyo sebagai Ahli Welding pada Sidang tanggal 26 Maret 2018 (*vide Bukti* B21);----------

4.12 Sdri. Maria Kristanti selaku Manajer Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa I dari SKK Migas sebagai Ahli Pengadaan pada Sidang tanggal 11 April 2018 (*vide Bukti* B22); -

4.13 Sdr. Dr. Jur. Udin Silalahi, SH.,M.H., sebagai Ahli Persaingan Usaha pada Sidang pada tanggal 17 April 2018 (*vide Bukti* B24);

4.14 Sdr. Pandji Achmad Ariaz sebagai Ahli Pengadaan pada Sidang tanggal 18 April 2018 (*vide Bukti* B25); ----------

4.15 Konsorsium PT Jasalindo - PT Warna Triendo, sebagai Saksi Investigator pada Sidang Majelis Komisi tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* B27); ----------

4.16 Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., sebagai Ahli Hukum Persaingan Usaha pada Sidang Majelis Komisi tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* B28); ----------

4.17 Sdr. Febby A. Viriawan, sebagai Saksi Terlaporpada Sidang Majelis Komisi tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* B29);----------

4.18 Sdr. Nur Achroni, sebagai Saksi Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* B31); ----------

4.19 Sdr. Herry Gunawan, sebagai Saksi Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* B32); ----------

4.20 Sdr. Nizar Saputra, sebagai Saksi Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* B33); ----------

4.21 Sdr. Wahyu Adiartono, sebagai Ahli pada Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* B34); ----------

4.22 PC Muriah, Ltd., dan PC Muriah II Ltd., sebagai Terlapor I dan Terlapor II pada Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Juli 2018 (*vide Bukti* B36);----------

4.23 PT Aquamarine Divindo Inspection, sebagai Terlapor III pada Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Juli 2018 (*vide Bukti* B37); ----

5. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (*vide Bukti* B38); ----------

6. Menimbang bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide Bukti* B39); ----------

7. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide Bukti* I6); ----------

7.1 Persyaratan IMCA Membership ----------

Penjelasan Umum Terkait IMCA ----------

Berdasarkan Bye Law for IMCA Holding Limited, IMCA (*International Marine Contractors Association*) adalah: "*The international trade association representing the interests of contractors and the associated supply chain directly or indirectly involved with the construction, installation, maintenance and/or operation of marine facilities for the extraction, production or transportation of offshore oil or gas, other extractive industries and for utilisation of wind, wave and other energy sources in a marine environment.*" ----------

Salah satu tujuan utama pembentukan IMCA adalah berupaya memberikan standar tertinggi terkait *health, safety, environment, and quality* dengan resiko dan biaya yang seimbang. Untuk memenuhi standarisasi tersebut, IMCA memberikan *training* dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bagi perusahaan yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota IMCA; ---------

Anggota IMCA antara lain terdiri dari para kontraktor, pemilik kapal, supplier barang dan jasa terkait kegiatan marine operations, *Diving*, Remotely Operation Vehicle (ROV) dan *Hydrographic Survey and Positioning Systems*; ----------

Bahwa keanggotaan IMCA berdasarkan kompetensi kontraktor terdiri dari Marine Division, *Diving* Division, Offshore Survey Division dan Remote System and ROV Division; ----------

Bahwa untuk memperoleh keanggotaan IMCA tersebut, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk masing-masing kategori/division, selanjutnya IMCA melakukan penilaian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, dan menerbitkan sertifikat IMCA bagi perusahaan yang lulus. Sertifikat IMCA tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang;----------

Berdasarkan Articles of Association for IMCA Holdings Limited, kriteria Keanggotaan IMCA (IMCA Membership) yaitu:----------

a. *Membership will be open to companies and other organisations but not to private individuals;* ----------
b. *Membership is non-transferrable;*----------
c. *Members shall be active in the offshore, marine or underwater engineering industries, either as contractors,*

vessel owners, suppliers of equipment or services, or as oil & gas and other offshore operators, government departments or other non-governmental organisations;----------

d. *There shall be two types of members: voting members (being all members other than corresponding members) and corresponding members;* ----------

e. *The category of membership to which a member shall belong shall be determined in accordance with the bye-laws.*---------

Bahwa sertifikat keanggotaan IMCA bersifat non transferable melekat pada perusahaan pemiliknya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi PT. Jaya Salvage Indonesia (Jasalindo) – PT. Warna Triendo. ----------

23.	Pertanyaan Investigator	Apakah betul sertifikat IMCA non transferable atau tidak bisa dialihkan keperusahaan lain?
	Jawaban	Betul, yang pasti itu melekat pada perusahaan pemiliknya.

Persyaratan Keanggotaan IMCA dalam *Tender Underwater for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No.11204) ----------

Bahwa persyaratan keanggotaan IMCA dalam tender a quo diatur berdasarkan ketentuan berikut : ----------

a. Dokumen Perencanaan Tender terkait Sertifikasi mensyaratkan IMCA Membership of Contractor, IMCA Supervisor Certification, IMCA Divers Certification; ----------

b. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender, Huruf D. Persyaratan Kualifikasi, poin 3. Persyaratan Teknis, diatur bahwa pemohon wajib melampirkan salinan keanggotaan dari *IMCA Membership*; ----------

c. *Dokumen Tender, Exhibit I-Special Provision and Scope of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience (point 1)* menyebutkan *"The Contractor is to be and IMCA member company";*----------

d. *Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification* berdasarkan dokumen faksimili Nomor 1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa peserta tender harus merupakan anggota IMCA untuk kategori *Diving* dan kategori ROV, dan

standarisasi peralatan dan personil harus mengikuti *IMCA Guidance* dan *IMCA Standard.*----------

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa salah satu persyaratan dalam tender perkara a quo adalah peserta tender memiliki sertifikat keanggotaan IMCA: ----------

a. Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia- PT Siguros Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Februari 2018 menyatakan bahwa persyaratan harus memiliki keanggotaan IMCA untuk *Diving* dan ROV adalah wajib. Oleh karena persyaratan peserta tender harus anggota IMCA untuk *Diving* dan ROV, dimana Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia - PT Siguros Indonesia hanya memiliki salah satu sertifikat IMCA yaitu IMCA ROV namun tidak ada untuk IMCA *Diving*, maka konsorsium tersebut memutuskan untuk tidak mengikuti proses tender selanjutnya (tidak memasukkan dokumen penawaran) : ----

26.	Pertanyaan Investigator	Apakah peserta harus memiliki IMCA membership untuk Diving dan ROV, apakah benar?
	Jawaban	Iya benar, di dokumen itu diwajibkan harus memiliki membership IMCA untuk Diving dan ROV.
27.	Pertanyaan Investigator	Apakah bisa disebutkan itu di dalam dokumen apa?
	Jawaban	Di dokumen klarifikasi, adminitrasi, teknikal qualifikasi. Ini dijadikan satu dokumen dan mengikat.
28.	Pertanyaan Investigator	Berarti pihak saksi memutuskan untuk tidak mengikuti tender, karena tidak memiliki salah satu sertifikat untuk diving dan ROV?
	Jawaban	Kami saling melengkapi untuk PT Bintang Subsea memiliki sertifikat ROV ada, tetapi yang diving tidak punya, sehingga kami memutuskan untuk tidak ikut dalam tender tersebut.
29.	Pertanyaan Investigator	Apakah menurut saksi persyaratan tersebut penting?
	Jawaban	Bukan menurut kami, tetapi menurut K3S, dan hal tersebut wajib harus ada.

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Advanced Offshore Services dalam Sidang Majelis tanggal 6 Februari 2018 ketentuan persyaratan keanggotaan IMCA telah disebutkan dalam dokumen ITB namun hanya menyebutkan harus anggota IMCA saja, belum sampai kepada persyaratan 2 (dua) jenis keanggotaan IMCA yaitu IMCA *Diving* dan IMCA ROV. Kemudian

pada saat *pre-bid clarification meeting* PT Advanced Offshore Services meminta klarifikasi mengenai persyaratan keanggotaan IMCA dan dijawab oleh Panitia Tender dengan menyatakan bahwa disyaratkan peserta tender harus anggota IMCA *Diving* dan IMCA ROV : ----------

12.	Pertanyaan Investigator	Persyaratan apa yang dilampirkan dalam dokumen ITB?
	Jawaban	Dalam dokumen ITB dijelaskan apa saja yang harus dilakukan salah satunya Kegiatan operasi yang harus dilaksanakan pemenang tender yakni *Diving* dan ROV. Kami juga kompeten karena memiliki sertifikat IMCA, kami percaya diri untuk mengikuti tender karena kami anggota IMCA.
13.	Pertanyaan Investigator	Apakah disebutkan dalam persyaratan tersebut hanya sertifikat *membership* IMCA atau sertifikat IMCA untuk *Diving* dan ROV?
	Jawaban	Di dokunmen ITB itu hanya menyebutkan harus member IMCA saja.

17.	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda mengajukan pertanyaan saaat *pre bid meeting*?
	Jawaban	Iya. Untuk hasil dari *pre bid meeting* tersebut tertuang didalam *memorandum of pre bid meeting* disitu dijelaskan kembali detail mengenai *instruction for bidder*, dimana yang salah satunya dijelaskan mengenai peserta yang ikut tender, nama tender atau judul tender dan para *bidder* diberi waktu satu hari untuk list permohonan klarifikasi yang ingin disampaikan. Dalam dokumen ITB juga disampaikan amandemen dokumen ITB pada point 2.4.4, yang mana masih sama harus menjadi member IMCA untuk peserta lelang. Satu hari setelah *pre bid meeting*, Kami meminta klarifikasi tentang IMCA member, lalu diberikan tanggapan oleh Panitia bahwa *bidder* harus member dalam bidang ROV dan *Diving* Division dalam IMCA. Ada juga pertanyaan yang serupa seperti kami dari peserta tender lain yang memohon konfirmasi terkait IMCA member, dan dijawab juga oleh panitia dengan jawaban yang serupa. Peserta tender haruslah anggota IMCA dalam bidang ROV dan *Diving*. Kegiatan ROV terpisah dengan kegiatan *Diving*.
18.	Pertanyaan Investigator	Berarti menurut saksi sertifikasi IMCA yang dimaksud harus IMCA ROV dan *Diving*?
	Jawaban	Iya, betul. Seluruh *bidder* yang menyerahkan dokumen tender haruslah memiliki IMCA member ROV dan *Diving*.

33.	Pertanyaan Investigator	Saat itu panitia mempersyaratkan sertifikat IMCA itu harus milik *bidder*?
	Jawaban	Betul, sertifikat IMCA harus milik *bidder*.

c. Bahwa keterangan saksi saudara Nizar Saptura Head coordinator (Karyawan Terlapor I dan Terlapor II) yang bekerja sebagai user dan yang mengevaluasi teknis kapal, diver dan ROV menjelaskan bahwa untuk tender a quo sertifikasi yang dipersyaratkan adalah keanggotaan IMCA ROV dan *Diving* : -----

61	Pertanyaan Investigator	Apa saja sertifikasi yang dipersyaratkan untuk Diver dan ROV?
	Jawaban	Untuk *tender a quo,*sertifikasi yang dipersyaratkan adalah sertifikasi IMCA.

71	Pertanyaan Investigator	Adakah ada yang bertanya terkait persyaratan IMCA? Perusahaan apa yang bertanya?
	Jawaban	Ya, ada dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika. Untuk PT Patra Dinamika bertanya tentang kepemilikan sertifikasi IMCA *Diving* dan IMCA ROV. Begitu pula dengan PT AOS yang menanyakan hal serupa.
72	Pertanyaan Investigator	Bagaimana jawaban anda?
	Jawaban	Kami menjawab kontraktor yang mempunyai IMCA *membership* ROV dan *Diving*.

d. Bahwa untuk mengikuti tender a quo perusahaan disyaratkan untuk memiliki sertifikat keanggotaan IMCA sesuai dengan BAP dari Konsorsium PT Cahaya Karya Bhakti Samudera – PT. Samudera Biru Nusantara :----------

17	Pertanyaan Investigator	Apakah dalam tender ini, diharuskan peserta harus memiliki IMCA?
	Jawaban	Ya betul, persyaratannya yang sudah memiliki sertifikat IMCA.

Terkait Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification) ----------

Pada tanggal 7 Oktober 2016 Terkait dengan Persyaratan Keanggotaan Sertifikat IMCA untuk *Diving* dan adalah sebagai berikut:----------

a. Dokumen ini dikirimkan kepada 6 (enam) peserta tender yang lulus prakualifikasi;----------
b. Dokumen ini merupakan respon dari Panitia Tender terhadap permintaan klarifikasi administrasi dan teknis dari peserta tender pada pre bid clarification meeting tanggal 26 September 2016; ----------

c. Panitia tender menyatakan bahwa dokumen ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender; ----------

d. Berdasarkan *Minutes of Prebid Meeting* tanggal 7 Oktober 2016 (halaman 5) tersebut dinyatakan bahwa "*The Minutes of Prebid Meeting shall be an integral part of bid Document and shall be submitted along with Bidder's proposal*"; ----------

e. Berdasarkan *Minutes of Prebid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016, butir 5 tentang *Technical, Commercial and Contractual Clarifications*, butir 5.5. dinyatakan bahwa *"Contractor shall follow IMCA requirement for all aspect of the execution';* ----------

f. Panitia tender menyatakan bahwa hasil dari pre-bid clarification meeting ini sifatnya mengikat.; ----------

g. Bahwa berdasarkan dokumen *Pre-Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification*) Pada tanggal 7 Oktober 2016 yang telah ditunjukan di dalam persidangan ketika melakukan pemeriksaan kepada Saksi yaitu Nizar Saputra sebagai Karyawan Petronas dan sebagai user dalam tender ini pada tanggal 24 Juli 2018, diketahui terdapat pertanyaan dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika terkait dengan persyaratan sertifikat IMCA. Berikut Pertanyaan dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika yang tercantum di dalam *Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification*) Pada tanggal 7 Oktober 2016 (Bukti Dokumen *Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification* Pada tanggal 7 Oktober 2016). Berikut lampiran dokumen tersebut yang isinya adalah ketika Panitia Tender merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta tender terkait dengan Sertifikasi IMCA dan standarisasi IMCA sebagai berikut: -----

	Reference	*Bidder's Clarification Request*	*Company Response*
	PT Advanced Offshore Services		
6.	*Exhibit I-Special Provision and Scope of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience (point 1)*	*Bidder request Company to confirm that Bidder must be IMCA member in Diving Division "Contractor Category".*	*Bidder of Member IMCA ROV and Diving.*

14.	*Exhibit III _ Contractor Equipment & Personnel Specification item. 4 Equipment page 4 of 9*	*Bidder request Company to confirm that this project will be follow strictly to IMCA guideline?*	- *Refer to IMCA Guidance* - *PETRONAS TECHNICAL STANDARD 602124 Diving operation management Guideline*
	PT Patra Dinamika		
4.	*Exhibit I (Point 2.4.4. Contractors Qualification Experience)*	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 September 2016. Kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan *IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS* karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV?	- Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA - Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan *Diving*
6.	*Exhibit III (Point 4.0. Equipment – A. Diving Equipment)*	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 September 2016. Semua peralatan menyelam dan peralatan yang terkait harus mematuhi IMCA. Semua peralatan menyelam dibuat dalam waktu 20 tahun terakhir diganti mejadi fit for purpose.	- IMCA Standard - IMCA D14 - IMCA D15 - IMCA D23 - IMCA R004
	PT Seascape Survey Indonesia		
5.	*Exhibit III Contractor Equipment & Personnel Specification. 4.0.A. Diving Equipment*	*It is stated in the document that all Diving equipment and associated equipment shall comply to International Diving reference like IMCA or ADCI or applicable government regulation.* *During the Pre Bid Meeting, Bidder understand that Company will revise the document and stated to be"comply to IMCA". Please confirm.*	*See Exhibit III Rev Company will refer to IMCA.*

Bahwa *pre-bid meeting* mengikat Kepada peserta tender dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender seperti keterangan ahli tender: ----------

a. Keterangan Ahli SKK Migas Maria Kristanti ----------

37	Pertanyaan Terlapor III	Pre bid meeting dilaksanakan di ruangan atau melalui korespondensi by email?
	Jawaban	Panitia tender mengundang semua peserta yang mendaftar tender dalam satu ruangan dan dalam pre bid meeting tersebut ada berita acara pre bid meeting dimana para peserta yang hadir menandatangani berita acara tersebut.
38	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ini sifatnya itu mengikat?

	Jawaban	Mengikat, Hasil rapat pre bid meeting akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen tender yang harus dilaksanakan oleh K3S dan peserta tender.

b. Keterangan Ahli SKK Migas Pandji Achmad Ariaz ----------

31	Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II	Dalam pre bid meeting itu sistemnya seperti apa?
	Jawaban	Pre bid meeting tujuannya menjelaskan agar semua peserta paham apa yang ingin ditenderkan, termasuk proses tendernya seperti apa. Pre bid meeting harus diadakan dalam suatu rapat dan ada interaksi antara semua peserta dan panitia tender secara terbuka untuk bisa saling bertanya. Pre bid meeting hanya untuk peserta yang lulus prakualifikasi dan ambil dokumen tender. Bila ada undangan pre bid meeting dan tidak hadir, maka peserta tersebut didiskualifikasi. Dalam pre bid meeting dimungkinkan terjadi sebuah perubahan, dituangkan dalam risalah rapat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen tender.

63	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan pre bid meeting, outputnya berita acara ditandatangani oleh semua pihak bila ada perubahan?
	Jawaban	Ya harus dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani semua pihak karena menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen tender.
64	Pertanyaan Investigator	Berarti risalah ini bagian mengikat dalam tender?
	Jawaban	Ya mengikat.

c. Keterangan Ahli Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Migas Wahyu Adiartono ----------

21	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	Apakah benar jika hasil dari klarifikasi itu harus disirkulasikan dan disepakati?
	Jawaban	Ya betul. Prinsipnya Transparan

25	Pertanyaan Investigator	Apa definisi *pre bid meeting*?
	Jawaban	Bahasa indonesianya adalah rapat penjelasan lelang. Artinya adalah rapat yang diberikan pada para penawar untuk menjelaskan isi dokumen pengadaan yang terdiri dari ITB, *General Terms and Condition* dan *Exhibit*. Menjelaskan apa yang menjadi persyaratan dan bagaimana tata cara pemasukan penawarannya. Juga menerima pertanyaan dari para penawar terkait hal-hal yang belum dipahami, baik itu tentang persyaratan maupun tentang spesifikasi (baik teknis maupun kualifikasi)

26	Pertanyaan Investigator	Jadi Tanya jawab yang terjadi nantinya akan dituangkan dalam risalah? Apakah menjadi bagian dari dokumen tender dan mengikat seluruh peserta?
	Jawaban	Ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender.

d. Keterangan Nizar Saputra sebagai Saksi karyawan Petronas dan sebagai *user* dalam tender ini ----------

74	Pertanyaan Investigator	Apakah *Pre Bid Meeting* ini bersifat mengikat?
	Jawaban	Ya mengikat, karena hasilnya diketahui oleh semua pihak.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Direktur PT Patra Dinamika yang bernama Achmad Djaelani pada tanggal 12 Maret 2018 diketahui bahwa terkait dengan pertanyaan dari PT Patra Dinamika di dalam *Pre Bid Meeting* terkait "Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA *Diving and Remote System and ROV Division* karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV" dan adanya jawaban dari *Tender Comitee*: "Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA *Diving* dan ROV. Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan menyelam". Bahwa menurut Direktur PT Patra Dinamika yang bernama Achmad Djaelani keanggotaan IMCA untuk *Diving and Remote System and ROV Division* merupakan syarat yang harus dimiliki oleh Para Peserta Tender: ----------

15	Pertanyaan Investigator	Setelah membaca dokumen tender (ITB) tersebut, apa yang anda pahami?
	Jawaban	Tender seperti ini bukan hal baru bagi PT Patra Dinamika karena kami sudah lama mengikuti tender sejenis, jadi sepertinya semua yang diminta dapat kami penuhi, baik dokumen administrasi maupun dokumen teknik.
	Pertanyaan Investigator	Apakah termasuk sertifikat IMCA *Diving* dan ROV juga?
16	Jawaban	Ya, itu masuk di dokumen teknis yang dipersyaratkan. Kami lengkapi semuanya
22	Pertanyaan Investigator	Dicatatan saya, ada. Untuk PT Patra Dinamika disini disebutkan bahwa: "Mohon konfirmasi, sesuai dengan *Pre-bid Meeting* pada 26 September 2016, kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA *Diving and Remote System and ROV Division* karena dalam proyek

		ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV" Kemudian dibalas oleh *Tender Comitee*: Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA *Diving* dan ROV. Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan menyelam.
	Jawaban	Maaf saya lupa, mungkin benar ada pertanyaan seperti itu dari PT Patra Dinamika. Saat itu yang *in charge* menangani langssung adalah Pak Doni, pegawai saya, beliau yang mengurusi tender ini. Saya yang mengawasi saja. Menurut sepemahaman saya dari pertanyaan diatas berarti peserta tender harus memiliki keduanya ya, baik *Diving* maupun ROV.

No	Reference	Question from Bidder		Response from Company
		Indonesia	English	
4	Exhibit I (Point 2.4.4 Contractors Qualification Experiences)	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 Sept 2016. Kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan Penyelaman dan ROV?	Please confirm: In accordance with the pre bid meeting Sept 26, 2016. The contractor is to be IMCA member company. Bidders must have a member IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS due to in this project related operation with diving and ROV?	• Peserta tender memiliki Ke anggotaan IMCA ROV Dan Diving • Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan Diving

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Direktur Advanced Offshore Services yang bernama Ravinda Pratap Singh pada tanggal 12 Maret 2018 diketahui bahwa terkait dengan PT Advance Offshore mengajukan pertanyaan ketika *Pre Bid Meeting* pada tanggal 7 Oktober 2016 terkait dengan IMCA member yang berdasarkan klarifikasi oleh Panitia Tender dijelaskan bahwa *bidder* harus member dalam bidang ROV dan *Diving* Division dalam IMCA;----------

17	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda mengajukan pertanyaan saaat *pre bid meeting*?
	Jawaban	Iya. Untuk hasil dari *pre bid meeting* tersebut tertuang didalam *memorandum of pre bid meeting* disitu dijelaskan kembali detail mengenai *instruction for bidder*, dimana yang salah satunya dijelaskan mengenai peserta yang ikut tender, nama tender atau judul tender dan para *bidder* diberi waktu satu hari untuk list permohonan klarifikasi yang ingin disampaikan. Dalam dokumen ITB juga disampaikan amandemen dokumen ITB pada point 2.4.4, yang mana masih sama harus menjadi member IMCA untuk peserta lelang.

		Satu hari setelah *pre bid meeting*, Kami meminta klarifikasi tentang IMCA member, lalu diberikan tanggapan oleh Panitia bahwa *bidder* harus member dalam bidang ROV dan *Diving* Division dalam IMCA.Ada juga pertanyaan yang serupa seperti kami dari peserta tender lain yang memohon konfirmasi terkait IMCA member, dan dijawab juga oleh panitia dengan jawaban yang serupa. Peserta tender haruslah anggota IMCA dalam bidang ROV dan *Diving*. Kegiatan ROV terpisah dengan kegiatan *Diving*.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Direktur Advanced Offshore Services yang bernama Ravinda Pratap Singh pada tanggal 12 Maret 2018 diketahui bahwa Sertifikat IMCA yang diminta oleh Pihak Panitia Komite tender adalah *IMCA Member Diving dan ROV;*----------

18	Pertanyaan Investigator	Berarti menurut saksi sertifikasi IMCA yang dimaksud harus IMCA ROV dan *Diving*?
	Jawaban	Iya, betul. Seluruh *bidder* yang menyerahkan dokumen tender haruslah memiliki IMCA member ROV dan *Diving*.

h. Bahwa pada saat penjelasan dijelaskan oleh Terlapor I dan Terlapor II perusahaan harus memiliki Keanggotaan IMCA untuk ROV dan *Diving* sesuai keterangan Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia dan PT Siguros Indonesia sebagi berikut:----------

26.	Pertanyaan Investigator	Apakah peserta harus memiliki IMCA membership untuk Diving dan ROV, apakah benar?
	Jawaban	Iya benar, di dokumen itu diwajibkan harus memiliki membership IMCA untuk Diving dan ROV.
27.	Pertanyaan Investigator	Apakah bisa disebutkan itu di dalam dokumen apa?
	Jawaban	Di dokumen klarifikasi, adminitrasi, teknikal qualifikasi. Ini dijadikan satu dokumen dan mengikat.
29.	Pertanyaan Investigator	Apakah menurut saksi persyaratan tersebut penting?
	Jawaban	Bukan menurut kami, tetapi menurut K3S, dan hal tersebut wajib harus ada.

i. Bahwa keterangan PT Advance Offshore Services, menjelaskan untuk mengikuti tender a quo disyaratkan mempunyai sertifikat keanggotan IMCA *Diving* dan ROV -----

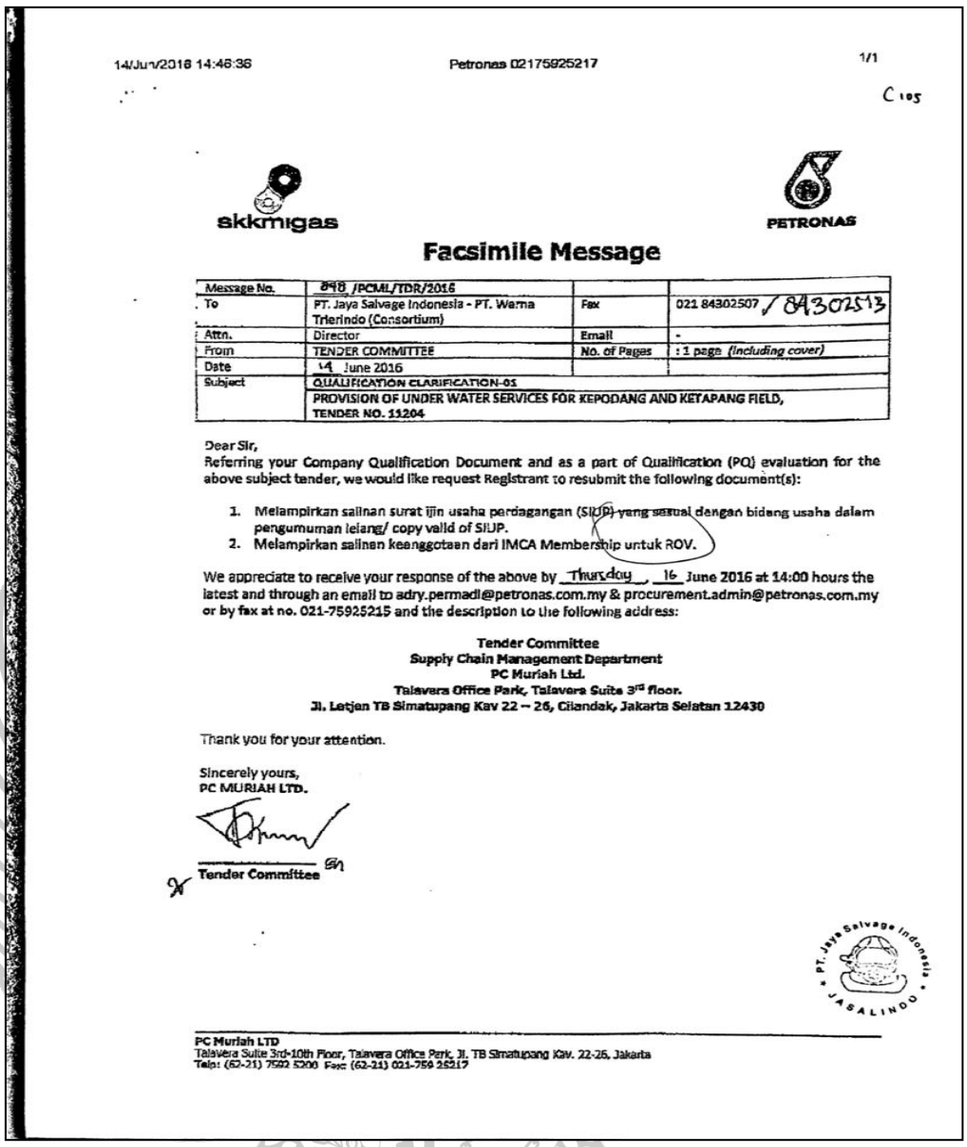
12	Pertanyaan Investigator	Persyaratan apa yang dilampirkan dalam dokumen ITB?
	Jawaban	Dalam dokumen ITB dijelaskan apa saja yang harus dilakukan salah satunya Kegiatan operasi yang harus dilaksanakan pemenang tender yakni Diving dan ROV. Kami juga kompeten karena memiliki sertifikat IMCA, kami percaya diri untuk mengikuti tender karena kami anggota IMCA.
13	Pertanyaan Investigator	Apakah disebutkan dalam persyaratan tersebut hanya sertifikat membership IMCA atau sertifikat IMCA untuk Diving dan ROV?
	Jawaban	Di dokunmen ITB itu hanya menyebutkan harus member IMCA saja.
14	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda memenuhi persyaratan IMCA Diving dan ROV?
	Jawaban	Iya, kami memiliki IMCA member bidang Diving dan ROV. Sehingga kami merasa masuk kualifikasi dalam tender perkara a quo.
15	Pertanyaan Investigator	Apakah persyatan dalam dokumen ITB termasuk persyaratan yang penting menurut saudara saksi?
	Jawaban	Iya, karena tender ini adalah pekerjaan utamanya bidang Diving dan ROV dan kami memiliki dan mampu melakukan jenis pekerjaan ini. Namun dalam dokumen ITB belum dijelaskan lebih lanjut member IMCA tersebut dalam kategori bidang apa.
16	Pertanyaan Investigator	Pada saat pre bid meeting panitia tender menjelaskan apa saja?
	Jawaban	Ada banyak hal yang dijelaskan dan apa saja yang harus dipenuhi oleh para bidder. Untuk detailnya kami mempunyai memorandum of requirement pre bid meeting tersebut satu persatu, tetapi yang kami dititik beratkan di point 5.4 yang menyebutkan “Contractor shall follow IMCA requirement for all aspect of the execution” yang dapat kami interpretasikan bahwa peserta harus mengikuti persyaratan IMCA untuk semua persyaratan aspek pelaksanaan.
17	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda mengajukan pertanyaan saaat pre bid meeting?
	Jawaban	Iya. Untuk hasil dari pre bid meeting tersebut tertuang didalam memorandum of pre bid meeting disitu dijelaskan kembali detail mengenai instruction for bidder, dimana yang salah satunya dijelaskan mengenai peserta yang ikut tender, nama tender atau judul tender dan para bidder diberi waktu satu hari untuk list permohonan klarifikasi yang ingin disampaikan. Dalam dokumen ITB juga disampaikan amandemen dokumen ITB pada point 2.4.4, yang mana masih sama harus menjadi member IMCA untuk peserta lelang.

		Satu hari setelah pre bid meeting, Kami meminta klarifikasi tentang IMCA member, lalu diberikan tanggapan oleh Panitia bahwa bidder harus member dalam bidang ROV dan *Diving* Division dalam IMCA. Ada juga pertanyaan yang serupa seperti kami dari peserta tender lain yang memohon konfirmasi terkait IMCA member, dan dijawab juga oleh panitia dengan jawaban yang serupa. Peserta tender haruslah anggota IMCA dalam bidang ROV dan *Diving*. Kegiatan ROV terpisah dengan kegiatan *Diving*.
18	Pertanyaan Investigator	Berarti menurut saksi sertifikasi IMCA yang dimaksud harus IMCA ROV dan *Diving*?
	Jawaban	Iya, betul. Seluruh bidder yang menyerahkan dokumen tender haruslah memiliki IMCA member ROV dan *Diving*.

Terkait Dengan Persyaratan Keanggotaan IMCA Kontraktor Di dalam Tahap Pra Kualifikasi Yang Tercantum Di dalam ITB (*Instruction To Bidder)* ----------

Bahwa diketahui di dalam ITB (*Instruction To Bidder*) terkait dengan persyaratan di dalam Pra Kualifikasi masih menyebutkan memiliki keanggotaan IMCA kontraktor secara umum sebagaimana berdasarkan ketentuan *Exhibit I-Spesial Provision And Scope Of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience* (Poin 1) Di sebutkan bahwa : *The Contractors is tobe and IMCA member company* (Bukti Dokumen ITB); ----------

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo pada tanggal 17 Juli 2018 diketahui bahwa pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo telah diminta oleh pihak komite tender /panitia di dalam tahap Pra kualifikasi untuk kepemilikan dan keanggotaan sertifikat IMCA untuk jenis ROV (*Remotely Operated Vehicle)* melalui Faxmile yang dikirimkan oleh pihak Komite Tender/ Panitia. Berikut Terlampir Faxmile yang diberikan oleh pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo melalui persidangan terkait dengan Permintaan pihak Komite Tender/ Panitia permintaan untuk melengkapi sertifikat IMCA untuk jenis ROV (*Remotely Operated Vehicle);* ----------



14/Jun/2016 14:46:36 Petronas 02175925217 1/1

C 105

skkmigas PETRONAS

Facsimile Message

Message No.	848 /PCML/TDR/2016		
To	PT. Jaya Salvage Indonesia - PT. Warna Triendo (Consortium)	Fax	021 84302507 / 84302513
Attn.	Director	Email	-
From	TENDER COMMITTEE	No. of Pages	: 1 page (including cover)
Date	14 June 2016		
Subject	QUALIFICATION CLARIFICATION-01		
	PROVISION OF UNDER WATER SERVICES FOR KEPODANG AND KETAPANG FIELD, TENDER NO. 11204		

Dear Sir,
Referring your Company Qualification Document and as a part of Qualification (PQ) evaluation for the above subject tender, we would like request Registrant to resubmit the following document(s):

1. Melampirkan salinan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang sesuai dengan bidang usaha dalam pengumuman lelang/ copy valid of SIUP.
2. Melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership untuk ROV.

We appreciate to receive your response of the above by Thursday, 16 June 2016 at 14:00 hours the latest and through an email to adry.permadi@petronas.com.my & procurement.admin@petronas.com.my or by fax at no. 021-75925215 and the description to the following address:

Tender Committee
Supply Chain Management Department
PC Muriah Ltd.
Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd floor.
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Thank you for your attention.

Sincerely yours,
PC MURIAH LTD.

Tender Committee

PT. Jaya Salvage Indonesia JASALINDO

PC Muriah LTD
Talavera Suite 3rd-10th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta
Telp: (62-21) 7592 5200 Fax: (62-21) 021-759 25217

15	Pertanyaan Investigator	Tolong diceritakan kembali proses-proses awal dari proses tender dan mendapatkan surat faximili
	Jawaban	Sebelum ada faksimili yang menyatakan kami tidak lolos, ada faks sebelumnya yang menanyakan beberapa dokumen kepada kami yaitu agar melampirkan SIUP yang sesuai dengan bidang usaha dalam lelang, m lampirkan salinan IMCA membership ROV. Lalu kami jawab, kami melampirkan SIUP dan support letter (Surat dukungan) dari pihak ketiga untuk sertifikat IMCA ROV. Saat itu faximili pertama pada tanggal 14 Juni 2016. Kemudian kami menjawab surat tersebut melalui surat kami pada tanggal 16 juni 2016. Setelah itu kami mendapatkan pemberitahuan bahwa kami gagal pada tanggal 12 Agustus 2016.

Bahwa berdasarkan Dokumen Faxmile yang tertanggal 16 Juni 2016 yang ditunjukan oleh pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo di muka persidangan pada tanggal 17 Juli 2018terkait dengan jawaban dari pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo kepada komite tender/Panitia

di ketahui di dalam faxmile tersebut pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo menjelaskan bahwa di dalam persyaratan di Dokumen Prakualifikasi tidak menyebutkan untuk persyaratan sertifikat IMCA jenis ROV tetapi hanya menyebutkan kepemilikan dan keanggotaan sertifikat IMCA saja (*Having read the administration requirement for the subject tender, we noted that there was not stated on the said requirement for IMCA ROV however we the bidders should be provided IMCA Membership only (attached please find the technical requirement pages 7 0f 27)* . Berikut Terlampir Faxmile tertanggal 16 Juni 2016 terkait dengan Jawaban pihak pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo kepada Komite Tender/ Panitia; ----------

PT. WARMA TRIERINDO
MARINE OFFSHORE SERVICES

C 104

To : **Tender Committee**
Supply Chain Management Department
PC Muriah Ltd
Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd Floor
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22 – 26
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

From : **PT. Warma Trierindo**
Ref No: 104/LTR/IV/2016

Date : **Jakarta, June 16, 2016**

RE : **Qualification Clarification**
PROVISION OF UNDER WATER SERVICES FOR
KEPODANG & KETAPANG FIELD

Dear Sirs

We thanks for your fax dated of June 14, 2016 regarding Qualification Clarification for Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field with Tender No. 11204

Having read the Administration Requirement for the subject Tender, we noted that there was not stated on the said requirement for IMCA ROV however we the bidders should be provided IMCA Membership only *(attached please find the Technical Requirement Pages 7 of 27)*

However attached please find the following mention documents for your references:
1. IMCA Membership (PT. Jaya Salvage Indonesia)
2. SIUP Salvage & PBA PT. Jaya Salvage Indonesia)
3. SIUP Besar (PT. Jaya Salvage Indonesia & PT. Warma Trierindo)
4. Support Letter & IMCA ROV

Hope the above would be clarifying and your kind attention and corporation is highly appreciated

Kind Regards

B. J. Doddy Vidhiantoro
Director

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada Terlapor III yaitu PT Aquamarine Divindo Inspection pada tanggal 25 Juli 2018 diketahui bahwa Rachmadi Satriya Permana sebagai Manager PT Aquamarine Divindo Inspection mengatakan bahwa di dalam dokumen tender atau ITB (*Instruction To Bidder)* tidak terdapat persyaratan untuk sertifikat keanggotaan IMCA jenis *Diving* dan

ROV tetapi persyaratan tersebut di jelaskan oleh pihak komite tender/Panitia Tender dan tertulis di dalam tahap *Pre Bid Meeting;* ----------

96	Pertanyaan Investigator	Setelah mengambil dokumen tender, anda melihat ada persyaratan menyertakan sertifikat dokumen IMCA ROV dan IMCA *Diving*?
	Jawaban	Dalam dokumen ITB tidak disebutkan, namun tertulis dalam klarifikasi setelah pre bid meeting.

Terkait ketentuan *letter of support* untuk Persyaratan Keanggotaan IMCA ----------

Bahwa dalam *Instruction To Bidder* (ITB) yang disampaikan kepada seluruh peserta tender, tidak ada penyebutan atau ketentuan mengenai letter of support untuk keanggotaan IMCA sama sekali; ----------

Bahwa berdasarkan *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016 tidak ada menyinggung atau membahas mengenai letter of support untuk keanggotaan IMCA sama sekali;----------

Bahwa konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia - PT Siguros Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Februari 2018 menyatakan bahwa dalam tender perkara a quo, terkait persyaratan IMCA sertifikat keanggotaan IMCA haruslah yang dimiliki oleh perusahaan peserta tender sebagaimana juga dibahas saat *pre bid clarification meeting*, bukan *letter of support*;

48.	Pertanyaan Majelis Komisi	Kenapa tidak mencari alternatif dari pihak lain untuk mendapatkan latter of support untuk mensupport sertifikat tersebut?
	Jawaban	Karena menurut pemahaman kami, kalau ingin memberikan dukungan perizinan-perizinan, harus dengan konsorsium. Dan menurut pemahaman kami juga, sertifikat membership IMCA haruslah yang dimiliki oleh perusahaan peserta tender. Karena hal tersebut kami memilih untuk mengundurkan diri.
49.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada perbincangan dalam rapat pre-bid meeting terkait sertifikat ROV dan Diving IMCA?
	Jawaban	Yang dibicarakan adalah masalah kepemilikan dari sertifikat IMCA.
50.	Pertanyaan Majelis Komisi	Bukan letter of support?
	Jawaban	Bukan.
51.	Pernyataan Majelis Komisi	Dalam dokumen klarifikasi, bagaimana kesimupulan terkait sertifikat IMCA ini?
52.	Jawaban	Disini disebutkan: "Bidder request company to confirm that bidder must be IMCA member in Diving Division Contractor Catagory" Kemudian respon dari perusahaan adalah: "Bidder of member IMCA in ROV and Diving"

Bahwa Ahli Manager Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas Maria Kristanti dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 April 2018 "apabila di dalam dokumen tender tidak menyebutkan mengenai persyaratan *letter of support* maka peserta tender tidak boleh menggunakan *letter of support*";-------

29.	Pertanyaan Terlapor III	Apakah *letter of support* (surat dukungan) boleh digunakan dalam pekerjaan ini?
	Jawaban	Jika di persyaratakan dalam dokumen tender maka dapat digunakan.
30.	Pertanyaan Terlapor III	Berdasarkan PTK007 Rev. 3, apakah ada larangan peserta menggunakan surat dukungan?
	Jawaban	Tidak ada aturan tersebut didalam PTK 007, apabila sejak awal sudah disebutkan dalam persyaratan dokumen tender. Namun bila di dalam dokumen tender tidak ada disebutkan dari awal persyaratan tersebut, maka tidak boleh menggunakan surat dukungan.
31.	Pertanyaan Terlapor III	Surat dukungan yang anda maksud seperti apa?
	Jawaban	Salah satunya contoh surat dukungan bank. Harus dicantumkan dalam dokumen tender dari awal.
32.	Pertanyaan Terlapor III	Itu kan untuk bank, bila yang lain bagaimana?
	Jawaban	Sama saja, baik itu surat dukungan teknis juga sama saja. Harus dipersyaratkan sejak awal dalam dokumen tender.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan Saksi Nur Achroni tanggal 17 Juli 2018, Nur Achroni selaku karyawan Terlapor I dan Terlapor II yaitu *procurement officer* pekerjaan tender dalam perkara *a quo* (panitia) menyatakan bahwa terkait persyaratan IMCA di dalam dokumen Minutes of Pre Bid Meeting tidak ada menyebutkan mengenai *letter of support* diperbolehkan, hanya ada kata *membership* (of IMCA) dan tidak ada kata-kata *letter of support* sama sekali; ----------

	Jawaban	Tidak ada pak, hanya seperti yang tertulis pada dokumen yakni membership, namun tidak ada larangan.
43.	Pertanyaan Investigator	Jadi hanya ada kata membership?
	Jawaban	Ya betul.
44.	Pertanyaan Investigator	Tidak ada kata supporting letter?
	Jawaban	Tidak ada.
41.	Pertanyaan Investigator	Tadi anda bilang supporting lazim, apakah ada pertanyaan tentang supporting letter dalam pre bid meeting dan waktu tambahan sehari?
	Jawaban	Tidak ada.
42.	Pertanyaan Investigator	Adakah tertulis bahwa supporting letter diperbolehkan?

Bahwa untuk mengikuti tender ini tidak dapat menggunakan *letter of support* karena sertifikat keanggotaan IMCA baik *Diving*

dan ROV bersifat mengikat dan melekat kepada perusahaan yang tercantum di dalam sertifikat sehingga perusahaan dapat membentuk konsorsium untuk dapat mengikuti persyaratan tender a quo tidak dapat dalam bentuk *letter of support*, sesuai dengan keterangan PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (Cakrabhasa); ----------

16	Pertanyaan Majelis Komisi	Ketika mendaftar tender ini, anda melakukan konsorsium atau supporting letter?
	Jawaban	Kami melakukan konsorsium dengan perusahaan pemilik IMCA yakni SBN. Yang saya pahami, nama dalam sertifikat kan milik SBN. Maka untuk bisa mengikuti tender ini dengan persyaratan peserta harus memiliki IMCA, kami membentuk konsorsium dengan SBN.
18	Pertanyaan Investigator	Hal tersebut yang membuat anda membentuk konsorsium?
	Jawaban	Ya betul, itu alasan saja membentuk konsorsium. Peserta dipersyaratkan harus memiliki IMCA.
19	Pertanyaan Investigator	Apakah sertifikat IMCA atas nama bidder?
	Jawaban	Ya, sertifikat kami saat itu atas nama SBN, maka kami lakukan KSO.

Bahwa keterangan PT. Advance Offshore Services menjelaskan bahwa sertifikat IMCA harus milik sendiri untuk mengikuti tender a quo; ----------

19	Pertanyaan Investigator	Apakah Sertifikasi IMCA untuk *Diving* dan ROV ini milik perusahaan anda sendiri?
	Jawaban	Betul, atas nama perusahaan kami.

Berdasarkan keterangan tersebut letter of support tidak diperkenankan karena tidak tercantum di dalam Bid Document, dan letter of support adalah bentuk dari fasilitasi dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III untuk memenangkan tender *a quo;* ----------

Bahwa dalam menetapkan persyaratan tender terkait keanggotaan IMCA yang menurut Terlapor I dan Terlapor II boleh dengan *letter of support* meskipun tidak dibahas sama sekali dalam dokumen tender dan *pre-bid meeting* mengenai *letter of support.* Terlapor I dan Terlapor II membuat interpretasi yang berbeda terkait persyaratan tender dari dokumen tender dan hasil *pre-bid meeting*, dimana menurut Ahli Paramita Prananingtyas pada tanggal 17 Juli 2018 isi dokumen yang

bersifat ambigu merupakan salah satu ciri persekongkolan di Indonesia----------

	Jawaban	Mohon maaf Majelis, apa yang disampaikan, adalah salah satu ciri persekongkolan tender di Indonesia. Ada beberapa hal yakni berhubungan dengan adanya isi dokumen yang bersifat ambigu dimana dokumen bisa salah diinterpretasikan peserta tender. Merupakan kewajiban panitia tender untuk memberikan penjelasan kepada peserta tender dalam bahasa yang sama. Peserta tender diberikan kesempatan untuk menanyakan isi dari dokumen tender dan bagaimana proses perencanaan dan tahapan-tahapan tender.

21.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apabila dalam suatu dokumen persyaratan, terdapat hal-hal yang tidak jelas, apakah bisa ditafsirkan lain, siapa yang berwenang menentukan tafsir tersebut?

Pemenang tender *a quo* tidak mempunyai sertifikat IMCA *Diving*

Bahwa pemenang tender A quo yaitu PT Aquamarine Divindo (Terlapor III) tidak memiliki sertifikat IMCA *Diving* yang disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II seperti dijelaskan oleh Keterangan Saksi PT Cakrawala Amartha Jaya;----------

11.	Pertanyaan Investigator	Anda tahu pemenang tender a quo?
	Jawaban	Saya tahu, PT Aquamarine. Mereka punya sertifikat ROV, tapi untuk sertifikat *Diving* mereka sepertinya sedang urus IMCA karena tidak punya. Sesama pelaku bisnis kami saling kenal.

Bahwa berdasarkan keterangan PT Advance offshore services, pemenang tender yaitu Terlapor III tidak mempunyai sertifikat keanggotaan IMCA *Diving* seperti yang dipersyaratkan di dalam *Bid Document* dan *Pre-bid Meeting* oleh Terlapor I dan Terlapor III. ----------

25	Pertanyaan Investigator	Lalu berdasarkan informasi yang diperoleh dari website apakah semuanya adalah member of IMCA?
	Jawaban	Tidak.
26	Pertanyaan Investigator	Bisa dijelaskan?
	Jawaban	Berdasarkan *official website* IMCA kami menemukan bahwa yang memiliki sertifikat IMCA katagori *Diving* dan ROV adalah PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika. PT Seascape Surveys Indonesia memiliki sertifikat IMCA katagori *Diving* sedangkan untuk IMCA ROVnya milik perusahaan mereka yang berada di Singapore. Untuk PT Aquamarine Divindo Inspection hanya memiliki sertifikat IMCA katagori ROV dan tidak memiliki sertifikat IMCA katagori *Diving*, padahal yang dipersyaratkan harus keduanya.

Scoop of Work Utama Tender A Quo ----------

Bahwa *scope of work* utama tender a quo adalah pekerjaan *underwater services* bukan pekerjaan kapal, sehingga memiliki keanggotaan sertifikat IMCA *Diving* dan ROV adalah keharusan bagi perusahaan yang mengikuti tender ini tidak bisa menggunakan *letter of support* seperti halnya dalam kapal, karena sertifikat IMCA bersifat mengikat ke perusahaan dan tidak bisa dipindahkan (*not transferable*); ----------

Bahwa BAP Saudara Herry Gunawan yang bekerja sebagai *marine coordinator* (karyawan Terlapor I dan Terlapor II) menerangkan pekerjaan utama adalah *underwater services* bukan kapal. ----------

24	Pertanyaan Investigator	Apakah kapal menjadi pekerjaan utama tender ini?
	Jawaban	Pekerjaan utamanya *underwater services*, kapal adalah salah satu pendukungnya.

Terdapat rangkap jabatan pada beberapa posisi di PC Muriah (Terlapor I) dan PC Ketapang (Terlapor II) ----------

Bahwa terdapat rangkap jabatan Presiden Direktur dan posisi kunci (struktural) di PC Muriah (Terlapor I) dan PC Ketapang (Terlapor II) sesuai dengan keterangan Terlapor I dan Terlapor II.

37	Pertanyaan Investigator	Apakah bapak Muhammad Zaini sebelumnya juga menjabat di PC Muriah dan PC Ketapang?
	Jawaban	Ya benar.
38	Pertanyaan Investigator	Apa pertimbangan dari Petronas pusat untuk membuat kebijakan ada satu president untuk PC Muriah dan PC ketapang?
	Jawaban	Menurut pandangan saya, pertimbangan dari petronas menunjuk satu president untuk PC Ketapang dan PC Muriah dalam rangka optimalisasi dan mengintegrasikan kegiatan operasi di kedua perusahaan tersebut.
39	Pertanyaan Investigator	Apakah struktur orginasi di bawahnya juga begitu, seperti key position di PC Muriah dan PC ketapang?
	Jawaban	Kami beroperasi sebagai satu badan, dimana stafnya berbagi waktu untuk PC Muriah dan PC ketapang. Namununtuk pekerjaandi lapangan offshorehal ini tidak berlaku.
40	Pertanyaan Investigator	Sayaulangin pertanyaan saya, apakah adakey position juga yang dirangkap dalam PC Muriah dan PC Ketapang?
	Jawaban	Ya betul, untuk manager juga merangkap di PC Muriah dan PC Ketapang.

41	Pertanyaan Investigator	Jadi apa tujuandilakukannya pengadaan bersamaan untuk PC Muriah dan PC Ketapang?
	Jawaban	Jadi memang dalam praktik terbaik adalah melakukan pengadaan bersama untuk PC Muriah dan PC Ketapang, Tujuannya untuk mendapatkan penyedia yang beragam dan pengoptimalan operasi untuk mendapat harga yang kompetitif.

Tentang PT Samudera Biru Nusantara ----------

Bahwa PT. Samudera Biru Nusantara adalah perusahaan yang memberikan dukungan IMCA *Diving* kepada PT. Aquamarine (Terlapor III) sehingga dapat ditunjuk sebagai pemenang pada tender a quo, sesuai dengan keterangan Terlapor III; ----------

54	Pertanyaan Kuasa Hukum III	Pada saat memasukan dokumen tender, anda ingat apa saja yang harus dilengkapi setelah hasil prebid?
	Jawaban	Disebutkan IMCA Contractor wajib memiliki IMCA *Diving* dan IMCA ROV.

55	Pertanyaan Kuasa Hukum III	Apakah anda memiliki semuanya?
	Jawaban	Untuk saat itu kami hanya memiliki IMCA ROV, untuk IMCA *Diving* kami support dari PT Samudra Biru

Bahwa kondisi keuangan dan kantor PT. Samudera Biru Nusantara sudah hampir bangkrut sesuai dengan keterangan saksi PT. Rubotori Petrotech. ----------

11	Pertanyaan Investigator	Apakah Rubotori jadi melakukan akuisisi kepada SBN?
	Jawaban	SBN tidak jadi kami akuisisi karena asetnya sedikit.
17	Pertanyaan Investigator	SBN ini sudah bangkrut atau bagaimana sehingga anda tertarik untuk mengakuisisi? Tolong diceritakan?
	Jawaban	SBN Sudah bangkrut, kami tertarik untuk mengakuisisi karena SBN ini sudah ada sejak tahun 98 dengan pengalaman kerja yang cukup bagus dan sertifikat IMCA yang dimiliki dimana di Indonesia tidak banyak yang bisa punya sertifikat IMCA. Kami pernah mendatangi kantornya, Perusahaan sudah bangkrut, kantornya juga sudah menjadi resto. Untuk tabung selang dan chamber sudah tua dan buatan lama. Boleh dibilang untuk akuisisi itu hanya untuk dijual di kilo saja untuk loak, kami butuh paper-nya untuk pengalaman kerja saja.
6	Pertanyaan Investigator	Saat akan melakukan kerja sama B to B antara Rubotori dan SBN, Apakah sertifikat IMCA *Diving* dari SBN sudah expired atau masih berlaku?

	Jawaban	Sertifikat IMCA sudah mati pada saat itu, prosesnya adalah Rubotori yang memperpanjang. Yang menghubungi ke UK adalah SBN karena mempunyai direct account, financialnya dari Rubotori.
37	Pertanyaan Majelis Komisi	Saat itu anda yang memperjanjang sertifikat IMCA SBN, berapa biayanya?
	Jawaban	Saat itu sekitar Rp 140.000.000, 00 per tahun untuk member fee IMCA.
39	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk SBN sendiri masih ada divernya?
	Jawaban	Masih ada, saat itu saya lihat ada 2 (dua) orang diver.
32	Pertanyaan Terlapor III	Apa dasar bapak mengatakan SBN bangkrut dan Saat itu keadaan SBN bagaimana?
	Jawaban	Saat itu posisi sudah seperti bangkrut, dokumen berserakan dan kantor sudah berantakan seperti gudang.

Bahwa PT. Samudera Biru Nusantara juga mengikuti prakualifikasi tender a quo sesuai dengan keterangan BAP konsorsium PT. Cahaya Karya Bhakti Samudera (Cakrabhasa) dan PT. Samudera Biru Nusantara (SBN);----------

16	Pertanyaan Majelis Komisi	Ketika mendaftar tender ini, anda melakukan konsorsium atau supporting letter?
	Jawaban	Kami melakukan konsorsium dengan perusahaan pemilik IMCA yakni SBN. Yang saya pahami, nama dalam sertifikat kan milik SBN. Maka untuk bisa mengikuti tender ini dengan persyaratan peserta harus memiliki IMCA, kami membentuk konsorsium dengan SBN.

Letter of Award ----------

Bahwa PC Muriah (Terlapor I) dan PC Ketapang (Terlapor II) telah mengirimkan Letter of Award kepada PT. Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III) pada tanggal 6 Februari 2017 dengan nomor surat reff 11/PCML/OPS/II/2017 perihal *Letter of Award Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field No. 4850000140 ("Contract") Ex. Tender No. 11204*; ----------

Bahwa di dalam *Letter of Award* disebutkan *Contractor's name adalah PT. Aquamarine Divindo Inspection (Contractor)-(Terlapor III) dan Total Contract Value IDR 47.335.000.000. Local content 83,80%, contract duration Three (3) years with one (1) year optional for extension dan effective date 6 february 2017*;----------

Bahwa Terlapor III di dalam *letter of award* tersebut diminta menyiapkan beberapa dokumen dalam jangka waktu 14 hari kerja dari tanggal *letter of award* yaitu *Performance Bond sebesar Rp. 1.183.875.000, Insurance Certificates, Letter of Acceptance*; --

Bahwa pada tanggal 7 februari 2017 PT. Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III) mengirim surat kepada PC Muriah (Terlapor I) yang ditujukan kepada *VP operations* dengan perihal *Acknowledgement Receipt and Acceptance* yang ditandatangai oleh Ir. Yunus Nafik *President Director* PT. Aquamarine Divindo Inspection. Hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor III di dalam persidangan. ----------

110	Pertanyaan Investigator	Kapan perusahaan anda diberitahu menang tender ini?
	Jawaban	Sekitar bulan februari 2017.
111	Pertanyaan Investigator	Kapan anda dikirimkan surat Letter of Award (LoA) oleh PC muriah dan PC ketapang?
	Jawaban	Seingat saya awal Februari tahun 2017.
112	Pertanyaan Investigator	Mohon Majelis menunjukkan LoA pada Terlapor III
	Majelis Komisi	Anda Terlapor III masih ingat atau tidak?
	Jawaban Terlapor III	Masih ingat Majelis
113	Pertanyaan Investigator	Apakah anda sudah merespon surat letter of award tersebut?
	Jawaban	Sudah. Jadi di dalam letter of award tersebut terdapat lampiran persyaratan dan template untuk letter of acceptance. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap LOA. Lalu kami kirimkan letter of acceptance tersebut dan disusulkan dengan persyaratan yang diminta antara lain performance bond, asuransi, daftar personil, jamsostek dan asuransi kapal. Dokumen tersebut kami susulkan sesuai persyaratan LOA.

Bahwa investigator menyimpulkan Terlapor I dan Terlapor II telah menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender A quo dengan dikirimkannya dokumen *Letter of Award* kepada terlapor III dan sudah dibalas dengan surat *Acknowledgment Receipt* and *Acceptance* yang dikirimkan kepada Terlapor I dan Terlapor II. --

7.2 Analisa Investigator ----------

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran Tender *Provision of Underwater Services for*

Kepodang and Ketapang Field (Tender No.11204) adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:----------

Pelaku *usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.* -

Berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: ----------

1. Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------
2. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------
3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.----------

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa; -----

Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk: ----------

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;----------
2. Mengadakan barang dan/atau jasa;----------
3. Membeli suatu barang dan/atau jasa; ----------

4. Menjual suatu barang dan/atau jasa. ----------

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

1. Tender terbuka; ----------
2. Tender terbatas;----------
3. Pelelangan umum; dan ----------
4. Pelelangan terbatas. ----------

Bahwa Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No.11204)* merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan berupa jasa inspeksi platform dan pipa gas yang dilakukan melalui tender terbuka. ----------

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:----------

Unsur Pelaku Usaha; ----------

Bahwa dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah:----------

"Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan *atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";* ----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah:----------

I. PC Muriah Ltd., beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Labuan, Malaysia berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of PC Muriah Ltd.* tanggal 20 Januari 2005, yang merupakan operator Kontrak Kerja Sama Muriah untuk

eksplorasi dan pengembangan sumber daya di wilayah kerja Muriah, Lepas Pantai Utara Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan bersama dengan PC Ketapang II Ltd;----------

II. PC Ketapang II Ltd, beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan T.B. Simatupang Kavling 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan *Bye Laws of ConocoPhillips (Ketapang) Ltd.* yang diadopsi pada 29 November 2002, kemudian berdasarkan *Certificate of Incorporation on Change of Name* yang diregistrasi di Bermuda, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PC Ketapang II Ltd. pada 16 September 2008. PC Ketapang II Ltd. merupakan operator Kontrak Kerja Sama Ketapang untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya di wilayah kerja Ketapang, Lepas Pantai Pulau Madura, Jawa Timur, Indonesia, yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan bersama dengan PC Muriah Ltd;----------

III. PT Aquamarine Divindo Inspection, beralamat di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 9 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Aris Hilmi, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *underwater services* yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai pelaku usaha pemenang tender.----------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. ---------

Unsur Pihak Lain; ----------

Bahwa Pihak lain adalah menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah: ----------

Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender *dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.* ----------

Bahwa Pihak lain yang dimaksud di dalam dugaan pelanggaran ini adalah: ----------

I. PT Aquamarine Divindo Inspection, beralamat di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 9 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Aris Hilmi, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *underwater services*; ----------

II. Dalam prakteknya, PT Aquamarine Divindo Inspection telah mengikuti dan menjadi pemenang dalam Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No.11204).*----------

Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi. ----------

Unsur Bersekongkol ----------

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah ----------

"*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif* siapapun *dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu".* ----------

Bahwa unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
d. menciptakan persaingan semu;----------
e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

Bahwa berdasarkan bentuknya, persekongkolan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu: ----------

a. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender;----------
b. Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender; ----------
c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik Panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.----------

Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam dugaan pelanggaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik

pekerjaan dengan memfasilitasi Terlapor III sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang dengan cara sebagai berikut:--

Penjelasan Umum Terkait IMCA ----------

Berdasarkan *Bye Law for IMCA Holding Limited*, IMCA (*International Marine Contractors Association*) adalah: "*The international trade association* representing *the interests of contractors and the associated supply chain directly or indirectly involved with the construction, installation, maintenance and/or operation of marine facilities for the extraction, production or transportation of offshore oil or gas, other extractive industries and for utilisation of wind, wave and other energy sources in a marine environment.*" ----------

Salah satu tujuan utama pembentukan IMCA adalah berupaya memberikan standar tertinggi terkait *health, safety, environment, and quality* dengan resiko dan biaya yang seimbang. Untuk memenuhi standarisasi tersebut, IMCA memberikan *training* dan menerbitkan sertifikasi kompetensi bagi perusahaan yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota IMCA; ----------

Anggota IMCA antara lain terdiri dari para kontraktor, pemilik kapal, supplier barang dan jasa terkait kegiatan marine operations, *Diving*, Remotely Operation Vehicle (ROV) dan *Hydrographic Survey and Positioning Systems*; ----------

Bahwa keanggotaan IMCA berdasarkan kompetensi kontraktor terdiri dari *Marine Division, Diving Division, Offshore Survey Division dan Remote System and ROV Division*; ----------

Bahwa untuk memperoleh keanggotaan IMCA tersebut, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk masing-masing kategori/division, selanjutnya IMCA melakukan penilaian sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, dan menerbitkan sertifikat IMCA bagi perusahaan yang lulus. Sertifikat IMCA tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang; ----------

Berdasarkan *Articles of Association for IMCA Holdings Limited*, kriteria Keanggotaan IMCA (IMCA Membership) yaitu:----------

1. *Membership will be open to companies and other organisations but not to private individuals;* ----------
2. *Membership is non-transferrable;*----------
3. *Members shall be active in the offshore, marine or underwater engineering industries, either as contractors, vessel owners, suppliers of equipment or services, or as oil & gas and other offshore operators, government departments or other non-governmental organisations;*
4. *There shall be two types of members: voting members (being all members other than corresponding members) and corresponding members;* ----------
5. *The category of membership to which a member shall belong shall be determined in accordance with the bye-laws.*---------

Bahwa sertifikat keanggotaan IMCA bersifat non transferable melekat pada perusahaan pemiliknya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi PT. Jaya Salvage Indonesia (Jasalindo) – PT. Warna Triendo;----------

23.	Pertanyaan Investigator	Apakah betul sertifikat IMCA non transferable atau tidak bisa dialihkan keperusahaan lain?
	Jawaban	Betul, yang pasti itu melekat pada perusahaan pemiliknya.

Bahwa Investigator berpendapat bahwa sertifikat IMCA bersifat non transferable dan melekat pada kontraktor sehingga sertifikat ini tidak bisa dipindahalihkan kepada pihak-pihak atau perusahaan.----------

Terkait Persyaratan Keanggotaan IMCA dalam tender Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204)----------

Bahwa persyaratan keanggotaan IMCA dalam tender a quo diatur berdasarkan ketentuan berikut:----------

1. Dokumen Perencanaan Tender terkait Sertifikasi mensyaratkan IMCA *Membership of Contractor*, IMCA *Supervisor Certification*, IMCA *Divers Certification*; ----------
2. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender, Huruf D. Persyaratan Kualifikasi, poin 3. Persyaratan Teknis, diatur bahwa pemohon wajib melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership;----------

3. Dokumen Tender, *Exhibit I-Special Provision and Scope of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience (point 1)* menyebutkan *"The Contractor is to be and IMCA member company"*; ----------
4. Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification berdasarkan dokumen faksimili Nomor 1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa peserta tender harus merupakan anggota IMCA untuk kategori *Diving* dan kategori ROV, dan standarisasi peralatan dan personil harus mengikuti IMCA *Guidance* dan IMCA *Standard*. ----------

Bahwa keterangan saksi saudara Nizar Saptura *Head coordinator* (Karyawan Terlapor I dan Terlapor II) yang bekerja sebagai user dan yang mengevaluasi teknis kapal, diver dan ROV menjelaskan bahwa untuk tender *a quo* sertifikasi yang dipersyaratkan adalah keanggotaan IMCA ROV dan *Diving* : -----

61	Pertanyaan Investigator	Apa saja sertifikasi yang dipersyaratkan untuk Diver dan ROV?
	Jawaban	Untuk *tender a quo*,sertifikasi yang dipersyaratkan adalah sertifikasi IMCA.

71	Pertanyaan Investigator	Adakah ada yang bertanya terkait persyaratan IMCA? Perusahaan apa yang bertanya?
	Jawaban	Ya, ada dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika. Untuk PT Patra Dinamika bertanya tentang kepemilikan sertifikasi IMCA *Diving* dan IMCA ROV. Begitu pula dengan PT AOS yang menanyakan hal serupa.
72	Pertanyaan Investigator	Bagaimana jawaban anda?
	Jawaban	Kami menjawab kontraktor yang mempunyai IMCA *membership* ROV dan *Diving*.

Bahwa untuk mengikuti tender a quo perusahaan disyaratkan untuk memiliki sertifikat keanggotaan IMCA sesuai dengan BAP dari Konsorsium PT Cahaya Karya Bhakti Samudera – PT Samudera Biru Nusantara : ----------

17	Pertanyaan Investigator	Apakah dalam tender ini, diharuskan peserta harus memiliki IMCA?
	Jawaban	Ya betul, persyaratannya yang sudah memiliki sertifikat IMCA.

Bahwa Investigator berpendapat sesuai dengan fakta persidangan terkait dengan persyaratan IMCA sesuai dengan dokumen ITB dan kesaksian para saksi, para peserta tender dalam perkara *aquo* ini harus memiliki member keanggotaan IMCA dan diterangkan melalui *pre-bid meeting* yang kedua pada tanggal 7 Oktober 2016 yang intinya adalah bahwa persyaratan sertifikat IMCA ini yang harus dipenuhi adalah Sertifikat IMCA *Diving* dan ROV; ----------

Bahwa Investigator berpendapat komite tender tidak menerapkan aturan sesuai dengan ITB kepada PT Aquamarine Divindo Inspection karena perusahaan ini tidak memiliki sertifikat IMCA untuk jenis *Diving* sehingga seharusnya gugur pada evaluasi administratif dan teknis tetapi Komite tender tetap memenangkan PT Aquamarine Divindo Inspection; ---------

Bahwa Investigator menilai komite tender tetap meluluskan PT Aquamarine Divindo Inspection pada tahap evaluasi administratif dan teknis karena ingin menjadikan PT Aquamarine Divindo Inspection sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*. ----------

Terkait *Pre Bid Clarification Meeting#2* (*Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification*) ----------

Pada tanggal 7 Oktober 2016 Terkait dengan Persyaratan Keanggotaan Sertifikat IMCA untuk *Diving* dan adalah sebagai berikut:----------

a. Dokumen ini dikirimkan kepada 6 (enam) peserta tender yang lulus prakualifikasi; ----------
b. Dokumen ini merupakan respon dari Panitia Tender terhadap permintaan klarifikasi administrasi dan teknis dari peserta tender pada *pre bid clarification meeting* tanggal 26 September 2016;----------
c. Panitia tender menyatakan bahwa dokumen ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender; ----------
d. Berdasarkan *Minutes of Prebid Meeting* tanggal 7 Oktober 2016 (halaman 5) tersebut dinyatakan bahwa "*The Minutes*

of Prebid Meeting shall be an integral part of bid Document and shall be submitted along with Bidder's proposal"; --------

e. Berdasarkan *Minutes of Prebid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016, butir 5 tentang *Technical, Commercial and Contractual Clarifications*, butir 5.5. dinyatakan bahwa *"Contractor shall follow IMCA requirement for all aspect of the execution';* ----------

f. Panitia tender menyatakan bahwa hasil dari *pre-bid clarification meeting* ini sifatnya mengikat.; ----------

g. Bahwa berdasarkan dokumen *Pre-Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification*) Pada tanggal 7 Oktober 2016 yang telah ditunjukan di dalam persidangan ketika melakukan pemeriksaan kepada Saksi yaitu Nizar Saputra sebagai Karyawan Petronas dan sebagai user dalam tender ini pada tanggal 24 Juli 2018, diketahui terdapat pertanyaan dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika terkait dengan persyaratan sertifikat IMCA. Berikut Pertanyaan dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika yang tercantum di dalam *Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification*) Pada tanggal 7 Oktober 2016 (Bukti Dokumen *Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification* Pada tanggal 7 Oktober 2016). Berikut lampiran dokumen tersebut yang isinya adalah ketika Panitia Tender merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta tender terkait dengan Sertifikasi IMCA dan standarisasi IMCA antara lain sebagai berikut: ----------

	Reference	*Bidder's Clarification Request*	*Company Response*
	PT Advanced Offshore Services		
6.	*Exhibit I-Special Provision and Scope of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience (point 1)*	*Bidder request Company to confirm that Bidder must be IMCA member in Diving Division "Contractor Category".*	*Bidder of Member IMCA ROV and Diving.*
14.	*Exhibit III _ Contractor Equipment & Personnel Specification item. 4*	*Bidder request Company to confirm that this project will be follow strictly to IMCA*	*- Refer to IMCA Guidance* *- PETRONAS*

	Equipment page 4 of 9	*guideline?*	*TECHNICAL STANDARD 602124 Diving operation management Guideline*
	PT Patra Dinamika		
4.	*Exhibit I (Point 2.4.4. Contractors Qualification Experience)*	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 September 2016. Kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki *keanggotaan IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS* karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV?	- Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA - Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan *Diving*
6.	*Exhibit III (Point 4.0. Equipment – A. Diving Equipment)*	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 September 2016. Semua peralatan menyelam dan peralatan yang terkait harus mematuhi IMCA. Semua peralatan menyelam dibuat dalam waktu 20 tahun terakhir diganti mejadi fit for purpose.	- IMCA Standard - IMCA D14 - IMCA D15 - IMCA D23 - IMCA R004
	PT Seascape Survey Indonesia		
5.	*Exhibit III Contractor Equipment & Personnel Specification. 4.0.A. Diving Equipment*	*It is stated in the document that all Diving equipment and associated equipment shall comply to International Diving reference like IMCA or ADCI or applicable government regulation.* *During the Pre Bid Meeting, Bidder understand that Company will revise the document and stated to be"comply to IMCA". Please confirm.*	*See Exhibit III Rev Company will refer to IMCA.*

Bahwa *pre-bid meeting* mengikat kepada peserta tender dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender seperti keterangan ahli tender: ----------

a. Keterangan Ahli SKK Migas Maria Kristanti ----------

37	Pertanyaan Terlapor III	Pre bid meeting dilaksanakan di ruangan atau melalui korespondensi by email?
	Jawaban	Panitia tender mengundang semua peserta yang mendaftar tender dalam satu ruangan dan dalam pre bid meeting tersebut ada berita acara pre bid meeting dimana para peserta yang hadir menandatangani berita acara tersebut.
38	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ini sifatnya itu mengikat?

	Jawaban	Mengikat, Hasil rapat pre bid meeting akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen tender yang harus dilaksanakan oleh K3S dan peserta tender.

b. Keterangan Ahli SKK Migas Pandji Achmad Ariaz ----------

31	Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II	Dalam pre bid meeting itu sistemnya seperti apa?
	Jawaban	Pre bid meeting tujuannya menjelaskan agar semua peserta paham apa yang ingin ditenderkan, termasuk proses tendernya seperti apa. Pre bid meeting harus diadakan dalam suatu rapat dan ada interaksi antara semua peserta dan panitia tender secara terbuka untuk bisa saling bertanya. Pre bid meeting hanya untuk peserta yang lulus prakualifikasi dan ambil dokumen tender. Bila ada undangan pre bid meeting dan tidak hadir, maka peserta tersebut didiskualifikasi. Dalam pre bid meeting dimungkinkan terjadi sebuah perubahan, dituangkan dalam risalah rapat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen tender.

63	Pertanyaan Investigator	Terkait dengan pre bid meeting, outputnya berita acara ditandatangani oleh semua pihak bila ada perubahan?
	Jawaban	Ya harus dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani semua pihak karena menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen tender.
64	Pertanyaan Investigator	Berarti risalah ini bagian mengikat dalam tender?
	Jawaban	Ya mengikat.

c. Keterangan Ahli Lembaga Sertifikasi Profesi Kegiatan Usaha Hulu Migas Wahyu Adiartono ----------

21	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III	Apakah benar jika hasil dari klarifikasi itu harus disirkulasikan dan disepakati?
	Jawaban	Ya betul. Prinsipnya Transparan
25	Pertanyaan Investigator	Apa definisi *pre bid meeting*?
	Jawaban	Bahasa indonesianya adalah rapat penjelasan lelang. Artinya adalah rapat yang diberikan pada para penawar untuk menjelaskan isi dokumen pengadaan yang terdiri dari ITB, *General Terms and Condition* dan *Exhibit*. Menjelaskan apa yang menjadi persyaratan dan bagaimana tata cara pemasukan penawarannya. Juga menerima pertanyaan dari para penawar terkait hal-hal yang belum dipahami,

		baik itu tentang persyaratan maupun tentang spesifikasi (baik teknis maupun kualifikasi)
26	Pertanyaan Investigator	Jadi Tanya jawab yang terjadi nantinya akan dituangkan dalam risalah? Apakah menjadi bagian dari dokumen tender dan mengikat seluruh peserta?
	Jawaban	Ya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tender.

d. Keterangan Nizar Saputra sebagai SaksiKaryawan Petronas dan sebagai *user* dalam tender ini;----------

74	Pertanyaan Investigator	Apakah *Pre Bid Meeting* ini bersifat mengikat?
	Jawaban	Ya mengikat, karena hasilnya diketahui oleh semua pihak.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Direktur PT Patra Dinamika yang bernama Achmad Djaelani pada tanggal 12 Maret 2018 diketahui bahwa terkait dengan pertanyaan dari PT Patra Dinamika di dalam *Pre Bid Meeting* terkait "Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA *Diving and Remote System and ROV Division* karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV" dan adanya jawaban dari *Tender Comitee*: "Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA *Diving* dan ROV. Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan menyelam". Bahwa menurut Direktur PT Patra Dinamika yang bernama Achmad Djaelani keanggotaan IMCA untuk *Diving and Remote System and ROV Division* merupakan syarat yang harus dimiliki oleh Para Peserta Tender:----------

15	Pertanyaan Investigator	Setelah membaca dokumen tender (ITB) tersebut, apa yang anda pahami?
	Jawaban	Tender seperti ini bukan hal baru bagi PT Patra Dinamika karena kami sudah lama mengikuti tender sejenis, jadi sepertinya semua yang diminta dapat kami penuhi, baik dokumen administrasi maupun dokumen teknik.
	Pertanyaan Investigator	Apakah termasuk sertifikat IMCA *Diving* dan ROV juga?
16	Jawaban	Ya, itu masuk di dokumen teknis yang dipersyaratkan. Kami lengkapi semuanya

22.	Pertanyaan Investigator	Dicatatan saya, ada. Untuk PT Patra Dinamika disini disebutkan bahwa: "Mohon konfirmasi, sesuai dengan *Pre-bid Meeting* pada 26 September 2016, kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA *Diving and Remote System and ROV Division* karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan penyelaman dan ROV" Kemudian dibalas oleh *Tender Comitee*: Peserta tender memiliki keanggotaan IMCA *Diving* dan ROV. Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan menyelam.
	Jawaban	Maaf saya lupa, mungkin benar ada pertanyaan seperti itu dari PT Patra Dinamika. Saat itu yang *in charge* menangani langssung adalah Pak Doni, pegawai saya, beliau yang mengurusi tender ini. Saya yang mengawasi saja. Menurut sepemahaman saya dari pertanyaan diatas berarti peserta tender harus memiliki keduanya ya, baik *Diving* maupun ROV.

No	Reference	Question from Bidder		Response from Company
		Indonesia	English	
4	Exhibit I (Point 2.4.4 Contractors Qualification Experiences)	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 Sept 2016. Kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan Penyelaman dan ROV?	Please confirm: In accordance with the pre bid meeting Sept 26, 2016. The contractor is to be IMCA member company. Bidders must have a member IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS due to in this project related operation with diving and ROV?	• Peserta tender memiliki Ke anggotaan IMCA ROV Dan Diving • Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan Diving

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Direktur Advanced Offshore Services yang bernama Ravinda Pratap Singh pada tanggal 12 Maret 2018 diketahui bahwa terkait dengan PT Advance Offshore mengajukan pertanyaan ketika *Pre Bid Meeting* pada tanggal 7 Oktober 2016 terkait dengan IMCA member yang berdasarkan klarifikasi oleh Panitia Tender dijelaskan bahwa *bidder* harus member dalam bidang ROV dan *Diving* Division dalam IMCA;---

17	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda mengajukan pertanyaan saaat *pre bid meeting*?
	Jawaban	Iya. Untuk hasil dari *pre bid meeting* tersebut tertuang didalam *memorandum of pre bid meeting* disitu dijelaskan kembali detail mengenai *instruction for bidder*, dimana yang salah satunya dijelaskan mengenai peserta yang ikut tender, nama tender atau judul tender dan para *bidder* diberi waktu satu hari untuk list permohonan klarifikasi yang ingin disampaikan.

		Dalam dokumen ITB juga disampaikan amandemen dokumen ITB pada point 2.4.4, yang mana masih sama harus menjadi member IMCA untuk peserta lelang. Satu hari setelah *pre bid meeting*, Kami meminta klarifikasi tentang IMCA member, lalu diberikan tanggapan oleh Panitia bahwa *bidder* harus member dalam bidang ROV dan *Diving* Division dalam IMCA. Ada juga pertanyaan yang serupa seperti kami dari peserta tender lain yang memohon konfirmasi terkait IMCA member, dan dijawab juga oleh panitia dengan jawaban yang serupa. Peserta tender haruslah anggota IMCA dalam bidang ROV dan *Diving*. Kegiatan ROV terpisah dengan kegiatan *Diving*.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Direktur Advanced Offshore Services yang bernama Ravinda Pratap Singh pada tanggal 12 Maret 2018 diketahui bahwa Sertifikat IMCA yang diminta oleh Pihak Panitia Komite tender adalah *IMCA Member Diving dan ROV;*----------

18	Pertanyaan Investigator	Berarti menurut saksi sertifikasi IMCA yang dimaksud harus IMCA ROV dan *Diving*?
	Jawaban	Iya, betul. Seluruh *bidder* yang menyerahkan dokumen tender haruslah memiliki IMCA member ROV dan *Diving*.

h. Bahwa pada saat penjelasan dijelaskan oleh Terlapor I dan Terlapor II perusahaan harus memiliki Keanggotaan IMCA untuk ROV dan *Diving* sesuai keterangan Konsorsium PT. Bintang Subsea Indonesia dan PT. Siguros Indonesia sebagai berikut: ----------

26.	Pertanyaan Investigator	Apakah peserta harus memiliki IMCA membership untuk Diving dan ROV, apakah benar?
	Jawaban	Iya benar, di dokumen itu diwajibkan harus memiliki membership IMCA untuk Diving dan ROV.
27.	Pertanyaan Investigator	Apakah bisa disebutkan itu di dalam dokumen apa?
	Jawaban	Di dokumen klarifikasi, adminitrasi, teknikal qualifikasi. Ini dijadikan satu dokumen dan mengikat.
29.	Pertanyaan Investigator	Apakah menurut saksi persyaratan tersebut penting?
	Jawaban	Bukan menurut kami, tetapi menurut K3S, dan hal tersebut wajib harus ada.

i. Bahwa keterangan PT Advance Offshore Services, menjelaskan untuk mengikuti tender a quo disyaratkan mempunyai sertifikat keanggotan IMCA *Diving* dan ROV ----------

12	Pertanyaan Investigator	Persyaratan apa yang dilampirkan dalam dokumen ITB?
	Jawaban	Dalam dokumen ITB dijelaskan apa saja yang harus dilakukan salah satunya Kegiatan operasi yang harus dilaksanakan pemenang tender yakni Diving dan ROV. Kami juga kompeten karena memiliki sertifikat IMCA, kami percaya diri untuk mengikuti tender karena kami anggota IMCA.
13	Pertanyaan Investigator	Apakah disebutkan dalam persyaratan tersebut hanya sertifikat membership IMCA atau sertifikat IMCA untuk Diving dan ROV?
	Jawaban	Di dokunmen ITB itu hanya menyebutkan harus member IMCA saja.
14	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda memenuhi persyaratan IMCA Diving dan ROV?
	Jawaban	Iya, kami memiliki IMCA member bidang Diving dan ROV. Sehingga kami merasa masuk kualifikasi dalam tender perkara a quo.
15	Pertanyaan Investigator	Apakah persyatan dalam dokumen ITB termasuk persyaratan yang penting menurut saudara saksi?
	Jawaban	Iya, karena tender ini adalah pekerjaan utamanya bidang Diving dan ROV dan kami memiliki dan mampu melakukan jenis pekerjaan ini. Namun dalam dokumen ITB belum dijelaskan lebih lanjut member IMCA tersebut dalam kategori bidang apa.
16	Pertanyaan Investigator	Pada saat pre bid meeting panitia tender menjelaskan apa saja?
	Jawaban	Ada banyak hal yang dijelaskan dan apa saja yang harus dipenuhi oleh para bidder. Untuk detailnya kami mempunyai memorandum of requirement pre bid meeting tersebut satu persatu, tetapi yang kami dititik beratkan di point 5.4 yang menyebutkan “Contractor shall follow IMCA requirement for all aspect of the execution” yang dapat kami interpretasikan bahwa peserta harus mengikuti persyaratan IMCA untuk semua persyaratan aspek pelaksanaan.
17	Pertanyaan Investigator	Apakah perusahaan anda mengajukan pertanyaan saaat pre bid meeting?

	Jawaban	Iya. Untuk hasil dari pre bid meeting tersebut tertuang didalam memorandum of pre bid meeting disitu dijelaskan kembali detail mengenai instruction for bidder, dimana yang salah satunya dijelaskan mengenai peserta yang ikut tender, nama tender atau judul tender dan para bidder diberi waktu satu hari untuk list permohonan klarifikasi yang ingin disampaikan. Dalam dokumen ITB juga disampaikan amandemen dokumen ITB pada point 2.4.4, yang mana masih sama harus menjadi member IMCA untuk peserta lelang. Satu hari setelah pre bid meeting, Kami meminta klarifikasi tentang IMCA member, lalu diberikan tanggapan oleh Panitia bahwa bidder harus member dalam bidang ROV dan Diving Division dalam IMCA. Ada juga pertanyaan yang serupa seperti kami dari peserta tender lain yang memohon konfirmasi terkait IMCA member, dan dijawab juga oleh panitia dengan jawaban yang serupa. Peserta tender haruslah anggota IMCA dalam bidang ROV dan Diving. Kegiatan ROV terpisah dengan kegiatan Diving.
18	Pertanyaan Investigator	Berarti menurut saksi sertifikasi IMCA yang dimaksud harus IMCA ROV dan Diving?
	Jawaban	Iya, betul. Seluruh bidder yang menyerahkan dokumen tender haruslah memiliki IMCA member ROV dan Diving.

Bahwa Investigator berpendapat dari fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa *Pre-bid Clarification Meeting#2 (tender clarification: administrative and technical clarification)* pada tanggal 7 Oktober 2016 merupakan klarifikasi yang dilakukan oleh Komite Tender kepada semua peserta dan peserta mendapatkan informasi yang sama dan hasil klarifikasi dari *Pre Bid Clarification Meeting#2* ini bersifat mengikat; ----------

Bahwa Investigator berpendapat didalam *Pre-bid Clarification Meeting#2 (tender clarification: administrative and technical clarification)* telah dijelaskan di dalam klarifikasi yang terdapat pertanyaan dari PT Patra Dinamika dan PT Advance Offshore Services terkait dengan persyaratan sertifikat member IMCA adalah sertifikat member IMCA untuk jenis *Diving* dan ROV; ----

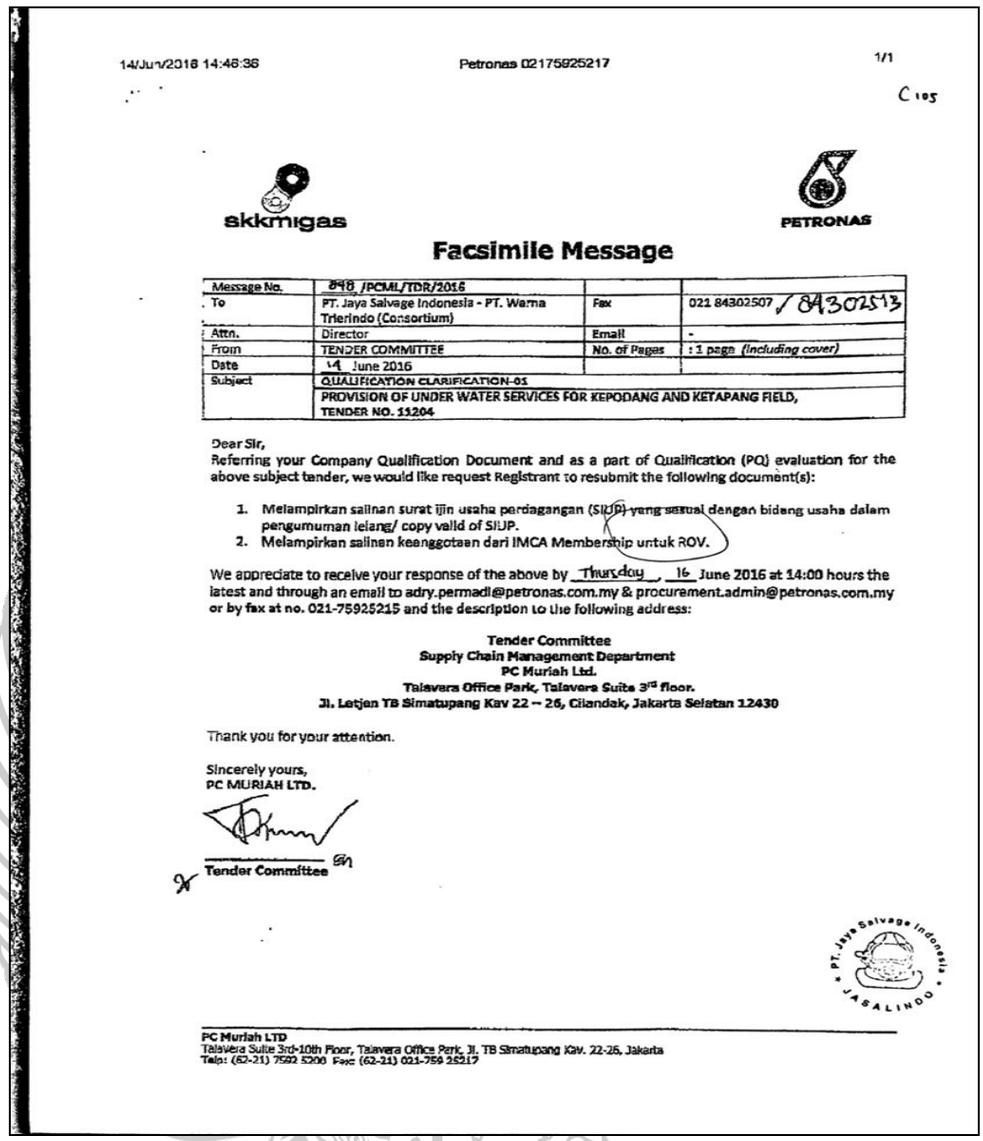
Bahwa Investigator berpendapat tidak ada tambahan informasi dari pihak komite tender terkait dengan persyaratan sertifikat IMCA di dalam *Pre-bid Clarification Meeting*#2 (tender *clarification: administrative and technical clarification);*----------

Bahwa Investigator menilai Komite tender telah melakukan evaluasi di *luar* kesepakatan *Pre-bid Clarification Meeting*#2 (tender *clarification: administrative and technical clarification)* dengan meloloskan PT Aquamarine Divindo Inspection yang tidak memiliki sertifikat IMCA adalah cara Komite Tender untuk memenangkan PT Aquamarine Divindo Inspection. ----------

Terkait Dengan Persyaratan Keanggotaan IMCA Kontraktor Di dalam Tahap Pra Kualifikasi Yang Tercantum Di dalam ITB (*Instruction To Bidder*) ----------

Bahwa diketahui di dalam ITB (*Instruction To Bidder*) terkait dengan persyaratan di dalam Pra Kualifikasi masih menyebutkan memiliki keanggotaan IMCA kontraktor secara umum sebagaimana berdasarkan ketentuan *Exhibit I-Spesial Provision And Scope Of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience* (Poin 1) Di sebutkan bahwa : *The Contractors is tobe and IMCA member company* (Bukti Dokumen ITB (*Instruction To Bidder*)); ----------

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kepada saksi yaitu Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo pada tanggal 17 Juli 2018 diketahui bahwa pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo telah diminta oleh pihak komite tender /panitia di dalam tahap Pra kualifikasi untuk kepemilikan dan keanggotaan sertifikat IMCA untuk jenis ROV (*Remotely Operated Vehicle)* melalui Faxmile yang dikirimkan oleh pihak Komite Tender/ Panitia. Berikut Terlampir Faxmile yang diberikan oleh pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo melalui persidangan terkait dengan Permintaan pihak Komite Tender / Panitia permintaan untuk melengkapi sertifikat IMCA untuk jenis ROV (*Remotely Operated Vehicle);*----------



14/Jun/2016 14:46:36 Petronas 02175925217 1/1

C 105

skkmigas PETRONAS

Facsimile Message

Message No.	848 /PCML/TDR/2016		
To	PT. Jaya Salvage Indonesia - PT. Warna Triendo (Consortium)	Fax	021 84302507 / 84302513
Attn.	Director	Email	-
From	TENDER COMMITTEE	No. of Pages	: 1 page (including cover)
Date	14 June 2016		
Subject	QUALIFICATION CLARIFICATION-01		
	PROVISION OF UNDER WATER SERVICES FOR KEPODANG AND KETAPANG FIELD, TENDER NO. 11204		

Dear Sir,
Referring your Company Qualification Document and as a part of Qualification (PQ) evaluation for the above subject tender, we would like request Registrant to resubmit the following document(s):

1. Melampirkan salinan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang sesuai dengan bidang usaha dalam pengumuman lelang/ copy valid of SIUP.
2. Melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership untuk ROV.

We appreciate to receive your response of the above by Thursday, 16 June 2016 at 14:00 hours the latest and through an email to adry.permadi@petronas.com.my & procurement.admin@petronas.com.my or by fax at no. 021-75925215 and the description to the following address:

Tender Committee
Supply Chain Management Department
PC Muriah Ltd.
Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd floor.
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Thank you for your attention.

Sincerely yours,
PC MURIAH LTD.

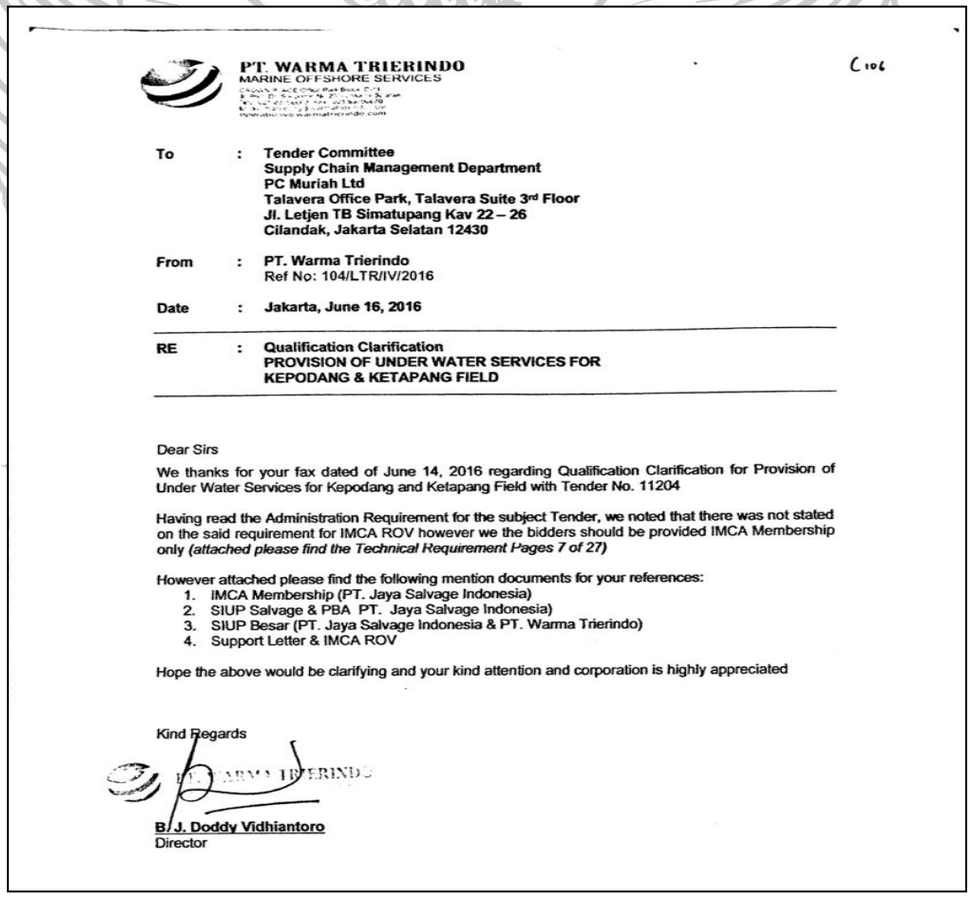
Tender Committee

PC Muriah LTD
Talavera Suite 3rd-10th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta
Telp: (62-21) 7592 5200 Fax: (62-21) 021-759 25217

15	Pertanyaan Investigator	Tolong diceritakan kembali proses-proses awal dari proses tender dan mendapatkan surat faximili
	Jawaban	Sebelum ada faksimili yang menyatakan kami tidak lolos, ada faks sebelumnya yang menanyakan beberapa dokumen kepada kami yaitu agar melampirkan SIUP yang sesuai dengan bidang usaha dalam lelang, m lampirkan salinan IMCA membership ROV. Lalu kami jawab, kami melampirkan SIUP dan support letter (Surat dukungan) dari pihak ketiga untuk sertifikat IMCA ROV. Saat itu faximili pertama pada tanggal 14 Juni 2016. Kemudian kami menjawab surat tersebut melalui surat kami pada tanggal 16 juni 2016. Setelah itu kami mendapatkan pemberitahuan bahwa kami gagal pada tanggal 12 Agustus 2016.

Bahwa berdasarkan Dokumen Faxmile yang tertanggal 16 Juni 2016 yang ditunjukan oleh pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo di muka persidangan pada tanggal 17 Juli 2018terkait dengan jawaban dari pihak Konsorsium

PT Jasalindo – PT Warna Triendo kepada komite tender/Panitia di ketahui di dalam faxmile tersebut pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo menjelaskan bahwa di dalam persyaratan di Dokumen Prakualifikasi tidak menyebutkan untuk persyaratan sertifikat IMCA jenis ROV tetapi hanya menyebutkan kepemilikan dan keanggotaan sertifikat IMCA saja (*Having read the administration requirement for the subject tender, we noted that there was not stated on the said requirement for IMCA ROV however we the bidders should be provided IMCA Membership only (attached please find the technical requirement pages 7 0f 27)* . Berikut Terlampir Faxmile tertanggal 16 Juni 2016 terkait dengan Jawaban pihak pihak Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo kepada Komite Tender/Panitia; ----------



PT. WARMA TRIERINDO
MARINE OFFSHORE SERVICES

C 106

To : **Tender Committee**
Supply Chain Management Department
PC Muriah Ltd
Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd Floor
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22 – 26
Cilandak, Jakarta Selatan 12430

From : **PT. Warma Trierindo**
Ref No: 104/LTR/IV/2016

Date : **Jakarta, June 16, 2016**

RE : **Qualification Clarification**
PROVISION OF UNDER WATER SERVICES FOR
KEPODANG & KETAPANG FIELD

Dear Sirs

We thanks for your fax dated of June 14, 2016 regarding Qualification Clarification for Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field with Tender No. 11204

Having read the Administration Requirement for the subject Tender, we noted that there was not stated on the said requirement for IMCA ROV however we the bidders should be provided IMCA Membership only *(attached please find the Technical Requirement Pages 7 of 27)*

However attached please find the following mention documents for your references:
1. IMCA Membership (PT. Jaya Salvage Indonesia)
2. SIUP Salvage & PBA PT. Jaya Salvage Indonesia)
3. SIUP Besar (PT. Jaya Salvage Indonesia & PT. Warma Trierindo)
4. Support Letter & IMCA ROV

Hope the above would be clarifying and your kind attention and corporation is highly appreciated

Kind Regards

PT. WARMA TRIERINDO

B. J. Doddy Vidhiantoro
Director

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepada Terlapor III yaitu PT Aquamarine Divindo Inspection pada tanggal 25 Juli 2018 diketahui bahwa Rachmadi Satriya Permana sebagai Manager PT Aquamarine Divindo Inspection mengatakan bahwa di dalam dokumen tender atau ITB (*Instruction To Bidder)* tidak terdapat

persyaratan untuk sertifikat keanggotaan IMCA jenis *Diving* dan *ROV* tetapi persyaratan tersebut di jelaskan oleh pihak komite tender/Panitia Tender dan tertulis di dalam tahap *Pre Bid Meeting;* ----------

96	Pertanyaan Investigator	Setelah mengambil dokumen tender, anda melihat ada persyaratan menyertakan sertifikat dokumen IMCA ROV dan IMCA *Diving*?
	Jawaban	Dalam dokumen ITB tidak disebutkan, namun tertulis dalam klarifikasi setelah pre bid meeting.

Bahwa Investigator berpendapat sesuai dengan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa sesuai dengan ITB (*Instruction To Bidders)* bahwa persyaratan sertifikat IMCA untuk di tahap Prakualifikasi adalah sertifikat member IMCA dan tidak menyebut persyaratan untuk jenis sertifikat IMCA *Diving* dan ROV; ----------

Bahwa Investigator berpendapat sesuai dengan fakta persidangan PT Jasalindo- PT *Warna* Triendo (Konsorsium) di tahap Prakualifikasi telah diminta oleh pihak Panitia untuk memenuhi sertifikat IMCA Jenis ROV; dan PT Samudera Biru Nusantara- PT Cahaya Karya Bhakti yang diminta dan tidak lulus karena tidak memenuhi sertifikat IMCA untuk Jenis *Diving*; ----------

Bahwa Investigator menilai Komite Tender telah melakukan diskriminasi dengan cara tidak menerapkan aturan sesuai dengan ITB kepada semua peserta tender khususnya kepada PT Jasalindo- PT Warna Triendo (Konsorsium) dan PT Samudera Biru Nusantara- PT Cahaya Karya Bhakti terkait persyaratan sertifikat IMCA karena PT Aquamarine Divindo Inspection sendiri tidak memiliki sertifikat IMCA untuk jenis *Diving* di tahap Pra kualifikasi tetapi tidak diminta oleh Komite Tender dan tetap lulus hingga menjadi pemenang. ----------

Terkait ketentuan *letter of support* untuk Persyaratan Keanggotaan IMCA; ----------

Bahwa dalam *Instruction To Bidder* (ITB) yang disampaikan kepada seluruh peserta *tender*, tidak ada penyebutan atau

ketentuan mengenai *letter of support* untuk keanggotaan IMCA sama sekali; ----------

Bahwa berdasarkan *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016 tidak ada menyinggung atau membahas mengenai *letter of support* untuk keanggotaan IMCA sama sekali; ----------

Bahwa konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia - PT Siguros Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Februari 2018 menyatakan bahwa dalam tender perkara a quo, terkait persyaratan IMCA sertifikat keanggotaan IMCA haruslah yang dimiliki oleh perusahaan peserta tender sebagaimana juga dibahas saat *pre bid clarification meeting*, bukan *letter of support*; ----------

48.	Pertanyaan Majelis Komisi	Kenapa tidak mencari alternatif dari pihak lain untuk mendapatkan latter of support untuk mensupport sertifikat tersebut?
	Jawaban	Karena menurut pemahaman kami, kalau ingin memberikan dukungan perizinan-perizinan, harus dengan konsorsium. Dan menurut pemahaman kami juga, sertifikat membership IMCA haruslah yang dimiliki oleh perusahaan peserta tender. Karena hal tersebut kami memilih untuk mengundurkan diri.
49.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada perbincangan dalam rapat pre-bid meeting terkait sertifikat ROV dan Diving IMCA?
	Jawaban	Yang dibicarakan adalah masalah kepemilikan dari sertifikat IMCA.
50.	Pertanyaan Majelis Komisi	Bukan letter of support?
	Jawaban	Bukan.
51.	Pernyataan Majelis Komisi	Dalam dokumen klarifikasi, bagaimana kesimupulan terkait sertifikat IMCA ini?
52.	Jawaban	Disini disebutkan: "Bidder request company to confirm that bidder must be IMCA member in Diving Division Contractor Catagory" Kemudian respon dari perusahaan adalah: "Bidder of member IMCA in ROV and Diving"

Bahwa ahli Manager Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas Maria Kristanti dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 April 2018 "apabila di dalam dokumen tender tidak menyebutkan mengenai persyaratan *letter of support* maka peserta tender tidak boleh menggunakan *letter of support*"; ------

29.	Pertanyaan Terlapor III	Apakah *letter of support* (surat dukungan) boleh digunakan dalam pekerjaan ini?
	Jawaban	Jika di persyaratakan dalam dokumen tender maka dapat digunakan.
30.	Pertanyaan Terlapor III	Berdasarkan PTK007 Rev. 3, apakah ada larangan peserta menggunakan surat dukungan?
	Jawaban	Tidak ada aturan tersebut didalam PTK 007, apabila sejak awal sudah disebutkan dalam persyaratan dokumen tender. Namun bila di dalam dokumen tender tidak ada disebutkan dari awal persyaratan tersebut, maka tidak boleh menggunakan surat dukungan.
31.	Pertanyaan Terlapor III	Surat dukungan yang anda maksud seperti apa?
	Jawaban	Salah satunya contoh surat dukungan bank. Harus dicantumkan dalam dokumen tender dari awal.
32.	Pertanyaan Terlapor III	Itu kan untuk bank, bila yang lain bagaimana?
	Jawaban	Sama saja, baik itu surat dukungan teknis juga sama saja. Harus dipersyaratkan sejak awal dalam dokumen tender.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan Saksi Nur Achroni tanggal 17 Juli 2018, Nur Achroni selaku karyawan Terlapor I dan Terlapor II yaitu *procurement officer* pekerjaan tender dalam perkara *a quo* (panitia) menyatakan bahwa terkait persyaratan *IMCA* di dalam dokumen *Minutes of Pre Bid Meeting* tidak ada menyebutkan mengenai *letter of support* diperbolehkan, hanya ada kata *membership* (of IMCA) dan tidak ada kata-kata *letter of support* sama sekali; ----------

41.	Pertanyaan Investigator	Tadi anda bilang supporting lazim, apakah ada pertanyaan tentang supporting letter dalam pre bid meeting dan waktu tambahan sehari?
	Jawaban	Tidak ada.
42.	Pertanyaan Investigator	Adakah tertulis bahwa supporting letter diperbolehkan?
	Jawaban	Tidak ada pak, hanya seperti yang tertulis pada dokumen yakni membership, namun tidak ada larangan.
43.	Pertanyaan Investigator	Jadi hanya ada kata membership?
	Jawaban	Ya betul.
44.	Pertanyaan Investigator	Tidak ada kata supporting letter?
	Jawaban	Tidak ada.

Bahwa untuk mengikuti tender ini tidak dapat menggunakan letter of support karena sertifikat keanggotaan IMCA baik *Diving* dan ROV bersifat mengikat dan melekat kepada perusahaan yang tercantum di dalam sertifikat sehingga perusahaan dapat membentuk konsorsium untuk dapat mengikuti persyaratan tender a quo tidak dapat dalam bentuk *letter of support*, sesuai

dengan keterangan PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (Cakrabhasa) ----------

16	Pertanyaan Majelis Komisi	Ketika mendaftar tender ini, anda melakukan konsorsium atau supporting letter?
	Jawaban	Kami melakukan konsorsium dengan perusahaan pemilik IMCA yakni SBN. Yang saya pahami, nama dalam sertifikat kan milik SBN. Maka untuk bisa mengikuti tender ini dengan persyaratan peserta harus memiliki IMCA, kami membentuk konsorsium dengan SBN.
18	Pertanyaan Investigator	Hal tersebut yang membuat anda membentuk konsorsium?
	Jawaban	Ya betul, itu alasan saja membentuk konsorsium. Peserta dipersyaratkan harus memiliki IMCA.
19	Pertanyaan Investigator	Apakah sertifikat IMCA atas nama bidder?
	Jawaban	Ya, sertifkat kami saat itu atas nama SBN, maka kami lakukan KSO.

Bahwa keterangan PT. Advance Offshore *Services* menjelaskan bahwa sertifikat IMCA harus milik *sendiri* untuk mengikuti tender a quo; ----------

19	Pertanyaan Investigator	Apakah Sertifikasi IMCA untuk Diving dan ROV ini milik perusahaan anda sendiri?
	Jawaban	Betul, atas nama perusahaan kami.

Bahwa Investigator berpendapat sesuai fakta persidangan di dalam *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* tanggal 7 Oktober 2016 tidak dibahas oleh pihak komite tender dan peserta tender terkait dengan *letter of support* untuk persyaratan sertifikat IMCA; ----------

Investigator menilai berdasarkan fakta persidangan *letter of support* tidak *diperkenankan* karena tidak tercantum di dalam *Bid Document,* dan *letter of support* adalah bentuk dari fasilitasi dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III untuk memenangkan tender *a quo.* ----------

Pemenang tender *a quo* tidak mempunyai sertifikat IMCA *Diving*

Bahwa pemenang tender A quo yaitu PT Aquamarine Divindo (Terlapor III) tidak memiliki sertifikat IMCA *Diving* yang disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II seperti dijelaskan oleh Keterangan Saksi PT Cakrawala Amartha Jaya; ----------

12.	Pertanyaan Investigator	Anda tahu pemenang tender a quo?

	Jawaban	Saya tahu, PT Aquamarine. Mereka punya sertifikat ROV, tapi untuk sertifikat *Diving* mereka sepertinya sedang urus IMCA karena tidak punya. Sesama pelaku bisnis kami saling kenal.

Bahwa berdasarkan keterangan PT Advance offshore services, pemenang tender yaitu Terlapor III tidak mempunyai sertifikat keanggotaan IMCA *Diving* seperti yang dipersyaratkan di dalam *Bid Document* dan *Pre-bid Meeting* oleh Terlapor I dan Terlapor III. ----------

25	Pertanyaan Investigator	Lalu berdasarkan informasi yang diperoleh dari website apakah semuanya adalah member of IMCA?
	Jawaban	Tidak.
26	Pertanyaan Investigator	Bisa dijelaskan?
	Jawaban	Berdasarkan *official website* IMCA kami menemukan bahwa yang memiliki sertifikat IMCA katagori *Diving* dan ROV adalah PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika. PT Seascape Surveys Indonesia memiliki sertifikat IMCA katagori *Diving* sedangkan untuk IMCA ROVnya milik perusahaan mereka yang berada di Singapore. Untuk PT Aquamarine Divindo Inspection hanya memiliki sertifikat IMCA katagori ROV dan tidak memiliki sertifikat IMCA katagori *Diving*, padahal yang dipersyaratkan harus keduanya.

Bahwa Investigator *berpendapat* sesuai fakta persidangan bahwa PT Aquamarine Divindo Inspection tidak memiliki sertifikat IMCA jenis *Diving*; ----------

Bahwa Investigator menilai seharusnya PT Aquamarine Divindo Inspection gugur karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang *dijelaskan* di dalam *Pre Bid Clarification Meeting#2* pada tanggal 7 Oktober 2016 tetapi Komite Tender tetap memenangkan PT Aquamarine Divindo Inspection sebagai pemenang; ----------

Bahwa dalam menetapkan persyaratan tender terkait keanggotaan IMCA yang menurut Terlapor I dan Terlapor II boleh dengan *letter of support* meskipun tidak dibahas sama sekali dalam dokumen tender dan *pre-bid meeting* mengenai *letter of support.* Investigator berpendapat bahwa Terlapor I dan Terlapor II membuat interpretasi yang berbeda dari dokumen

tender dan hasil *pre-bid meeting*, dimana menurut Ahli Paramita Prananingtyas isi dokumen yang bersifat ambigu merupakan salah satu ciri persekongkolan di Indonesia; ----------

21.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apabila dalam suatu dokumen persyaratan, terdapat hal-hal yang tidak jelas, apakah bisa ditafsirkan lain, siapa yang berwenang menentukan tafsir tersebut?

	Jawaban	Mohon maaf Majelis, apa yang disampaikan, adalah salah satu ciri persekongkolan tender di Indonesia. Ada beberapa hal yakni berhubungan dengan adanya isi dokumen yang bersifat ambigu dimana dokumen bisa salah diinterpretasikan peserta tender. Merupakan kewajiban panitia tender untuk memberikan penjelasan kepada peserta tender dalam bahasa yang sama. Peserta tender diberikan kesempatan untuk menanyakan isi dari dokumen tender dan bagaimana proses perencanaan dan tahapan-tahapan tender.

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi. ---------

Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender; ------

Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya". ----------

Bahwa unsur mengatur dan menentukan pemenang tender didalam dugaan pelangaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan mengatur dan menentukan Terlapor III sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang; ----------

Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan mengatur dan menentukan Terlapor III menjadi pemenang telah dijelaskan sebagaimana di atas di dalam unsur bersekongkol dengan cara sebagai berikut: ----------

(1) Terkait dengan persyaratan IMCA; ----------

(2) Terkait Persyaratan Keanggotaan IMCA dalam tender *Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204)*; ----------

(3) Terkait *Pre Bid Clarification Meeting #2 (Tender Clarification#2 Administrative and Technical Clarification)* Pada tanggal 7 Oktober 2016 Terkait dengan Persyaratan Keanggotaan Sertifikat IMCA untuk *Diving* dan ROV; ------

(4) Terkait Dengan Persyaratan Keanggotaan IMCA Kontraktor Di dalam Tahap Pra Kualifikasi Yang Tercantum Di dalam ITB *(Instruction To Bidder)*; ----------

(5) Terkait ketentuan letter of support untuk Persyaratan Keanggotaan IMCA;----------

(6) Terkait Pemenang tender A quo tidak mempunyai sertifikat IMCA *Diving*.----------

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.----------

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

Bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:----------

"Persaingan Antar Pelaku Usaha Dalam Menjalankan Kegiatan Produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan Usaha"

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PC Muriah sebagai Terlapor I dan PC Ketapang Terlapor II untuk memenangkan PT Aquamarine Inspection Division selaku Terlapor III dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan Usaha sebagaimana yang telah yang diuraikan secara jelas di dalam fakta persidangan dan analisa Investigator adalah merupakan tindakan yang melanggar persaingan usaha tidak sehat;----------

Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.----------

Dampak ----------

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pihak lain tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

Kesimpulan ----------

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Tim Investigator dapat menyimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran Pasal Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada *Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204)* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. ----------

8. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* TI-TII.20);------

8.1 Terlapor I dan Terlapor II adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Terlapor I dan Terlapor II merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang mempunyai wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Negara Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). ----------

Sebagai Kontraktor KKS, kegiatan operasional Terlapor I dan Terlapor II akan mempengaruhi penerimaan bagi Negara dan pengeluaran berkenaan dengan kegiatan tersebut akan ditagih kembali kepada Negara. Oleh karenanya, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Terlapor I dan Terlapor II memegang tanggung jawab yang besar terhadap Negara Republik Indonesia karena semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional tersebut akan dikembalikan oleh negara (*cost recovery*). Terganggunya produksi minyak dan gas bumi akan mempengaruhi penerimaan negara.----------

Adapun sebagian wilayah kerja Terlapor I dan Terlapor II berada di Muriah, lepaspantai Jawa Tengah dan Ketapang, lepas pantai Jawa Timur. ----------

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, selaku Kontraktor KKS, Terlapor I dan Terlapor II wajib mengikuti dan mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh SKK Migas secara khusus, termasuk berkenaan dengan suatu proses lelang/tender. --------

Sebagai bentuk pengawasan terhadap Terlapor I dan Terlapor II, SKK Migas mempunyai peran untuk melaksanakan penilaian kinerja Kontraktor KKS (dalam hal ini Terlapor I dan Terlapor II) secara berkala melalui mekanisme penilaian *Key Performance Indicator* (KPI). Dalam praktek, SKK Migas pun dapatmembantu Kontraktor KKS untuk menyelesaikan permasalahan dengan sub-kontraktornya apabila diperlukan, baik sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh SKK Migas. ----------

8.2 Pelaksanaan Tender Berdasarkan Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKK/SKKO0000/2015/SO Revisi ketiga mengenai Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kontrak Kerjasama (PTK 007 Revisi 03)----------

Tender dalam perkara *a quo* adalah untuk pekerjaan bidang jasa *underwater services*. ----------

Tender *a quo* dilaksanakan berdasarkan ketentuan PTK 007 Revisi 03 dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kewajiban operasional Terlapor I dan Terlapor II selaku Kontraktor KKS. PTK 007 Revisi 03 mengatur prosedur atau tahapan khususnya bagi Kontraktor KKS untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa meliputi penyusunan rencana pengadaan, proses tender, manajemen kontrak, pembinaan Penyedia Barang/Jasa, dan penyelesaian perselisihan.----------

Tender *a quo* mempunyai nilai paket di bawah Rp50 miliar. Sesuai dengan Pasal 2.3 dan 2.3.1 Bab II PTK 007 Revisi 03,

rencana pengadaannya tidak membutuhkan persetujuan SKK Migas. Rencana untuk melakukan Tender tersebut hanya wajib dilaporkan kepada SKK Migas dengan mencantumkannya ke dalam daftar pengadaan (*procurement list*) pada setiap tahun anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Work Program & Budget (WP&B) (Pasal 2.3 dan 2.3.1 Bab II PTK 007 Revisi 03 dan Bab V-Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa halaman 45 PTK 007 Revisi 03). ----------

(1) Pekerjaan *underwater services* yang dibutuhkan oleh Terlapor I dan Terlapor II----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa Tender ini baru pertama kali diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C6, jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam tender *a quo* sudah diumumkan pada Surat Kabar Republika tanggal 25 Mei 2016, sebagaimana di bawah ini:----------

Nomor Tender	Judul Tender	Minimum TKDN	Golongan Usaha	Bidang	Sub Bidang
11204	PROVISION OF UNDER WATER SERVICES FOR KEPODANG AND KETAPANG FIELD	35%	Usaha Besar	Jasa Lainnya 02.f.03. Pelayanan Penyelaman (Diving Services) 02.l.12. Perawatan dan Perbaikan Peralatan	02.f.03.01 - Pengelasan Bawah Air 02.l.12.12. - Peralatan Pekerjaan Bawah Air 02.k.02 : Pengujian Tak Merusak (Non Destructive Testing)

Lingkup Pekerjaan:

Jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam Tender aquo adalah untuk kegiatan Inspeksi *Platform* (*Platform Inspection*) dan Survei Pipa bawah laut (*Pipeline Survey*) atas fasilitas operasional Terlapor I dan Terlapor II di wilayah lepas pantai Kepodang, Jawa Tengah dan lepas pantai Ketapang, Jawa Timur. Kegiatan Inspeksi *Platform* dimaksudkan agar struktur *Platform* Terlapor I dan Terlapor II tetap sesuai dan memenuhi persyaratan aturan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berlaku. Kegiatan Survei Pipa bawah laut meliputi pemeriksaan umum, bentangan bebas, stabilitas dan perlindungan yang memadai terhadap korosi.----------

Atas dasar alat bukti ini, Tim Investigator mendalihkan bahwa pekerjaan *underwater services* adalah pekerjaan pengelasan bawah air. Tim Investigator telah menghadirkan Ahli Slamet Subagyo (*vide Bukti* Investigator-B21) yang menyatakan bahwa pekerjaan pengelasan bawah air merupakan salah satu jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh Terlapor I dan Terlapor II apabila setelah dilakukan survei dan inspeksi, terdapat fasilitas yang memang membutuhkan pengelasan. Oleh karena itu, jenis pekerjaan pengelasan bawah air bukan merupakan jenis pekerjaan utama dari tender *a quo* sehingga pekerjaan pengelasan bawah air sebagaimana dimaksud masuk ke sub-bidang pekerjaan (apabila diperlukan dan dibutuhkan).----------

Pekerjaan *underwater services* ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan standar tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. Karenanya, Terlapor I dan Terlapor II sebagai perusahaan - perusahaan multinasional yang sangat konservatif dalam menerapkan prinsip keselamatan kerja, kesehatan dan lindung lingkungan mempunyai tolak ukur atau standar yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terkait.----------

Karena Indonesia belum mempunyai suatu pedoman baku atau standardisasi yang berlaku dalam skala nasional untuk standar-standar keselamatan dan keamanan untuk pekerjaan *underwater services*, maka Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar yang dijadikan rujukan oleh seluruh perusahaan-perusahaan dalam grup perusahaan Terlapor I dan Terlapor II yang salah satunya dan utamanya untuk pekerjaan *underwater services* adalah *guidelines* atau petunjuk yang dikeluarkan oleh organisasi *Internasional Marine Contractors Association* (IMCA). Petunjuk IMCA ini juga banyak dijadikan rujukan oleh perusahaan-perusahaan sejenis dengan Terlapor I dan Terlapor II di negara-negara lain di dunia dalam melaksanakan pekerjaan *underwater services*.----------

Untuk dapat disertifikasi oleh IMCA, perusahaan-perusahaan atau individu yang mengajukan permohonan sertifikasi diseleksi dan dinilai secara ketat oleh IMCA. Karenanya, dengan menggunakan vendor-vendor yang tersertifikasi oleh IMCA diharapkan resiko dalam melaksanakan pekerjaan *underwater services* dapat ditekan ke *zero risk*. Hal ini penting karena kembali ke tanggung jawab Terlapor I dan Terlapor II sebagai Kontraktor KKS, seluruh pengeluaran operasional-nya akan ditagih kembali kepada Negara, dan kerugian akan menjadi tanggung jawab Negara. Karenanya, adalah merupakan tanggung jawab Terlapor I dan Terlapor II untuk dapat melakukan pekerjaan, khususnya dalam perkara ini, *underwater services* dengan sebaik-baiknya dan *zero risk*. ----------

(2) Proses Tender Berdasarkan PTK 007 Revisi 03----------

Sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan, berdasarkan Bukti Investigator-C9 dan Bukti Investigator-C12, tender dalam perkara *a quo* adalah tender yang menggunakan sistem dua sampul. ----------

Dalam melaksanakan tender, Terlapor I dan Terlapor II telah menjalankannya sesuai dengan PTK 007 Revisi 03. Sebagaimana terbukti dalam persidangan, dalam rangkaian proses tender, seluruh Peserta Tender telah: ----------

A. memperoleh dokumen-dokumen persyaratan Tender yang sama: ----------
   1. Bid-Document pada tanggal 22 September 2016 (*vide Bukti* Investigator-C16);----------
   2. Risalah *Pre-Bid Clarification Meeting* yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2016 (*vide Bukti* Investigator-C81); ----------
   3. Tanggapan atas permintaan klarifikasi administrasi dan teknis pada tanggal 7 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-2);----------
   4. seluruh klarifikasi administrasi pada tanggal 12 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-3). ----------

B. diberikan waktu untuk melakukan persiapan dan pengumpulan dokumen persyaratan Tender yang sama.

C. memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk bertanya, mengajukan protes, keberatan, dan sanggahan kepada Panitia Tender, yaitu: ----------

1. kesempatan untuk mengajukan keberatan hasil Pra-Kualifikasi (Calon Peserta Tender);----------
2. kesempatan untuk bertanya pada tahap *Pre-Bid Clarification Meeting* maupun pada waktu tambahan yang diberikan;----------
3. kesempatan untuk mengajukan protes atas isi Dokumen Tender ataupun perubahannya;----------
4. kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas hasil evaluasi teknis dan keputusan penetapan pemenang tender;----------
5. kesempatan untuk mengajukan sanggahan banding atas hasil tanggapan Panitia Tender terhadap sanggahan yang diajukan untuk keputusan penetapan pemenang tender. ----------

Berdasarkan PTK 007 Revisi 03, Peserta Tender mempunyai kesempatan:----------

1. sebanyak 2 (*dua*) kali untuk bertanya kepada Panitia Tender terkait persyaratan-persyaratan ataupun dokumen - dokumen yang dibutuhkan dalam tender *a quo*; dan----------
2. 4 (*empat*) kali kesempatan untuk bertanya sehubungan dengan mekanisme penilaian oleh Panitia Tender.----------

D. mendapatkan jawaban Panitia Tender secara tertulis dalam waktu yang sama atas seluruh pertanyaan yang diajukan.----------

(3) Mengenai ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999----------

Pasal 22 UU No.5/1999 mengatur sebagai berikut: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender*

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

Pada tahun tahun 2017, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No.85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017, yang pada intinya mengubah bunyi Pasal 22 UU No.5/1999 menjadi: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha laindan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*" ----------

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur dari Pasal 22 UU No.5/1999 sesuai dengan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Persaingan Usaha tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999) adalah:-----

A. Pelaku usaha;----------
B. Bersekongkol;----------
C. Pihak lain;----------
D. Untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan ----------
E. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

(4) Kasus Posisi yang Didalihkan oleh Tim Investigator----------

Dalam halaman 36 – 37 LDP, Tim Investigator berdalih bahwa "*unsur mengatur danmenentukan pemenang tender didalam dugaan pelanggaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/pengguna jasa/pemilik pekerjaan dengan mengatur dan menentukan Terlapor III sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang.*" Selanjutnya didalihkan; "*tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan mengatur dan menentukan Terlapor III menjadi pemenang telah dijelaskan sebagaimana di atas di dalam unsur bersekongkol dengan cara sebagai berikut*:--

1. *Terkait dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan The Contractor is to be and IMCA member company;* ----------

2. *Terkait dengan persyaratan workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebaga gudang penyimpanan Tools and Equipment of NDT and Inspection Services;*----------
3. *Terkait Evaluasi Persyaratan Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;*----------
4. *Terkait Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA;*---
5. *Terkait Surat dukungan Keanggotaan IMCA PT SBN kepada Terlapor III bertentangan dengan ketentuan IMCA;*----------
6. *Terkait Penilaian Panitia kepada Surat Dukungan Yang diberikan Oleh PT SBN kepada Terlapor III sebagai Pemenang Tender; dan* ----------
7. *Terkait Owner Estimate dan Harga Penawaran Pemenang Tender."* ----------

Selama proses persidangan berlangsung, Tim Investigator tidak dapat membuktikan satu pun unsur-unsur persekongkolan sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). Tim Investigator justru hanya berkutat dengan masalah pemberian surat dukungan berkenaan dengan persyaratan keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* dan ROV dari para Calon Peserta Tender dan/atau Peserta Tender kepada Peserta Tender lainnya.---

Tim Investigator tidak dapat membuktikan bahwa: ----------

1. pemberian surat dukungan itu adalah suatu bentuk "persekongkolan" antara Terlapor I dan Terlapor II denganTerlapor III; dan karenanya;----------
2. pemberian surat dukungan itu menjadikan Terlapor III sebagai pemenang tender. ----------

8.3 Kesimpulan ----------

Aspek Formil;----------

Terbukti bahwa Tim Investigator melanggar *due process of law*--

1. Tim Investigator terbukti telah mengutip dan menerapkan secara berbeda ketentuan yang diatur pada Angka 2.4.6. Bab VIII PTK 007 Revisi 03----------

   Tim Investigator secara nyata telah mengutip dan menerapkan secara berbeda ketentuan tentang bukti pengalaman yang harus disampaikan oleh calon Peserta Tender pada tahap Pra-Kualifikasi. Tim Investigator pada Angka 10.1 halaman 13 LDP menyampaikan sebagai berikut: (*vide Bukti* TI&TII-4) ----------

   "*Pengalaman perusahaan: harus memiliki pengalaman di bidang Underwater service (Diving and ROV inspection) minimum 7 (tujuh) tahun untuk pekerjaan sejenis di Indonesia.*"----------

   Tidak ada satupun persyaratan dalam dokumen Tender *a quo* yang mensyaratkan bahwa calon Peserta Tender harus mempunyai pengalaman minimal 7 (*tujuh*) tahun untuk pekerjaan *underwater service* di Indonesia. Dalam dokumen Pra-Kualifikasi, Angka 3 Bagian C halaman 7 (*vide Bukti* TI&TII-5) mensyaratkan: ----------

   "...Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada sub bidang usaha yang sesuai dengan paket tender, diindustri perminyakan maupun diluar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota konsorsium ataupun sebagai subkontraktor..."----------

   Persyaratan mengenai bukti pengalaman untuk pekerjaan sejenis sebagaimana tercantum dalam dokumen Pra-Kualifikasi yang disusun oleh Panitia Tender mengikuti aturan pada Angka 2.4.6. Bab VIII PTK 007 Revisi 03 (*vide Bukti* TI&TII-6), yang berbunyi sebagai berikut: ----------

   "Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, diindustri perminyakan maupun diluar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota konsorsium ataupun sebagai subkontraktor dan memiliki nilai pengalaman sesuai ketentuan dan yang dipersyaratkan pada angka 2.4.7."----------

Hal ini dipertegas oleh ahli-ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a. Ahli Pandji Achmad Ariaz dalam persidangan tanggal 18 April 2018 menerangkan bahwa pada intinya Angka 2.4.6. halaman 73 PTK 007 Revisi 3 mengatur bahwa pengalaman yang dimaksud adalah menyelesaikan 1 pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 7 (*tujuh*) tahun. --

b. Ahli Maria Kristanti dalam persidangan tanggal 11 April 2018 menerangkan bahwa pada intinya PTK 007 Revisi 03 mengatur jika perusahaan harus mempunyai pengalaman minimal 1 (*satu*) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 7 (*tujuh*) tahun terakhir, bukan mempunyai pekerjaan minimum 7 (*tujuh*) tahun untuk pekerjaan sejenis. ----------

c. Adapun ahli Wahyu Adiartono dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 menerangkan bahwa pada intinya peserta lelang diminta untuk membuktikan setidaknya memiliki 1 (*satu*) kali saja pengalaman sejenis dalam 7 (*tujuh*) tahun terakhir dengan cara melampirkan fotokopi *purchase order* atau kontrak. ----------

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa persyaratan yang terdapat dalam dokumen Pra-Kualifikasi dan PTK 007 Revisi 03 adalah bukti pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam 7 (*tujuh*) tahun terakhir, bukan minimum 7 (*tahun*) untuk pekerjaan sejenis. Pengertian dari kedua persyaratan tersebut sangatlah berbeda dengan kutipan dan penerapan pasal dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga sangat fatal apabila ada pihak yang menafsirkannya secara tidak tepat. ----------

2. Tim Investigator membelokkan keterangan Saksi Michael Wilson Tinangon tentang penggunaan surat dukungan dalam Tender *aquo* ----------

Tim Investigator dengan sengaja membelokkan keterangan Direktur PT SBN, Michael Wilson Tinangon, pada tahap

penyelidikan. Angka 13.12 halaman 20 LDP berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Menurut Saksi Sdr. Michael Wilson Tinangon, pada saat prakualifikasi, seharusnya Panitia Tender dapat melihat Konsorsium PT SBN-PT Cakrabhasa dan supporting letter PT SBN untuk PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III). Seharusnya kedua perusahaan tersebut didiskualifikasi oleh Panitia Tender.*" ----------

Padahal menurut keterangan Saksi Direktur PT SBN, Michael Wilson Tinangon pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, menyatakan sebagai berikut:----------

"*yang betul adalah, apabila sama-sama muncul saat PQ maka bisa didiskualifikasi. Namun, ini ada yang gugur, maka tidak masalah ...*"----------

Pada dasarnya, Saksi Michael Wilson Tinangon menerangkan bahwa apabila terdapat 2 (*dua*) perusahaan yang didukung oleh satu perusahaan yang sama dan kedua perusahaan tersebut lolos tahap pra-kualifikasi, maka kedua perusahaan yang didukung oleh perusahaan yang sama tersebut wajib didiskualifikasi.----------

Faktanya, dalam tender *a quo*, Konsorsium PT SBN-PT Cahaya Karya Bhakti Samudra (PT Cakrabasha) tidak lolos pada tahap Pra-Kualifikasi (*vide Bukti* TI&TII-7), sehingga tidak dapat mengikuti proses tender ini. Lebih lanjut, Saksi Michael Wilson Tinangon menjelaskan pada intinya apabila Konsorsium tersebut lolos tahap Pra-Kualifikasi dan secara bersamaan PT SBN juga memberikan surat dukungan kepada PT Aquamarine Divindo Inspection (PT Aquamarine), maka kondisi seperti ini yang dapat menggugurkan kedua Peserta Tender tersebut. Akan tetapi, karena Konsorsium PT SBN-PT Cakrabasha tidak lolos tahap Pra-Kualifikasi, lalu setelahnya PT SBN memberikan surat dukungan ke PT Aquamarine pada saat sebelum tahap penyampaian Dokumen Tender, maka hal ini diperbolehkan.

Karenanya, terbukti bahwa di dalam LDP, bahwa patut diduga Tim Investigator KPPU telah membelokkan

keterangan Michael Wilson Tinangon dan membuat pernyataan Michael Wilson Tinangon menjadi tidak tepat. ---

LDP terbukti kurang pihak atau tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium)* ----------

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Tanggapan, terbukti bahwa LDP Tim Investigator kurang pihak, dimana PT SBN tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Perkara ini. Hal ini karena Tim Investigator dalam LDP-nya berkali-kali menyangkut pautkan PT SBN ke dalam dalih-dalih tuduhan persekongkolannya, yaitu: ----------

1. Angka 13 Halaman 19 LDP----------
   Dalih Tim Investigator KPPU terkait PT SBN.----------
2. Angka 14 Halaman 21 LDP----------
   Dalih Tim Investigator KPPU terkait Konsorsium PT SBN-PT Cakrabasha.----------
3. Angka 15 Halaman 22 LDP----------
   Dalih Tim Investigator KPPU terkait surat dukungan Keanggotan IMCA dari PT SBN kepada Terlapor III.----------

Berdasarkan pendapat ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Cetakan 16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 439 (*vide Bukti* TI&TII-8), menyatakan bahwa: ----------

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung RI selalu memutus secara konsisten bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) sebagaimana Terlapor I dan Terlapor II kutip di bawah ini:-------

1. Putusan Mahkamah Agung No.186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985----------

"*Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknyaberpendapat bahwa apabila pihak tergugat dianggap kurang, maka tuntutan dalam gugatan tidak dapat diselesaikan secara hukum.*"

2. Putusan Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 ----------

"*Mahkamah Agung dalam perkara ini pada pokoknyaberpendapat bahwa masalah kepemilikan penting untuk menentukan apakah suatu pihak harus ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat dalam gugatan perdata.*" ---------

Dengan demikian, apabila PT SBN tidak dijadikan sebagai Terlapor oleh Tim Investigator KPPU, hal ini jelas bahwa LDP Tim Investigator dinyatakan kurang pihak.----------

Aspek Materil----------

A. Unsur - Unsur "Persekongkolan" Tidak Terpenuhi, Karenanya Terbukti Tidak Ada Persekongkolan Diantara Para Terlapor ----------

1. Tidak ada Persekongkolan Tender antara Para Terlapor --

Dalam Perkara ini, Para Terlapor telah dituduh melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999, dimana: "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*" ----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa terdapat 5 (*lima*) unsur yang bersifat kumulatif di dalam Pasal 22 UU No.5/1999, yaitu: (i) unsur pelaku usaha; (ii) unsur bersekongkol; (iii) unsur pihak lain; (iv) unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan (v) unsur persaingan usaha tidak sehat.----------

Kelima unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif, dan apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No.5/1999. ----------

Terbukti, selama persidangan berlangsung, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli, unsur bersekongkol tidak dilanggar oleh Terlapor I dan Terlapor II dan karenanya tidak terbukti

Terlapor I dan Terlapor II telah melanggar Pasal 22 UU No.5/1999. Justru sebaliknya, dalam pelaksanaan tender, Terlapor I dan Terlapor II terbukti mematuhi dan mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat. Untuk jelasnya, berikut Terlapor I dan Terlapor II sampaikan fakta-fakta bahwa tidak ada unsur-unsur Pasal 22 UU No.5/1999 yang dilanggar oleh Terlapor I dan Terlapor II, sebagai berikut: ----------

Unsur Pelaku Usaha ----------

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No.5/1999 dan Pasal 1 angka (11) Perkom No.1/2010: ----------

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." ----------

Adapun Terlapor I dan Terlapor II merupakan Kontraktor KKS yang melakukan kegiatan usaha di Negara Republik Indonesia. Pihak-pihak yang dianggap sebagai "pelaku usaha" haruslah lengkap dan sesuai dengan definisi pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal yang dijelaskan di atas. ----------

Unsur Bersekongkol----------

Berdasarkan *vide* Bukti Investigator-C4, Bukti Investigator-C10, dan Bukti Investigator C-12, serta keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 April 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31), Saksi Nizar Sahputra dalam persidangan tanggal 24 April 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33), Saksi Achmad Djaelani dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti Investigator-B10) dan Saksi Michael Wilson Tinangon dalam persidangan tanggal 13 Maret 2018 (*vide* Bukti Investigator-B13), terbukti bahwa Para Terlapor tidak bersekongkol;----------

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (8) UU No.5/1999, bahwa: ----------

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"; ----------

maka, tuduhan atas suatu persekongkolan harus membuktikan adanya kepentingan untuk menguasai suatu pasar bersangkutan; ----------

Dalam hal ini, tidak ada satupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terlapor I dan Terlapor II mempunyai kepentingan untuk melakukan persekongkolan dengan Terlapor III, dalam rangka menguasai suatu pasar bersangkutan. Pertanyaannya kemudian adalah, pasar bersangkutan mana yang hendak dikuasai Para Terlapor? Apakah pasar underwater services? Mohon untuk perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa Terlapor I dan Terlapor II bukanlah pengusaha yang bidang usahanya melakukan kegiatan underwater services. Ditambah lagi Terlapor I dan Terlapor II tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terlapor III;----------

Hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi, yaitu Saksi Achmad Djaelani (*vide* Bukti Investigator-B10), Saksi Michael Wilson Tinangon (*vide* Bukti Investigator-B13) dan Saksi Maya Aprilia (*vide* Bukti Investigator-B14), yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pekerjaan *underwater services*, para Calon Peserta Tender dan Peserta Tender merupakan perusahaan-perusahaan yang masing-masing memiliki pengalaman serupa selama bertahun-tahun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sedangkan Terlapor I dan Terlapor II baru pertama kali ini mengadakan Tender *underwater services*;

Selain itu, seluruh rangkaian proses tender telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* Bukti Investigator C-16 dan Bukti Investigator C-8) dan PTK

007 Revisi 03. Terlebih lagi, prinsip keterbukaan kepada Peserta Tender telah dilaksanakan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Seluruh rangkaian proses tender, baik itu perubahan persyaratan dan informasi terkait tender diberikan kepada seluruh Peserta Tender; ----------

Hal ini dapat dibuktikan di dalam persidangan bahwa seluruh Calon Peserta Tender ataupun Peserta Tender yang mengikuti tender dapat menjelaskan rangkaian proses tender aquo (*vide* Bukti Investigator-B4 s.d. Bukti Investigator-B7, Bukti Investigator-B9, Bukti Investigator-B10, Bukti Investigator-B12 s.d. Bukti Investigator-B14, dan Bukti Investigator-B27). ----------

Jenis - Jenis Bersekongkol Menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 ----------

Bahwa Angka 3.2 Bab III Halaman 6 Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai "unsur bersekongkol", yaitu sebagai berikut: ----------

> *".. Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu."*----------

Bahwa Unsur Bersekongkol antara lain dapat berupa: ---

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;----------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya; ----------
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
d. menciptakan persaingan semu;----------
e. tidak menolak melakukan bahwa tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; --------
f. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun

tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.----------

Di dalam LDP, Tim Investigator menuduh bahwa Para Terlapor melakukan persekongkolan secara vertikal. Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ---

Terhadap tuduhan ini, Terlapor I dan Terlapor II menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan apapun antara Para Terlapor dalam tender *a quo*;----------

Berikut penjelasan dan tanggapan Terlapor I dan Terlapor II beserta fakta di dalam persidangan KPPU terkait dengan unsur-unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Angka 3.2 Bab III Halaman 6 Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999.----------

Unsur kerjasama antara dua pihak atau lebih. ----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa tidak ada kerja sama antara Panitia Tender dengan Peserta Tender tersebut. Hal ini terbukti dari fakta-fakta berikut ini: ----------

(1) Bukti TI&TII-9 tentang banyaknya divisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tender, jo. Bukti Investigator-C6 tentang pengumuman tender melalui Koran Republika; ----------

(2) Keterangan Saksi Dwi Andriyanto (*vide Bukti* Investigator-B4), Saksi Mia Siti Mariani (*vide Bukti* Investigator-B5), Saksi Lusiana Sulistianingsih (*vide Bukti* Investigator-B6), Saksi Daniel Yudi (*vide Bukti* Investigator-B7), Saksi Nissa Pramesti (*vide Bukti* Investigator-B9), Saksi Achmad Djaelani (*vide Bukti* Investigator-B10), Saksi Febbi A. Viariawan

(*vide Bukti* Investigator-B29), Saksi Nur Achroni (*vide Bukti* Investigator-B31), Saksi Herry Gunawan (*vide Bukti* Investigator-B32), dan Saksi Nizar Saputra (*vide Bukti* Investigator-B33); ----------

(3) Keterangan Ahli Udin Silalahi (*vide Bukti* Investigator-B24) dan Ahli Pandji Achmad Ariaz (*vide Bukti* Investigator-B25);----------

(4) Keterangan Terlapor III (*vide Bukti* Investigator-B37)

Karenanya terbukti bahwa: ----------

(1) Seluruh Peserta Tender telah mendapatkan dan mengetahui seluruh perubahan - perubahan, persyaratan-persyaratan ataupun informasi - informasi terkait tender *a quo*; dan----------

(2) Seluruh Peserta Tender menandatangani setiap minuta rapat di seluruh tahapan tender. ----------

Hal ini membuktikan bahwa Peserta Tender telah menyetujui seluruh perubahan ataupun persyaratan dari tender *a quo.*----------

Unsur Membandingkan Dokumen Tender Sebelum Penyerahan ----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa tidak ada peristiwa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, baik antara sesama Peserta Tender maupun antara Peserta Tender dengan Panitia Tender. Hal ini didasarkan pada: ----------

(1) Pengumuman Tender melalui Koran Republika (*vide* Bukti Investigator-C6), *Log Bid. PQ Submission* tanggal 3 Juni 2016 (*vide* Bukti TI&TII-11), Faksimili No.1155/PCML/TDR/2016 tanggal 21 September 2016 (*vide* Bukti TI&TII-12), dan *Log Bid Document Collection* tanggal 22 September 2016 (*vide* Bukti TI&TII-13);----------

(2) Keterangan Saksi Dwi Andriyanto (*vide* Bukti Investigator-B4) dan Saksi Achmad Djaelani (*vide* Bukti Investigator-B10). ----------

Karenanya terbukti bahwa: ----------

(1) Seluruh Calon Peserta Tender di tahap pengumpulan Dokumen Kualifikasi telah mengumpulkan pada waktu yang telah ditentukan dokumen Pra-Kualifikasi; dan----------

(2) Seluruh Peserta Tender telah mengumpulkan Dokumen Tender pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Tender ----------

Unsur Menciptakan Persaingan Semu ----------

Terbukti selama persidangan berlangsung bahwa Tidak ada persaingan semu. Seluruh Peserta Tender bersaing secara adil dan transparan. Seluruh kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Panitia Tender, termasuk namun tidak terbatas pada: Health, Safety and Environment (HSE), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Bid Bond (Jaminan Penawaran), Keanggotaan IMCA, dan lain-lain berlaku untuk seluruh Peserta Tender. ----------

Hal ini didasarkan pada: ----------

(1) Faksimili No.0068/PCML/TDR/2017 tanggal 26 Januari 2017 (*vide* Bukti TI&TII-14), Letter of Award tanggal 6 Februari 2017 (*vide* Bukti Investigator-C14), Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender (*vide* Bukti Investigator-C51), Bid-Document (*vide* Bukti Investigator-C16), dan Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting (*vide* Bukti Investigator-C8); ----------

(2) Keterangan Saksi Nissa Pramesti (*vide* Bukti Investigator-B9) dan Saksi Achmad Djaelani (*vide* Bukti Investigator-B10); ----------

(3) Keterangan Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Bukti Investigator-B36). ----------

Karenanya Terbukti Bahwa ----------

(1) Tidak ada Peserta Tender yang mengajukan sanggahan atas keputusan Panitia Tender yang menunjuk Terlapor III sebagai pemenang tender; dan----------

(2) Seluruh Peserta Tender mendapatkan Dokumen Pra-Kualifikasi dan Dokumen Tender yang sama, sehingga Peserta Tender bersaing secara adil dan transparan. Seluruh persyaratan Dokumen Pra-Kualifikasi dan Dokumen Tender mencerminkan kebutuhan Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo*. ----------

Unsur Menyetujui dan atau Memfasilitasi Terjadinya Persekongkolan ----------

Terbukti selama persidangan berlangsung tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan telah terjadi pemberian fasilitas dari Terlapor I dan Terlapor II terhadap pemenang tender. ----------

Hal ini Didasarkan pada: ----------

(1) Risalah *Clarification Meeting* tanggal 4 Januari 2017 antara Panitia Tender dan PT AOS (*vide* Bukti TI&TII-10), *Minutes of Bid Opening (first envelope)* (*vide* Bukti Investigator-C9) dan *Minutes of Bid Opening (second envelope)* (*vide* Bukti Investigator-C12); ----------

(2) Keterangan Saksi Dwi Andriyanto (*vide* Bukti Investigator-B4), Saksi Mia Siti Mariani (*vide* Bukti Investigator-B5), Saksi Lusiana Sulistianingsih (*vide* Bukti Investigator-B6), Saksi Daniel Yudi (*vide* Bukti Investigator-B7), Saksi Achmad Djaelani (*vide* Bukti Investigator-B10), Saksi Margaretha Retno Sundari (*vide* Bukti Investigator-B12), Saksi Michael Wilson Tinangon (*vide* Bukti Investigator-B13), Saksi Maya Aprilia (*vide* Bukti Investigator-B14), Saksi Saksi Alfonso Reno Erawan dan Saksi BJ Doddy Vidhiantoro (*vide* Bukti Investigator-B27),

Saksi Nur Achroni (*vide* Bukti Investigator-B31), Saksi Herry Gunawan (*vide* Bukti Investigator-B32), dan Saksi Nizar Saputra (*vide* Bukti Investigator-B33);----------

(3) Keterangan Ahli Pandji Achmad Ariaz (*vide* Bukti Investigator-B25), dan Ahli Wahyu Adiartono (*vide* Bukti Investigator-B35);----------

(4) Keterangan Terlapor III (*vide* Bukti Investigator-B37).----------

Karenanya Terbukti Bahwa: ----------

(1) Surat dukungan atau *letter of support* merupakan hal yang lumrah ditemukan dalam suatu tender; --

(2) Banyak perusahaan yang meminta dan mendapatkan surat dukungan atau letter of support kepada perusahaan lain yang telah menjadi anggota IMCA untuk memenuhi persyaratan di suatu tender; dan----------

(3) Seluruh Peserta Tender diberikan kesempatan untuk melihat dokumen-dokumen Peserta Tender lainnya yang telah dibuka bersama-sama dengan Panitia Tender.----------

Mengenai Unsur tidak menolak melakukan tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender----------

Telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa seluruh tindakan Panitia Tender dilakukan berdasarkan PTK 007 Revisi 03 dan ketentuan dalam ITB beserta dokumen lain yang terdapat dalam tender. ----------

Hal ini didasarkan pada: ----------

(1) Faksimili No.0068/PCML/TDR/2017 tanggal 26 Januari 2017 (*vide* Bukti TI&TII-14), *Letter of Award* tanggal 6 Februari 2017 (*vide* Bukti

Investigator-C14), Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender (*vide* Bukti Investigator-C51), *Bid-Document* (*vide* Bukti Investigator-C16), dan *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* (*vide* Bukti Investigator-C8), *Statement of Act* tanggal 13 November 2016 (*vide* Bukti TI&TII-15), *Technical Evaluation Report* (*vide* Bukti TI&TII-16) dan *Detailed Technical Evaluation Criteria* (*vide* Bukti TI&TII-17);----------

(2) Keterangan Saksi Nissa Pramesti (*vide* Bukti Investigator-B9) dan Saksi Achmad Djaelani (*vide* Bukti Investigator-B10);----------

Karenanya terbukti bahwa: ----------

(1) Tidak ada Peserta Tender yang mengajukan sanggahan atas keputusan Panitia Tender yang menunjuk Terlapor III sebagai pemenang tender;---

(2) Seluruh penilaian dilakukan oleh Panitia Tender terhadap dokumen penawaran dari seluruh Peserta Tender adalah berdasarkan pada dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat-syarat keikutsertaan tender dan berdasarkan kebutuhan tender----------

Mengenai Unsur pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa Seluruh proses tender dilakukan secara adil, berimbang dan tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu PTK 007 Revisi 03 dan tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang bertentangan dengan PTK 007 Revisi 03 maupun UU No.5/1999. Surat dukungan untuk suatu persyaratan tertentu berlaku bagi semua Peserta Tender. Syarat TKDN juga berlaku untuk seluruh Peserta Tender.

Hal ini didasarkan pada: ----------

(1) *Tender Plan (Resitting*) tanggal 29 April 2016 (*vide* Bukti TI&TII-18), *Minutes of Pre-Bid Clarification Meeting* (*vide* Bukti Investigator-C8) dan Risalah *Clarification Meeting* tanggal 4 Januari 2017 antara Panitia Tender dan PT AOS (*vide* Bukti TI&TII-10);-

(2) Keterangan Saksi Achmad Djaelani (*vide* Bukti Investigator-B10), Saksi Michael Wilson Tinangon (*vide* Bukti Investigator-B13), dan Saksi Maya Aprilia (*vide* Bukti Investigator-B14); ----------

(3) Keterangan Terlapor III (*vide* Bukti Investigator-B37).----------

Karenanya terbukti bahwa tidak ada pemberian kesempatan eksklusif kepada Peserta Tender tertentu, karena: ----------

(1) Setiap Saksi (Calon Peserta Tender atau Peserta Tender) telah mengetahui sifat atau natur pekerjaan underwater services dan paham serta tidak ada yang keberatan mengenai persyaratan keanggotaan IMCA; ----------

(2) Setiap Calon Peserta Tender atau Peserta Tender memperoleh perlakuan yang sama mengenai surat dukungan;----------

(3) Klarifikasi atau jawaban atas pertanyaan selalu dibuat minuta tertulis dan diberikan kepada Peserta Tender. ----------

Oleh karena tidak satupun unsur-unsur bersekongkol sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak tuduhan-tuduhan Tim Investigator.----------

1. Indikasi Tender yang Menciptakan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Menghambat Persaingan Usaha Menurut Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

   Selanjutnya, Angka 4.2 Bab IV Halaman 9 Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 menjelaskan indikasi-indikasi persekongkolan dalam tender yang berpotensi

menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha, yaitu: ----------

a. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya ----------

   Terkait dengan hal ini, berdasarkan Bukti Investigator-C7, Bukti Investigator-C8, Bukti Investigator-C10, Bukti Investigator-C13, Bukti Investigator-C12, Bukti Investigator-C68, Bukti Investigator-C69, dan Bukti Investigator-C71, proses tender *a quo* tidak tertutup dan bersifat transparan. Hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan KPPU bahwa seluruh Calon Peserta Tender dan Peserta Tender mendapatkan seluruh informasi, perubahan dan korespondensi terkait tender *a quo*; ----------

   Selain itu, tender *a quo* telah diumumkan terbuka secara luas bagi seluruh pelaku usaha. Hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan KPPU bahwa Tender aquo diumumkan melalui website dan surat kabar berskala nasional (*vide* Bukti Investigator-C6, Bukti Investigator-B4 s.d. Bukti Investigator-B7, Bukti Investigator-B9, Bukti Investigator-B10, dan Bukti Investigator-B12). ----

b. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama ----------

   Tidak ada satupun alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Hal ini dibuktikan berdasarkan Bukti Investigator-B4, Bukti Investigator-B5, Bukti Investigator-B10, dan

Bukti Investigator-B12 s.d. Bukti Investigator-B14, bahwasanya tender tidak bersifat diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang mempunyai kompetensi dalam pekerjaan tender *a quo*. Selain itu terbukti bahwa Calon Peserta Tender yang mendaftar sudah mengetahui jenis pekerjaan dan persyaratan umum dalam tender. ----------

c. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut----------

Terkait dengan hal ini, jelas terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa persyaratan tender a quo tidak mengarah kepada salah satu Calon Peserta Tender yang mengikuti tender aquo. Dalam hal ini Tim Investigator KPPU mendalihkan bahwa salah satu persyaratan tender adalah mengenai kepemilikan IMCA, dimana menurut Tim Investigator persyaratan IMCA dalam tender terlihat mengarah kepada Terlapor III; ----------

Terhadap tuduhan Tim Investigator Terlapor I dan Terlapor II menolak dengan tegas. Apabila Panitia Tender mensyaratkan kepemilikan IMCA hanya bagi Peserta Tender yang telah memiliki sertifikasi untuk kategori *Diving* dan ROV dan melarang penggunaan surat dukungan, maka hanya akan ada 2 pelaku usaha yang dapat mengikuti tender *a quo* (*vide Bukti* Investigator-B7, Bukti Investigator-B10, Bukti Investigator-B12, Bukti Investigator-B13, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigator-B33). ----------

Dari penjelasan di atas, tidak ada satupun indikasi-indikasi yang terbukti apabila Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan dalam tender ini. Selain

itu, jika setelah proses tender dilalui kemudian Terlapor I dan Terlapor II menentukan Terlapor III sebagai pemenang tender, hal ini tidak berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha;----------

Penilaian Terlapor I dan Terlapor II didasarkan pada dokumen sampul-I (penawaran teknis) dan sampul-II (penawaran komersial) yang disampaikan oleh Peserta Tender. Apabila Peserta Tender tidak memenuhi standar penilaian yang ditentukan dan dibutuhkan oleh Panitia Tender untuk pekerjaan tender *a quo*, maka Peserta Tender tersebut tidak akan lolos ke tahap berikutnya. ----------

Hal ini disampaikan oleh para ahli di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut: ----------

a. Ahli Pandji Achmad Ariaz, dalam persidangan tanggal 18 April 2018, yang menerangkan sebagai berikut: ----------

   "*Harus dilihat apakah betul dibutuhkan atau tidak padapekerjaan tersebut.*" ----------

b. Ahli Maria Kristanti, dalam persidangan tanggal 11 April 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

   "*... Prakualifikasi untuk menjaring peserta yang layak ikut.Layak ikut di sini dia memiliki spesifikasi atau kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tender itu sendiri ...*" ----------

   "*Pre-bid meeting itu sebenarnya adalah waktu dimana panitia menjelaskan mengenai isi tender itu sendiri, dari kebutuhan tendernya apa, persyaratannya apa yang harus diikuti oleh penyedia barang dan jasa. Dari situ, penyedia barang dan jasa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pun yang keterkaitannya dengan proses tender itu. Jadi dibuka kesempatan, tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga bisa langsung menanyakan kepada panitia kebutuhan dari tender itu sendiri itu apa.*" ----------

   "*...Jika memang dibutuhkan lagi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan oleh panitia*

tender.Jadi calls-nya itu ada di panitia tender. Karena tiap tender itu berbeda, ada yang penyedia barang dan jasanya manis-manis semuanya duduk manis mendengarkan tahu, ada yang dari awal mereka usil aja sama penawarannya orang, ada saja. Jadi itu tergantung calls nya di panitia tender untuk bisa membuat tendernya ini berjalan dengan baik, semua penyedia barang dan jasa ter-deliver semua kebutuhannya, pertanyaan-pertanyaannya mereka yaitu seperti itu ... panitia tender boleh melakukan proses tender selama tidak bertentangan dengan PTK 007, silakan dilakukan jika memang untuk kebutuhan tender itu sendiri." ----------

2. Indikasi Persekongkolan dalam Pelaksanaan Tender - Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat dalam memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Terlapor I dan Terlapor II sampaikan di bawah ini uraian indikasi suatu persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 beserta keterangan para saksi dan ahli yang diperiksa dalam persidangan. Pada penjelasan di bawah ini dapat terlihat bahwa tidak ada satu indikasi apapun yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam dan sepanjang tahap-tahap proses Tender yang dapat dianggap sebagai suatu persekongkolan: ----------

   a. Indikasi Persekongkolan Pada Saat Perencanaan -

      Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka ---------

      Terbukti berdasarkan Bukti Investigator-C6 bahwa metode tender dilakukan secara terbuka. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman tender dalam Surat Kabar Republika, Rabu 25 Mei 2016;
      Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31). ----------

Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu. --

Tidak terbukti Terlapor I dan Terlapor II hanya menyampaikan informsi tersebut kepada satu Calon Peserta Tender dan/atau Peserta Tender. Bahkan sebaliknya, berdasarkan dokumen Log Bid. PQ Submission tanggal 3 Juni 2016 (*vide* Bukti TI&TII-11), terdapat 14 peserta yang mendaftar dan akhirnya 10 peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31). ----------

Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/ melaksanakannya. ----------

Tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa tender a quo hanya dibuat untuk satu atau dua Calon Peserta Tender saja. Buktinya, 14 perusahaan melakukan registrasi dan 10 Calon Peserta Tender (termasuk konsorsium) menyampaikan dokumen prakualifikasi (*vide* Bukti TI&TII-11). Berdasarkan bukti *Minutes of Bid Opening (second envelope)*, hanya terdapat Peserta yang lolos ke tahap ini (*vide* Bukti Investigator-C12); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31). ----------

Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa. ----------

Tidak satupun alat bukti yang disampaikan selama persidangan menunjukkan adanya hubungan antara sumber dan dan pekerjaan jasa underwater services. Pendanaan tender berasal dari Terlapor I dan Terlapor II dengan komposisi seimbang (*vide* Bukti TI&TII-18). Keempat Peserta Tender yang maju ke tahap Pembukaan Dokumen Penawaran (termasuk Terlapor III) tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana terbukti berdasarkan *Minutes of Bid Opening (second envelope)* (*vide* Bukti Investigator-C12); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tanggal 25 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B36). ----------

Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang. ----------

Berdasarkan dokumen *Minutes of Bid Opening (second envelope)*, nilai HPS/OE Tender adalah Rp 49,465,485,000 (*vide Bukti* Investigator-C12). Sementara untuk nilai jaminan, berdasarkan Angka 1.3.1.4 halaman 6 *Instruction to Bidders*, nilai jaminan lelang adalah 1-3 % dari nilai penawaran (*vide Bukti* TI&TII-19). Jadi terbukti bahwa nilai jaminan pada tender *a quo* tidak lebih tinggi dari pada nilai HPS/OE; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti. ----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa lokasi tender sangat mudah dijangkau. Berdasarkan Bukti Investigator-C6, Bukti

Investigator-C16 dan Bukti Investigator-C51, lokasi tempat Tender di Talavera Officelantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Adapun waktu pelaksanaan lelang masih normal, tidak pernah pada proses Tender saat matahari belum terbit dan/atau matahari sudah terbenam. Seluruh pelaksanaan lelang dilakukan pada jam kerja yang wajar. ----------

Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti. ----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa lokasi tender sangat mudah dijangkau. Berdasarkan Bukti Investigator-C6, Bukti Investigator-C16 dan Bukti Investigator-C51, lokasi tempat Tender di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Adapun waktu pelaksanaan lelang masih normal, tidak pernah pada proses Tender saat matahari belum terbit dan/atau matahari sudah terbenam. Seluruh pelaksanaan lelang dilakukan pada jam kerja yang wajar. ----------

b. Indikasi Persekongkolan Pada Saat Pembentukan Panitia ----------

Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi----------

Berdasarkan Bukti Investigator-B36 dan Bukti TI&TII-18, Panitia Tender yang dipilih sudah memenuhi kualifikasi untuk dapat menjalankan Tender. Panitia Tender ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Terlapor I dan Terlapor II. Orang-orang yang ditunjuk memiliki sertifikasi PTK 007 sebagai panitia pengadaan; ----------

Penunjukan Panitia Tender pada Terlapor I dan Terlapor II dibuat bukan untuk tender tertentu saja, namun berlaku untuk semua proses tender. Panitia Tender juga menandatangani Pakta Integritas; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Wahyu Adiartono dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B35) dan keterangan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tanggal 25 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B36). ----------

Panitia Terafiliasi dengan Pelaku Usaha Tertentu-

Seluruh Panitia Tender merupakan pegawai yang profesional dan tidak terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu. Berdasarkan peraturan internal dan *Code of Business Ethic Petronas*, apabila terdapat *conflict of interest* dalamproses tender maka panitia tender yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan digantikan dengan panitia tender lainnya. ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tanggal 25 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B36). ----------

Susunan dan kinerja panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup - tutupi ----------

Berdasarkan Bukti TI&TII-18, susunan, tugas dan kewenangan Panitia Tender ditentukan di dalam dokumen Rencana Tender. Untuk selanjutnya, seluruh berita acara proses Tender, baik itu pemberitahuan, tanggapan, ataupun klarifikasi, selalu mencantumkan susunan Panitia Tender.

c. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang----------

Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C16 dan Bukti Investigator-C51, tidak ada persyaratan yang membatasi pelaku usaha tertentu di dalam Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender dan Instruction to Bidders (ITB) beserta dokumen lain yang terdapat dalam Tender;----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan ----------

Tidak ada kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu/Peserta Tender terkait dengan spesifikasi tertentu dan hal-hal lain tersebut di atas. Bahkan, berdasarkan Bukti Investigator-C8, seluruh perubahan persyaratan atau kebutuhan dokumen dibahas pada tahap pemberian penjelasan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender tanggal 26 September 2016; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan Saksi Nizar Sahputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang -----

Berdasarkan Bukti Investigator-C8, tidak ada kesepakatan di luar dari tahap pemberian

penjelasan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender tanggal 26 September 2016. -------

Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan -----

Berdasarkan Bukti TI&TII-31, tidak ada pelaku usaha yang diluluskan apabila tidak atau kurang memenuhi persyaratan. Sebaliknya, seluruh Calon Peserta Tender yang lulus dalam Pra-Kualifikasi adalah peserta-peserta yang telah memenuhi persyaratan;----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31) dan Saksi Nizar Sahputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33). ----------

Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu ----------

Tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Panitia Tender yang memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pelaku usaha. Seluruh kriteria dan syarat Tender berlaku bagi seluruh Peserta Tender. Bagi Calon Peserta Tender/Peserta Tender yang tidak lulus penilaian ataupun dokumen yang dipersyaratkan, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya (*vide* Bukti TI&TII-31 dan Bukti TI&TII-16);--------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31), keterangan Saksi Daniel Yudi PS dalam persidangan tanggal 7 Februari 2018 (*vide* Bukti Investigator-B7). --------

Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta ----------

Berdasarkan Bukti TI&TII-12, Panitia Tender mengundang Peserta Tender untuk menghadiri rapat penjelasan Tender. Selain itu, berdasarkan Bukti Investigator-C71, seluruh klarifikasi atas persyaratan setelah tahap Pra-Kualifikasi dibahas di dalam rapat penjelasan Tender, dibuat berita acara rapatnya dan diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender;----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Daniel Yudi PS dalam persidangan tanggal 7 Februari 2018 (*vide* Bukti Investigator-B7), keterangan Saksi Nissa Pramesti dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti Investigator-B9), keterangan Saksi Achmad Djaelani dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti Investigator-B10), keterangan Saksi Margaretha Retno Sundari dalam persidangan tanggal12 Maret 2018 (*vide* Bukti Investigator-B12), keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31), keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33), dan keterangan Terlapor III dalam persidangan tanggal 25 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B37).----------

Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan)----------

Berdasarkan Bukti Investigator-B6, tidak ada pemegang saham Terlapor I dan Terlapor II yang

juga memiliki saham di perusahaan Peserta Tender dan tidak ada benturan kepentingan bagi Terlapor I dan Terlapor II dengan Peserta Tender atau pihak lain terkait Tender; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Terlapor I dan Terlapor II dalam persidangan tanggal 25 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B6). ----------

d. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang ----------

Persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi ----------

Tidak terbukti bahwa terdapat persyaratan dalam dokumen tender yang mencantumkan syarat sertifikasi yang menguntungkan peserta tertentu. Sebaliknya berdasarkan Bukti Investigator-C6 dan Bukti Investigator-C8 seluruh peserta tender mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan persyaratan;----------

Bahkan terkait dengan persyaratan IMCA yang dipersoalkan oleh Tim Investigator, tidak benar bahwa persyaratan IMCA yang diterapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II mengarahkan kepada satu Peserta Tender (*vide* Bukti Investigator-C6, Bukti Investigator-C8, dan Bukti TI&TII-18);-------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33). ----------

e. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender ----------

Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas ----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C6, jangka waktu pengumuman tender diberikan dalam kurun waktu yang cukup bagi Calon Peserta Tender untuk mengetahui dan mempelajari pengumuman tender yaitu: pada tanggal 26 s.d. 31 Mei 2016.---

Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu ----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C6, pengumuman yang dibuat oleh Panitia Tender di dalam pengumuman Tender dibuat secara lengkap dan sesuai dengan Angka 1.3 Bab XI halaman 132 PTK 007 Revisi 3.Dokumen Tender diberikan kepada seluruh Peserta Tender. Klarifikasi atas persyaratan Tender juga disampaikan kepada seluruh Peserta Tender (*vide Bukti* TI&TII-13 dan Bukti Investigator-C71); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan ----------

Pengumuman Tender melalui Surat Kabar Republika, yang merupakan surat kabar yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1992. Surat Kabar Republika merupakan Surat Kabar nasional (*vide Bukti* Investigator-C6); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/*lay-out* surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang ----------

Pengumuman Tender telah mengikuti ukuran iklan yang wajar (*vide Bukti* Investigator-C6). ------

f. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang ----------

Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang----

Seluruh Dokumen Tender yang diberikan kepada Peserta Tender sama dan tidak ada perbedaan diantara para Peserta Tender (*vide Bukti* TI&TII-13); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) ----------

Waktu Pengambilan dokumen tender/ lelang yang diberikan sangat terbatas ----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C7, Panitia Tender memberikan kesempatan kepada Peserta Tender

untuk mengambil Dokumen Tender dalam waktu yang cukup yaitu pada tanggal 21 s.d. 22 September 2016; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang ----------

Lokasi tempat pengambilan Dokumen tender berada di wilayah yang sangat mudah untuk didatangi, yaitu di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 (*vide Bukti* Investigator-C6); ----------

Jl. Letjen TB Simatupang merupakan salah satu jalan raya yang dikenal di Ibukota Jakarta.Gedung Talavera adalah gedung perkantoran yang besar dan memiliki tanda/*signage* yang besar. ----------

Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka---------

Tidak pernah terjadi pemindahan tempat pengambilan dokumen. Pengambilan Dokumen Tender selalu berlokasi di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 (*vide Bukti* Investigator-C6). ----------

g. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang -

Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan ----------

HPS/OE yang ditentukan di Tender hanya satu yaitu senilai Rp 49,465,485,000 sebagaimana mengacu pada dokumen Summary of OE (*vide Bukti* Investigator-C15); ----------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu ----------

HPS/OE diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender pada saat pembukaan sampul-II (penawaran komersial). Besaran nilai HPS/OE tersebut dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga (*vide Bukti* Investigator-C12); ----------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nissa Pramesti dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B9), keterangan Saksi Achmad Djaelani dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B10), keterangan Saksi Margaretha Retno Sundari dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B12), dan keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli2018 (*vide Bukti* Investigator-B31).

Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar ----------

Mengacu pada dokumen Summary of OE, perhitungan HPS/OE dilakukan secara jelas dan wajar (*vide Bukti* Investigator-C15);----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

h. Indikasi Persekongkolan Pada Saat Tender Atau *Open House* Lelang ----------

Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi --------

Seluruh informasi terkait pekerjaan Tender telah diberitahukan di dalam tahap pengumuman Tender dan tahap pemberian penjelasan oleh Panitia Tender pada tanggal 26 September 2016 (*vide Bukti* Investigator-C6 dan Bukti Investigator-C69); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya----------

Panitia Tender telah menanggapi permintaan klarifikasi oleh Peserta Tender terkait beberapa ketentuan yang ada di Dokumen Tender dan sesuai Angka 6.4.2 Bab XI halaman 140 PTK 007 Revisi 03. Buktinya, proses Tender dilanjutkan setelah Panitia Tender melakukan klarifikasi atas dokumen Tender serta menyampaikan kepada

seluruh Peserta Tender (*vide Bukti* Investigator-C71); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka ----------

Panitia Tender selalu mengundang dan memberikan informasi terkait seluruh klarifikasi dan/atau informasi terkait dengan Dokumen Tender (*vide Bukti* Investigator-C69 dan Bukti Investigator-C71); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan panitia ----------

Tidak ada pertemuan tertutup antara Calon Peserta Tender dan Panitia Tender. Seluruh pertemuan antara Panitia Tender dan Calon Peserta Tender dan/atau Peserta Tender selalu dibuatkan berita acara dan dikirimkan kepada Calon Peserta Tender dan/atau Peserta Tender (*vide Bukti* Investigator-C69, Bukti Investigator-C8, Bukti Investigator-C9, dan Bukti Investigator-C12); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

i. Indikasi Persekongkolan Pada Saat Penyerahan dan Pembukaan Dokumen atau Kotak Penawaran Tender/Lelang----------

Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu ----------

Seluruh dokumen penawaran dari Peserta Tender diberikan sebelum hari penutupan penyampaian Dokumen Tender yaitu tanggal 19 Oktober 2016. Tidak ada Peserta Tender yang mengajukan dokumen penawaran ataupun Panitia Tender yang menerima setelah masa penutupan penyampaian dokumen penawaran Tender (*vide Bukti* TI&TII-32); ----------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain ----------

Berdasarkan Bukti TI&TII-13, seluruh dokumen penawaran Tender yang diterima oleh Peserta Tender telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat di Angka 2.4 bagian 2 Proses Tender dokumen ITB; ----------

Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi ----------

Berdasarkan Bukti TI&TII-13, hanya Peserta Tender yang lulus tahap proses kualifikasi yang dapat memberikan penawaran/memasukan dokumen penawaran; ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran

Tidak ada perubahan HPS/OE dari sejak pertama kali dinyatakan di dalam dokumen Rencana Tender (*vide Bukti* TI&TII-18 dan Bukti Investigator-C15). ----------

Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka----------

Lokasi penyerahan dokumen Tender hanya di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 (*vide Bukti* Investigator-C8). ----------

j. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang ----------

Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya----------

Tender untuk jenis pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide Bukti* Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigatior-33); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33). ----------

Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama---

Tender ini baru pertama kali diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide Bukti Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigatior-B33*);----------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti Investigator-B31*) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti Investigator-B33*).----------

Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama----------

Keempat Peserta Tender yang telah lolos tahap evaluasi teknis memasukkan harga yang berbeda-beda. Hal ini dapat dibuktikan pada dokumen *Minutes of Bid Opening (second envelope)* tanggal 9 Januari 2017 (*vide Bukti Investigator-C12*); --------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nissa Pramesti dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti Investigator-B9*), keterangan Saksi Achmad Djaelani dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti Investigator-B10*), keterangan Saksi Margaretha Retno Sundari dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti Investigator-B12*), keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31), dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33).----------

Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang

berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut

Tender untuk pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I danTerlapor II (*vide Bukti Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigator-33*); ----------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti Investigator-B31*) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti Investigator-B33*). ----------

Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/ lelang tertentu ----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C8 dan Bukti Investigator-C16, seluruh Peserta Tender diberikan hak dan informasi yang sama untuk dapat memasukan dokumen penawaran.----------

Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip ----------

Mengacu ke aturan PTK 007 Revisi 3, ada beberapa dokumen yang harus disampaikan oleh Peserta Tender. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Tender selain mengacu pada ketentuan PTK 007 Revisi 3, juga yang mendukung kegiatan pekerjaan Tender. Setiap Peserta Tender secara independen memasukkan dokumen penawarannya.

Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia----------

Seluruh dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Tender tidak dibuka sampai dengan tahapannya, yaitu dokumen penawaran teknis

yang dibuka pada saat pembukaan sampul pertama dan dokumen penawaran komersial dibuka pada saat pembukaan sampul kedua (*vide Bukti Investigator-C9 dan Bukti Investigator-C12*);-
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti Investigator-B31*).

Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi ----------

Mengenai tempat, sekali lagi Terlapor I dan Terlapor II tegaskan bahwa proses evaluasi teknis dan komersial dilakukan di kantor Terlapor I dan Terlapor II yang berlokasi di Talavera Office lantai 3, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22 – 26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 (*vide Bukti TI&TII-16 dan bukti TI&TII-33*);

Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya ----------

Tender untuk jenis pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide Bukti Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigator-33*); ----------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide* Bukti Investigator-B33).

k. Indikasi Persekongkolan Pada Saat Pengumuman Calon Pemenang ----------

Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui

secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas

Pengumuman telah dilakukan oleh Panitia Tender melalui pemberitahuan melalui faksimili kepada seluruh Peserta Tender yang lolos *technical evaluation.* Dengan demikian, Peserta Tender yang pada akhirnya tidak ditunjuk sebagai pemenang Tender juga akan mengetahui siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang tidak (*vide Bukti* Investigator-C13); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Daniel Yudi PS dalam persidangan tanggal 7 Februari 2018 (*vide Bukti* Investigator-B7), keterangan Saksi Nissa Pramesti dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B9), keterangan Saksi Achmad Djaelani dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B10), keterangan Saksi Margaretha Retno Sundari dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B12) dan keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31).

l. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas ----------

Panitia Tender mengumumkan calon pemenang Tender tanggal 25 Januari 2017 dan tidak ada perubahan atau penundaan terkait jadwal pengumuman tersebut (*vide Bukti* Investigator-C13); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap -

Tender untuk jenis pekerjaan ini baru pertama kali diadakan (*vide Bukti* Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigatior-33). Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31); ----------

Peserta Tender yang memenangkan Tender adalah Peserta Tender yang memenuhi persyaratan Tender dan telah lulus seluruh tahapan proses Tender (*vide Bukti* TI&TII-31, Bukti TI&TII-17, dan Bukti TI&TII-33). ----------

Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu----------

Tender untuk jenis pekerjaan ini baru diadakan pertama kali oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide Bukti* Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, Bukti Investigator-33); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan----------

Mengingat harga terendah yang ditawarkan oleh salah satu peserta tender masih di atas dibanding dengan 80% nilai HPS/OE, maka harga penawaran tersebut masih dibilang wajar (*vide Bukti* Investigator-C12); ----------

Mengacu pada Angka 9.6.10.1 Bab XI halaman 154 – 155 PTK 007 Revisi 3, panitia tender baru melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada peserta tender apabila diketahui nilai penawaran yang diajukan lebih rendah dibanding dengan 80% nilai HPS/OE. ----------

m. Indikasi Persekongkolan Pada Saat Pengajuan Sanggahan ----------

Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang ----------

Sampai dengan tahap penentuan pemenang Tender, Panitia Tender selalu menanggapi sanggahan yang diajukan oleh Peserta Tender (*vide Bukti* Investigator-C55 dan Bukti TI&TII-10). Hanya terdapat satu kali sanggahan dan telah ditanggapi dengan baik oleh kedua belah pihak; --

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nissa Pramesti dalam persidangan tanggal 12 Maret 2018 (*vide Bukti* Investigator-B9), keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31) dan keterangan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B33). ----------

Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi ----------

Hasil evaluasi Tender selalu diberitahukan melalui faksimili yang dikirimkan kepada seluruh Peserta

Tender. Hasil evaluasi teknis maupun komersial dinyatakan secara singkat di dalam faksimili yang dikirimkan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender (*vide Bukti* Investigator-C10 dan Bukti Investigator-C13); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

n. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak ----------

Surat penunjukan pemenang tender/ lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan----------

Berdasarkan Bukti Investigator-C14, surat penunjukan pemenang tender/ *letter of award* (LoA) baru dikeluarkan setelah adanya calon Pemenang Tender, yaitu PT Aquamarine (Terlapor III). Adapun pengumuman calon pemenang Tender diberitahukan pada tanggal 25 Januari 2017 (*vide Bukti* Investigator-C13);----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ----------

Setelah pengumuman calon pemenang Tender, Panitia menerbitkan surat penunjukan pemenang Tender kepada Peserta Tender pada tanggal 6 Februari 2017 (*vide Bukti* Investigator-C13 dan Bukti Investigator-C14); ----------

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31).

Surat penunjukan pemenang tender/ lelang tidak lengkap ----------

Tidak ada kriteria surat penunjukan pemenang Tender, baik itu di PTK 007 Revisi 03 maupun di dokumen ITB beserta dokumen lain yang terdapat dalam Tender (*vide Bukti* Investigator-C16 dan Bukti Investigator-C8). Berdasarkan Bukti Investigator-C14, pemenang Tender ditunjuk berdasarkan LoA yang diberikan Panitia Tender kepada Terlapor III pada tanggal 6 Februari 2017. Penunjukan pemenang Tender telah lengkap sesuai dengan persyaratan Tender yang terdapat di PTK 007 Revisi 3, ITB dan perubahannya; ------
Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31). ----------

Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak----------

Konsep kontrak dibuat secara detail dan komprehensif, sesuai dengan seluruh ketentuan, persyaratan dan kriteria yang terdapat di dalam dokumen penawaran Tender (*vide Bukti* Investigator-C16). ----------

Mengacu pada uraian penjelasan unsur bersekongkol di atas, maka unsur bersekongkol tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, karenanya sudah sepatutnya Majelis Komisi yang terhormat menolak LDP Tim Investigator. ----------

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

Terkait dengan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender ini, angka 3.2 Bab III Halaman 6 Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 mengatur sebagai berikut: ----------

"*suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secarabersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.*"

Selama persidangan berlangsung, Tim Investigator tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2 Bab III Halaman 6 Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 di atas. Bahkan, sebagaimana telah disebutkan pada angka 30 bagian 35 di atas, tuduhan terhadap Terlapor I dan Terlapor II semakin mengerucut pada permasalahan pemberian surat dukungan untuk persyaratan keanggotaan IMCA untuk kategori *Diving* dan ROV; ----------

Dalih utama Tim Investigator berkenaan dengan ini adalah bahwa terdapat perbedaan berkenaan dengan persyaratan sertifikasi IMCA dalam Tender aquo. Dalih Tim Investigator adalah terdapat 3 (tiga) kali perubahan persyaratan IMCA selama proses Tender, yaitu:----------

a. Berdasarkan Bukti Investigator-B51, persyaratan IMCA dalam Dokumen Pra-Kualifikasi, sebagaimana terdapat di bawah ini:----------

   Melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership.

b. Berdasarkan Bukti Investigator-B16, persyaratan IMCA dalam Dokumen Tender, sebagaimana terdapat di bawah ini:----------

2.4.4 Contractors Qualification Experience

- The contractor is to be and IMCA member company.

c. Berdasarkan Bukti Investigator-B71, persyaratan IMCA dalam risalah Pre-Bid Clarification Meeting, sebagaimana terdapat di bawah ini:

Exhibit I – Special Provision and Scope of Work. Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience (point 1)	Bidder request Company to confirm that Bidder must be IMCA member in Diving Division "Contractor Category".	Bidder of Member IMCA ROV and Diving

Exhibit I (Point 2.4.4 Contractors Qualification Experiences)	Mohon konfirmasi: Sesuai dengan pre bid meeting 26 Sept 2016. Kontraktor adalah anggota IMCA. Peserta tender harus memiliki keanggotaan IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS karena dalam proyek ini operasi terkait dengan kegiatan Penyelaman dan ROV?	Please confirm: In accordance with the pre bid meeting Sept 26, 2016. The contractor is to be IMCA member company. Bidders must have a member IMCA DIVING AND REMOTE SYSTEM & ROV DIVISIONS due to in this project related operation with diving and ROV?	• Peserta tender memiliki Keanggotaan IMCA ROV Dan Diving • Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan Diving

Tim Investigator kemudian menyimpulkan bahwa seluruh peserta tender harus mempunyai sertifikat IMCA *Diving* dan ROV, dan karenanya surat dukungan tidak diperbolehkan; ----------

Meskipun demikian, Panitia Tender tetap menerima penggunaan surat dukungan terhadap kepemilikan keanggotaan IMCA. Terbukti dalam persidangan bahwa dalam prakteknya, penggunaan surat dukungan juga lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memberikan salah satu persyaratan yang diatur dalam tender. Sehingga, atas hal tersebut, Panitia Tender menerima penggunaan surat dukungan; ----------

Surat dukungan juga berlaku dalam persyaratan untuk kepemilikan kapal. Walaupun dalam Dokumen Tender (Bukti Investigator-B16) terdapat persyaratan kepemilikan kapal. ----------

2.4.3 Contractors Equipment

- Contractor shall provide at its sole cost and expense all transportation/accommodation for Contractor's Personnel to/from Company's point of departure/return.
- CONTRACTOR shall have equipment for supporting activities Four Mooring DSV Vessel shall have capability for
  - underwater services support
  - IIndonesian flag
  - Clear deck space minimum 250 m
  - Accommodation for 30 personel,
  - Main Crane capacity min 4 T
- CONTRACTOR shall have equipment for supporting activities for Direct Positioning Vessel type 2 (DP 2) Vessel with minimum requirement :
  - Shall have capability for underwater services support
  - Indonesian flag
  - Clear deck space minimum 250 m
  - Accommodation for 40 personel
  - Main Crane capacity min 10 T,
  - Auxiliary Crane Capacity min 3 T.

akan tetapi karena peserta tender bukanlah pemilik kapal dan pemilik izin Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL) maka surat dukungan untuk penggunaan kapan pihak ketiga dalam Tender aquo juga diperbolehkan; ----------

Seluruh perubahan persyaratan IMCA telah diberitahukan kepada Calon Peserta Tender pada tahap Pra-Kualifikasi dan Peserta Tender pada tahap Tender. Tidak ada Calon Peserta Tender (tahap Pra-Kualifikasi) dan Peserta Tender (tahap Tender) yang mengajukan keberatan terhadap persyaratan tersebut; ----------

Selain itu, pertimbangan Panitia Tender menerima penggunaan surat dukungan adalah karena tidak banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempunyai kedua sertifikasi IMCA kategori *Diving* dan ROV. Apabila penggunaan surat dukungan tidak diterima, maka hanya terdapat 2 (*dua*) perusahaan yang memenuhi persyaratan IMCA dalam Tender ini, dan sesuai dengan PTK 007 Revisi 03, tender dapat digagalkan jika perusahaan yang mendaftar kurang dari 3 (*tiga*); ----------

Apabila memang Panitia Tender tidak memperbolehkan penggunaan surat dukungan dalam Tender ini, maka seharusnya surat dukungan atas persyaratan kepemilikan kapal juga tidak diterima. Menurut Saksi Herry Gunawan, pada persidangan tanggal 24 Juli 2018,

pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang *underwater services* bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. Sehingga, perusahaan *underwater services* belum tentu memiliki kapal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Tender aquo (*vide Bukti* Investigator-B32); ----------

Berdasarkan Bukti Investigator-B32, hampir seluruh mobilisasi peralatan dan personil ditempatkan pada kapal, sehingga persyaratan kepemilikan kapal merupakan salah satu persyaratan yang utama dan harus dipenuhi oleh Peserta Tender yang mendaftar; -----

Jika penggunaan surat dukungan tidak diperbolehkan, maka hampir dipastikan bahwa tidak ada Peserta Tender yang mendaftar dan Tender tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh Panitia Tender. ----------

Surat Dukungan dan Persyaratan IMCA----------

Perlu Terlapor I dan Terlapor II sampaikan bahwa berdasarkan Bukti TI&TII-2, Bukti TI&TII-5, Bukti TI&TII-10, Bukti TI&TII-18, Bukti Investigator-C16, Bukti Investigator-C51, dan keterangan Saksi Dwi Andriyanto (*vide Bukti* Investigator-B4), Saksi Mia Siti Mariani (*vide Bukti* Investigator-B5), Saksi Lusiana Sulistianingsih (*vide Bukti* Investigator-B6), Saksi Daniel Yudi (*vide Bukti* Investigator-B7), Saksi Achmad Djaelani (*vide Bukti* Investigator-B10), Saksi Margaretha Retno Sundari (*vide Bukti* Investigator-B12), Saksi Michael Wilson Tinangon (*vide Bukti* Investigator-B13), Saksi Maya Aprilia (*vide Bukti* Investigator-B14), Saksi Nur Achroni (*vide Bukti* Investigator-B31), Saksi HerryGunawan (*vide Bukti* Investigator-B32), dan Saksi Nizar Saputra (*vide Bukti* Investigator-B33), menjelaskan pada pokoknya bahwa: --

a. persyaratan mengenai IMCA bukanlah satu-satunya persyaratan yang dalam Tender; dan ----------

b. surat dukungan pada umumnya, serta secara khusus surat dukungan terkait dengan keanggotaan IMCA adalah merupakan hal yang lazim dan biasa terjadi dalam proses tender seperti ini.----------

Fakta-fakta tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan Ahli Pandji Achmad Ariaz dalam persidangan tanggal 18 April 2018, dan Ahli Wahyu Adiartono dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dukungan adalah hal yang lazim terjadi dalam suatu proses tender pengadaan yang dijalankan berdasarkan PTK 007. Keterangan para ahli dimaksud dikutip sebagai berikut:

a. Ahli Pandji Achmad Ariaz, dalam persidangan tanggal 18 April 2018 menyatakan:----------

"PTK tidak mengatur dalam hal larangan dalam surat dukungan pada siapa saja, kecuali dokuen tendernya mengatur."

b. Ahli Wahyu Adiartono, dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 menyatakan:----------

"Surat dukungan dikenal dalam proses pengadaan di Kegiatan Usaha Hulu Migas, tapi memang tidak diatur dalam PTK 007 Rev 3."

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, bahwa setiap Peserta Tender diberikan hak yang sama untuk mengajukan surat dukungan, sebagaimana terbukti terdapat 4 (*empat*) Peserta Tender yang mengajukan surat dukungan keanggotaan IMCA, dan 3 (*tiga*) Peserta Tender yang mengajukan surat dukungan kapal, sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut: ----------

Surat dukungan keanggotaan IMCA dan Surat Dukungan Kapal----------

Nama Perusahaan/Peserta Tender	Pemberi Surat Dukungan dan Nomor Surat	Jenis Dukungan
PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III)	PT Samudera Nusantara (PT SBN) Surat No:005/SBN/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016	IMCA *Diving*

	(*vide Bukti* TI&TII-20).	
PT Cakrawala Amartha Jaya (PT CAJ)	PT Jasalindo Surat No:023-JKT/ADM-SL/X/16 tertanggal 7 Oktober 2016 (*vide* Bukti TI&TII-21).	IMCA kategori *Diving* dan ROV
PT Seascape Surveys Indonesia (PT Seascape)	Catatan: PT Seascape tidak menyerahkan surat dukungan, melainkan sertifikat keanggotaan atas nama Seascape (*headquarter* PT Seascape) dan Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd. (*vide Bukti* TI&TII-22). Dikarenakan sertifikat tersebut berasal dari entitas atau badan hukum yang berbeda dengan PT Seascape, maka adalah wajar apabila penyerahan sertifikat tersebut juga disamakan dengan pemberian surat dukungan.	IMCA kategori: *Offshore Survey and Remote Systems&ROV Divisions.* *Diving, Marine and Remote Systems&ROV Divisions providing Surface Supplied and Bell/Saturation Diving Operations.*

Nama Perusahaan/Peserta Tender	Pemberi Surat Dukungan dan Nomor Surat	Jenis Dukungan
PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III)	PT Bahtera Niaga Internasional Surat No.335/MKT-BNI/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-23)	Kapal
PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III)	Neptune Marine Pacific Pte. Ltd. Surat No.110-16-SEA tanggal 12 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-24)	IMCA kategori ROV
PT Patra Dinamika (PT PADI)	PT Wintermar Offshore Marine Group Surat tanggal 12 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-25)	Kapal
PT Patra Dinamika (PT PADI)	PT Tridaya Patra Marine Surat No.LO113/TPM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-26)	Kapal
PT Patra Dinamika (PT PADI)	PT Pageo Utama Surat No.PQ-343-I Rev.0 tanggal 5 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-27)	IMCA kategori *survey & Positioning Services*
PT Advanced Offshore Services (PT AOS)	PT Wintermar Offshore Marine Group Surat No.3365/A.10/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-28)	Kapal
PT Advanced Offshore Services (PT AOS)	PT Bayu Maritim Berkah Surat No.650/BMB-MKT/LOS/X-16 tanggal 3 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-29)	Kapal

PT Advanced Offshore Services (PT AOS)	PT Logindo Samuderamakmur Tbk. Surat No.247/BD-LOG/X/16 tanggal 11 Oktober 2016 (*vide Bukti* TI&TII-30)	Kapal

Selain itu, dalam prakteknya dan terbukti dalam persidangan, setiap Peserta Tender lainnya pernah memberikan atau diberikan surat dukungan untuk keanggotaan IMCA dalam mengikuti suatu tender bidang minyak dan gas bumi. Untuk memudahkan Majelis Komisi yang terhormat, di bawah ini kami sertakan tabel ringkasan kesaksian masing-masing Peserta Tender terkait pemberian dan penerimaan surat dukungan yang terkait dengan keanggotaan IMCA. ----------

No.	Saksi/Peserta Tender	Tanggal persidangan	Memberikan surat dukungan IMCA	Diberikan surat dukungan IMCA
1.	PT DOF Subsea Indonesia (*vide Bukti* Investigator-B4)	17 Januari 2018	-	√
	Keterangan: Surat dukungan IMCA dari DOF Asia Pacific.			
2.	PT Fabila Teknik Sejahtera (PT Fabila) (*vide Bukti* Investigator-B5)	6 Februari 2018	√	√
	Keterangan: PT Fabila sering meminta surat dukungan ke perusahaan lain sebelum menjadi anggota IMCA untuk kategori ROV. PT Fabila sering memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain yang meminta.			
3.	Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia-PT Sigur Ros Indonesia (*vide Bukti* Investigator-B6)	6 Februari 2018	√	√
	Keterangan: PT Sigur Ros Indonesia selalu menggunakan dan didukung oleh *headquarter*-nya. PT Sigur Ros mendukung untuk IMCA kategori *Diving* kepada PT Bintang Subsea Indonesia. PT Bintang Subsea Indonesia mendapatkan dukungan oleh *headquarter*-nya.			
4.	PT Cakrawala Amartha Jaya (PT CAJ) (*vide Bukti* Investigator-B7)	7 Februari 2018	√	√
	Keterangan: PT CAJ sering memberikan surat dukungan kepada perusahaan lain yang meminta. Surat dukungan IMCA kategori *Diving* dan ROV dari PT Jasalindo dalam Tender			

	aquo.			
5.	PT Patra Dinamika (PT PADI) (*vide Bukti* Investigator-B10)	10 Maret 2018	-	√
	Keterangan: Sebelum menjadi anggota IMCA, PT PADI selalu meminta dukungan ke perusahaan lain.			
6.	PT Rubotori Petrotech Indonesia (PT Rubotori) (dalam kapasitasnya mewakili PT Samudera Biru Nusantara) (*vide Bukti* Investigator-B11)	12 Maret 2018	√	-

No.	Saksi/Peserta Tender	Tanggal persidangan	Memberikan surat dukungan IMCA	Diberikan surat dukungan IMCA
	Keterangan: Surat dukungan IMCA kategori *Diving* kepada PT Cahaya Karya Bhakti Samudra (PT Cakrabasha) dalam Tender aquo.			
7.	PT Seascape Surveys Indonesia (PT Seascape) (*vide Bukti* Investigator-B12)	12 Maret 2018	-	√
	Keterangan: PT Seascape selalu meminta dukungan dari *headquarter*-nya.			
8.	PT Samudera Biru Nusantara (PT SBN) (*vide Bukti* Investigator-B13)	13 Maret 2018	√	√
9.	PT Cakrabasha (*vide Bukti* Investigator-B14)	13 Maret 2018	-	√
	Keterangan: Surat dukungan IMCA kategori *Diving* dari PT Rubotori dalam Tender aquo (dalam kapasitasnya mewakili PT SBN).			
10.	Konsorsium PT Jaya Salvage Indonesia (Jasalindo)-PT Warma Trierindo (Warma) (*vide Bukti* Investigator-27)	17 Juli 2018	√	√

Berdasarkan Bukti TI&TII-2, terdapat Peserta Tender yang menanyakan kepada Terlapor I dan Terlapor II terkait dengan persyaratan IMCA dalam Tender ini, yaitu:(i) PT AOS; dan (ii) PT PADI;----------

Atas pertanyaan yang diajukan tersebut, Terlapor I dan Terlapor II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Peserta Tender memiliki

IMCA keanggotaan IMCA *Diving* dan ROV (*vide Bukti* TI&TII-2); ----------

Namun demikian, terdapat satu peserta tender yaitu PT AOS yang mengajukan sanggahan setelah tahap pengumuman evaluasi teknis. Sanggahan PT AOS tersebut untuk mempertanyakan penilaian Terlapor I dan Terlapor II dalam meloloskan Terlapor III yang hanya mempunyai surat dukungan untuk IMCA kategori *Diving* (*vide Bukti* Investigator-C11). ----------

Sanggahan PT AOS Terhadap Persyaratan IMCA----------

Berdasarkan Bukti TI&TII-10, PT AOS mengajukan sanggahan dalam suratnya No.124/AOS-BID/RSP/X/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang meminta Panitia; ----------

Tender untuk melakukan klarifikasi terhadap *Facsimile Message* No.1408/PCML/TDR/2016 tanggal 13 Desember 2016 terkait pemberitahuan kepada Peserta Tender yang lulus dan tidak lulus dalam tahap evaluasi teknis (Surat Sanggahan PT AOS). Intinya PT AOS meminta klarifikasi atas penilaian Panitia Tender yang meloloskan beberapa Peserta Tender yang tidak menjadi anggota IMCA untuk kedua kategori yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender, yaitu *Diving* dan ROV; ----------

Terhadap sanggahan PT AOS tesebut, berdasarkan Bukti TI&TII-10, Berita Acara Rapat (*Minutes of Meeting-Clarification Meeting*) tanggal 4 Januari 2017, dan keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018 dan Saksi Nizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018, menjelaskan bahwa pada pokoknya PT AOS hanya menanyakan soal surat dukungan keanggotaan IMCA Terlapor III untuk kategori *Diving*; ----

Hal ini janggal karena dalam pembukaan sampul-I (penawaran teknis), PT AOS memperoleh kesempatan untuk melihat dokumen penawaran Peserta Tender lainnya. Jelas bahwa selain Terlapor III, terdapat PT CAJ

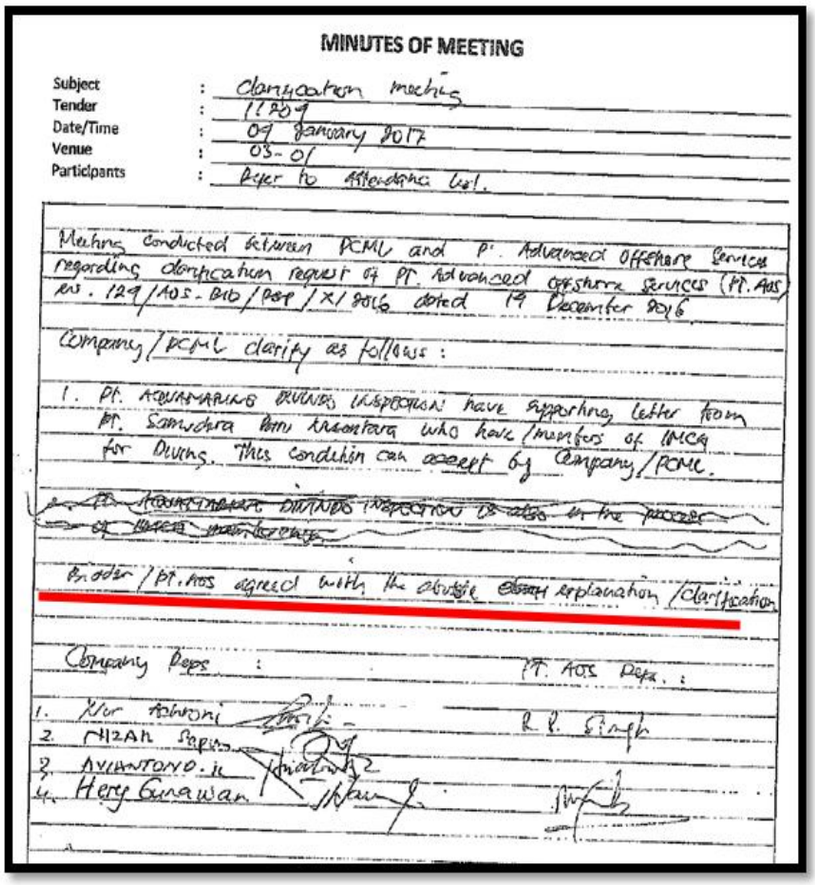
yang menyerahkan juga surat dukungan keanggotaan IMCA dan PT Seascape yang menyerahkan sertifikat keanggotaan IMCA milik badan hukum lain. Apabila PT AOS murni ingin meminta kejelasan, *quod non*, mengenai surat dukungan keanggotaan IMCA, PT AOS seharusnya juga menanyakan tentang PT CAJ dan PT Seascape, bukan hanya"menargetkan" Terlapor III; ----------

Berdasarkan Bukti TI&TII-10, Terlapor I dan Terlapor II telah mengadakan rapat klarifikasi dengan PT AOS pada tanggal 4 Januari 2017. Terbukti bahwa penjelasan Terlapor I dan Terlapor II atas penerimaan surat dukungan dalam Tender aquo diterima oleh Presiden Direktur PT AOS, Saksi Ravindra S. Singh. Berdasarkan keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa proses Tender tetap berjalan ke tahap selanjutnya karena PT AOS telah menyetujui klarifikasi yang disampaikan oleh Panitia Tender atas penggunaan surat dukungan pada Tender aquo; ----------

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT AOS telah menerimadan menyetujui tanggapan dari Panitia Tender atas Surat Sanggahan PT AOS dan menandatangani risalah rapat tersebut, bahwa *Terlapor III memiliki surat dukungandari PT SBN untuk keanggotaan IMCA kategori Diving* ----------

"Bidder/PT AOS agreed with the above explanation/clarification."

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, berikut Terlapor I dan Terlapor II sampaikan bukti risalah rapat antara Panitia Tender dan PT AOS dimana PT AOS telah menerima dan menyetujui tanggapan dari Panitia Tender atas sanggahan hasil penilaian evaluasi teknis (sebagaimana digaris bawah dengan warna merah)-------



MINUTES OF MEETING

Subject : Clarification meeting
Tender : 11209
Date/Time : 04 January 2017
Venue : 03-01
Participants : Refer to Attendance list.

Meeting conducted between PCML and PT. Advanced Offshore Services regarding clarification request of PT. Advanced Offshore Services (PT. AOS) no. 129/AOS-BID/BSP/XI/2016 dated 19 December 2016

Company/PCML clarify as follows :

1. PT. AQUAMARINE DIVINDO INSPECTION have supporting letter from PT. Samudera Dani Nusantara who have/owners of IMCA for Divers. This condition can accept by Company/PCML.

~~2. PT. AQUAMARINE DIVINDO INSPECTION IS also in the process of IMCA membership~~

Bidder/PT. AOS agreed with the above explanation/clarification

Company Reps : PT. AOS Reps. :

1. Nur Achroni — R. P. Singh
2. Hizar Saputra
3. Aviantoyo. H
4. Hery Gunawan

Gambar 1.3. Risalah Rapat Dengan PT AOS Tanggal 4 Januari 2017

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 85 oleh Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018, dan dikarenakan tidak ada lagi sanggahan yang diajukan oleh PT AOS dan PT AOS telah menerima tanggapan dari Panitia Tender terhadap Surat Sanggahan PT AOS, maka proses Tender aquo dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pembukaan sampul-II atau dokumen penawaran komersial;----------

Setelah rapat klarifikasi dengan Panitia Tender tanggal 4 Januari 2017 tersebut dan hingga pengumuman pemenang Tender, terbukti dalam persidangan sesuai Bukti Investigator-B9, tidak ada lagi sanggahan yang diajukan PT AOS, walaupun PTK 007 Revisi 03 masih memberikan kesempatan atau jalur yang secara ”legal” dapat ditempuh oleh PT AOS;----------

PTK 007 Revisi 03 telah memberikan kesempatan bagi Peserta Tender yang tidak setuju dengan hasil evaluasi tender. Seharusnya, Peserta Tender yang tidak setuju

atas hasil evaluasi tender tersebut dapat menyampaikan di dalam tahap tersebut, bukan dengan langsung melaporkannya kepada KPPU;----------

Oleh karenanya, apabila KPPU menerima LDP yang patut diduga dilaporkan oleh pihak yang tidak puas atas proses Tender ini, maka hal tersebut dapat menjadi preseden yang tidak kondusif bagi seluruh Kontraktor KKS di Indonesia dan para pelaku usaha yang menjadi peserta tender;----------

Akan menjadi kekhawatiran yang mendasar apabila setiap peserta tender yang tidak puas terhadap persyaratan atau hasil suatu tender minyak dan gas bumi atau peserta tender yang kalah, serta merta langsung mengajukan laporan adanya dugaan persekongkolan tanpa terlebih dahulu memahami/mentaati PTK 007 yang berlaku dengan melakukan upaya keberatan/ banding/ sanggahan yang sebenarnya dapat menunda seluruh proses tender; ------

Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Komisi yang terhormat menolak LDP dan menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak bersalah atas dugaan pelanggaran adanya persekongkolan dalam Tender aquo oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III. ----------

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

Terkait dengan unsur persaingan usaha tidak sehat, Pasal 1 angka (6) UU No.5/1999 dan Angka 3.2 Bab III Halaman 6 Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 menjelaskan, sebagai berikut: ----------

"*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, terutama berdasarkan keterangan Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal

17 Juli 2018 (*vide Bukti* Investigator-B31), Terlapor I dan Terlapor II telah menjalankan proses Tender dengan cara yang jujur, tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak menghambat persaingan usaha; ----------

Dalam Tender aquo, Terlapor I dan Terlapor II telah memberikan seluruh informasi kepada seluruh Peserta Tender terkait dengan persyaratan, korespondensi ataupun informasi lainnya. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam melaksanakan Tender. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan SaksiNizar Saputra dalam persidangan tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan pada pokoknya proses Tender telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku;----------

Lebih lagi, Terlapor I dan Terlapor II juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon Peserta Tender dan/atau Peserta Tender untuk bertanya, mengajukan protes ataupun sanggahan di beberapa tahapan tender sesuai dengan aturan PTK 007 Revisi 03. Protes yang diajukan oleh PT AOS telah ditanggapi dan diklasifikasi oleh Panitia Tender, dimana PT AOS telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat klarifikasi pada tanggal 4 Januari 2017 (*vide Bukti* TI&TII-10); ------

Terlapor I dan Terlapor II menunjuk Terlapor III sebagai pemenang Tender karena Terlapor III memenuhi seluruh persyaratan yang disyaratkan dan menjadi penawar terendah dalam Tender aquo (*vide Bukti* TI&TII-1 dan Bukti TI&TII-17). Dalam hal ini, PTK 007 Revisi 03 mengatur apabila penawar terendah tidak bersedia untuk menerima pekerjaan Tender setelah dilakukannya negosiasi oleh Panitia Tender, maka negosiasi akan dilanjutkan kepada penawar terendah kedua, yang berbunyi sebagai berikut: ----------

"16.2.Apabila Peserta Tender yang ditunjuk sebagai pemenang Tender:

…

16.2.2. tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam angka 16.1.; atau

...

Maka jaminan penawaran-nya dicairkan dan kepada Peserta Tender dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Bab XIV.

16.3. Selanjutnya, Pejabat Berwenang menunjuk pemenang Tender peringkat kedua sebagai pemenang Tender. ..."

Terkait dengan hal ini, Terlapor III menerima pekerjaan yang dimaksud dalam Tender aquo, dan setelah proses negosiasi selesai, maka Terlapor III ditunjuk sebagai pemenang Tender aquo (*vide Bukti* Investigator-C14);-----

Oleh karena tidak ada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang membuktikan adanya persekongkolan dalam Tender ini, maka dalih Tim Investigator mengenai adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses Tender karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar. Oleh karenanya tidak ada dampak negatif terhadap persainganusaha yang ditimbulkan oleh proses Tender aquo;----------

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 22 UUNo.5/1999 terbukti dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, sehingga patut danberalasan bagi Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak LDP yang diajukan Tim Investigator ----------

B. Fakta - Fakta Persidangan Membuktikan Seluruh Dalih Tim Investigator Tidak Sesuai Dengan Proses Tender ----------

Terbukti dalam persidangan bahwa seluruh fakta yang dijabarkan oleh Tim Investigator KPPU pada angka 10-19 halaman 13-26 LDP tidak sesuai dengan proses Tender yang dilaksanakan oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide Bukti* Investigator-B22, Bukti Investigator-B25, Bukti Investigator-B31, dan Bukti Investigator-B35);----------

Proses Tender aquo sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Nur Achroni dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018, menyatakan bahwa pada pokoknya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tender yang dikeluarkan oleh SKK Migas, yaitu PTK 007 Revisi 03. Selain itu, terdapat banyak penjelasan Tim Investigator KPPU yang tidak sesuai dengan aturan dan praktek yang terjadi dalam kegiatan tender minyak dan gas bumi;----------

Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, tidak ada fakta-fakta yang dapat membuktikan tuduhan Tim Investigator dalam LDP pada saat persidangan berlangsung. Sebaliknya, dalam persidangan terbukti bahwa: ----------

Proses tender dilakukan secara terbuka (*vide Bukti* Investigator-C16, BuktiInvestigator-C81, Bukti TI&TII-2, dan Bukti TI&TII-3). Hal ini dapat dibuktikan dari: ----------

1) Seluruh Peserta Tender mendapatkan Dokumen Tender ataupun perubahannya dalam waktu yang sama; ---------
2) Seluruh informasi terkait dengan Tender telah diterima oleh seluruh Peserta Tender dalam waktu yang sama;----
3) Seluruh perubahan, penambahan dan/atau klarifikasi atau Dokumen Tender diterima oleh seluruh Peserta Tender dalam waktu yang sama; dan ----------
4) Peserta Tender mengetahui dokumen Peserta Tender lainnya dalam tahap pembukaan sampul-I (penawaran teknis) dan pembukaan sampul-II (penawaran komersial).

Tidak ada Peserta Tender yang mengajukan sanggahan dan sanggahan banding dalam tahap penunjukan pemenang Tender oleh Panitia Tender (*vide* Bukti Investigator-C12). ----

1. Dalih Tim Investigator KPPU mengenai Persyaratan IMCA dalam dokumen Tender yang berubah-ubah----------

   Mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa persyaratan IMCA mengenai"*The Contractor is to be and IMCA member company*" bertujuan untuk "membuka" persyaratan IMCA menjadi lebih luas dan akan menjaring lebih banyak peserta tender. Akan berbeda dampaknya apabila Tender sejak awal dan secara langsung sudah

mensyaratkan keanggotaan IMCA hanya untuk kategori tertentu. Hal ini akanlebih mempersempit kesempatan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengikuti Tender apabila dibatasi hanya bagi perusahaan yang telah menjadi anggota IMCA (*vide Bukti* Investigator-C16);

Berdasarkan bukti dokumen Tender Plan (Resitting) tanggal 29 April 2016 (*vide Bukti* TI&TII-18), *Bid Document Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Tender No.11204* yang memuat *Exhibit I, item 2.4.4* tersebut telah selesai disusun oleh Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor II) sebelum Pengumuman Tender (25 Mei 2016), yaitu pada saat proses pengajuan Rencana Tender (*Tender Plan*) kepada Panitia Tender. Hal ini berarti, Terlapor I dan Terlapor II tidak serta merta mengubah ketentuan dalam dokumen tersebut untuk secara spesifik memasukan *Exhibit I, item 2.4.4* guna mengistimewakan Terlapor III semata;----------

Fakta bahwa *Bid Document* mensyaratkan "*The Contractor is to be and IMCA member company"* dan Terlapor III sedang mengurus pendaftaran keanggotaannya untuk menjadi anggota IMCA kategori *Diving* dan sudah menjadi anggota IMCA untuk kategori ROV sehingga Terlapor III diloloskan untuk maju ke tahap berikutnya adalah suatu hal yang telah sesuai dengan persyaratan dalam Tender;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dalih-dalih Tim Investigator KPPU tentang dugaan bahwa dimasukkannya syarat "*The Contractor is to be and IMCA member company"* adalah untuk memfasilitasi Terlapor III merupakan dalih yang tidak benar dan tidak berdasar; --

Selain itu, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan, perusahaan Indonesia yang telah menjadi anggota IMCA untuk kedua kategori *Diving* dan ROV hanya PT AOS dan PT PADI (*vide Bukti* Investigator-B7, Bukti Investigator-B12, Bukti Investigator-B13, Bukti Investigator-B31 dan Bukti Investigator-B33).Apabila

persyaratan keanggotaan IMCA hanya untuk perusahaan yang telah menjadi anggota untuk IMCA kategori *Diving* dan ROV saja, maka proses tender tidak dapat berjalan karena di bawah nilai kuorum yang ditentukan dalam angka 18.1.1. Bab XI halaman 180 PTK 007 Revisi 03, yaitu minimal 3 (tiga) pendaftar dan tidak ada persaingan yang sehat dalam Tender aquo, yang berbunyi sebagai berikut: ----------

"*18.1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila:*

18.1.1. Calon Peserta Tender yang mendaftar kurang dari tiga...."

2. Persyaratan *workshop* atau kantor perwakilan yang diduga memfasilitasi Terlapor III agar dapat memenangkan Tender aquo----------

Sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, bahwa tidak ada persyaratan dalam dokumen Tender, yang secara spesifik menentukan hal terkait ketentuan lokasi "*workshop*" ataupun "kantor perwakilan" (*vide* Bukti Investigator-C16 dan Bukti Investigator-C51); ------

Ketentuan terkait lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) dibuat dengan memperhitungkan lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender. Adalah fakta bahwa lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender ini adalah di dalam wilayah fasilitas Terlapor I dan Terlapor II, yaitu *Petronas Shore Base* yang merupakan Fasilitias Produksi/Operasi di ORF Surabaya dan *offshore site* Bukit Tua di lepas pantai Jawa Timur dan kepodang di lepas pantai Jawa Tengah (*vide* Bukti TI&TII-18);----------

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, karena Tender dilaksanakan untuk keperluan perawatan fasilitas Terlapor I dan Terlapor II yang berada pada Tempat Asal (*Point of Origin*) di Surabaya, Jawa Timur, tentunya Titik Keberangkatan (*Point of Hire*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) berada di dalam wilayah atau di sekitar wilayah Tempat Asal (*Point of Origin*); ----------

Dalam hal ini, maka sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin apabila suatu daerah di Kalimantan, Sulawesi ataupun di Papua menjadi Tempat Asal (*Point of Origin*), Titik Keberangkatan (*Point of Hire*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*); ----------

Apabila penetapan lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) dalam dokumen Instruction to Bidders (ITB) dan lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender dihubungkan, terdapat kesamaan, yaitu seluruh lokasi berada di Jawa Timur. Oleh karena itu, dapat diketahui fakta bahwa penetapan-penetapan lokasi tersebut seluruhnya didasarkan oleh lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender ini. Bahkan apabila melihat riwayat tender-tender lain yang pernah diadakan oleh Terlapor I dan Terlapor II, hampir seluruh lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) ditentukan di sekitar wilayah Jawa Timur. ----------

3. Penilaian surat dukungan PT SBN kepada PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III) atas persyaratan IMCA yang tidak dapat dialihkan----------

Sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan dan telah dijelaskan pada angka 75 sampai 81, surat dukungan atau *letter of support* bukan merupakan suatu pengalihan kepemilikan. Surat dukungan bukan berarti mengalihkan kepemilikan atas keanggotaan IMCA-nya, namun perusahaan hanya memberikan dukungan dan membantu Peserta Tender tersebut agar dapat menyesuaikan standar IMCA dalam jenis pekerjaan *underwater services* (*vide Bukti* Investigator-B7, Bukti Investigator-B10 s.d. Bukti Investigator-B14, Bukti Investigator-B27, Bukti Investigator-B31 s.d. Bukti Investigator-B33); ----------

Surat dukungan juga sering ditemukan di dalam tender untuk bidang jasa minyak dan gas. Hal ini diperkuat oleh

keterangan para saksi yang diperiksa dalam persidangan, yang menyatakan bahwa pada pokoknya seluruh Peserta Tender pernah menerima surat dukungan atau *letter of support*dari perusahaan lain. Hal ini sebagaimana juga dibuktikan dalam dokumen penawaran teknis Peserta Tender; ----------

Penilaian Panitia Tender terhadap surat dukungan tidak hanya khusus mengenai persyaratan IMCA saja sebagaimana didalihkan oleh Tim Investigator. Surat dukungan juga berlaku atas persyaratan lainnya dalam dokumen Tender, yakni surat dukungan untuk kepemilikan kapal (*vide Bukti* Investigator-B32 dan Bukti Investigator-C16); ----------

Para ahli juga menjelaskan bahwa SKK Migas mengenal surat dukungan dalam suatu tender yang berkaitan dengan minyak dan gas. Dalam persidangan, para ahli menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Ahli Maria Kristanti dalam persidangan tanggal 11 April 2018:----------

   "*Surat dukungan pastinya ada. Cuma kebutuhannya sepertiapa terhadap surat dukungan itu …*"

b. Ahli Pandji Achmad Ariaz dalam persidangan tanggal 18 April 2018:----------

   "*… PTK tidak mengatur mengenai larangan soal surat dukungan dari siapa saja, kecuali dokumennya mengatur hal tersebut. …*"

   Oleh karena itu, penggunaan surat dukungan pada suatu tender dengan jenis pekerjaan *underwater services* sudah menjadi hal yang lumrah ditemukan dan dapat diterima semua pihak terkait.----------

4. Mengenai Keterangan Terlapor ----------

   Berdasarkan Bukti Investigator-B36 dan Bukti Investigator-B37, pada pokoknya Para Terlapor memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

   a. Seluruh rangkaian proses Tender aquo telah mengikuti aturan PTK 007 Revisi 03; ----------

b. Terlapor I dan Terlapor II mempunyai kode etik dalam menjalankan kegiatannya. Kode etik tersebut juga mengatur mengenai persaingan usaha yang sehat. Kode etik tersebut berlaku untuk seluruh karyawan Terlapor I dan Terlapor II;----------

c. Terlapor I dan Terlapor II melakukan penangguhan pelaksanaan kontrak dengan pemenang Tender aquo karena terdapat Perkara ini;----------

d. Tidak ada pekerjaan Tender aquo yang telah dilakukan oleh Terlapor III dan adanya pembayaran dari Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III; dan

e. Penggunaan surat dukungan lazim digunakan pada tender *underwater services*. ----------

Tidak ada keterangan yang dapat membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III. Sebaliknya dan telah dibuktikan dalam persidangan serta didukung oleh keterangan para saksi dan para ahli, Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan proses Tender sesuai dengan PTK 007 Revisi 03 dan telah menunjuk penawar terendah sebagai pemenang Tender (*vide Bukti* Investigator-B24, Bukti Investigator-B25, Bukti Investigator-B29, Bukti Investigator-B31, Bukti Investigator-B33, Bukti Investigator-B35 s.d. Bukti Investigator-B37).----------

5. Bantahan Terhadap Dalih Tim Investigator ----------

Terlapor I dan Terlapor II mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan alat bukti-alat bukti yang telah diuraikan dalam Kesimpulan ini, terbukti bahwa tuduhan Investigator KPPU yang menyatakan:----------

"*tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan mengatur dan menentukan Terlapor IIImenjadi pemenang telah dijelaskan sebagaimana di atas di dalam unsur bersekongkol"* sama sekali tidak terbukti, satu dan lain hal karena:----------

a. Tidak ada satupun alat bukti yang diajukan selama persidangan berlangsung yang dapat membuktikan

bahwa telah tejadi persekongkolan terkait dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, *Exhibit I, item 2.4.4.* yang menyebutkan"*The Contractor is to be and IMCA member company*". Hal ini sebagaimana penjelasan Terlapor I dan Terlapor II pada angka 101 s.d. angka 105 Kesimpulan ini; ----------

b. Demikian pula dengan dalih Tim Investigator KPPU mengenai adanya dugaan persekongkolan terkait dengan persyaratan *workshop* atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Services*, bahwa tidak ada satupun alat bukti dan fakta-fakta di persidangan yang membuktikan demikian. Hal ini sebagaimana sudah Terlapor I dan Terlapor II jelaskan pada angka 106 s.d. angka 109 Kesimpulan; ----------

c. Sama halnya dengan dalih persekongkolan terkait Evaluasi Persyaratan Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Hal ini telah secara gamblang Terlapor I dan Terlapor II uraikan pada angka 75 s.d. angka 90 Kesimpulan; ----------

d. Tuduhan dan dalih-dalih Tim Investigator terkait Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan dengan menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA, adalah tuduhan yang keliru dan tidak berdasar. Tidak ada satupun bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan ahli yang membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan hal yang demikian. Hal ini telah Terlapor I dan Terlapor II uraikan pada angka 65 s.d. angka 74 Kesimpulan; ----------

e. Apalagi mengenai tuduhan dan dalih-dalih Tim Investigator terkait persekongkolan mengenai

pemberian surat dukungan Keanggotaan IMCA PT SBN kepada Terlapor III bertentangan dengan ketentuan IMCA, hal ini telah secara gamblang dibantah dan dibuktikan pada angka 110 s.d. angka 113 Kesimpulan, bahwa tidak satupun alat bukti-alat bukti yang diajukan selama persidangan berlangung yang membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan persekongkolan;---------

f. Tidak pula ada persekongkolan terkait penilaian Panitia kepada surat dukungan yang diberikan oleh PT SBN kepada Terlapor III sebagai pemenang Tender, karena tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan dimaksud. Hal ini sebagaimana telah Terlapor sampaikan pada angka 110 s.d. angka 113 Kesimpulan;----------

g. Pada akhirnya, tidak ada tuduhan Tim Investigator mengenai persekongkolan terkait Owner Estimate dan Harga Penawaran Pemenang Tender yang terbukti, karena tidak ada alat bukti-alat bukti yang mampu membuktikan persekongkolan dimaksud, sebagaimana telah Terlapor I dan Terlapor II uraikan pada angka 82 s.d. angka 90 Kesimpulan.----------

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlapor I dan Terlapor II sampaikan di atas, tidak adasatupun alat bukti baik itu surat-surat atau dokumen-dokumen, keterangan dari para saksi dan para ahli, serta keterangan Para Terlapor yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 22 No.5/1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Karenanya terbukti bahwa dalih-dalih Tim Investigator dalam LDP adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung tentang adanya pelanggaran Pasal 22 No.5/1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Sehingga, terbukti tidak ada persekongkolan

yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam Tender aquo dengan mengacu pada seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. ----------

8.4 Bahwa Untuk itu, Terlapor I dan Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ----------

1. Menerima seluruh Tanggapan dan Kesimpulan yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; ----------
2. Menolak seluruh dugaan pelanggaran Pasa! 22 UU No.5/1999 yang dituduhkan terhadap Terlapor I dan Terlapor 11, baik di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Kesimpulan dari Tim Investigator;----------
3. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor 11 tidak terbukti melakukan persekongkolan dalam Tender "*Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field*" (Tender No.11204) dengan Terlapor III.----------

9. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* TIII.11);----------

Terlapor III secara tegas membantah seluruh dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 28 November 2017 (“Laporan Dugaan Pelanggaran”) dari Tim Investigator yang pada pokoknyatelah menuduh Terlapor III telah melakukan persekongkolan Tender dengan Terlapor I dan Terlapor II. Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut terbukti tidak benar dan tidak berdasar karena seluruh tuduhan dan analisanya sangat sumir, mengada-ada, tidak berdasar bukti, hanya bersandar pada asumsi-asumsi Tim Investigator belaka sebagaimana terbukti didalam pemeriksaan perkara.----------

Terlapor III secara tidak terbantahkan telah terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (“uu no. 5/1999”) dalam bentuk apapun dan dengan pihak manapun, yang berbunyi sebagai berikut, sebagaimana telah diubah

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"

Dalil-dalil Kesimpulan Terlapor III yang membuktikan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak benar dan tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang telah dilakukan oleh Terlapor III akan Terlapor III uraikan secara rinci sebagai berikut: ----------

KRONOLOGIS TENDER DALAM PERKARA *AQUO*----------

(1) Sebelum Terlapor III menguraikan dalil-dalil Terlapor III, perkenankan Terlapor III untuk menguraikan kronologis lengkap proses pelaksanaan Tender Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204) ("Tender") berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan perkara, sebagai berikut: ----------

NO.	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
PENGUMUMAN TENDER & PRA KUALIFIKASI (PQ)			
1.	25 Mei 2016	Pengumuman Tender	
2.	26-31 Mei 2016	Masa pendaftaran dan pengambilan Dokumen Persyaratan Kualifikasi	
3.	3 Juni 2016	Jangka waktu terakhir pemasukan dokumen Pra Kualifikasi	Aquamarine memasukkan dokumen Pra Kualifikasi dan diterima oleh Panitia Tender
4.	3 - 14 Juni 2016	Klarifikasi Dokumen Kualifikasi oleh Panitia Tender	
5.	14 Juni 2016	Klarifikasi dari Panitia Tender terhadap dokumen dari Konsorsium PT Jasalindo-PT Warma Triendo	Panitia Tender meminta Konsorsium untuk melengkapi beberapa dokumen terkait
6.	16 Juni 2016	Konsorsium PT Jasalindo-PT Warma Triendo memberikan jawaban klarifikasi	Konsorsium menyerahkan dokumen yaitu: 1) IMCA Membership PT Jasalindo 2) SIUP Salvage 3) SIUP Besar 4) Surat dukungan IMCA ROV
7.	12 Agustus 2016	Pengumuman hasil evaluasi kualifikasi (Facsmile message No. 1035/PCML/TDR/2016)	<u>6 perusahaan yang lulus pra kualifikasi</u>: 1) PT Seascape Survey Indonesia 2) PT Advance Offshore Services 3) PT Patra Dinamika 4) PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia

			(Konsorsium) 5) PT Cakrawala Amartha Jaya 6) PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III) 4 perusahaan yang tidak lulus pra kualifikasi: 1) PT DOF Indonesia (alasan HSE) 2) Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo (alasan HSE) 3) PT Fabila Teknik Sejahtera (alasan HSE) 4) Konsorsium PT Cahaya Karya – PT Samudera Biru Nusantara (alasan HSE)

8.	15 – 16 Agustus 2016	Jangka waktu keberatan terhadap hasil Pra Kualifikasi	Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera mengajukan keberatan dengan melampirkan sertifikatIMCA, SKT Migas dan isian HSE.
9.	2 September 2016	Tanggapan Panitia Tender terhadap keberatan Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera	Panitia melakukan evaluasi ulang dan tetap menyatakan Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera tidak lulus Pra Kualifikasi karena nilai HSE nya dibawah nilai minimum.
PEMASUKAN PENAWARAN			
10.	21-22 September 2016	Undangan untuk mengambil dokumen pengadaan (Bid Document/ITB) (Facsmile message No. 1155/PCML/TDR/2016)	Undangan kepada enam perusahaan yang lolos Pra Kualifikasi untuk mengambil dokumen pengadaan (*Bid Document*) (21-22 September 2016) dan pemberitahuan pelaksanaan *Pre Bid Meeting*yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016
11.	26 September 2016	Rapat Penjelasan (*Prebid Clarification Meeting*)	6 perusahaan yang diundang dan ikut menghadiri rapat adalah: 1) PT Seascape Survey Indonesia 2) PT Advance Offshore Services 3) PT Patra Dinamika 4) PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Konsorsium) 5) PT Cakrawala Amartha Jaya PT Aquamarine Divindo Inspection Namun PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Konsorsium) memutuskan untuk tidak mengikuti tender. Berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan (*Minutes of Prebid Clarification Meeting*), terdapat beberapa hal yang dijelaskan oleh

			Panitia Tender, sebagai berikut: - TKDN (local content) minimal 35% - Batas akhir pertanyaan maupun

			klarifikasi paling lambat dilakukan pada tanggal 27 September 2016 - Bid Proposal terdiri dari 2 amplop - Amplop pertama terdiri dari hal-hal teknis mencakup: *bidder's experiences, bidder's organization, bidder's working procedures, bidder's equipments, list of proposesd personel (resume) and HSE plan & emergency response procedure* (*the details shall refer to Additional Technical Requirement document*) - Peserta tender harus mengikuti prosedur IMCA (*Contractor shall follow IMCA requirement for all aspect of the execution*) Klarifikasi terkait dengan pertanyaan dari beberapa peserta tender. Berapa hal penting yang diklarifikasi adalah: a. Exhibit I Special Provision and Scope of Work , Bab I Introduction: - Lokasi pekerjaan (*operating area*) adalah di wilayah Bukit Tua dan Muriah - *Point of Origin* dari kontraktor adalah di wilayah Surabaya, Jawa Timur - *Point of Delivery* ada *di Supply Base* b. Exhibit I, Bagian 2, Sub Bab 2.4.4. Contractors Qualification Experience: - "The contractor is to be and IMCA member company" c. Exhibit III Contractor Equipment & Personnel Specification - In general, all *Diving* equipment and associated equipment shall comply to Company *Diving* Management System document also International *Diving* reference like IMCA or ADCI or applicable government regulation.

12.	6 Oktober 2016	Panitia Tender mengirimkan Tender Clarification #1 (Facsmile message No. 1186/PCML/TDR/2016)	Panitia Tender memberitahukan bahwa masa pemasukan dokumen penawaran diperpanjang menjadi tanggal 14 Oktober 2016.
13.	7 Oktober 2016	Panitia Tender mengirimkan Tender Clarification #2 menyangkut hal-hal administratif dan teknis (Facsmile message No. 1193/PCML/TDR/2016)	Beberapa hal yang diklarifikasi oleh Tender Committee adalah: a. Bidder merupakan member IMCA di bidang ROV dan *Diving*. Kegiatan ROV akan terpisah dengan kegiatan *Diving*. b. Semua peralatan menyelam harus memenuhi standar IMCA c. Proyek ini akan dikerjakan dengan berpedoman pada IMCA Guidance dan Petronas Technical Standard. d. Perpanjangan masa pemasukan dokumen menjadi 14 Oktober 2016
14.	12 Oktober 2016	Tender Committee mengirimkan Tender Clarification #3 terkait hal-hal administratif. (Facsmile message No. 1212/PCML/TDR/2016)	Beberapa hal yang diklarifikasi oleh Tender Committee adalah: a. Bid Bond harus dalam rupiah. b. Proposal Bond harus dalam rupiah. c. Bidder harus menyiapkan HSE plan secara spesifik yang minimal memuat 11 item. d. Pemberitahuan penutupan pemasukan penawaran pada tanggal 19 Oktober2016 pukul 13.30 dan pembukaan dokumen penawaran akan dilakukan pada pukul 14.00 hari yang sama.
15.	12 Oktober 2016	Tender Committee mengirimkan Tender Clarification #4 (Facsmile message No. 1213/PCML/TDR/2016)	Klarifikasi Panitia Tender bahwa judul tender adalah “Provision of Underwater Services For Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204)”.
16.	18 Oktober 2016	PT Samudera Biru Nusantara (“SBN”) memberikan surat dukungan (letter of support) kepada Aquamarine	Berdasarkan surat nomor 005/SBN/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, SBN memberikan *letter of support* kepada Aquamarine dalam hal: a. Provision of underwater inspection b. Provision of underwater maintenance work

17.	19 Oktober 2016	SBN melakukan kerjasama dengan Aquamarine	SBN mengadakan kerjasama dengan Aquamarine untuk membantu dan mensupport Aquamarine dalam hal *technical consultancy* sesuai dengan *Diving* Standards of IMCA dalam setiap proyek tender yang dikerjakan oleh SBN atau

			Aquamarine. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun.
18.	19 Oktober 2016	Aquamarine memasukkan Dokumen Penawaran kepada Panitia	- Harga penawaran Aquamarine adalah Rp. 47.360.900.000,00 - Letter of Support dari SBN disertakan dalam dokumen penawaran (sampul pertama)
19.	21 Oktober 2016	Rencana inspeksi peralatan dan wawancara personil (*inspection to proposed equipment and interview to the personnel*) (Facsmile message No. 1251/PCML/TDR/2016)	PC Muriah dan PC Ketapang II menginformasikan rencana inspeksi peralatan dan personil kepada 5 (lima) peserta tender sebagai bagian dari evaluasi teknis
20.	21 Oktober 2016	Tanggapan Aquamarine terhadap rencana Petronas untuk melakukan inspeksi (Surat no. 185-B/AMDI-PCML/X/2016)	Aquamarine menyatakan kesediaannya untuk dilakukan inspeksi pada tanggal 2 November 2016, bertempat di head office dan workshop Aquamarine di Komplek Pergudangan 88 Blok C5-C7, Sidoarjo
21.	2 November 2016	Klarifikasi Dokumen Tender	Klarifikasi antara Petronas dengan Aquamarine terhadap dokumen-dokumen Aquamarine
22.	15 November 2016	Permintaan inspeksi kapal dari Petronas (Facsmile message No. 1316/PCML/TDR/2016)	Petronas berencana melakukan inspeksi terhadap 2 kapal dengan jadwal sebagai berikut: - TSS Beta (Tanjung Priok) tanggal 16 November 2016 - MV Logindo Sturdi (Pontianak) tanggal 18 November 2016
23.	15 November 2016	Tanggapan Aquamarine terhadap rencana Petronas melakukan inspeksi kapal	Aquamarine menkonfirmasi rencana inspeksi kapal oleh Petronas
24.	18 November 2016	Perubahan rencana inspeksi kapal (Facsmile message No. 1319/PCML/TDR/2016)	Perubahan jadwal inspeksi kapal MV Logindo Sturdi dari tanggal 18 November 2016 menjadi tanggal 22 November 2016 di Pontianak
25.	13 Desember 2016	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Pembukaan Sampul Pertama (Facsmile message No. 1408/PCML/TDR/2016)	4 perusahaan yang lulus ke tahap pembukaan sampul kedua adalah: 1. PT Patra Dinamika 2. PT Seascape Survey Indonesia 3. PT Aquamarine Divindo Inspection 4. PT Advance Offshore Services PT Cakrawala Amartha Jaya dinyatakan tidak lulus karena berdasarkan hasil inspeksi Panitia Tender peralatannya tidak sesuai dengan standar.
26.	14 Desember	Permintaan klarifikasi	

	2016	oleh PT Advance Offshore Services	
27.	4 Januari 2017	Klarifikasi Panitia Tender terhadap pertanyaan dari PT Advance Offshore Services	PT Advance Offshore Indonesia menyatakan menerima klarifikasi dan penjelasan Panitia Tender bahwa surat dukungan IMCA *Diving* dari SBN kepada Aquamarine diperbolehkan.
28.	9 Januari 2017	Pembukaan Dokumen Penawaran (Sampul Kedua)	OE diumumkan sebesar Rp49.465.485.000,- Hasil pembukaan penawaran adalah: 1. Aquamarine: Rp47.360.900.000,- 2. PT Patra Dinamika: Rp. 65.139.825.000,- 3. PT Advance Offshore Services: Rp66.306.725.000,- 4. PT Seascape Survey Indonesia: Rp114.968.040.000,- Proses pembukaan dihadiri perwakilan dari 4 perusahaan tersebut.

29.	17 Januari 2017	Undangan kepada Aquamarine untuk menghadiri rapat negosiasi dengan Panitia Tender (*Invitation to Commercial Negotiation Meeting*) (Facsmile message No. 0043/PCML/TDR/2017)	Undangan kepada Aquamarine untuk menghadiri rapat negosiasi dengan Panitia Tender pada tanggal 18 Januari 2017
30.	18 Januari 2017	Rapat negosiasikontrak antara Aquamarine dengan Tender Committee	Berdasarkan hasil negosiasi, Aquamarine sepakat untuk merevisi harga penawaran menjadi Rp.47.355.000.000,-
31.	25 Januari 2017	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Pembukaan Sampul Kedua (Facsmile message No. 0068/PCML/TDR/2017)	Tender Committee mengirimkan pemberitahuan bahwa Aquamarine merupakan pemenang tender, dan menyatakan 3 perusahaan tidak berhasil dalam evaluasi komersial: a. PT Patra Dinamika b. PT Seascape Surveys c. PT Advanced Offshore Services
PENETAPAN PEMENANG			
32.	6 Februari 2017	Penetapan pemenang (*Letter of Award*)	PC Muriah dan PC Ketapang II menunjuk Aquamarine sebagai pemenang berdasarkan Letter of Award, dimana dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja Aquamarine harus menjawab dengan menerbitkan *Letter of Acceptance*.
33.	7 Februari 2017	Acknowledgement Receipt and Acceptance	Respon Aquamarine terhadap penetapan Aquamarine sebagai pemenang tender, yang diterbitkan

			masih dalam jangka waktu yang ditentukan.
34.	13 Februari 2017	Penerbitan Performance Bond	
35.	16 Februari 2017	Penerbitan surat asuransi dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	
36.	20 Februari 2017	Penerbitan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	

37.	14 Februari 2017	Kick Off Meeting antara PC Muriah dan PC Ketapang II dengan Aquamarine	PC Muriah dan PC Ketapang II serta Aquamarine membahas hal-hal umum terkait dengan pekerjaan dan kontrak.
38.	7 September 2017	Rapat pembahasan kontrak antara Petronas dengan Aquamarine	Rapat antara Petronas dengan Aquamarine, dimana Petronas menyatakan mempertimbangkan untuk menarik Letter of Award No. 11/PCML/OPS/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dan berencana melakukan proses tender baru.
39.	14 September 2017	Surat klarifikasi dari Aquamarine terhadap rencana PC Muriah menarik Letter of Award Response to PCML plan for LOA withdrawal	Aquamarine meminta klarifikasi kepada PC Muriah terkait rencana PC Muriah menarik Letter of Award kepada Aquamarine dengan merujuk pada Rapat Pembahasan Kontrak tanggal 7 September 2017

(2) Berdasarkan uraian kronologis Tender tersebut dan sebagaimana telah terungkap berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, telah jelas bahwa setiap tahapan Tender dilakukan secara terbuka, fair dan transparan. Tender telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja SKK Migas Revisi 3 ("PTK 007 Rev. 3"), Dokumen Persyaratan Kualifikasi dan Dokumen *Instruction to Bidders* (ITB), dimana seluruh peserta Tender memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tender, memperoleh informasi yang sama (*symmetric information*), oleh karena itu sangat tidak mungkin bagi Terlapor III untuk melakukan persekongkolan tender sebagaimana dituduhkan didalam Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

(3) Panitia Tender juga telah membuka kesempatan untuk melakukan sanggahan atau keberatan atassetiap keputusan Panitia Tender. Keberatan tersebut diajukan oleh Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara dan PT CahayaKarya Bhakti Samuderapada saat Pra Kualifikasi dan PT Advance Offshore Services. Namun demikian kedua peserta tender tersebut telah

menerima penjelasan dan klarifikasi oleh Panitia Tender dan tidak mengajukan sanggah banding terhadap keputusan Panitia Tender tersebut. ----------

(4) Dengan demikian maka seluruh proses tender sampai dengan penunjukkan pemenang telah dilaksanakan dengan prosedur yang benar. Maka telah jelas tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perkara ini karena seluruh peserta telah menerima keputusan Panitia Tender. ----------

(5) Namun demikian meskipuntelah ditunjuk sebagai pemenang Tender, Terlapor III belum pernah menandatangani kontrak dan belum melaksanakan pekerjaan tender ini, dikarenakan keputusan sepihak dari Terlapor I dan Terlapor II untuk membatalkan tender dan melakukan pengumuman tender ulang. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan persekongkolan semakin tidak beralasan karena Terlapor III justru dirugikan dalam hal ini. Penjelasan mengenai kerugian yang diderita oleh Terlapor III akan Terlapor III uraikan lebih lanjut pada BabVIIKesimpulan ini. ----------

TERLAPOR III TERBUKTI TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO. 5/1999 KARENA FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN MENUNJUKKAN TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN MAUPUN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM TENDER*A QUO*----------

(1) Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, karena selama proses persidangan, baik dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator terbukti tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuduhan didalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikannya sendiri. ----------

(2) Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (“Perkom 1/2010”), Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan poin acuan dalam proses penanganan perkara di KPPU sebagai basis utama yang memuat uraian peristiwa, tindakan, dan uraian unsur-unsur

pelanggaran UU No. 5/1999 yang dituduhkan kepada pihak Terlapor oleh Tim Investigator. ----------

(3) Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan di KPPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Perkom No. 1/2010 sebagai berikut: -------

a. Pasal 1 Angka 8 Perkom No. 1/2010:----------

"*Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk meyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.*"

b. Pasal 1 Angka 9 Perkom No. 1/2010:----------

"*Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran."*

(4) Berdasarkan Perkom No. 1/2010, maka tugas Tim Investigator KPPU adalah untukmembuktikan Laporan Dugaan Pelanggarandengan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, sebagai berikut: ------

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:
a. keterangan saksi
b. keterangan ahli
c. surat dan atau dokumen
d. petunjuk
e. keterangan pelaku usaha

(5) Ketentuan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara KPPU juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Perkom No. 1/2010, sebagai berikut: ----------

(1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa:
a. Keterangan Saksi;
b. Pendapat Ahli;
c. Surat dan/ atau dokumen;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terlapor.

(6) Laporan Dugaan Pelanggaran juga tidak terbukti karena dalam perkara ini berlaku asas hukum *Unus Testis Nullus Testis,*yang merupakan salah satu prinsip pembuktian hukum juga berlaku didalam perkara ini.Asas *Unus Testis Nullus Testis*diatur didalam

Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, dimana keterangan yang disampaikan oleh satu saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian sebagai Keterangan Saksi:----------

"*Keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya.*"

(7) Keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (satu saksi bukan saksi). Maka agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 dan Pasal 72 ayat (1) Perkom No. 1/2010 harus diperoleh darisekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi. Namun demikian, seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran hanya disusun berdasarkan keterangan Saksi PT Advance Offshore Services (yang diduga merupakan Pelapor) yang tidak didukung oleh bukti-bukti dokumen maupun keterangan Saksi dan Ahli yang justru membuktikan sebaliknya di persidangan. ----------

(8) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai asas *Unus Testis Nullus Testis* ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973 sebagai berikut:----------

"*Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.*"

(9) Sejak awal hingga berakhirnya proses persidangan perkara ini, ternyata tidak ada ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan Tender, baik yang dilakukan oleh Terlapor III maupun Terlapor lainnya. ----------

(10) Seluruh hasil pemeriksaan perkara ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tender telah terlaksana secara fair dan tidak melanggar hukum. Terlapor III telah memenuhi seluruh persyaratan tender yang ditentukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dan merupakan peserta tender dengan penawaran paling rendah dibandingkan dengan peserta tender lainnya. Penunjukan Terlapor III sebagai pemenang Tender merupakan wewenang Terlapor I dan Terlapor II.----------

(11) Mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat, berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi ternyata terbukti terdapat kesalahan padaLaporan Dugaan Pelanggaran pada bagian huruf b halaman 31 karena telah menyatakan ketentuan mengenai workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai persyaratan Tender.----------

(12) Berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi, ketentuan mengenai *workshop* dan kantor perwakilan bukan merupakan persyaratan tender, melainkan hanya merupakan penjelasan mengenai lingkup pekerjaan (*general sccope of work*). ----------

(13) Hal tersebut terbukti berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi Point A pada halaman 4-5, dimana General Scope of Workhanya sebatas memuat penjelasan dan gambaran umum mengenai pelaksanaan pekerjaan serta memuat ketentuan bahwa pemenang tender nantinya harus bersedia menyediakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan requirement Terlapor I dan Terlapor II, yang meliputi: ----------

a. Durasi kontrak selama 3 (tiga) tahun. ----------
b. Area operasi (*operation area*) terletak di wilayah *offshore* di Bukit Tua dan Muriah. ----------
c. Titik awal (*Point of Origin*), dimana kontraktor nantinya harus bersedia mendirikan kantor perwakilan atau mendirikan/menyewa gudang yang terletak di sekitar daerah Surabaya, Jawa Timur.----------
d. Tempat pelaksanaan pekerjaan (*work site*) yang terletak di fasilitas milik PC Muriah di area Bukit Tua dan Muriah. ----
e. Titik pengiriman (*Point of Delivery*), dimana kontraktor diharuskan menanggung biaya transportasi dan akomodasi personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dari Point of Origin dan Point of Delivery (pulang pergi). ----------
f. Peralatan yang dibutuhkan terdiri dari peralatan menyelam (*Diving equipment*), ROV (*Remote Operated Vehicle*), *Cleaning Tools* dan DSV (*Diving Support Vessel*). ----------

Sehingga karena *general scope of work* bukan merupakan persyaratan tender, maka ketentuan tersebut tidak bersifat menggugurkan.Hal ini pun terbukti dimana tidak ada perusahaan yang digugurkan karena alasan ini. ----------

(14) Selanjutnya, Laporan Dugaan Pelanggaran kembali telah SALAH dalam menguraikan kronologis Tender karena menyatakan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran pada tanggal 17 Oktober 2016. Hal ini bertentangan dengan bukti dokumen Tender Clarification #3 tanggal 12 Oktober 2016 yang menyatakan batas waktu terakhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 19 Oktober 2016. ----------

(15) Kesalahan dan tidak cermatnya Laporan Dugaan Pelanggaran telah secara sengaja mengarahkan pada kesimpulan seolah-olah telah terjadi *post bidding* dan pelanggaran proses Tender.Namun faktanya proses Tender tidak melanggar ketentuan apapun karena Terlapor III memasukkan Dokumen Penawaran masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pantia Tender yaitu pada tanggal 19 Oktober 2016. ----------

(16) Laporan Dugaan Pelanggaran juga kembali salah karena menyatakan Terlapor I sebagai pemenang Tender, karena faktanya pemenang Tender *a quo* adalah Terlapor III. Kesalahan fatal Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Laporan Dugaan Pelanggaran, Bab Analisis Dugaan Pelanggaran, poin C angka 4 halaman 30, yang kami kutip sebagai berikut: ----------

"Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam dugaan pelanggaran ini adalah yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan memfasilitasi Terlapor I sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang…"

(17) Laporan Dugaan Pelanggaran kembali mengandung kesalahan karena tidak menguraikan salah satu unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 yaitu unsur "sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" secara substansial dan komprehensif. ----------

(18) Pasal 22 UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan *rule of reason* sehingga mutlak diperlukan adanya bukti disertai analisis dampak negatif akibat dari tindakan atau perbuatan yang dituduhkan kepada Terlapor II maupun Terlapor lainnya. -

(19) Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyatakan dampak dari tindakan persekongkolan adalah berupa "tindakan tidak jujur dan melawan hukum" sangat tidak beralasan dan tidak cukup membuktikan adanya persekongkolan karena karena hal-hal tersebut bukan merupakan bentuk akibat atau dampak. ----

(20) Tidak adanya bukti, uraian maupun penjelasan adanya dampak negatif terhadap tingkat persaingan didalam Laporan Dugaan Pelanggaran terbukti telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Laporan Dugaan Pelanggaran sama sekali tidak mampu menguraikan pihak mana yang dirugikan, berapa kerugian yang diderita, maupun hal-hal lain sebagai bukti adanya dampak negatif yang merugikan persaingan.----------

(21) Berdasarkan uraian tersebut maka jelas terbukti Laporan Dugaan Pelanggaran disusun secara tidak cermat dan mengandung pemahaman yang keliru atas fakta-fakta yang terjadi sehingga telahmenghasilkan kesalahan dalam melakukan analisa. ----------

(22) Demikian pula telah terbukti bahwa kesimpulan akhir Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 36-37 sangat tidak berdasar karena tidak didukung oleh bukti apa pun.Laporan Dugaan Pelanggaran telah terbantahkan karena seluruh hasil pemeriksaan telah mengungkapkan fakta bahwa tidak terdapat pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 didalam Tender *a quo*: -----

Kesimpulan Investigator	Hasil Pemeriksaan
1. Terkait dengan persyaratan dalam Dokumen Tender, Exhibit I, item 2.4.4. yang menyebutkan *The Contractor is to be and IMCA member company*	Faktanya, persyaratanini merupakan hasil klarifikasi Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor II) atas pertanyaan dari peserta tender. Selain Terlapor III, PT Cakrawala Amartha Jaya juga diperbolehkan untuk menggunakan surat dukungan IMCA.
2. Terkait dengan persyaratan	Faktanya, ketentuan ini termasuk

workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di sekitar Jawa Timur sebagai gudang penyimpanan *Tools and Equipment of NDT and Inspection Servcies*	sebagai "*General Scope of Work*" dan bukan termasuk sebagai persyaratan tender. Ketentuan ini pun wajar mengingat lokasi pekerjaan yang terletak di lepas pantai Lamongan, Jawa Timur.
3. Terkait Evaluasi Persyaratan Keanggotaan IMCA yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II	Faktanya, Panitia Tender memperbolehkan para peserta tender untuk menggunakan Surat Dukungan IMCA, sebagaimana PT Cakrawala Amartha Jaya yang menggunakan Surat Dukungan IMCA dari PT Jasalindo. Selain itu, terkait persyaratan kapal (*vessel*), Panitia Tender juga memperbolehkan para peserta tender untuk menggunakan Surat Dukungan dengan mekanisme yang sama dengan persyaratan keanggotaan IMCA dimana hal ini dapat diterima dan tidak dipermasalahkan oleh Tim Investigator.
4. Terkait Terlapor I dan Terlapor II menerapkan standar ganda dalam menilai persyaratan keanggotaan IMCA	Faktanya, tidak ada standar ganda karena PT Cakrawala Amartha Jaya juga diperbolehkan Panitia Tender untuk menggunakan Surat Dukungan IMCA.

	Hal ini terbukti karena PT Cakrawala Amartha Jaya tidak lulus evaluasi sampul pertama bukan karena surat dukungan, melainkan karena peralatannya tidak memenuhi standar berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan Panitia Tender. Selain itu, penyebab tidak lolosnya Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti bukan karena PT Samudera Biru Nusantara hanya memiliki 1 (satu) Sertifikat Keanggotaan IMCA, melainkan dikarenakan tidak lolos penilaian HSE.
5. Terkait Surat dukungan keanggotaan IMCA PT SBN kepada Terlapor III	Faktanya, baik saksi maupun ahli semuanya menyatakan bahwa surat dukungan diperbolehkan

bertentangan dengan ketentuan IMCA	dan merupakan hal yang lazim dalam pengadaan di bidang oil & gas. Pemberian Surat dukungan bukan merupakan perpindahan hak (*transfer of rights*) sehingga tidak melanggar ketentuan IMCA.
6. Terkait Penilaian Panitia kepada Surat Dukungan yang diberikan oleh PT SBN kepada Terlapor III sebagai Pemenang Tender	Faktanya, surat dukungan dari SBN kepada Terlapor III tidak melanggar ketentuan apa punkarena Sertifikat keanggotaan IMCA kategori *Diving* dari PT SBN merupakan sertifikat yang valid dan karena Konsorsium SBN dan Cakrabasha telah gugur pada tahap Pra Kualifikasi (dikarenakan tidak memenuhi persyaratan HSE), sehingga SBN tidak dilarang untuk memberikan
	surat dukungan kepada peserta tender lain berdasarkan ketentuan PTK 007 Rev. 3. Selain itu pada proses evaluasi teknis, Panitia Tender tidak pernah mempermasalahkan Surat Dukungan IMCA PT Cakrawala Amartha Jaya yang diperoleh dari PT Jasalindo. Sehingga terbukti bahwa penggunaan Surat Dukungan IMCA tidak dilarang dalam Tender.
7. Terkait *Owner Estimate* ("OE") dan Harga Penawaran Pemenang Tender	Faktanya, OE disusun oleh Panitia Tender secara independen melalui *market survey*yang sama sekali tidak pernah dilakukan terhadap atau melibatkan Terlapor III dan bersifat rahasia. Terlapor III sama sekali tidak mengetahui nilai OE sampai pada saat pembukaan penawaran. Harga penawaran Terlapor III disusun secara mandiri dengan mempertimbangkan kompetensi dan faktor lokasi pekerjaan yang berjarak tidak jauh dari kantor Terlapor III sehingga dapat menekan komponen harga mobilisasi dan harga penawaran.

(23) Sehingga dengan tidak terbuktinya tuduhan Tim Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran, maka dengan sendirinya

seharusnya Terlapor III dibebaskan dari semua tuduhan dan dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam perkara ini.----------

(24) Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, maka Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

TERLAPOR III TERBUKTI TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO. 5/1999 KARENA TERLAPOR III SELALU MENGIKUTI DAN MEMATUHI SELURUH PERSYARATAN TENDER DAN MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF DIBANDINGKAN PESERTA TENDER LAINNYA----------

A. TERLAPOR III TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH TERLIBAT DIDALAM PROSES PERENCANAAN TENDER (*TENDER PLAN*)----------

(1) Terlapor III membantah seluruh tuduhan persekongkolan tender dalam Laporan Dugaan Pelanggaran karena Terlapor III tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam proses perencanaan Tender. Terlapor III tidak pernah terlibat dalam keputusan panitia tender dalam menetapkan persyaratan Tender, termasuk penyusunan OE.----------

(2) Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, perencanaan Tender merupakan kewenangan penuh dari Terlapor I dan Terlapor II dan bersifat tertutupdan rahasia. Terlapor III tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk dapat terlibat dan mempengaruhi keputusan Terlapor I dan Terlapor II dalam merencanakan Tender. ---

(3) Berdasarkan bukti dokumen *Summary of Owner Estimate* (OE), terbukti nilai OE telah ditetapkan jauh hari sebelum dimulainya Tender ini. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai OE ditetapkan sebesar Rp. 49.465.485.000,00 (*empat puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dan kemudian

disetujui oleh Terlapor I dan Terlapor II pada saat itu, Bpk. Hazli Sham Kassim.----------

Proposed OE			Remark
~~USD~~/IDR: 49.465.485.000,00			
In word : Forty-nine billion Four hundred sixty-five million Four hundred eighty-five thousand rupiah			
Prepared By	Reviewed By	Approved Submission by	
Sulton Amrullah	**Hendrayana**	Hazli Sham Kassim	
Position: Manager	Sr. Manager	President	
Signature:	12/5/2016		

Nb.
1). If the numerical is different with the wording, the valid is the wording.
2). President can put discount percentage in the remark as per his/her own justification.
3). Detail Owner Estimate is attached for internal use.
   a. Owner Estimate Calculation
   b. Market Survey (please provide detail: year, how many vendors, etc.)
   c. Previous Contract (please provide justification for the use of previous contract)
   d. Others, please describe.

(4) Berdasarkan dokumen *Summary of Owner Estimate* (OE) Angka 1 butir b dan c tersebut, terbukti bahwa nilai OE tersebut ditetapkan berdasarkan *market survey* yang dilakukan oleh internal Terlapor I dan Terlapor II serta berdasarkan nilai pekerjaan sejenis sebelumnya. ----------

(5) Independensi dan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II dalam menetapkan nilai OE dan persyaratan Tender lainnya telah dibuktikan selama pemeriksaan berdasarkan keterangan President Director Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:----------

11.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Apa tugas dari presiden PC Muriah dan PC Ketapang?*
	Jawaban	*Sebagai presiden, dalam proses tender. Presiden bertanggungjawab mengesahkan rencana tender dan mengesahkan pemenang tender berdasarkan rekomendasi dari panitia tender.*

47.	*Pertanyaan Investigator*	*Siapa yang membuat dokumen perencanaan dan siapa yang mengesahkan?*
	Jawaban	*Yang membuat dokumen perencanaan disusun oleh departemen yang akan menggunakan jasa (user) dan supply chain.*

(6) Bukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II mempunyai kewenangan penuh dalam menyusun perencanaan Tender juga telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:----------

Keterangan Saksi Nizar Saputra (*vide*B33):----------

40.	*Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Standar apa saja yang bapak buat dalam menyusun OE?*
	Jawaban	*Kami mengambil dari bench mark beberapa perusahaan. YANG PASTI TIDAK ADA PT AQUAMARINE DISITU.*

Keterangan Saksi Nur Achrony (*vide* B31): ----------

32.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Dokumen Bid siapa yang menyusun?*
	Jawaban	*Yang menyusun procurement dan sudah ada standarnya/template, seperti: ITB, draft kontrak.*

(7) Sifat kerahasiaan OE telah diperjelas oleh Ahli dari SKK Migas, Ibu Maria Kristanti yang dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut (*vide* B22):----------

40.	*Pertanyaan Terlapor III*	*Apakah HPS sejak awal dirahasiakan?*
	Jawaban	*Ya. Sampai dengan pembukaan komersial HPS dirahasiakan. Dalam pembukaan sampul komersial harus disampaikan total nilai HPS-nya.*

(8) Dengan demikian telah jelas bahwa Terlapor III tidak pernah terlibatdalam bentuk apa pun dalam perencanaan Tender karena Terlapor III baru mengetahui informasi Tender pada saat pengumuman tender.----------

(9) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka telah jelas terbukti bahwa Terlapor III tidak terlibat, tidak melakukan kerjasama, dan tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk dan cara apapun dalam proses perencanaan Tender (*Tender Plan*). Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor III tidak bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

B. TERLAPOR III TERBUKTI LULUS PADA TAHAP PRA KUALIFIKASI KARENA TERLAPOR III MAMPU MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN TENDER TERUTAMA PERSYARATAN HSE (*HEALTH SAFETY ENVIRONMENT*) DAN SERTIFIKAT IMCA

(1) Terlapor III membantah seluruh tuduhan persekongkolan tender dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, karena keterlibatan Terlapor III pada Tender ini sama dengan peserta tender lainnya. Terlapor III selalu berusaha patuh

dan mengikuti seluruh prosedur dan persyaratan tender yang ditetapkan oleh Panitia Tender pada tahap Pra Kualifikasi. ----------

(2) Selain itu, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Laporan Dugaan Pelanggaran telah terbukti bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti selama pemeriksaan.---------

(3) Pada tahap Pra Kualifikasi, Panitia Tender menerbitkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi yang memuat penjelasan, pedoman, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta tender.Persyaratan-persyaratan tersebuttersebut diatur didalam Dokumen Persyaratan Kualifikasi pada Bagian D halaman 6 mengenai Persyaratan Kualifikasi, sebagai berikut:---------

D. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. *Persyaratan Legal & Administrasi*
   - 1.1. *Surat Permohonan*
   - 1.2. *Izin & Lisensi*
   - 1.3. *Surat Pernyataan*
2. *Persyaratan Finansial*
3. *Persyaratan Teknis*
   - *Bukti pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada sub bidang sesuai dengan Tender.*
   - *Nilai pengalaman tertinggi (NPT) yang diperoleh dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yang memenuhi persyaratan minimum 1/5 KD.*
   - *Melampirkan salinan sertifikat ISO 9001 "Quality Assurance".*
   - *Melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership.*
4. *Persyaratan HSE*

   Menyediakan dan menyerahkan isian HSE questionnaires termasuk dokumen-dokumen pendukungnya dengan minimum kelulusan grade 56 (high risk).

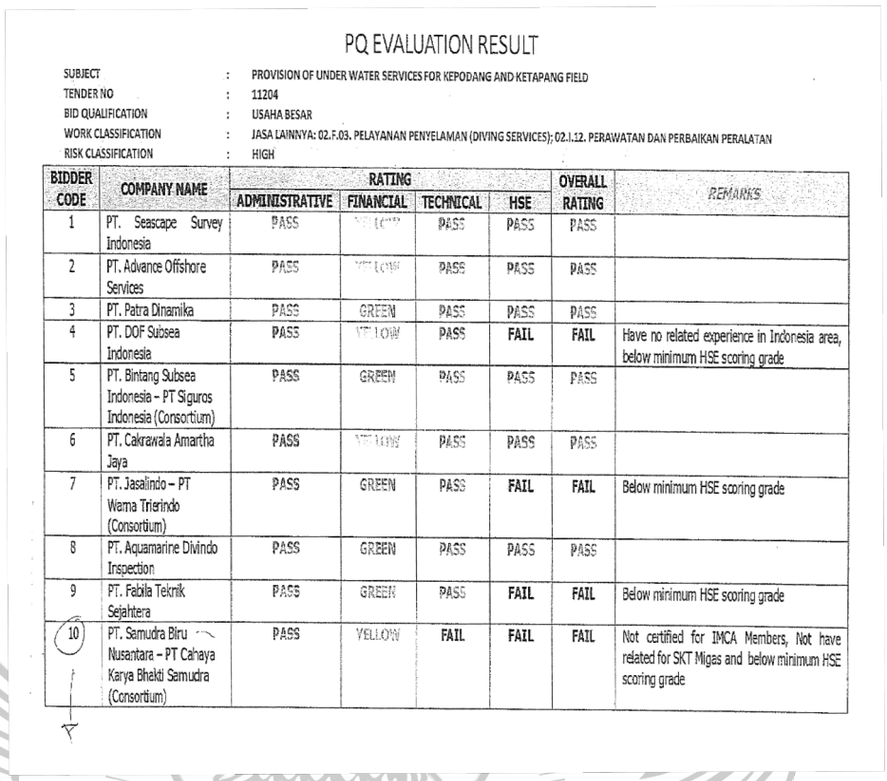
(4) Sesuai dengan ketentuan Dokumen Persyaratan Kualifikasi tersebut, Terlapor III telah menyerahkan seluruh dokumen pendukung yang ditentukan oleh Panitia Tender, terutama pengalaman pekerjaan, ISO 9001, IMCA Membership dan isian *questionnaire* HSE (*Health Safety Environment*). ----------

(5) Sesuai dengan ketentuan Dokumen Persyaratan Kualifikasi, para calon peserta tender wajib menyampaikan salinan keanggotaan IMCA Membership. Dokumen Persyaratan Kualifikasi sebagai satu-satunya dokumen rujukan pada tahap ini sama sekali belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis IMCA Membership apa yang dimaksud. Fakta bahwa Terlapor III terbukti secara tidak terbantahkan telah memiliki IMCA Membership kategori ROVyang kemudian telah diserahkan kepada Panitia Tender membuktikan bahwa Terlapor III telah memenuhi persyaratan IMCA Membership yang diminta pada tahap ini (Lampiran 1). ----------

(6) Selanjutnya,Panitia Tender melakukan evaluasi dokumen Pra Kualifikasi terhadap seluruh calon peserta tender yang kemudian berdasarkan facsmile message nomor 1035/PCML/TDR/2016 tanggal 12 Agustus 2016 (*vide Bukti* C7) Panitia Tender mengumumkan hasil kualifikasi sebagai berikut:----------

6 perusahaan yang lulus Pra Kualifikasi	4 perusahaan yang tidak lulus Pra Kualifikasi:
1) PT Seascape Survey Indonesia	1) PT DOF Indonesia
2) PT Advance Offshore Services	2) PT Jasalindo – PT Warna Triendo (Konsorsium)
3) PT Patra Dinamika	3) PT Fabila Teknik Sejahtera
4) PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Konsorsium)	4) PT Samudera Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudera (Konsorsium)
5) PT Cakrawala Amartha Jaya	
6) PT Aquamarine Divindo Inspection	

(7) Hasil evaluasi tersebut dilakukan oleh Panitia Tender terhadap dokumen dari calon peserta tender, dimana faktor utama yang menyebabkan tidak lolos adalah karena HSE yang tidak memenuhi skor minimum yang ditetapkan oleh Panitia Tender.Hal initerbukti berdasarkan bukti dokumen PQ *Evaluation Result* (*vide Bukti* C7) sebagai berikut: ----------



PQ EVALUATION RESULT

SUBJECT : PROVISION OF UNDER WATER SERVICES FOR KEPODANG AND KETAPANG FIELD
TENDER NO : 11204
BID QUALIFICATION : USAHA BESAR
WORK CLASSIFICATION : JASA LAINNYA: 02.F.03. PELAYANAN PENYELAMAN (DIVING SERVICES); 02.I.12. PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN
RISK CLASSIFICATION : HIGH

BIDDER CODE	COMPANY NAME	RATING				OVERALL RATING	REMARKS
		ADMINISTRATIVE	FINANCIAL	TECHNICAL	HSE		
1	PT. Seascape Survey Indonesia	PASS	YELLOW	PASS	PASS	PASS	
2	PT. Advance Offshore Services	PASS	YELLOW	PASS	PASS	PASS	
3	PT. Patra Dinamika	PASS	GREEN	PASS	PASS	PASS	
4	PT. DOF Subsea Indonesia	PASS	YELLOW	PASS	FAIL	FAIL	Have no related experience in Indonesia area, below minimum HSE scoring grade
5	PT. Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia (Consortium)	PASS	GREEN	PASS	PASS	PASS	
6	PT. Cakrawala Amartha Jaya	PASS	YELLOW	PASS	PASS	PASS	
7	PT. Jasalindo – PT Wama Trisindo (Consortium)	PASS	GREEN	PASS	FAIL	FAIL	Below minimum HSE scoring grade
8	PT. Aquamarine Divindo Inspection	PASS	GREEN	PASS	PASS	PASS	
9	PT. Fabila Teknik Sejahtera	PASS	GREEN	PASS	FAIL	FAIL	Below minimum HSE scoring grade
10	PT. Samudra Biru Nusantara – PT Cahaya Karya Bhakti Samudra (Consortium)	PASS	YELLOW	FAIL	FAIL	FAIL	Not certified for IMCA Members, Not have related for SKT Migas and below minimum HSE scoring grade

(8) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka telah jelas terbukti bahwa pada tahap Pra Kualifikasi, Panitia Tender tidak pernah menjelaskan dan mempermasalahkan jenis kategori sertifikat IMCAyang dipersyaratkan kepada seluruh peserta tender. Oleh karena itu fakta bahwaTerlapor III memiliki Sertifikat IMCA ROV adalah sudah seharusnya dapat diterima oleh Panitia Tender. Hal ini pun telah dijelaskan oleh Saksi Nur Achrony sebagai berikut: (*vide* B31) ----------

38.	*Pertanyaan Investigator*	*Apakah Dokumen PQ yang dipersyaratkan IMCA Diving Atau IMCA ROV?*
	Jawaban	*Hanya menyebutkan dokumen IMCA saja, tidak ada penjelasan IMCA apa.*

(9) Sementara itu Konsorsium PT Cahaya Karya Bhakti Nusantara–PT Samudera Biru Nusantara mengajukan keberatan atas keputusan Panitia yang menggugurkan Konsorsium tersebut. Atas evaluasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Tender, Konsorsium PT Cahaya Karya Bhakti Nusantara–PT Samudera Biru Nusantara tetap dinyatakan gugur karena skor HSE dibawah standard dan bukan karena permasalahan Sertifikat IMCA. ----------

(10) Atas keputusan Pantia Tender tersebut, PT Cahaya Karya Bhakti Nusantara–PT Samudera Biru Nusantara tidak mengajukan sanggah banding dan menerima keputusan Panitia Tender.----------

(11) Seluruh proses evaluasi Pra Kualifikasi sendiri berlangsung fair, profesional dan tidak ada preferensi terhadap perusahaan tertentu, karena orang yang melakukan evaluasi sendiri tidak mengetahui asal dokumen dari perusahaan yang mana, sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Febby A. Viariawan (*vide* B29), sebagai berikut:----------

15.	*Pernyataan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Apakah persyaratan HSE sangat penting untuk menentukan pemenang tender?*
	Jawaban	*Sangat penting,karenanya kami harus yakin bahwa perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan harus memiliki standar HSE yang baik. Ada skor tertentu yang harus dicapai. Bila batasan skor tidak bisa dicapai maka tidak bisa ikut dalam tender tersebut.*
52.	*Pertanyaan Majelis Komisi*	*Jadi anda tidak tahu nama perusahaan yang dievaluasi?*
	Jawaban	*Bukan tidak tahu namanya, tapi mengingat kami Sumber daya manusianya sedikit maka, satu orang bisa mengerjakan berbagai pekerjaan, jadi bisa tidak tahu perusahaan tersebut ikut tender apa saja.*

(12) Berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti tersebut maka telah jelas terbukti hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Enam peserta gugur karena skor HSE-nya tidak memenuhi standar Panitia Tender.Komponen HSE sendiri sangat penting karena pekerjaan Tender ini termasuk sebagai pekerjaan dengan resiko tinggi (*high risk*).----------

b. Panitia Tender hanya menyatakan persyaratan kepemilikan IMCA Membership tanpa merinci jenis kategori sertifikat yang dimaksud, sehingga sepanjang calon peserta tender dapat melampirkan bukti kepemilikan IMCA Membership dalam jenis apapun maka hal tersebut sudah sepatutnya dapat diterima oleh Panitia Tender. ----------

c. Dengan gugurnya Konsorisum Cakrabasa-PT Samudera Biru Nusantara pada tahap Pra

Kualifikasi, maka PT SBN sudah bukan lagi berkedudukan sebagai peserta tender dan tidak dilarang untuk menerbitkan suratdukungan kepada perusahaan lain yang mengikuti tender berdasarkan PTK 007 Rev. 3. ----------

d. Terlapor III bersama-sama dengan 5 (lima) perusahaan lain telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II sehingga dinyatakan lulus Pra Kualifikasi. ----------

(13) Dengan demikian cukup beralasan bagi Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 karena terbukti proses Pra Kualifikasi berjalan fair dan transparan.----------

C. TERLAPOR III TERBUKTI LULUS TAHAP EVALUASI PENAWARAN KARENA SURAT DUKUNGAN (*LETTER OF SUPPORT*) IMCA *DIVING* DARI PT SBN TERBUKTI TIDAK MENYALAHI *INSTRUCTION TO BIDDER* (ITB) ----------

(1) Terlapor III membantah seluruh tuduhan persekongkolan tender dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, karena Terlapor III selalu berusaha patuh dan mengikuti seluruh prosedur dan persyaratan tender yang ditetapkan oleh Panitia Tender pada tahap penawaran.----------

(2) Terlapor III berusaha memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Tender berdasarkan dokumen Instruction To Bidders (ITB). Selama proses klarifikasi ini, para peserta tender mempunyai hak untuk menanyakan dan melakukan klarifikasi terhadap ketentuan ITB yang dirasa belum jelas. ----------

(3) Berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan (*Minutes of Prebid Clarification Meeting*) yang dikirimkan oleh Panitia Tender melalui facsmile No. 1191/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016, Panitia Tender melakukan klarifikasi ketentuan Dokumen ITB Exhibit I, Bagian 2,

Sub Bab 2.4.4. mengenai pengalaman kontraktor (*Contractors Qualification Experience*), dengan menyatakan bahwa: "*The contractor is to be and IMCA Member Com*pany." ----------

(4) Selanjutnya berdasarkan Tender Clarification #2 yang dikirimkan oleh Panitia Tender melalui facsmile No. 1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016, Panitia Tender menjelaskan bahwa *bidder* harus merupakan member IMCA di bidang ROV dan *Diving*. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi peserta tender untuk menggunakan surat dukungan. ----------

(5) Fakta bahwa peserta tender termasuk Terlapor III diperbolehkan untuk menggunakan surat dukungan (*letter of support*) telah dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Nur Achrony (*vide* B31) sebagai berikut: ----------

25.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlpaor II*	*Apakah lazim menggunakan supporting letter dalam industry Migas?*
	Jawaban	*Menurut pemahaman saya ini common dilakukan. Selama kami melakukan evaluasi teknis, ada perusahaan lain juga yang menggunakan supporting letter, dan tidak ada larangan untuk menggunakan supporting letter.*
42.	*Pertanyaan Investigator*	*Adakah tertulis bahwa supporting letter diperbolehkan?*
	Jawaban	*Tidak ada pak, hanya seperti yang tertulis pada dokumen yakni membership namun tidak ada larangan.*

(6) Selain itu, terdapat fakta dimana seluruh peserta tender yang lulus hingga tahap evaluasi penawaran juga menggunakan *Letter of Support* untuk persyaratan kepemilikan kapal (*vessel*). Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa penggunaan Letter of Support, baik untuk IMCA Diving, IMCA ROV, maupun kapal (vessel) tidak dilarang oleh Panitia Tender. ----------

(7) Dalam prakteknya, penggunaan surat dukungan dalam pengadaan di bidang *supply chain oil & gas* merupakan hal yang lazim, sebagaimana telah dibuktikan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:----------

Saksi PT Cakrawala Amartha Jaya (*vide* B7): ----------

35.	*Pertanyaan Investigator*	*Letter of Support dimaksud, diberikan beserta alat dan personilnya ataukah dokumennya saja? Jadi seperti apa praktiknya?*
	Jawaban	*Jika PT A ikut tender underwater, namun dia tidak punya sertifikat Diving. Saya memberikan surat dukungan untuk bagian pekerjaan yang dia tidak punya tapi saya punya. Maka dia meminta dukungan pada saya, maka saya menjadi sub-kon. Atau bisa juga dilakukan konsorsium sejak awal. Tidak ada sertifikat dipinjamkan.*

49.	*Pertanyaan Terlapor III*	*Jarangnya yang punya IMCA itu menciptakan sering saling support?*
	Jawaban	*Ya betul, biasa saja hal itu terjadi.*

Saksi PT SBN (*vide* B13):----------

47.	*Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II*	*Apakah lazim adanya pemberian supporting letter pada perusahaan lain?*
	Jawaban	*Sangat lazim untuk memberikan supporting letter IMCA.*

Saksi PT Seascape Survey Indonesia (*vide* B12):----------

33.	*Pertanyaan Terlapor III*	*Apakah lazim untuk peserta tender untuk meminta supporting letter?*
	Jawaban	*Untuk IMCA saya tidak tahu, tapi untuk pekerjaan seperti kapal dan lainnya wajar mendapatkan dukungan dengan cara KSO. Semua tergantung dengan permintaan panitia tender atau pemilik proyek sesuai dengan PTK 07.*

Saksi PT Patra Dinamika (*vide* B10):----------

27.	*Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II*	*Tadi anda menyatakan PT Patra Dinamika mendapatkan supporting letter terkait dengan vessel dan survey and posisition services. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam tender, supporting letter seperti ini sudah biasa digunakan? Secara supporting letter ini dapat digunakan untuk alat apa saja?*
	Jawaban	*Supporting letter seperti ini sudah biasa, karena kami tidak punya alatnya maka kami minta pada pihak lain. Supporting letter ini tergantung requirement ya, jadi tergantung alat apa saja yang memang tidak dimiliki perusahaan padahal dibutuhkan dalam tender.*
28.	*Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II*	*Supporting letter untuk sertifikat IMCA Diving dan ROV apakah bisa dilakukan?*
	Jawaban	*Saya tidak tahu, dimungkinkan saja, tergantung dengan oil company-nya membolehkan atau tidak, bagaimana persyaratannya. Memang sudah lumrah memberikan supporting letter seperti ini.*

Saksi PT Fabila Teknik Sejahtera (*vide* B5): ----------

28.	*Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II*	*Bila kita tidak punya IMCA, maka kita minta dukungan. Apakah hal tersebut sudah biasa terjadi dipekerjaan seperti ini?*

	Jawaban	*Betul, saat ini tahun 2016. Namun PTK selalu diperbaharui tiap tahunnya.*
39.	*Pertanyaan Investigator*	*Apakah perusahaan anda pernah ikut tender yang mengisyaratkan ROV?*
	Jawaban	*Pernah, kami meminta letter of supporting dari Danforth.*

Saksi Konsorsium PT Jasalindo – PT Warma Triendo (*vide* B27):----------

39.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Apakah lazim menggunakan supporting letter dahulu dan berikutnya bisa saja pakai perusahaan tersebut atau tidak?*
	Jawaban	*Lazim menggunakan supporting letter tersebut, namun kami pasti akan menggunakan perusahaan yang memberikan surat dukungan.*

Saksi Herry Gunawan (*vide* B22): ----------

11.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Apakah supporting letter dalam perkapalan itu hal lazim?*
	Jawaban	*Itu adalah hal yang lazim dan biasa di perkapalan.*

(8) Berdasarkan dokumen ITB dan hasil klarifikasi tersebut, maka Terlapor III kemudian mengajukan permintaan kepada PT SBN agar bersedia memberikan surat dukungan (*Letter of Support*) IMCA kategori *Diving* kepada Terlapor III, hal ini mengingat PT SBN merupakan anggota IMCA dan memiliki sertifikat IMCA *Diving*, selain itu Konsorsium Cakrabasa – PT Samudera Biru Nusantara telah terlebih dulu gugur pada tahap Pra Kualifikasi (Lampiran 2).----------

(9) Berdasarkan permintaan Terlapor III tersebut, PT SBN setuju untuk menerbitkan Surat Dukungan (*Letter of Support*) nomor 005/SBN/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (Lampiran 3), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT SBN akan memberikan dukungan kepada Terlapor III dalam 2 (dua) lingkup pekerjaan Tender *a quo*, yaitu: ----------

a. *Provision of underwater inspection.*----------
b. *Provision of underwater maintenance work*. ----------

(10) Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016, Terlapor III menyerahkan seluruh Dokumen Penawaran kepada

Panitia Tender (termasuk didalamnya *Letter of Support* dari PT SBN). Dengan demikian maka telah jelas terbukti bahwa surat dukungan dari PT SBN diterbitkan sebelum Terlapor III memasukkan dokumen penawaran (Lampiran 4). ----------

(11) Setelah melakukan evaluasi teknis, pada tanggal 13 Desember 2016 Panitia Tender mengumumkan hasil evaluasi sampul pertama melalui Facsmile No. 1408/PCML/TDR/2016 (*vide Bukti* C9, C10), dengan hasil sebagai berikut:----------

Lulus Sampul Pertama	Tidak Lulus Sampul Pertama
1. PT Patra Dinamika 2. PT Seascape Surveys Indonesia 3. PT Aquamarine Divindo Inspection 4. PT Advanced Offshore Services	PT Cakrawala Amartha Jaya

(12) Berdasarkan inspeksi peralatan yang dilakukan Panitia Tender, PT Cakrawala Amartha Jaya dinyatakan gugur karena ternyata peralatannya tidak memenuhi standar, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh PT Cakrawala Amartha Jaya dalam pemeriksaan (*vide* B7), sebagai berikut: ----------

15.	*Pertanyaan Investigator*	*Bagaimana kronologisnya?*
	Jawaban	*Setelah submit dokumen administrasi dan teknis yang diminta sesuai RKS, lalu panitia melakukan visit, saat mereka cek alat kami dan disanalah kami gugur.*
21.	*Pertanyaan Investigator*	*Anda tadi menyampaikan PT CAJ gugur dan kalah karena peralatan, apakah tidak ada laporan terkait peralatan tersebut?*
	Jawaban	*Kebetulan saat visit, peralatan di workshop tidak berfungsi, dinilai tidak layak. Untuk sertifikat saya punya. Makanya saya gugur.*
26.	*Pertanyaan Investigator*	*Terkait gugurnya perusahaan anda, disampaikan melalui pengumuman?*
	Jawaban	*Disampaikan, ada keterangannya kami gugur di teknis dan sertifikat kami expired.*

(13) Keterangan Saksi PT Cakrawala Amartha Jaya mengenai gugur akibat peralatannya tidak memenuhi standar Panitia Tender tersebut didukungoleh keterangan yang disampaikan Saksi Nizar Saputra (*vide Bukti*33), sebagai berikut: ----------

49.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Mengapa PT Cakrawala Amartha Jaya gagal dalam tender?*
	Jawaban	*Saat kita verifikasi dan cek di lapangan, equipment mereka tidak sesuai dengan standar kita. Kita buat berita acara dan mereka agree bahwa peralatan mereka tidak siap untuk tender ini. Jadi bukan karena masalah IMCA. Kita harus tetap verifikasi karena pekerjaan ini high-risk.*

(14) Setelah pengumuman evaluasi Sampul Pertama, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2016 PT Advance Offshore Services mengajukan keberatan mengenai status Terlapor III yang tidak memiliki sertifikat IMCA *Diving*. Namun hal tersebut kemudian telah diklarifikasi oleh Panitia Tender pada pertemuan tanggal 4 Januari 2017 dengan menjelaskan bahwa Terlapor III mendapatkan surat dukungan dari PT SBN sehingga telah memenuhi persyaratan didalam ITB. ----------

(15) Selanjutnya PT Advance Offshore Services menyatakan menerima penjelasan Panitia Tender tersebut dan tidak mengajukan sanggah banding. Hal tersebut sebagaimana terbukti berdasarkan tanda tangan PT Advance Offshore Indonesia didalam dokumen *Minutes of Meeting* tanggal 4 Januari 2017 (*vide* Bukti C11). ----------

(16) Fakta tidak ada keberatan terkait penggunaan surat dukungan IMCA *Diving* juga telah terbukti dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi Nizar Saputra dan keterangan Ahli Pandji A. Ariaz sebagai berikut:----------

Saksi Nizar Saputra(vide B33):----------

21.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Setelah itu apakah ada keberatan-keberatan yang lainnya dari bidders?*
	Jawaban	*Ada diproses evaluasi teknis, terdapat yang melakukan sanggahan yaitu perusahaan PT Advance Offshore Services, dia keberatan dimana ada salah satu peserta tender ikut, tetapi peserta tersebut tidak punya sertifikat IMCA Diving. Tapi dia di support oleh perusahaan lain yang punya IMCA Diving.*

22.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Lalu apa yang terjadi?*
	Jawaban	*Kami buat pertemuan dan hasilnya didalam minute of meeting dan mereka juga tandatangan dan setuju dnegan klarifikasi dari kami.*

Ahli Pandji A Ariaz (vide B25):----------

45.	*Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II*	*Bila tidak ada sanggahan bagaimana?*
	Jawaban	*Berarti semua peserta dianggap setuju dengan hasil tender. Pada proses tender para peserta telah diberikan kesempatan 4 (empat) kali untuk mengajukan keberatan:* *1. Keberatan terhadap hasil prakualifikasi, bila hasilnya benar maka dikoreksi* *2. Protes atas isi dokumen tender, bila isinya bertentangan dengan PTK 007 dan atau mengarah dan menguntungkan pihak tertentu, bila protes benar isi dokumen dikoreksi.* *3. Sanggahan atas hasil koreksi evaluasi teknis, bila benar akan mengoreksi evaluasi teknis tersebut.* *4. Sanggahan atas penetapan calon pemenang tender, bila tidak puas dapat melakukan sanggahan banding. Jika benar bisa merubah calon pemenang tender. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta tender untuk menyampaikan sanggahan.*

(17) Lebih lanjut, selama proses evaluasi Panitia Tender memperbolehkan dan menerima Surat Dukungan dari PT SBN kepada Terlapor III, sebagaimana telah Terlapor III jelaskan dalam pemeriksaan sebagai berikut:----------

27.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Bagaimana sikap panitia atas PT Aquamarine yang menggunakan letter of support atas sertifikat IMCA Diving?*
	Jawaban	*Panitia menerima.*
39.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Selain support letter untuk IMCA Diving, adalah support letter dari lainnya?*
	Jawaban	*Ada, selain IMCA Diving, kami gunakan letter of support dari pT BNI untuk kapal.*
40.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Apakah panitia memperbolehkan?*
	Jawaban	*Ya dibolehkan panitia.*
41.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Untuk surat dukungan ini diperbolehkan dan lazim?*
	Jawaban	*Sepanjang yang saya ketahui ini lazim dan diperbolehkan.*

56.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Apa alasan untuk menggunakan letter of support?*
	Jawaban	*Karena kami tidak punya dan sudah*

		prekteknya letter of support diterima K3S.

(18) Berdasarkan keterangan Ahli Maria Kristanti (SKK Migas), surat dukungan SBN tersebut tetap diperbolehkan karena berdasarkan ITB, hasil klarifikasi, serta hasil klarifikasi Panitia Tender terhadap keberatan PT Advance Offshore Services, maka persyaratan Tender yang berlaku adalah ITB beserta perubahannya yang telah disepakati oleh seluruh peserta tender: ----------

39.	*Pertanyaan Terlapor III*	*Apabila ada penjelasan boleh tentang sesuatu, lalu ditanyakan lagi ternyata tidak boleh, jadi mana yang digunakan?*
	Jawaban	*Yang diputuskan oleh K3S dan diketahui atau disetujui oleh semua peserta tender.*

(19) Lebih lanjut, seluruh peralatan dan personil Terlapor III telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Tender berdasarkan hasil inspeksi lapangan. Panitia Tender melakukan inspeksi dan klarifikasi terhadap dokumen, peralatan *Diving*, ROV, personil dan kapal (*vessel*) terhadap seluruh peserta tender, termasuk Terlapor III. ---

(20) Peralatan Terlapor III telah dinyatakan Panitia Tender memenuhi standar keamanan IMCA yang berlaku berdasarkan sertifikat audit dari SS Subsea Pte. Ltd. nomor CERT/AIR/16/0101 (Lampiran 5) dan sertifikat SO-1111-000059 dari Sea and Land Technologies Pte. Ltd. (Lampiran 6). Selain itu, pelaksanaan pekerjaan *Diving* sepenuhnya menggunakan sumber daya dari Terlapor III dengan konsultasi dan supervisi dari PT SBN sesuai dengan yang diatur dalam Surat Dukungan IMCA *Diving* PT SBN. ----------

(21) Pernyataan Laporan Dugaan Pelanggaran yang menyebutkan PT SBN tidak beroperasi sepenuhnya tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan langsung oleh saksi PT SBN dalam pemeriksaan bahwa PT SBN tetap beroperasi dan aktif melakukan pekerjaan *Underwater services*. PT SBN hingga saat ini masih terdaftar sebagai member IMCA *Diving*. ----------

(22) Seluruh proses evaluasi teknis Terlapor III terbukti dilakukan oleh Panitia Tender secara profesional dan objektif, sebagaimana dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Nizar Saputrasebagai berikut (*vide*B33):----------

35.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Tolong ceritakan seperti apa proses evaluasi dokumen tender PT Aquamarine?*
	Jawaban	*Seperti biasa kami memeriksa dari dokumen peserta tender, baik equipment, kapal, administrasi dan lain-lainnya. Setelah melakukan evaluasi tersebut kami juga melakukan site visit kemasing-masing vendor untuk membuktikan benar mempunyai alat dan mereka qualified dalam pekerjaan, stelah itu hasilnya kamis serahkan kepada Panitia Tender.*
37.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Dari semua proses evaluasi tender apakah benar PT Aquamarine lolos dari semua kriteria persyaratan tersebut?*
	Jawaban	*IYA*
38.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Apakah ada catatan tersendiri?*
	Jawaban	*Tidak ada*
39.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Apakah benar harga dari PT Aquamarine yang paling rendah dan semuanya terpenuhi?*
	Jawaban	*Iya benar.*
67.	*Pertanyaan Investigator*	*Apakah semua yang anda lakukan sudah sesuai dengan yang di dokumen ITB?*
	Jawaban	*Ya sudah. Sudah dimasukkan secara jelas dalam summary/report yang akan disampaikan ke panitia tender.*

(23) Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Panitia Tender memperbolehkan peserta tender untuk menggunakan surat dukungan dari perusahaan lain, termasuk dalam hal ini adalah terkait persyaratan IMCA Membership dan persyaratan kapal (*vessel*). -----
b. Surat dukungan IMCA *Diving* dari PT SBN diterima oleh Panitia Tender dan tidak bertentangan dengan ITB serta ketentuan PTK 007 Rev. 3. ----------
c. Panitia Tender telah melakukan evaluasi teknis dengan juga melakukan inspeksi peralatan dan personil seluruh peserta tender. ----------
d. PT Cakrawala Amartha Jaya gugur karena peralatannya tidak memenuhi syarat, dan bukan karena menggunakanSurat Dukungan IMCA. ----------

e. Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara –PT Cahaya Karya Bhakti Samudera dinyatakan tidak lolos kualifikasi karena tidak lolos penilaian HSE, bukan karena hanya memiliki satu sertifikat keanggotaan IMCA. ----------

f. PT Advance Offshore Services menerima keputusan Panitia Tender mengenai penggunaan surat dukungan IMCA *Diving* Terlapor III.----------

(24) Dengan demikian maka tidak terbukti adanya upaya dari Panitia Tender untuk sengaja memenangkan Terlapor III dalam Tender ini. Demikian pula Terlapor III hanya bertindak pasif dengan mengajukan surat dukungan IMCA *Diving* dari PT SBN untuk memenuhi persyaratan Tender. Keputusan untuk menerima surat dukungan tersebut merupakan mutlak kewenangan Panitia Tender. Atas dasar alasan tersebut Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. -----

D. HARGA PENAWARAN TERLAPOR III MERUPAKAN HARGA TERENDAH KARENA TERLAPOR III MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF DIBANDINGKAN DENGAN PESERTA TENDER LAINNYA----------

(1) Terlapor III membantah seluruh tuduhan persekongkolan tender dalam Laporan Dugaan Pelanggaran karena penetapan Terlapor III sebagai pemenang tender telah dilakukan secara benar berdasarkan fakta bahwa harga penawaran Terlapor III merupakan yang paling rendah yang disebabkan oleh *competitive advantages* yang dimiliki oleh Terlapor III. ----------

(2) Berdasarkan evaluasi penawaran (sampul kedua) terhadap dokumen 4 (*empat*) peserta tender yang lolos evaluasi teknis (sampul pertama), kemudian pada tanggal 9 Januari 2017 Panitia Tender mengumumkan hasil pembukaan penawaran yang dituangkan dalam *Minutes of*

Bid Opening (Second Envelope), dengan hasil sebagai berikut (*vide* C.12):----------

No.	PESERTA TENDER	HARGA PENAWARAN	TKDN (LOCAL CONTENT)
1.	PT Aquamarine Divindo Inspection (Terlapor III)	Rp. 47.360.900.000,-	83.80%
2.	PT Patra Dinamika	Rp. 65.139.825.000,-	72,41%
3.	PT Advance Offshore Surveys	Rp. 66.306.725.000,-	80%
4.	PT Seascape Survey Indonesia	Rp. 114.968.040.000,-	48,92%

(3) Berdasarkan hasil pengumuman tersebut, selanjutnya berdasarkan facsmile nomor 0043/PCML/TDR/2017 tanggal 17 Januari 2017 Panitia Tender mengundang Terlapor III untuk menghadiri rapat negosiasi kontrak (*commercial negotiation meeting*) pada tanggal 18 Januari 2017. ----------

(4) Berikutnya berdasarkan negosiasi kontrak pada tanggal 18 Januari 2017 tersebut, Terlapor III setuju untuk merevisi harga penawarannya semula menjadi sebesar Rp. 47.355.000.000,-. ----------

(5) Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017, Panitia Tender mengirimkan facsmile nomor 0068/PCML/TDR/2017 kepada seluruh peserta tender untuk memberitahukan hasil evaluasi pembukaan sampul kedua dan mengumumkan Terlapor III merupakan pemenang Tender *aquo* (*vide* C.13). ----------

(6) Pada tanggal 6 Februari 2017, Terlapor I dan Terlapor II mengirimkan surat nomor 11/PCML/OPS/II/2017 perihal *Letter of Award* kepada Terlapor III yang pada pokoknya menginformasikan bahwa berdasarkan keseluruhan proses Tender maka Terlapor III merupakan pemenang Tender *a quo*.----------

(7) Berdasarkan *Letter of Award* tersebut, Terlapor I dan Terlapor II menentukan bahwa Terlapor III harus menerbitkan surat-surat pendukung dalam kurun waktu 14 (*empat belas*) hari kerja sejak penerbitan Letter of Award tersebut, sebagaimana dikutip sebagai berikut:-----

"*Prior to the formal execution of the Contract, COMPANY requires the following document(s) to be furnished and submitted to COMPANY within fourteen (14) business days from the date of this Letter of Award..*"
Terjemahan bebas nya :
"*Sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak secara formal, PERUSAHAAN meminta dokumen – dokumen yang disebutkan di bawah untuk diajukan kepada PERUSAHAAN dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Letter of Award ini …"*

(8) Berdasarkan Letter of Award tersebut, Terlapor III selanjutnya menerbitkan serta mengirimkan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, yaitu: ------

a. Performance Bond ----------
   - Bank Garansi No 17/OJR/068/5418 tanggal 13 Feb 2017 yang diberikan kepada PC Muriah Ltd., didukung oleh surat pernyataan keaslian dari Bank BNI. ----------
   - Bank Garansi No 17/OJR/070/5510 tanggal 13 Feb 2017 yang diberikan kepada PC Ketapang II, didukung oleh surat pernyataan keaslian dari Bank BNI. ----------

b. Asuransi ----------
   - Surat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No.SD.094/513-1/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 mengenai Surat Keterangan *Cash Collateral* 10% atas nama PT Aquamarine Divindo Inspection.
   - Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 20 Februari 2017. ---------
   - Polis Asuransi Aquamarine dari PT Jasaraharja Putera No. 105001213021700019. ----------
   - Polis Asuransi Aquamarine dari PT Jasaraharja Putera No. 105000909021700019. ----------

c. *Letter of Acceptance*, sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 7 Februari 2017 perihal *Acknowledgement Receipt and Acceptance*. Penerbitan Letter of Acceptance ini telah sesuai dengan permintaan Terlapor I dan Terlapor II yang mensyaratkan *Letter of Acceptance* harus diterbitkan

sebelum tanggal 8 Januari 2017 pukul 14.00 WIB atau dalam waktu 3 (*tiga*) hari kerja sejak tanggal 6 Januari 2017 (Lampiran 7). ----------

(9) Harga penawaran Terlapor III sebesar Rp. 47.355.000.000,- disusun berdasarkan kompetensi Terlapor III dan dihasilkan dari efisiensi biaya dari faktor dekatnya lokasi pekerjaan tender ini dengan lokasi *workshop* Terlapor III, sehingga Terlapor III dapat menekan harga penawaran secara signifikan terutama pada komponen mobilisasi peralatan dan personil. ----------

(10) Terlapor III sendiri telah memiliki kantor dan *workshop* di Sidoarjo sejak tahun 2007, sehingga tuduhan bahwa Terlapor I dan Terlapor II sengaja mengatur ketentuan tender untuk memfasilitasi Terlapor III sangat tidak berdasar. Hal-hal tersebut telah Terlapor III jelaskan pada saat pemeriksaan sebagai berikut: ----------

32.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Apakah bisa dijelaskan komponen apa saja yang menimbulkan harga rendah?*
	Jawaban	*Karena, harga yang kami berikan sudah kompetitif.*
33.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Kantor pusat PT Aquamarine ini di Sidoarjo?*
	Jawaban	*Ya betul, sidoarjo. Sudah berkantor sejak 2007 disana, saya bergabung tahun 2013.*
34.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Seberapa penting lokasi tender dengan workshop?*
	Jawaban	*Yang terkait dengan PT Aquamarine, lokasi kami dekat dengan K3S yang dekat east java exploration area. Ada Kepodang, SAKA, ada Pertamina EP, ada PHEWMO, SANTOS, HCML, Kangean Energy.*

35.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Jadi lokasi mempengaruhi harga?*
	Jawaban	*Ya karena berkaitan dengan biaya transportasi mobilisasi dan demobilisasi dari peralatan.*
36.	*Pertanyaan Kuasa Hukum III*	*Sering juga kalah tender dari wilayah yang jauh dari workshop?*

	Jawaban	*Ya sering.*

(11) Faktanya, merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi pada tender-tender lain dimana banyak perusahaan atau kontraktor kalah tender karena memang lokasi kantor atau peralatannya jauh dari lokasi pekerjaan dimaksud. --

(12) Pada Tender ini pun, terdapat perusahaan lain yang juga berdomisili di Jawa Timur dan berlokasi lebih dekat dengan lokasi pekerjaan daripada Terlapor III, yaitu PT Jasalindo yang berdomisili di Komplek Pergudangan Margomulyo Jaya, Jalan Sentong Asri C6, Surabaya, Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Tender tidak memihak perusahaan mana pun.----------

(13) Lebih lanjut, sudah merupakan kewajiban Panitia Tender untuk mencari harga yang paling efektif dan efisien sehingga akan menjadi tidak masuk akal apabila keunggulan kompetitif lokasi dari Terlapor III dan/atu PT Jasalindo kemudian dipermasalahkan seolah-olah adalah suatu persekongkolan. Secara logika, justru adalah merupakan suatu persekongkolan apabila Panitia Tender malah memenangkan peserta tender dengan harga lebih tinggi karena biaya transportasi yang besar akibat lokasi yang lebih jauh. ----------

(14) Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut, maka dapat telah terbukti dan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang Tender karena Terlapor III mengajukan harga penawaran paling rendah dibandingkan peserta tender lainnya.Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dibandingkan peserta Tender lainnya.----------

b. Terlapor III merupakan peserta tender dengan nilai TKDN paling tinggi (83,80%) dibandingkan peserta tender lainnya. ----------

c. Peserta tender lain telah menerima keputusan Panitia Tender karena tidak ada yang mengajukan sanggahan.
d. Panitia Tender sudah seharusnya menetukan pemenang tender dengan mempertimbangkan factor efektifitas dan efisiensi, termasuk atas biaya. ----------

(15) Namun demikian, meskipun telah ditunjuk sebagai pemenang Tender, hingga saat ini Terlapor III belum pernah menandatangani kontrak dan tidak pernah melakukan pekerjaan dimaksud. Hal ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Terlapor III mengingat besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Terlapor III selama mengikuti tender ini. Hal ini akan Terlapor III uraikan lebih lanjut pada Bab VII Kesimpulan ini. ----------

(16) Berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta dan argumen tersebut maka telah jelas terbukti Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan didalam perkara ini. Oleh karena itu Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999. ----------

TERLAPOR III TERBUKTI TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO. 5/1999 KARENA TERLAPOR III TIDAK PERNAH BEKERJASAMA DENGAN TERLAPOR I DAN TERLAPOR II UNTUK MENGATUR TENDER ----------

(1) Terlapor III mohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, karena Terlapor III tidak pernah bekerjasama dalam bentuk apa pun dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk mengatur tender ini. ----------

(2) Sejak awal mengikuti Tender ini, Terlapor III sudah berkomitmen untuk bersaing secara sehat dengan peserta tender lainnya untuk memenangkan Tender ini,dan sebagaimana telah dijelaskan, Terlapor III selalu cermat dan berhati-hati dalam

mengikuti Tender dengan berusaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. -----

(3) Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi maupun kerjasama dalam bentuk apapun dan dengan cara apa pun untuk mempengaruhi keputusan Terlapor I dan Terlapor II dalam melaksanakan Tender ini. Seluruh keputusan dalam Tender ini merupakan ranah kewenangan dari Terlapor I dan Terlapor selaku Panitia Tender, sebagaimana telah dijelaskan oleh Terlapor III dalam pemeriksaan sebagai berikut: ----------

67.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan II*	*Apakah pihak Terlapor I pernah menghubungi anda atau presiden direktur anda untuk memenangkan tender ini?*
	Jawaban	*Tidak ada.*

(4) Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan, telah terbukti bahwa evaluasi yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II terhadap seluruh dokumen Pra Kualifikasi dan Dokumen Penawaran para peserta tender dilakukan melalui proses evaluasi yang objektif, transparan dan independen, sebagaimana diakui oleh Saksi Nizar Saputra (*vide B33*) : ----------

35.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Tolong ceritakan seperti apa proses evaluasi dokumen tender PT Aquamarine?*
	Jawaban	*Seperti biasa kami memeriksa dari dokumen peserta tender, baik equitment, kapal, administrasi dan lain-lainnya. Setelah melakukan evaluasi tersebut kami juga melakukan site visit kemasing-masing vendor untuk membuktikan benar mempunyai alat dan mereka qualified dalam pekerjaan, setelah itu hasilnya kamis serahkan kepada Panitia Tender.*
37.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Dari semua proses evaluasi tender apakah PT Aquamarine lolos dari semua persyaratan tersebut?*
	Jawaban	*Iya*
38.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Apakah ada catatan tersendiri?*
	Jawaban	*Tidak ada*
39.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Apakah benar harga dari PT Aquamarine yang paling rendah dan semuanya terpenuhi?*
	Jawaban	*Iya benar*

(5) Seandainya pun -*quod non*-dianggap telah terjadi ketidaksesuaian dalampelaksanaan tender ini, maka hal tersebut bukan merupakan bukti persekongkolanmelainkan hanya kesalahan administratif yang dilakukan oleh dan

merupakan ranah kewenangan Terlapor I dan Terlapor II selaku pemilik pekerjaan, dan bukan sama sekali dilakukan, berhubungan dengan atau dapat dipersalahkan kepada Terlapor III. ----------

(6) Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("Pedoman Pasal 22") pada Bab IV Angka 4.2., KPPU telah mengatur lingkup indikasi persekongkolan dalam tender. --------

(7) Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Bab IV Angka 4.2. tersebut dan sebagaimana telah dibuktikan selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat satu pun indikasi persekongkolan yang terpenuhi, yang dapat kami uraikan sebagai berikut: -------

INDIKASI PERSEKONGKOLAN		HASIL PEMERIKSAAN PERKARA
1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan: TIDAK TERPENUHI		
a.	Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang terbuka	Faktanya, proses Tender berlangsung terbuka dimana sejak pengumuman Tender, setiap perusahaan yang berminat dapat mendaftar dan mengikuti Tender.
b.	Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.	Faktanya, tidak ada pembatasan spesifikasi Tender. Jenis pekerjaan bersifat terbuka dan tidak mengarah kepada pelaku usaha pemasok tertentu. Peserta tender juga dapat menggunakan surat dukungan dari pihak ketiga untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
c.	Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya	Faktanya, ketentuan dan persyaratan Tender tidak bersifat membatasi dan tidak mengarah kepada perusahaan tertentu.
d.	Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa	Faktanya, Terlapor III tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor I dan Terlapor II. Selain itu Terlapor I dan Terlapor berada dalam pengawasan ketat dari SKK Migas, sehingga tida mungkin terdapat *conflict of*

		interest sebagaimana dimaksud.
e.	Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada nilai dasar lelang.	Faktanya, indikasi ini tidak terpenuhi karena uang jaminan didasarkan atas Bank Guarantee atau Performance Bond yang dapat dipenuhi oleh seluruh peserta tender.
f.	Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti	Faktanya, seluruh proses Tender dilaksanakan di kantor Terlapor I dan Terlapor yang beralamat di Talavera Suite 3rd Floor, Talavera Office Park II, Jalan Letjend. Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan. Pelaksanaan tender dilaksanakan secara terbuka dan seluruh informasi Tender disampaikan secara transparan.
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia: TIDAK TERPENUHI		
a.	Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.	Faktanya, Panitia Tender memiliki kualifikasi yang cukup dan sertifikasi kompetensi sebagai panitia tender berdasarkan ketentuan SKK Migasdan PTK 007 Rev 3.
b.	Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.	Faktanya, Terlapor III tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II.
c.	Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.	Faktanya, susunan dan kinerja Panitia Tender bersifat terbuka. Setiap tahapan dan keputusan Panitia Tender selalu disirkulasikan kepada seluruh calon peserta tender maupun peserta tender.
3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang: TIDAK TERPENUHI		
a.	Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.	Faktanya, tidak satu pun persyaratan dalam Dokumen Persyaratan Kualifikasi yang bersifat membatasi. Ketentuan yang dipersyaratkan masih relevan dengan *scope* pekerjaan, seperti izin usaha, pengalaman pekerjaan, sertifikat ISO, IMCA *Membership*, dan HSE.
b.	Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan	Faktanya, tidak ada kesepakatan apapun yang dilakukan oleh Terlapor III dengan pihak lain, baik secara horizontal dan vertikal. Terlapor III bertindak secara profesional dalam memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh Panitia Tender.

c.	Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.	Faktanya, tidak ada kesepakatan apapun yang dilakukan oleh Terlapor III dengan pihak lain, baik secara horizontal dan vertikal. Terlapor III bertindak secara profesional dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh Panitia Tender.
d.	Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan	Faktanya, Terlapor III lulus pada tahap Pra Kualifikasi karena seluruh dokumen yang diserahkan telah memenuhi syarat dan diterima oleh Panitia Tender, terutama untuk item pengalaman pekerjaan sejenis selama 7 tahun terakhir, sertifikat IMCA dan HSE. Berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi, Panitia Tender tidak pernah membatasi IMCA jenis apa, sehingga sertifikat IMCA ROV milik Terlapor III diterima oleh Panitia Tender.
		Selain itu, beberapa perusahaan pada tahap Pra Kualifikasi tidak lolos karena skor HSE yang tidak memenuhi standar minimum Panitia Tender. HSE menjadi poin vital pada Tender ini karena pekerjaan Tender ini tergolong resiko tinggi (*high risk*).
e.	Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.	Faktanya, Terlapor III tidak pernah menerima perlakuan khusus/istimewa dari Panitia Tender. Terlapor III selalu bertindak profesional dalam memenuhi persyaratan Tender dan tidak pernah mempengaruhi keputusan Panitia Tender. Faktanya, selain Terlapor III juga terdapat PT Cakrawala Amartha Jaya yang juga tidak memiliki sertifikat IMCA ROV dan *Diving*, namun dinyatakan lulus oleh Panitia Tender. Selain itu, tidak lolosnya Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara - PT Cahaya Karya Bhakti Samudera bukan dikarenakan sertifikat IMCA yang dimiliki PT Samudera Biru Nusantara hanya berjumlah 1 (satu) sertifikat, melainkan karena tidak lolos penilaian

		HSE.
f.	Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.	Faktanya, tidak ada persyaratan tambahan karena persyaratan kualifikasi telah jelas diatur didalam Dokumen Persyaratan Kualifikasi.
g.	Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).	Faktanya, Terlapor III tidak pernah menjadi pemegang saham di Terlapor I maupun Terlapor II.
4.	Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi: TIDAK TERPENUHI	Faktanya, Terlapor III maupun calon peserta tender lainnya merasa seluruh persyaratan yang diminta Panitia Tender merupakan persyaratan yang wajar demi menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik. Terlapor III juga mampu untuk memenuhi persyaratan IMCA Membership dengan menyerahkan sertifikat IMCA ROV dan diterima oleh Panitia Tender. Faktanya, beberapa perusahaan tidak lulus tahap Pra Kualifikasi bukan karena sertifikat IMCA, melainkan karena skor HSE yang dibawah nilai standar yang ditetapkan oleh Panitia Tender. HSE menjadi poin vital pada Tender ini karena pekerjaan Tender ini tergolong resiko tinggi (*high risk*).
5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang: TIDAK TERPENUHI		
a.	Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas	Faktanya, Pengumuman dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016. Masa pendaftaran dan pengambilan Dokumen Persyaratan Kualifikasi dari tanggal 26 Mei sampai dengan 31 Mei 2016. Selanjutnya dokumen kualifikasi harus dimasukkan paling lambat pada tanggal 3 Juni 2016. Dengan demikian terdapat jangka waktu yang cukup dan wajar bagi para calon peserta tender untuk mempersiapkan dokumen tender sejak pengumuman tender.
b.	Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja	Faktanya, pengumuman dilakukan dengan menguraikan

	dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.	scope dan jenis pekerjaan, jadwal pengambilan dokumen Pra Kualifikasi, dan pemasukan Dokumen Pra Kualifikasi secara jelas dan lengkap.
c.	Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.	Faktanya, pengumuman Tender dilakukan di media nasional terkemuka yaitu surat kabar Media Indonesia dan Republika. Terlapor III sendiri mengetahui informasi pengumuman ini dari situs www.tender-indonesia.com
d.	Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.	Faktanya, informasi yang ditampilkan dalam pengumuman tender dilakukan secara detail dan terperinci, sehingga calon peserta tender mempunyai informasi yang cukup dalam menyiapkan dokumen Pra Kualifikasi.
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang: TIDAK TERPENUHI		
a.	Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.	Faktanya, Terlapor III maupun seluruh calon peserta tender mendapatkan informasi dan Dokumen Persyaratan Kualifikasi yang sama.
b.	Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.	Faktanya, Terlapor III maupun seluruh peserta tender memiliki waktu yang cukup untuk mengambil Dokumen Persyaratan Kualifikasi selama 5 (lima) hari kerja, yaitu dari tanggal 26 Mei sampai dengan 31 Mei 2016.
c.	Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.	Faktanya, infromasi tempat pengambilan Dokumen Persyaratan Kualifikasi telah jelas diumumkan yaitu di kantor Terlapor I dan Terlapor II yang beralamat di Talavera Suite 3rd Floor, Talavera Office Park II, Jalan Letjend. Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan.
d.	Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.	Faktanya, tidak terjadi pergantian atau perubahan jadwal pengambilan Dokumen Persyaratan Kualifikasi.
7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang: TIDAK TERPENUHI		
a.	Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar	Faktanya, Terlapor III tidak pernah terlibat dalam

	atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.	penyusunan HPS atau OE. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OE ditentukan oleh pihak *user*berdasarkan *market survey* dan nilai kontrak pekerjaan sejenis sebelumnya.
b.	Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.	Faktanya, OE bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada peserta tender, hingga tahap pembukaan penawaran (sampul kedua).
c.	Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.	Faktanya, Terlapor III tidak terlibat dalam penyusunan OE karena merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II. Berdasarkan pemeriksaan, OE disusun oleh Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan *market survey* dan nilaikontrak pekerjaan sejenis sebelumnya. OE ditetapkan langsung oleh President Director Terlapor I dan Terlapor II.

8.	Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau *open house* lelang: TIDAK TERPENUHI	
a.	Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.	Faktanya, seluruh informasi terkait Tender ini dilakukan secara terbuka karena Terlpaor I dan Terlapor II selalu mencatat *minutes of meeting* ataupun berita acara klarifikasi dan menginformasikannya kepada seluruh peserta tender. Terlapor I dan Terlapor II juga selalu terbuka terhadap pertanyaan dan klarifikasi dari pserta tender.
b.	Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta tender lainnya tidak dapat menyetujuinya.	Faktanya, seluruh peserta tender memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi terhadap persyaratan Pra Kualifkkasi maupun persyaratan dalam ITB. Pada saat tahap penawaran, klarifikasi dari Panitia Tender juga telah diterima, disetujui, dan diketahui oleh seluruh peserta tender.
c.	Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.	Faktanya, Panitia Tender bekerja secara terbuka. Seluruh informasi dan klarifikasi atas pertanyaan peserta tender selalu diinformasikan kepada seluruh peserta tender (*symetric information*).

d.	Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan dengan Panitia	Faktanya, Terlapor III tidak pernah melakukan pertemuan tertutup atau kerjasama, atau bentuk komunikasi ilegal lainnya dengan Panitia Tender.

9. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang: TIDAK TERPENUHI		
a.	Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu	Faktanya, tidak ada Dokumen Penawaran yang dimasukkan melebihi, jangka waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender yaitu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB. Terlapor III sendiri memasukkan Dokumen Penawaran pada tanggal 19 Oktober 2016 sebelum pukul 14.00 WIB. Dokumen Penawaran Terlapor III diterima oleh Panitia Tender.
b.	Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.	Faktanya, hal ini tidak terjadi karena Terlapor III tidak pernah berhubungan maupun bekerjasama dengan peserta tender lainnya. Terlapor III menyusun dan memasukkan Dokumen Penawaran secara mandiri dan terpisah dari dokumen peserta tender lainnya.
c.	Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.	Faktanya, Terlapor III telah dinyatakan lulus tahap Pra Kualifikasi sehingga berhak untuk mengikuti tahap penawaran (*bidding*).
d.	Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.	Faktanya, tidak ada penyesuaian harga karena Terlapor III tidak pernah mengetahui nilai OE dan tidak pernah bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam menyusun harga penawaran.
e.	Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.	Faktanya, Panitia Tender telah memberikan kelonggaran waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan memperpanjang jangka waktu menjadi tanggal 19 Oktober 2016. Perubahan jadwal ini disirkulasikan

		kepada seluruh peserta tender, sehingga seluruh peserta tender mengetahui perubahan jadwal dan dapat mengikuti proses tender.
10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang : TIDAK TERPENUHI		

a.	Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.	Faktanya, Tender ini bukan merupakan tender ulangan. Perusahaan yang lolos tahap Pra Kualifikasi merupakan peserta tender yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi sehingga dapat mengikuti proses penawaran (*bidding*).
b.	Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.	Faktanya, Tender ini bukan merupakan tender ulangan. Selain itu harga penawaran Terlapor III merupakan harga paling rendah dibandingkan dengan peserta tender lainnya karena jarak workshop milik Terlapor III dekat dengan lokasi pekerjaan sehingga Terlaor III mampu menekan harga penawaran terutama untuk item mobilisasi peralatan dan personil.
c.	Para peserta/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.	Faktanya, harga penawaran para peserta tender sangat bervariatif sehingga menunjukkan adanya persaingan yang fair.
d.	Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.	Faktanya, Tender ini bukan merupakan tender ulangan.

e.	Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.	Faktanya, Terlapor III tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus dari Panitia Tender. Surat dukungan IMCA *Diving* dari PT SBNmaupun bentuk surat dukungan untuk kapal tidak dilarang oleh Panitia Tender. Seluruh peserta tender mendapatkan perlakuan yang sama, yang tidak hanya mencakup evaluasi dokumen tetapi Panitia Tender juga melakukan inspeksi peralatan dan personil dari seluruh peserta tender.
f.	Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.	Faktanya, Dokumen Penawaran Terlapor III disusun sendiri sehingga tidak mirip dengan dokumen milik peserta tender lainnya.
g.	Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.	Faktanya, Dokumen Penawaran tetap berada pada amplop yang tertutup hingga saat dilakukan evaluasi oleh Panitia Tender

		sehingga tidak mungkin untuk ditukar ataupun dimodifikasi oleh Panitia Tender.
h.	Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.	Faktanya, Terlapor III tidak pernah mengetahui proses evaluasi dokumen dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, kecuali hasil evaluasi yang selalu diberitahukan kepada seluruh peserta lainnya. Selain itu, Panitia Tender telah melakukan evaluasi terbuka dengan inspeksi lapangan dan mengunjungi langsung kantor perwakilan peserta tender dan memeriksa kelengkapan personil dan kelayakan kapal yang akan digunakan.
i.	Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.	Faktanya, tender ini bukan merupakan tender ulangan.
11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang : TIDAK TERPENUHI		
a.	Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksmili dengan nama pengirim yang kurang jelas.	Faktanya, Terlapor III mengirimkan hasil pembukaan penawaran (sampul kedua) kepada semua peserta tender, untuk memberikan kesempatan mengajukan sanggahan. Demikian juga Panitia Tender memberitahukan informasi penetapan Terlapor III sebagai pemenang tender secara jelas kepada seluruh peserta tender lain yang gagal dalam proses penawaran.
b.	Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.	Faktanya, pengumuman pemenang tender merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II dan telah dilakukan sesuai dengan jadwal.
c.	Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.	Faktanya, tender ini bukan merupakan tender ulangan. Selain itu Terlapor III baru pertama kali memenangkan tender di Terlapor I dan Terlapor II.
d.	Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.	Faktanya, tender ini bukan merupakan tender ulangan. Selain itu Terlapor III baru pertama kali memenangkan tender di Terlapor I dan Terlapor II.

e.	Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.	Faktanya, harga penawaran Terlapor III merukan penawaran paling rendah karena Terlapor III mampu menekan biaya mobilisasi peralatan dan personel dikarenakan dekatnya lokasi pekerjaan dengan lokasi *worksop* Terlapor III.

12. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak : TIDAK TERPENUHI		
a.	Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang	Faktanya, Terlapor I dan Terlapor bersifat terbuka dan selalu menanggapi pertanyaan maupun klarifikasi dari peserta tender tanpa terkecuali. Hal ini termasuk memberikan klarifikasi/jawaban terhadap sanggahan yang diajukan oleh PT Advance Offshore Services.
b.	Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan dan hasil evaluasi.	Faktanya, Panitia Tender selalu bersifat terbuka dengan menginformasikan seluruh informasi, klarifikasi dan keputusan Panitia Tender kepada seluruh peserta tender
13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/ulang dan penandatanganan kontrak : TIDAK TERPENUHI		
a.	Surat penunjukkan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.	Faktanya, hingga masa sanggah berakhir tidak ada peserta tender yang mengajukan sanggahan. Sehingga kemudian Terlapor I dan Terlapor II menerbitkan *Letter of Award* kepada Terlapor III pada tanggal 6 Februari 2017.
b.	Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Faktanya, surat penunjukkan Terlapor III sebagai pemenang tidak pernah mengalami penundaan oleh Terlapor I dan Terlapor II.
c.	Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.	Faktanya, *Letter of Award* No. 11/PCML/OPS/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah lengkap dan disertai ketentuan yang mengharuskan Terlapor III untuk menerbitkan *Letter of Acceptance* dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti asuransi, *performance bond* dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal *Letter of Award*.

d.	Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.	Faktanya, Terlapor III belum pernah menandatangani kontrak apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II.
e.	Penandatanganan kontrak	Faktanya, Terlapor III belum

	dilakukan secara tertutup.	pernah menandatangani kontrak apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II.
f.	Penandantangan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.	Faktanya, Terlapor III belum pernah menandatangani kontrak Tender ini. Penundaan kontrak dilakukan secara sepihak oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan alasan adanya perkara KPPU ini. Sementara itu, Terlapor III terus meminta kejelasan pelaksanaan pekerjaan Tender ini mengingat Terlapor III telah mengeluarkan biaya yang besar selama mengkuti proses Tender.
14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan: TIDAK TERPENUHI		
a.	Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut.	Faktanya, tender ini belum pernah dilaksanakan. Selain itu Surat Dukungan IMCA *Diving* dari PT SBN bukan merupakan bentuk sub kontrak.
b.	Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan.	Faktanya, tender ini belum pernah dilaksanakan sehingga Terlapor III belum dapat memenuhi kewajibannya selaku pemenang Tender.
c.	Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Faktanya, tender ini belum pernah dilaksanakan sehingga Terlapor III belum dapat memenuhi kewajibannya selaku pemenang Tender.

(8) Berdasarkan uraian Pedoman Pasal 22 tersebut di atas, maka telah jelas terbukti bahwa tidak ada indikasi persekongkolan tender dalam pelaksanaan Tender ini. Selanjutnya Pedoman Pasal 22 pada bagian 4.2., KPPU juga telah menjelaskan bahwa indikasi-indikasi persekongkolan tender tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dapat dibuktikan secara hukum dalam pemeriksaan KPPU, sebagai berikut: ----------

"*Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.*"

(9) Pada kenyataannya, berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor III. Seluruh bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa tidak terjadi

persekongkolan tender dan Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender berdasarkan proses tender yang fair. ----------

(10) Berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas terbukti bahwaTerlapor III tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor I dan Terlapor II. Atas dasar alasantersebut maka Terlapor III mohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor III tidak bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

TERLAPOR III TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5/1999 KARENA UNSUR "MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER" DALAM PERKARA INI BELUM TERPENUHI ----------

(1) Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/199, yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara."

(2) Merujuk pada Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999, pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender dapat dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. ----------

(3) Dalam persidangan telah terbukti bahwa Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender dikarenakan memang kualifikasi yang dimiliki oleh Terlapor III baik Teknis maupun Komersial merupakan yang terbaik sesuai dengan hasil evaluasi dari Panitia Tender, sebagaimana telah Terlapor III uraikan pada Kesimpulan Bab III. B, III C, dan III D di atas. ----------

(4) Lebih lanjut, tidak ada satupun persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang sengaja diatur untuk memudahkan Terlapor III menjadi pemenang tender. Kalaupun ternyata, diterimanya Surat Dukungan (*Letter of Support*) atas sertifikat IMCA *Diving* yang Terlapor III ajukan merupakan indikasi persekongkolan (*quod non*), maka seluruh peserta tender juga patut di indikasikan telah melakukan

persekongkolan dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II karena seluruh peserta tender juga menggunakanSurat Dukungan untuk memenuhi persyaratan IMCA Membership dan/atau kepemilikan Kapal. ----------

(5) Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi Nizar Saputra dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: (*vide* B33) ----------

25.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Apakah supporting letter itu diperbolehkan dalam tender bentuknya seperti apa?*
	Jawaban	*Ya biasa terjadi, menggunakan supporting letter. Bentuknya seperti surat, konsultan teknis dan peralatan (equipment).*

26.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Jadi pada prakteknya dapat diterima supporting letter tersebut?*
	Jawaban	*Iya bisa.*
27.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I dan Terlapor II*	*Selain supporting letter dalam IMCA, supporting letter apa saja yang tersedia dalam tender ini?*
	Jawaban	*Pada tender ini ada supporting letter kapal. Karena ada perusahaan yang tidak punya kapal sendiri. Kita juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi peserta tender supaya bisa berpartisipasi bagi semuanya dalam tender ini.*

Sepanjang proses tender yang dilakukan oleh Terlapor III tidak ada satupun tindakan Terlapor III yang merupakan bentuk pengaturan dalam menentukan pemenang tender. Karena Terlapor III tidak pernah menghubungi dan/atau mempengaruhi Panitia Tender (Terlapor I dan/atau Terlapor II) untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor III sebagai pemenang Tender. ---

(6) Berdasarkan pemeriksaan pada persidangan yang telah dilakukan, tidak ada satu pun bukti yang membuktikan bahwa telah ada pengaturan dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor III, yang kami uraikan secara lebih rinci sebagai berikut: ----------

TERKAIT DENGAN PERSYARATAN DALAM DOKUMEN TENDER, EXHIBIT I, ITEM 2.4.4 YANG MENYEBUTKAN "*THE CONTRACTOR IS TO BE AND IMCA MEMBER COMPANY*" ----------

(1) Bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Dokumen Tender (*Bid Document*) tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia yang mengadakan tender karena Terlapor III tidak sama sekali mengetahui dan/atau mempengaruhi panitia tender apalagi memiliki kewenangan dalam menentukan *Bid Document*.

(2) Fakta bahwa Terlapor III sudah menjadi anggota IMCA kategori ROV dan sedang mengurus pendaftaran keanggotaan untuk menjadi anggota IMCA kategori *Diving* dengan syarat yang ditetapkan Terlapor I dan II dalam Dokumen Tender TIDAK ADA kaitannya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa terdapat persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor I dan II. Aplikasi untuk keanggotaan IMCA kategori *Diving* telah dilakukan oleh Terlapor III jauh sebelum adanya proses tender ini. Terlebih lagi, kewenangan untuk menentukan lolos atau tidaknya Terlapor III dalam tender adalah mutlak berada pada Terlapor I dan II. ----------

TERKAIT DENGAN PERSYARATAN WORKSHOP ATAU KANTOR PERWAKILAN YANG BERLOKASI DI SEKITAR JAWA TIMUR SEBAGAI GUDANG PENYIMPANAN *TOOLS AND EQUIPMENT OF NDT AND INSPECTION SERVICES* ----------

(1) Terlapor III secara tegas membantah dalil – dalil Tim Investigator tersebut karena dalil tersebut adalah sangat mengada – ada. Tidak ada satupun dalam Dokumen Tender maupun Klarifikasi terhadap Dokumen Tender yang mensyaratkan agar peserta tender memiliki workshop atau kantor perwakilan yang berlokasi di Jawa Timur. ----------

(2) Fakta bahwa Terlapor III memiliki workshop atau kantor yang berlokasi di Jawa Timur TIDAK dapat disimpulkan sebagai persekongkolan, karena Terlapor III yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 9 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Aris Hilmi, S.H., sudah berdomisiili di Sidoarjo, Jawa Timur dan memiliki lokasi kerja di Sidoarjo sejak Terlapor III didirikan. ----------

(3) Terlebih lagi, lokasi pelaksanaan pekerjaan Tender berada di wilayah Terlapor I dan II yang berlokasi di sekitar Jawa Timur, sehingga untuk mencapai efektifitas dan efisiensi adalah hal yang sangat wajar apabila lokasi titik keberangkatan (*Point of Hire)*, tempat asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) yang ditetapkan oleh Terlapor I dan II adalah di wilayah sekitar Jawa Timur. ----------

(4) Selain itu, telah terbukti di persidangan bahwa terdapat peserta tender lainnya yang berlokasi di wilayah Jawa Timur yaitu PT Cakrawala Amartha Jaya dan PT Jasalindo, sebagaimana diterangkan dalam keterangannya di persidangan yang dikutip sebagai berikut: ----------

Saksi PT Cakrawala Amartha Jaya (vide B7):----------

29.	*Pertanyaan Investigator*	*Jika anda lolos, rencana membuat dimana?*
	Jawaban	*Kami ada di Romo Kalisari di Surabaya, Jawa Timur. Kebetulan saya existing dengan SAKKA dan WMO. Semua mobilisasi di wilayah Gresik.*

Saksi Konsorsium PT Jasalindo – PT Warna Triendo (vide B27): -

4.	*Pertanyaan Investigator*	*Bisa dijelaskan company profile dan bidang perusahaan saksi?*
	Jawaban	*PT Jasalindo : Head office kami di Surabaya, kami bergerak di bidang underwater services. Jumlah karyawan kami di Surabaya kami ada 45 karyawan, termasuk diver…*

(5) Dengan demikian terbukti bahwa penetapan lokasi titik keberangkatan (*Point of Hire)*, tempat asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) yang ditetapkan oleh Terlapor I dan II di wilayah sekitar Jawa Timur bukanlah bentuk ataupun indikasi persekongkolan dengan Terlapor III. ----------

TERKAIT EVALUASI PERSYARATAN KEANGGOTAAN IMCA YANG DILAKUKAN OLEH TERLAPOR I DAN TERLAPOR II ----------

(1) Tim Investigator pada halaman 16 dan 17 LDP dan Analisis Dugaan Pelanggaran Bagian C Huruf c halaman 32 – 33 LDP pada intinya mendalilkan bahwa Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender padahal Terlapor III tidak memiliki sertifikat IMCA kategori *Diving*, sebagaimana disyaratkan pada dokumen tender. ----------

(2) Dalil-dalil Tim Investigator tersebut sangatlah tidak berdasar karena pada faktanya, Terlapor III telah memenuhi seluruh persyaratan Tender baik dalam Tahap Prakualifikasi, Evaluasi Teknis, Komersial sampai dengan Penunjukkan Pemenang Tender, sehingga keputusan Terlapor I dan Terlapor II yang menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender adalah tepat dan beralasan. ----------

(3) Mengenai persyaratan keanggotaan IMCA pada seluruh tahapan Tender akan Terlapor III uraikan sebagai berikut: ----------

Tahap Tender	Dokumen Tender	Persyaratan sertifikasi IMCA	Pemenuhan oleh Terlapor III
Pra Kualifikasi	Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender	Butir 3 Halaman 7 : "*Persyaratan Teknis :* *PEMOHON wajib menyediakan dan menyerahkan dokumen – dokumen berikut :* … - *Melampirkan Salinan keanggotaan dari IMCA Membership.*"	Terhadap persyaratan ini, Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor II) tidak secara spesifik menentukan keanggotaan IMCA jenis apa yang harus dimiliki oleh peserta tender. Oleh karena itu, Terlapor III mengajukan sertifikat keanggotaan IMCA kategori ROV yang telah dimiliki oleh Terlapor III.
Proses Tender	Instruction to Bidder – Exhibit I – Special Provision and Scope of Work.	Halaman 13, butir 2.4.4 : *"The Contractor is to be and IMCA member company."*	Dokumen ini diambil oleh Terlapor III pada kurun waktu tanggal 21 – 22 September 2016.
Tahap Klarifikasi Dokumen Tender	Tender Clarification #02 tanggal 7 Oktober 2016.	Terdapat pertanyaan dari PT Advance Offshore Services kepada Panitia Tender mengenai keanggotaan IMCA, yang dikutip sebagai berikut : *"Bidder request Company to confirm that Bidder must be IMCA member in Diving Division "Contractor Category"* Dimana terhadap pertanyaan tersebut, Panitia Tender memberikan klarifikasi : "*Bidder of Member IMCA ROV and Diving"*	Berdasarkan Tender Clarification #02 tersebut, Terlapor III berusaha untuk memenuhi persyaratan keanggotaan IMCA yang ditetapkan, yaitu IMCA kategori ROV dan *Diving*. Dikarenakan Terlapor III tidak memiliki sertifikasi IMCA kategori *Diving*, maka untuk memenuhi persyaratan keanggotaan IMCA yang ditetapkan oleh Panitia Tender tersebut, Terlapor III menggunakan Surat Dukungan dari PT SBN tertanggal 18 Oktober 2016, yang Terlapor III ajukan bersama – sama dengan pengumpulan dokumen tender pada tanggal 19 Oktober 2016.

(4) Surat Dukungan dari PT SBN tanggal 18 Oktober 2016, Terlapor III ajukan semata – mata sebagai bentuk usaha dari Terlapor III untuk memenuhi persyaratan tender. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan sebagaimana didalilkan Tim Investigator karena segala keputusan mengenai evaluasi atas kelengkapan dokumen teknis dari Terlapor III sebagai peserta tender MURNI merupakan kewenangan dari Terlapor I dan Terlapor II.----------

(5) Bahwa penggunaan Surat Dukungan dari PT SBN dilakukan oleh Terlapor III karena di dalam industri jasa inspeksi bawah laut terkait pertambangan minyak dan gas adalah lazim dan hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku usaha. Oleh karenanya, untuk memenuhi persyaratan keanggotaan IMCA kategori *Diving* yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender, Terlapor III menggunakan Surat Dukungan dari PT SBN. ----------

(6) Lebih lanjut, Surat Dukungan IMCA kategori *Diving* diterbitkan oleh PT SBN kepada Terlapor III pada tanggal 18 Oktober 2016, yaitu setelah Konsorsium PT Cahaya Karya Bhakti Samudera – PT Samudera Biru Nusantara dinyatakan tidak lolos tahap prakualifikasi oleh Panitia Tender. ----------

(7) Adapun alasan yang menyebabkan tidak lolosnya Konsorsium PT Cahaya Karya Bhakti Samudera – PT Samudera Biru Nusantara dikarenakan skor penilaian HSE yang tidak memenuhi standard, BUKAN dikarenakan tidak sahnya sertifikat IMCA yang dimiliki oleh PT SBN. Sehingga hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran terhadap ketentuan PTK 007 Rev. 03.---------

TERKAIT TERLAPOR I DAN TERLAPOR II MENERAPKAN STANDAR GANDA DALAM MENILAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN IMCA ------

(1) Pada Laporan Dugaan Pelanggaran butir e.1 halaman 34, Tim Investigator mendalilkan: ----------

> "*Bahwa diketahui Konsorsium PT SBN – PT Cakrabhasa tidak lulus prakualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan Keanggotaan IMCA karena hanya memiliki satu Sertifikat Keanggotaan IMCA untuk kategori Diving.*"

(2) Pada faktanya telah terbukti di persidangan bahwa Sertifikat keanggotaan IMCA kategori *Diving* milik PT SBN tersebut masih berlaku dan masih valid atau sah pada saat tender dilaksanakan (tahun 2016).----------

(3) Alasan yang menyebabkan Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cakrawala Bhakti Samuderatidak lolos tahap prakualifikasi bukanlah dikarenakan hanya memiliki 1 (satu) Keanggotaan IMCA, melainkan karena Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara– PT Cakrawala Bhakti Samudera tidak memenuhi standar penilaian HSE. Terlebih lagi, pada tahap Prakualifikasi hanya mensyaratkan keanggotaan IMCA, sehingga walaupun peserta hanya memiliki 1 (satu) keanggotaan IMCA, maka hal tersebut dapat diterima oleh Panitia Tender. ----------

(4) Oleh karena Konsorsium PT Samudera Biru Nusantara – PT Cakrawala Bhakti Samuderatelah dinyatakan tidak lolos tahapan Pra Kualifikasi dan IMCA kategori *Diving* milik PT SBN adalah sah dan masih berlaku, maka penerbitan Surat Dukungan tertanggal 18 Oktober 2016 kepada Terlapor III pada tahap tender adalah sah dan tidak dilarang oleh PTK 007 Rev. 3.

TERKAIT SURAT DUKUNGAN IMCA DIVING PT SBN KEPADA TERLAPOR III BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN IMCA----------

(1) Pada halaman 33 Laporan Dugaan Pelanggaran, Bagian C huruf d, Tim Investigator telah melakukan kekeliruan yang fatal yang mengartikan bahwa penerbitan Surat Dukungan merupakan bentuk “Pengalihan” atau “Transfer” atas keanggotaan IMCA kategori *Diving* milik PT SBN kepada Terlapor III.----------

(2) Penafsiran Tim Investigator yang demikian merupakan penafsiran yang keliru dan salah karena pada faktanya, penerbitan surat dukungan tersebut bukanlah pengalihan keanggotaan IMCA dari PT SBN kepada Terlapor III, karena dengan diterbitkannya Surat Dukungan IMCA kategori *Diving* tidak secara otomatis menjadikan Terlapor III menjadi anggota IMCA untuk kategori *Diving*.----------

(3) Lebih lanjut, penerbitan surat dukungan oleh PT SBN tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Terlapor III dan PT SBN tanggal 19 Oktober 2016 (*vide* Dokumen C41), dimana berdasarkan perjanjian tersebut telah secara tegas diatur bahwa bentuk kerja sama atau dukungan yang diberikan oleh PT SBN adalah konsultasi teknis sehubungan dengan Prosedur IMCA Kategori *Diving*, yang dikutip sebagai berikut: ---

> *"… that SBN is willing to assist and to support Aquamarine for technical consultancy whenever needed by Aquamarine for any procedures and standards to be implemented with reference to Diving Standards of IMCA D018, 023 and 040 (whichever applicable)…"*
> Terjemahan bebas:
> *"… SBN bersedia untuk membantu dan mendukung Aquamarine untuk memberikan konsultasi teknis kapanpun dibutuhkan oleh Aquamarine sehubungan terhadap segala prosedur dan standard yang perlu untuk diterapkan sesuai dengan Standard Diving dari IMCA D018, 023 dan 040 (yang mana yang diberlakukan) …"*

(4) Sebagaimana juga dijelaskan oleh PT SBN (yang diwakili oleh Direktur nya, Michael Wilson Tinangon), pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Maret 2018, yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II	*Seperti apa tindakan anda saat memberikan surat dukungan?*
Jawaban	*Kami berikan konsultasi tentang peralatan dan tenaga ahli. Namun ada juga mereka hanya konsultasi saja dan kami mendapatkan fee.*

Pertanyaan Terlapor III	*Dalam kerjasama anda dengan aquamarine seperti apa?*
Jawaban	*Saya hanya memberikan konsultasi, tidak ada kami memberikan alat ataupun personel dalam tender ini. Yang penting alat milik aquamarine sesuai dengan IMCA, saya ikut terlibat dalam memberikan daily maintenance dan monthly maintenance*

(5) Dengan demikian terbukti bahwa, penerbitan Surat Dukungan oleh PT SBN bukan merupakan pengalihan keanggotaan IMCA dari PT SBN kepada Terlapor III, melainkan hanyalah pemberian dukungan dalam bentuk konsultasi sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan *Diving* oleh Terlapor III dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedur IMCA.----------

(6) Lebih lanjut, peralatan Terlapor III telah dinyatakan Panitia Tender memenuhi standar keamanan IMCA yang berlaku berdasarkan sertifikat audit dari SS Subsea Pte. Ltd. nomor CERT/AIR/16/0101 (Lampiran 5) dan sertifikat SO-1111-000059 dari Sea and Land Technologies Pte. Ltd. (Lampiran 6). Selain itu, pelaksanaan pekerjaan *Diving* sepenuhnya menggunakan sumber daya dari Terlapor III dengan konsultasi dan supervisi dari PT SBN sesuai dengan yang diatur dalam Surat DukunganIMCA *Diving* PT SBN. ----------

TERKAIT PENILAIAN PANITIA KEPADA SURAT DUKUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH PT SBN KEPADA TERLAPOR III SEBAGAI PEMENANG TENDER ----------

(1) Sebagaimana telah Terlapor III uraikan, bahwa diterimanya Surat Dukungan atas sertifikat IMCA *Diving* yang Terlapor III tidak dapat diartikan sebagai persekongkolan. Karena pada faktanya, Terlapor I dan Terlapor II menerima seluruh Surat Dukungan yang diajukan oleh Peserta Tender lainnya, baik untuk dukungan terkait dengan kepemilikan Kapal maupun keanggotaan IMCA. ----------

(2) Adapun peserta tender selain dari Terlapor III yang juga mendapatkan Surat Dukungan dari perusahaan lain dan/atau sesama peserta tender adalah: ----------

a. PT Advanced Offshore Services ----------
   i. Surat Dukungan dari PT Bayu Maritim Berkah No. 650.MBM-MKT/LOS/X-16 tanggal 3 Oktober 2016. -----
   ii. Surat Dukungan dari PT Logindo Samudramakmur, Tbk. No. 247/BD-LOG/X/16 tanggal 11 Oktober 2016.-
   iii. Surat Dukungan dari PT Wintermar Offshore Marine Group No. 3365/A.10/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

b. PT Patra Dinamika ----------
   i. Surat Dukungan dari PT Wintermar Offshore Marine Group tanggal 12 Oktober 2017. ----------
   ii. Surat Dukungan dari PT Tridaya Patra Marine No. LO 113/TPM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.----------

iii. Surat Dukungan dari PT Pageo Utama No. PQ-343-I Rev. 0 tanggal 5 Oktober 2016. ----------

c. PT Cakrawala Amartha Jaya ----------

Surat Dukungan dari PT Jaya Salvage Indonesia (JASALINDO) No. 023-JKT/ADM-SL/X/16 tanggal 7 Oktober 2016. ----------

(3) Terlebih lagi, Surat Dukungan terkait dengan keanggotaan IMCA tidak hanya diajukan oleh Terlapor III melainkan juga telah diajukan oleh PT Cakrawala Amartha Jaya yang memperoleh surat dukungan dari PT Jasalindo, sebagaimana diterangkan oleh Saksi PT Cakrawala Amartha Jaya: ----------

37	*Pertanyaan Terlapor I dan Terlapor II*	*Tadi anda menyatakan adalah suatu biasa terkait disupport dan mensupport, anda pernah minta surat dukungan pada PT Jasalindo?*
	Jawaban	*Saat itu ROV saya punya, untuk IMCA Diving nya saya minta support pada PT Jasalindo.*

(4) Dengan demikian, apabila penerimaan Surat Dukungan oleh Terlapor I dan Terlapor II dianggap sebagai bentuk atau indikasi adanya persekongkolan, maka seharusnya, Tim Investigator juga menarik PT Advance Offshore Services, PT Patra Dinamika dan PT Cakrawala Amartha Jaya sebagai Terlapor dalam Perkara ini, karena Terlapor I dan Terlapor II menerima Surat Dukungan yang diajukan oleh mereka.----------

(5) Perlu Terlapor III sampaikan bahwa seandaianya pun penggunaan Surat Dukungan tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan tender (*quod non* – hal mana ditolak), hal tersebut adalah kesalahan administrative merupakan tanggung jawab dari Terlapor I dan Terlapor II sebagai penyelenggara/panitia tender. Keputusan untuk menerima atau menolak Surat Dukungan yang diajukan oleh Terlapor III sebagai peserta tender murni merupakan pertimbangan dari Panitia Tender, sehingga kesalahan dan tanggung jawab dari Panitia Tender tidak dapat dibebankan kepada Terlapor III. ----------

TERKAIT OWNER ESTIMATE DAN HARGA PENAWARAN PEMENANG TENDER ----------

(6) Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun dalam proses tender. Faktanya, OE disusun oleh Panitia Tender secara independen melalui *market survey* dan bersifat rahasia.----------

(7) Terlapor III tidak tahu menahu nilai OE sampai pada saat pembukaan penawaran komersial (sampul kedua), sesuai dengan ketentuan PTK 007 Rev. 3. ----------

(8) Harga penawaran Terlapor III disusun secara mandiri dengan mempertimbangkan kompetensi dan faktor lokasi pekerjaan yang berjarak tidak jauh dari kantor Terlapor III sehingga dapat menekan komponen harga mobilisasi dan harga penawaran, dan pada faktanya Harga Penawaran Terlapor III merupakan harga terendah karena memang Terlapor III memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan peserta tender lainnya.----------

(9) Penetapan lokasi Titik Keberangkatan (*Point of Hire*), Tempat Asal (*Point of Origin*) dan Titik Penyerahan (*Point of Delivery*) yang berada di wilayah Jawa Timur yang merupakan salah satu faktor penetapan harga penawaran peserta tender ditetapkan berdasarkan lokasi operasi Terlapor I dan Terlapor II yang membutuhkan Pekerjaan Tender di wilayah Jawa Timur.---------

(10) Selain itu, telah terbukti bahwa selain Terlapor III, terdapat peserta tender lainnya yang berlokasi ataupun memiliki *workshop* di wilayah Jawa Timur yaitu PT Cakrawala Amartha Jaya dan PT Jasalindo, sebagaimana diterangkan di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.----------

KONTRAK PEKERJAAN BELUM DITANDATANGANI, PELAKSANAAN PEKERJAAN BELUM DIMULAI DAN BAHKAN TENDER DIBATALKAN SERTA DILAKUKAN PENGUMUMAN TENDER ULANG SEHINGGA TERLAPOR III BUKANLAH PEMENANG TENDER DAN TIDAK ADA KEUNTUNGAN YANG DINIKMATI OLEH TERLAPOR III DALAM HAL INI

(1) Terlapor III membantah dan menolak seluruh tuduhan persekongkolan didalam LDP karena faktanya pekerjaan Tender ini belum pernah dilaksanakan oleh Terlapor III sehingga secara

hukum salah satu unsur Pasal 22 UU No.5/1999 yaitu unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang tender" tidak terpenuhi. ----------

(2) Pada faktanya, sampai dengan saat ini, Terlapor I dan Terlapor II belum juga memberikan Kontrak Pekerjaan kepada Terlapor III dan oleh karenanya, Pekerjaan sehubungan dengan Tender belum pernah dilakukan oleh Terlapor III, hal ini sebagaimana secara tegas diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II pada pemeriksaan di persidangan tanggal 25 Juli 2018, yang dikutip sebagai berikut: ----------

Pertanyaan Terlapor III	*Untuk LOA (Letter of Award) sudah disahkan?*
Jawaban	*Yang saya ketahui, LoA sudah disahkan. Namun kontrak sedang ditangguhkan karena persoalan tender ini.*
Pertanyaan Majelis Komisi	*Siapa yang menangguhkan tender ini?*
Jawaban	*Dari sudut pandang Petronas, kontrak ditangguhkan karena masih ada permasalahan tender ini di KPPU.*
Pertanyaan Terlapor III	*Jadi belum ada pekerjaan atau imbalan untuk PT Aquamarine?*
Jawaban	*Sepengetahuan saya, belum ada pekerjaan yang dikerjakan PT Aquamarine maka belum ada juga imbalan yang diberikan pada PT Aquamarine.*

(3) Terlebih lagi, berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Kontrak *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field Contract No. 4850000140 (Ex Tender No. 11204)* tanggal 7 September 2017 ("Berita Acara Rapat 7 September 2017") (Lampiran 8), terdapat fakta bahwa Petronas (Terlapor I dan Terlapor II) berkeinginan untuk menarik *Letter of Award* tanggal 6 Februari 2017 yang sudah dikeluarkan kepada Terlapor III dan tidak melanjutkan pelaksanaan Kontrak dan untuk selanjutnya Terlapor I dan Terlapor II berencana melakukan proses tender baru sesuai dengan PTK 007 Revisi 04.

(4) Bahwa ternyata kemudian, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Terlapor I dan Terlapor II mengumumkan pengadaan tender baru dengan jenis dan wilayah pekerjaan yang sejenis dengan Tender 11204, yaitu melalui Pengumuman tanggal 3 Februari 2018 dengan keterangan Pengumuman Lelang 11646 (Lampiran 9). ----------

(5) Fakta-fakta bahwa belum ditandatanganinya Kontrak Pekerjaan dan keinginan penarikan *Letter of Award* serta adanya Pengumuman Lelang 11646 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan bahwa Terlapor III belum melaksanakan Pekerjaan Tender 11204 dan oleh karenanya, belum mendapatkan imbalan apapun dari Terlapor I dan Terlapor II. Sehingga dapat disimpulkan unsur "mengatur dan atau menentukan pemenang tender" tidak terpenuhi dan oleh karenanya, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat agar menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999. ----------

TERLAPOR III TERBUKTI TIDAK MELANGGAR PASAL 22 UU NO.5/1999 KARENA TERLAPOR III TIDAK MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, DAN SEBALIKNYA TERLAPOR III JUSTRU TELAH MENGHASILKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEGIATAN USAHA----------

(1) Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999, definisi persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujuratau melawan hukumatau menghambat persaingan usaha.*"

(2) Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: ----------

a. Tidak ada persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang; dan
b. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

(3) Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 6 UU No.5/1999 tersebut tidak terbukti dalam perkara *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut: ----------

a. Selama proses Tender, kenyataannya masing-masing peserta tender saling bersaing secara ketat satu sama lain. Hal ini karena proses Tender dilaksanakan secara terbuka,

transparan dan *fair*. Seluruh peserta Tender memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk bersaing mengikuti Tender dengan mengikuti seluruh persyaratan Tender yang ada. ----

b. Panitia Tender *in casu* Terlapor I dan Terlapor II telah menginformasikan seluruh proses Tender dan keputusan Panitia Tender secara terbuka kepada calon *bidder* dan peserta tender, termasuk kepada Terlapor III. ----------

c. Panitia Tender *in casu* Terlapor I dan Terlapor II tidak menghambat hak peserta tender untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi terhadap ketentuan dan persyaratan Tender yang dianggap belum jelas. Setiap pertanyaan yang diajukan peserta tender telah dijawab oleh Panitia Tender dengan baik.----------

d. Panitia Tender *in casu* Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah menghambat hak peserta tender untuk mengajukan keberatan dan/atau sanggahan terhadap keputusan Panitia Tender.----------

e. Terlapor III tidak pernah menghambat persaingan usaha seperti menciptakan *entry barrier* maupun menghalangi peserta Tender lain. Lebih lanjut, Terlapor III sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi maupun kerjasama dalam bentuk apapun dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk menentukan pemenang Tender.----------

f. Terlapor III dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu bertindak secara patut dan tidak melawan hukum. Terlapor III selalu konsisten mematuhi seluruh prosedur dan persyaratan Tender dengan jujur. Terlapor III dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku, apalagi dengan mengingat status Terlapor III sebagai sebuah perusahaan yang memiliki reputasi baik di bidang *underwater construction* dan *marine services*.----------

(4) Lebih lanjut, harga penawaran dari Terlapor III merupakan harga paling rendah dalam Tender yang justru telah menghasilkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha terutama

bagi kegiatan usaha Terlapor I dan Terlapor II, yang mana selaras dengan maksud dan tujuan dari UU No.5/1999.----------

(5) Berdasarkan perhitungan antara nilai Owner Estimate, harga penawaran Terlapor III dan harga penawaran kedua terendah dari PT Patra Dinamika, maka dapat dilihat tabel perbandingan sebagai berikut: ----------

Nilai Owner Estimate	Rp 49.465.485.000
Nilai penawaran akhir Terlapor III (setelah negosiasi kontrak)	Rp 47.355.000.000
Nilai penawaran PT Patra Dinamika	Rp 65.139.826.000

(6) Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, maka diketahui bahwa selisih harga penawaran Terlapor III dengan nilai *Owner Estimate* telah terdapat efisiensi biaya kepada Terlapor I dan Terlapor sebesar Rp 2.110.485.000,- (*dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). ----------

(7) Selanjutnya berdasarkan selisih antara nilai *Owner Estimate* dengan harga penawaran kedua terendah dari PT Patra Dinamika, maka telah terdapat efisiensi biaya sebesar Rp15.674.341.000,-(*lima belas milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*). ----------

(8) Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 Bab IV Poin 4.3. halaman 12, Pasal 22 UU No. 5/1999 menggunakan pendekatan *rule of reason* yang artinya harus ada bukti kerugian atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dituduhkan. Namun dalam perkara ini, sama sekali tidak ada bukti adanya kerugian atau persaingan usaha tidak sehat: ----------

No.	Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999	Hasil Pemeriksaan
1.	Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya. (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, harga penawaran Terlapor III merupakan harga paling muranh sehingga menguntungkan Terlapor I dan Terlapor II selaku pemberi kerja.
2.	Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh. (TIDAK	Faktanya, kualitas pekerjaan yang ditawarkan oleh Terlapor III sudah diperiksa dan disetujui oleh Terlapor I dan Terlapor II. Selain itu, adanya surat

	TERPENUHI)	dukungan terbukti tidak akan mempengaruhi kualitas pekerjaan. Namun demikian, Terlapor III belum melaksanakan pekerjaan dimaksud karena keputusan sepihak dari Terlapor I dan Terlapor II.
3.	Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender. (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, tidak ada hambatan pasar, karena Terlapor I dan Terlapor II justru membuka kesempatan bagi *bidder* dengan memperbolehkan menggunakan surat dukungan (*letter of support*), sehingga setiap peserta tender memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan Tender.

4.	Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. (TIDAK TERPENUHI)	Faktanya, nilai penawaran yang ditawarkan oleh Terlapor III lebih rendah dari OE dan memiliki selisih cukup besar dengan penawaran terendah kedua dari PT Patra Dinamika. Dengan demikian Terlapor III justru telah memberikan efisiensi usaha dan menguntungkan Terlapor I dan Terlapor II selaku pemilik pekerjaan.

(9) Berdasarkan preseden Putusan KPPU No. 23/KPPU-I/2016 tanggal 6 November 2017 terkait dengan Tender Pengadaan *Floating Storage Offloading* di Cinta Terminal, KPPU pada pokoknya telah menegaskan bahwa harga penawaran pemenang tender sebagai penawaran paling rendah telah berhasil menciptakan efisiensi bagi pemilik pekerjaan dan hal tersebut bukan merupakan persekongkolan, yang dikutip sebagai berikut: ----------

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ------

8.1. Bahwa berdasarkan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 3 huruf a dan d sebagaimana dikutip sebagai berikut:

a. ... meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan;

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

8.2. Bahwa harga penawaran PT Sillo Maritime Perdana, Tbk. adalah sebesar US$ 63.816.750 (penawar

terendah pertama) sedangkan PT Buana Listya Tama, Tbk. sebesar US$ 86.971.500.

8.3. Bahwa selisih harga penawaran PT Sillo Maritime Perdana, Tbk. dibandingkan PT Buana Listya Tama, Tbk. adalah sebesar US$ 23.154.750 sehingga menyebabkan cost saving bagi Terlapor I.

8.4. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor I dalam menentukan persyaratan teknis tersebut telah mengakibatkan efisiensi perusahaan sesuai dengan tujuan diadakannya tender perkara a quo dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 di atas.

8.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan peningkatan efisiensi ekonomi nasional serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

(10) Atas dasar pertimbangan efisiensi tersebut maka Putusan KPPU No. 23/KPPU-I/2016 tanggal 6 November 2017 telah menyatakan bahwa Terlapor tidak bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang dikutip sebagai berikut: ----------

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I (CNOOC South East Sumatera (SES) Ltd) dan Terlapor II (PT Sillo Maritime Perdana) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

(11) Selanjutnya, berdasarkan preseden Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2015 terkait tender pembangunan pabrik pupuk di Petrokimia Gresik, KPPU juga telah menegaskan bahwa proses tender yang telah menghasilkan penawar terendah justru telah menghasilkan efisiensi produksi dan efisiensi biaya bagi pemilik pekerjaan sehingga Terlapor tidak dapat serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana dikutip sebagai berikut: ----------

10.6. ...pembangunan Pabrik Pupuk Amonia-Urea di Petrokimia Gresik akan mendukung peningkatan efisiensi produksi pangan di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur yang berpotensi menghemat biaya transportasi Urea yang dikeluarkan PT Petrokimia Gresik dan menghemat keuangan negara untuk importasi Amonia. Efisiensi produksi dan efisiensi biaya ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 di atas yaitu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

10.7. Bahwa harga penawaran Konsorsium Rekayasa – TEC (penawar terendah kedua) adalah USD 537,5 juta, sedangkan harga penawaran Konsorsium Wuhuan-Adhi (penawar terendah pertama) setelah penurunan harga sebesar USD 2,5 juta adalah USD 523,2 juta;

10.8. Bahwa selisih harga penawaran Konsorsium Wuhuan-Adhi dibandingkan Konsorsium Rekayasa – TEC (peserta terendah kedua) adalah kurang lebih USD 14,3 juta atau setara dengan Rp. 172.315.000.000 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah), sehingga pencabutan diskualifikasi Konsorsium Wuhuan-Adhi menyebabkan cost saving bagi Terlapor I kurang lebih USD 14,3 juta;

10.9. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor I mencabut keputusan diskualifikasi tersebut telah mengakibatkan terjadinya efisiensi perusahaan yang sesuai dengan tujuan diadakannya tender perkara a quo dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 10.1 di atas;"

(12) Berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum tersebut maka telah jelas terbukti Terlapor IIItidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan/perbuatan Terlapor III justru telah selaras dengan tujuan dari UU No.5/1999 karena telah menghasilkan efisiensi biaya sehingga justru menguntungkan Terlapor I dan Terlapor II selaku pemberi pekerjaan. ----------

TERLAPOR III TIDAK MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK APA PUN, SEBALIKNYA TERLAPOR III JUSTRU MENDERITA KERUGIAN BESAR AKIBAT PERKARA INI ----------

(1) Sebagaimana telah Terlapor III uraikan di atas bahwa tidak ada satu pun unsur dari Pasal 22 UU No. 5/1999 yang terpenuhi, dan oleh karenanya tidak ada persekongkolan tender yang terbukti. Justru sebaliknyaterbukti bahwa Terlapor III tidak melakukan persekongkolan apapun dan tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -

(2) Selama proses dan tahapan tender yang dilakukan oleh Terlapor III dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan ketentuan PTK 007 Rev. 03 dan selalu mematuhi persyaratan tender yang ditetapkan. Seandaianya pun, Surat Dukungan dari PT SBN yang Terlapor III ajukan sebagai salah satu pelengkap

persyaratan Tender tidak dapat digunakan (*quod non* – hal mana ditolak), hal tersebut merupakan murni keputusan dari Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan evaluasi terhadap dokumentasi dan persyaratan tender, dan kewenangan untuk menetapkan pemenang tender merupakan keputusan mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II TANPA ada pengaruh apapun dari Terlapor III. ----------

Oleh karena itu, adalah suatu ketidakadilan dan kezhaliman apabila Terlapor III diminta untuk turut bertanggung jawab atas hal – hal yang bukan merupakan tindakan Terlapor III.----------

(3) Pada Kesimpulan ini, Terlapor III ingin kembali menyampaikan kepada Majelis Komisi Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, bahwa sampai dengan saat ini, Kontrak Pekerjaan belum ditandatangani dan oleh karenanya Pekerjaan belum dilaksanakan sama sekali dan terlebih lagi adanya pengumuman tender ulang (*vide* Pengumuman Tender 11646 (Lampiran 9).----

(4) Tertundanya bahkan terancam batalnya pelaksanaan Pekerjaan tersebut mengakibatkan Terlapor III mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp. 3.134.844.470,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)(Lampiran 10), hal mana merupakan kerugian yang sangat besar bagi Terlapor III.----------

(5) Kami memohon keadilan sebesar-besarnya dari Majelis Komisi agar tidak menghukum Terlapor III dalam bentuk apapun apalagi terkait denda karena berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa selain tidak ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor III juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mengikuti dan mempersiapkan seluruh persyaratan tender termasuk biaya-biaya pembelian alat-alat dan telah menderita kerugian. Dengan tidak adanya pekerjaan dan pembayaran maka tidak ada keuntungan yang dinikmati oleh Terlapor III dalam hal ini, sehingga pengenaan denda terhadap Terlapor III menjadi tidak berdasar.----------

(6) Selain itu, dapat pula Terlapor III sampaikan bahwa penerbitan *Release Order* oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III

bukan merupakan bentuk pembayaran. *Release Order* tersebut digunakan sebagai dokumen antisipasi apabila Terlapor I dan Terlapor meminta Terlapor III untuk melakukan sebagian pekerjaan Tender sementara menunggu kontrak yang belum ditandatangani, sebagaimana telah dijelaskan dalam pemeriksaan sebagai berikut: ----------

124.	*Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor III*	*Release order diberikan untuk mengantisipasi bila ada pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan, saat kontrak masih belum ditandatangani, jadi sampai saat ini belum ada pekerjaan dari petronas sehingga aquamarine belum ada mengeluarkan invoice?*
	Jawaban	*Ya betul. Belum mulai pekerjaan dan belum mengeluarkan invoice.*

(7) Merujuk pada Pedoman KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai dengan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 ("Pedoman Tindakan Administratif"), Terlapor III tidak dapat dikenakan denda karena Terlapor III justru menderita kerugian dan tidak menerima keuntungan apa pun dalam Tender ini. Terlapor III belum menandatangani kontrak tender, tidak pernah melaksanakan pekerjaan, dan tidak pernah menerima pembayaran apa pun dari Terlapor I dan Terlapor II. ----------

(8) Terlapor III tidak dapat dikenakan denda karena berdasarkan Pedoman Tindakan Administratif Bab II Angka A, prinsip pengenaan denda sebenarnya adalah mengambil keuntungan yang tidak sah dari tindakan anti persaingan: ----------

"*Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan antipersaingan.Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.*"

(9) Maka dengan tidak adanya bukti persekongkolan dalam Tender *a quo* serta dengan fakta dimana Tender Dibatalkan secara sepihak, Pekerjaan belum dilaksanakan dan Terlapor III menderita kerugian dan tidak menerima keuntungan apa pun, maka sudah sepatutnya Terlapor III dinyatakan tidak bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

(10) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor III memohon Putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Komisi Yang Terhormat untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara ini sesuai dengan

fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk dapat menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam Kesimpulan ini, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017agar dapat mengeluarkan putusan sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

10. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2017. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor;----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------
3. Tentang Aspek Formil; ----------
4. Tentang Persyaratan Keanggotaan IMCA (*International Marine Contractors Association*) Kategori *Diving* dan *ROV*; ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------

1. Tentang Identitas Terlapor;----------

1.1 Bahwa Terlapor I, PC Muriah Ltd., beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Labuan, Malaysia berdasarkan Memorandum *and Articles of Association of* PC Muriah Ltd. tanggal 20 Januari 2005. PC Muriah Ltd. adalah anak perusahaan dari Petronas yang beroperasi berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC)/Kontrak Kerja Sama bagi hasil dengan Negara Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam praktiknya, PC Muriah Ltd., merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya di wilayah kerja Muriah, Lepas Pantai Utara Semarang, Jawa Tengah, Indonesia berdasarkan Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama (selanjutnya disebut PTK 007 Revisi 3), yang dalam perkara ini bertindak sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan bersama dengan PC Ketapang II Ltd. (*vide Bukti* C3, B36)----------

1.2 PC Ketapang II Ltd, beralamat di Talavera Office Park, Talavera Suite 3rd-10th Floor, Jalan T.B. Simatupang Kavling 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, Indonesia, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan *Bye Laws of Conoco Phillips* (Ketapang) Ltd. yang diadopsi pada 29 November 2002, kemudian berdasarkan *Certificate of Incorporation on Change of Name* yang diregistrasi di Bermuda, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PC Ketapang II Ltd. pada tanggal 16 September 2008. PC Ketapang II Ltd. adalah anak perusahaan dari Petronas yang beroperasi berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC)/Kontrak Kerja Sama bagi hasil dengan Negara Republik Indonesia melalui SKK Migas. Dalam praktiknya, PC Ketapang II

Ltd. merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya di wilayah kerja Ketapang, Lepas Pantai Pulau Madura, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan PTK 007 Revisi 3, yang dalam perkara ini bertindak sebagai panitia tender/pengguna jasa/pemilik pekerjaan bersama dengan PC Muriah Ltd. (*vide Bukti* C2, B36).----------

1.3 Bahwa Terlapor III, PT Aquamarine Divindo Inspection, beralamat di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 88, Komplek Pergudangan 88, Blok C5-C7, Sidoarjo 61253, Jawa Timur, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 9 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Aris Hilmi, S.H. Dalam praktiknya, PT Aquamarine Divindo Inspection yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang *underwater services* yang dalam dugaan pelanggaran ini adalah sebagai pelaku usaha pemenang tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204); ----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Paket Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) dengan nilai pekerjaan (proyek) sebesar Rp. 47.360.900.000,00 (*empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah*); ----------

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan: ----------

> *Pasal 22*
>
> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

3. Tentang Aspek Formil;----------

3.1 Bahwa Majelis Komisi menilai aspek formil yang relevan untuk dipertimbangkan adalah berkaitan dengan dalil Terlapor yang menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran kurang pihak atau tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*) karena PT Samudera Biru Nusantara (selanjutnya disebut PT SBN) tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal PT SBN merupakan pelaku usaha yang memberikan surat dukungan keanggotaan IMCA kepada Terlapor III; ----------

3.2 Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:----------

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran diketahui bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah bahwa Terlapor I dan Terlapor II sebagai panitia tender/ pengguna jasa/ pemilik pekerjaan dengan memfasilitasi Terlapor III sebagai peserta tender untuk menjadi pemenang;----------

Bahwa salah satu dugaan tindakan memfasilitasi tersebut adalah terkait dengan diloloskannya Terlapor III dan ditetapkannya Terlapor III menjadi pemenang tender oleh Terlapor I dan Terlapor II;----------

Bahwa Majelis Komisi menilai indikasi adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terletak pada tindakan memfasilitasi Terlapor III hingga menjadi pemenang tender dan Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti cukup adanya indikasi dan/atau dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT SBN karena tindakan PT SBN hanya sebatas memberikan surat dukungan sebagaimana surat dukungan – surat dukungan pada umumnya;----------

Bahwa PT SBN bukanlah peserta tender, melainkan calon peserta tender dikarenakan *bidder* mengikuti proses tender dan belum lulus penilaian kualifikasi, hal ini sesuai dengan point 5.13 PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015, yang dimaksud dengan calon peserta tender ialah sebagai berikut: ----------

"Calon Peserta Tender adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar untuk mengikuti proses Tender dan belum lulus penilaian kualifikasi. " ----------

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Tim Investigator telah jelas dan cukup dalam menetapkan pihak – pihak yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan fakta dan alat bukti pendukungnya;----------

4. Tentang Persyaratan Keanggotaan IMCA (*International Marine Contractors Association*) Kategori *Diving* dan *ROV*; ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, persyaratan keanggotaan IMCA dalam tender diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (*vide Bukti* C16, C8);----------

(1) Dokumen Tender, *Exhibit I-Special Provision and Scope of Work, Item 2.4.4. Contractors Qualification Experience* (point 1) menyebutkan "*The Contractor is to be and IMCA member company*"; ----------

(2) Dokumen perencanaan Tender terkait Sertifikasi mensyaratkan IMCA *Membership of Contractor,* IMCA *Supervisor Certification*, IMCA *Divers* Certification; ----------

(3) Dokumen Persyaratan Kualifikasi Tender, Huruf D. Persyaratan Kualifikasi, poin 3. Persyaratan Teknis, diatur bahwa pemohon wajib melampirkan salinan keanggotaan dari IMCA Membership;

(4) Tender Clarification#2 Administrative and Technical *Clarification* berdasarkan dokumen faksimili Nomor 1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa peserta tender harus merupakan anggota IMCA untuk kategori *Diving* dan kategori ROV, dan standarisasi peralatan dan personil harus mengikuti IMCA *Guidance* dan IMCA *Standard*; ----------

Bahwa adanya persyaratan keanggotaan IMCA dalam tender tersebut diperkuat oleh keterangan saksi – saksi sebagai berikut: ----------

(1) Konsorsium PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia yang pada pokoknya menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi peserta dalam dokumen kualifikasi yakni wajib memiliki keanggotaan IMCA untuk *Diving* dan IMCA untuk ROV. Selanjutnya Saksi KSO PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia tidak mengikuti tender dikarenakan hanya memiliki sertifikat IMCA ROV saja, sehingga Saksi KSO PT Bintang Subsea Indonesia – PT Siguros Indonesia memutuskan tidak ikut dalam tender tersebut dengan tidak memasukkan dokumen penawaran (*vide Bukti* B6); ----------

(2) PT Advanced Offshore Services menyatakan pada pokoknya persyaratan keanggotaan IMCA telah disebutkan dalam dokumen *Instruction To Bidders* (ITB) namun hanya sebatas menyebutkan harus anggota IMCA saja, akan tetapi pada saat *pre-bid clarification meeting* PT Advanced Offshore Services meminta klarifikasi mengenai persyaratan keanggotaan IMCA dan dijawab oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan menyatakan bahwa peserta tender dipersyaratkan harus anggota IMCA *Diving* dan IMCA ROV sertifikat (*vide Bukti* B9);----------

(3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Patra Dinamika yang menyatakan pada pokoknya telah melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknik yang dipersyaratkan, termasuk sertifikat IMCA *Diving* dan IMCA ROV (*vide Bukti* B10); ----------

(4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Nizar Saputra selaku perwakilan *user* dan Panitia Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tender perkara *a quo* sertifikasi yang dipersyaratkan adalah sertifikasi IMCA. Lebih lanjut, Saksi menerangkan dalam *Pre-bid Meeting* ada pertanyaan dari PT Advanced Offshore Services dan PT Patra Dinamika yang bertanya tentang kepemilikan sertifikasi IMCA *Diving* dan IMCA ROV dan dijawab oleh Saksi bahwa kontraktor harus mempunyai IMCA *membership* ROV dan IMCA *membership Diving* (*vide Bukti* B33); ----------

Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti dokumen, tanggapan dan kesimpulan yang disampaikan seluruh Terlapor telah diakui adanya

persyaratan keanggotaan *membership* IMCA *Diving* dan IMCA ROV pada tender *a quo* (*vide Bukti* B1-B37, TI-TII.5, TIII.6, TI-TII.20, TIII.11); ------

Berdasarkan alat bukti, Majelis Komisi mempertimbangkan fakta keanggotaan IMCA yang dimiliki oleh para peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi administrasi dan teknis yaitu sebagai berikut; ----------

(1) Terlapor III terbukti merupakan anggota IMCA dan memiliki IMCA ROV namun tidak memiliki IMCA *Diving*. Dalam memenuhi persyaratan IMCA *Diving*, Terlapor III menyampaikan surat dukungan dari PT Samudera Biru Nusantara; ----------

(2) PT Patra Dinamika terbukti merupakan anggota IMCA dan memiliki IMCA ROV serta memiliki IMCA *Diving*; ----------

(3) PT Advanced Offshore Services terbukti merupakan anggota IMCA dan memiliki IMCA ROV serta memiliki IMCA *Diving*; ----------

(4) PT Seascape Survey Indonesia terbukti merupakan anggota IMCA dan memiliki IMCA ROV serta memiliki IMCA *Diving*; ----------

Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa satu satunya peserta tender yang tidak memiliki setifikat IMCA *Diving* adalah Terlapor III sehingga Terlapor III meminta surat dukungan (*letter of support*) dari PT SBN; ----------

Selanjutnya, sebelum menilai tindakan para Terlapor terkait dengan pemenuhan persyaratan IMCA *Diving* yang disampaikan Terlapor III, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan dan menilai fakta terkait dengan kronologis Terlapor dalam mempersyaratkan sertifikat IMCA *Diving*, yaitu sebagai berikut:----------

(1) Berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa pada awalnya Terlapor I dan/atau Terlapor II hanya menetapkan persyaratan IMCA saja dan belum mempersyaratkan sertifikat IMCA ROV dan IMCA *Diving*; (*vide Bukti* B17); ----------

(2) Berdasarkan bukti Dokumen Tender, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I dan/atau Terlapor II masih menetapkan persyaratan dengan menyebutkan "*The Contractor is to be and IMCA member company*"; ----------

(3) Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I dan/atau Terlapor II menyampaikan persyaratan sertifikat IMCA *Diving* setelah proses tender berjalan atau setidak-tidaknya pada saat Tender Clarification#2 Administrative and Technical *Clarification* sebagaimana tertuang pada dokumen faksimili Nomor 1193/PCML/TDR/2016 tanggal 7 Oktober 2016; ----------

Bahwa atas dasar fakta tersebut, Majelis Komisi menilai persyaratan IMCA *Diving* baru mulai ditetapkan oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II sejak klarifikasi tersebut dan selanjutnya menjadi satu kesatuan yang mengikat sebagai persyaratan bagi peserta tender;----------

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Nizar Saputra dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Juli 2018 diketahui bahwa pemenuhan persyaratan IMCA *Diving* hanya dengan surat dukungan (*letter of support*) diputuskan oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II pada saat evaluasi teknis dengan menyatakan pada pokoknya: ----------

81		
	Jawaban	Dari sisi user kami berdiskusi internal kami dan akhirnya meng*approve* penggunaan *supporting letter* oleh *bidder*.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdri. Maria Kristanti dari SKK Migas yang menyatakan bahwa "apabila sejak awal *letter of support* (surat dukungan) sudah disebutkan dalam persyaratan dokumen tender maka tidak ada larangan. Namun bila di dalam dokumen tender tidak ada disebutkan *letter of support* (surat dukungan) dari awal persyaratan tersebut, maka tidak boleh menggunakan surat dukungan" (*vide Bukti* B22);----------

Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi perlu menilai tindakan para Terlapor terkait dengan pemenuhan persyaratan IMCA *Diving* melalui surat dukungan (*letter of support*) yaitu sebagai berikut: ----------

(1) Majelis Komisi berpendapat bahwa persyaratan terkait dengan kriteria keanggotaan IMCA yang ditetapkan oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II tidak tegas sejak awal proses tender; ---------

(2) Majelis Komisi berpendapat bahwa redaksional dokumen tender yang menyatakan: "*The Contractor is to be and IMCA member company*" dimaknai bahwa peserta tender harus merupakan anggota IMCA; ----------

(3) Majelis Komisi berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis keanggotaan IMCA dengan spesialisasi bidang tertentu antara lain IMCA ROV dan IMCA *Diving*; ----------

(4) Majelis Komisi berpendapat bahwa persyaratan peserta dalam tender ini adalah perusahaan yang merupakan anggota IMCA dengan spesialisasi ROV dan *Diving*; ----------

(5) Majelis Komisi berpendapat bahwa PT SBN bukan merupakan perusahaan peserta tender dan terbukti telah ditetapkan oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II sebagai perusahaan yang tidak memenuhi syarat kualifikasi; ----------

(6) Majelis Komisi berpendapat bahwa menilai PT SBN merupakan entitas yang berbeda dengan Terlapor III;----------

Atas dasar hal tersebut maka Majelis Komisi menilai surat dukungan (*letter of support*) IMCA *Diving* PT SBN kepada Terlapor III tidak serta merta mengakibatkan Terlapor III menjadi anggota IMCA dengan spesialisasi bidang *Diving*. Hal tersebut diperkuat oleh ketentuan kriteria keanggotaan IMCA (*IMCA Membership*) sebagai berikut: ---------

(1) *Membership is non-transferrable,* dimana keanggotaan IMCA hanya melekat di perusahaan yang telah memiliki spesialisasi yang ditetapkan IMCA sehingga dalam perkara *a quo,* sertifikat IMCA *Diving* yang diterbitkan untuk PT SBN hanya melekat pada PT SBN; ----------

Oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa sertifikat IMCA *Diving* tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pekerjaan yang dilakukan untuk dan atas nama PT SBN sendiri;-

(2) *Members shall be active in the offshore, marine or underwater engineering industries, either as contractors…..*, dimana berdasarkan keterangan PT SBN, Majelis Komisi menilai bahwa PT SBN tidak aktif lagi saat ini;----------

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

5.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan;----------

> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:----------

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 dan butir 1.2 Bagian Tentang Hukum sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur ini ;----

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **Terpenuhi**;

5.2.2 Unsur Bersekongkol; ----------

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan*

pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ------

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa:

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. Secara terang – terangan maupun diam – diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------
d. Menciptakan persaingan semu;----------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; --------
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; ----------

Bahwa tindakan bersekongkol dilakukan oleh para Terlapor dalam Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) dalam bentuk upaya memfasilitasi yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II selaku penyelenggara tender dengan memberikan perlakuan istimewa kepada peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah Terlapor III); --------

Bahwa pemberian perlakuan istimewa tersebut dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan cara tetap meluluskan Terlapor III dan selanjutnya menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender padahal Terlapor III

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pertimbangan Majelis Komisi pada butir 4 Bagian Tentang Hukum dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini; ----------

Dengan demikian, Majelis Komisi menilai indikasi mengarahkan persyaratan ke peserta tender tertentu merupakan bagian dari upaya Terlapor I dan Terlapor II dalam memfasilitasi Terlapor III menjadi pemenang tender dalam perkara *a quo*. ----------

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dalam Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) **Terpenuhi**; ----------

5.2.3 Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain; ----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III yang merupakan peserta tender sebagaimana diuraikan pada butir 1. Bagian Tentang Hukum sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur ini;-----

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha lain **Terpenuhi**;----------

5.2.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----------

Bahwa atas tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur proses tender dan pada akhirnya telah mengakibatkan Terlapor III ditetapkan menjadi pemenang tender oleh Terlapor I dan/atau Terlapor II;----------

Bahwa tindakan pengaturan tender tersebut diperkuat dengan keterangan para Terlapor terkait dengan kronologis tender yang membuktikan bahwa Terlapor I dan/atau Terlapor II hanya melakukan negosiasi harga (komersial) dengan Terlapor III saja, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk bersaing dari sisi harga penawaran melalui negosiasi dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II;----------

Atas rangkaian tindakan tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;----------

Dengan demikian mengatur dan/atau menentukan pemenang Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204) **Terpenuhi**;----------

5.2.5 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"*persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*".----------

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha yang sehat; ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **Terpenuhi**. ----------

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan serta belum memulai pekerjaan yang ditenderkan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung; ----------

7. Tentang Perhitungan Denda; ----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----

7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

7.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); ----------

7.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ---------

7.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; ----------

7.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (*sepuluh persen*), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; ----------

7.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;----------

7.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender; ----------

7.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (*seratus persen*);----------

7.9 Bahwa Majelis Komisi menentukan proporsi denda untuk Terlapor I sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari nilai dasar denda, untuk Terlapor II sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari nilai dasar denda;

7.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sesuai dengan pertimbangan Majelis Komisi;----------

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) dan Terlapor III (PT Aquamarine Divindo Inspection) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------**
2. **Menghukum Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), untuk membayar denda sebesar Rp. 1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------**
3. **Menghukum Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.243.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha;----------**
4. **Memerintahkan kepada Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) untuk membatalkan Tender *Provision of Underwater Services for Kepodang and Ketapang Field* (Tender No. 11204);----------**
5. **Memerintahkan para Terlapor I (PC Muriah Ltd.,), dan Terlapor II (PC Ketapang II Ltd.,) setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; ----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M..Hum., sebagai Ketua Majelis

Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M..Hum., sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom. M.H Melita Kristin, S.H., Luqman Nurdiansyah, S.H dan Testarosa D'Visa, SH masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M..Hum.

Anggota MajelisKomisi,	Anggota MajelisKomisi,
ttd	ttd
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D	Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

ttd	ttd
Melita Kristin,S.H.	Luqman Nurdiansyah, S.H.